PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS MASJID UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT PONOROGO

(Studi Multisitus pada Masjid Baitul Mukhlisin dan Masjid NU Ponorogo)

Disusun oleh:

PUTRA RIZKI JULIANTO

NIM 501240013

PROGRAM MAGISTER PRODI EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI

PONOROGO

2026

ABSTRAK

Putra Rizki Julianto. 2026. Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Untuk Mengsejahterakan Masyarakat Ponorogo (Studi Multisitus pada Masjid Baitul Mukhlisin dan Masjid NU Ponorogo).
Tesis. Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing : **Prof. Iza Hanifuddin, Ph.D. dan Dr Amin Wahyudi, M.E.I.**

Kata Kunci: Program Pemberdayaan Ekonomi, Masjid, Kesejahteraan Jamaah.

Masjid tidak hanya dipahami sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat aktivitas umat yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks masyarakat Muslim, masjid memiliki potensi strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara fungsi ideal masjid sebagai pusat pemberdayaan dengan realitas di lapangan yang cenderung terbatas pada aktivitas ritual. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang lebih aplikatif, berkelanjutan, dan mampu menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi ini difokuskan pada dua lokasi, yaitu Masjid Baitul Mukhlisin dan Masjid NU Ponorogo, yang dinilai telah mengembangkan berbagai program ekonomi produktif berbasis komunitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, dengan melibatkan pengurus masjid, jamaah, serta tokoh masyarakat sebagai informan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi seperti BUMM, Airku, BankZiska, koperasi syariah, dan program sosial produktif telah memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan solidaritas sosial masyarakat. Program tersebut mencerminkan transformasi dari pola karitatif menuju produktif dan berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat kendala pada aspek manajerial, keterbatasan sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, serta inovasi dan kemitraan strategis agar pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dapat berjalan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis ditulis oleh **Putra Rizki Julianto, NIM 501240013** dengan judul: "***Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Untuk Mensejahterakan Masyarakat Ponorogo (Studi Multisitus pada Masjid Baitul Mukhlisin dan Masjid NU Ponorogo)***", maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munāqashah* Tesis.

Ponorogo, 04 Maret 2026

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.	**Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.**
NIP. 196906241998031002	NIP. 197502072009011007

Mengetahui,

Kaprodi Magister Ekonomi Syariah

Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., M.S.I.
NIP. 197202111999032003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
PASCASARJANA
Alamat: Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471
Website: www.pasca.uinponorogo.ac.id Email: pasca@uinponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Putra Rizki Julianto, NIM 501240013, Program Magister** Program Studi Ekonomi Syariah dengan judul: ***"Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Untuk Mengsejahterakan Masyarakat Ponorogo (Studi Multisitus pada Masjid Baitul Mukhlisin dan Masjid NU Ponorogo)"*** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada **Hari Senin, tanggal 06 April 2026** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	**Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.** **NIP.** 197308011998031001 Ketua Sidang		24/04/2026
2	**Dr. Aji Damanuri, M.E.I.** **NIP.** 197506022002121003 Penguji Utama		20/04/2026
3	**Prof. Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.** **NIP.** 196906241998031002 Penguji 2		21/04/2026
4	**Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I.** **NIP.** 197502072009011007 Sekretaris		22/04/2026

Ponorogo, 09 April 2026
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Putra Rizki julianto**

Nim : **501240013**

Fakultas : **Pascasarjana**

Program Studi : **Magister Ekonomi Syariah**

Judul Tesis : **Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Untuk Mensejahterakan Masyarakat Ponorogo (Studi Multisitus pada Masjid Baitul Mukhlisin dan Masjid NU Ponorogo)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian surat pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 01 Mei 2026
Yang membuat pernyataan

Putra Rizki Julianto
501240013

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Putra Rizki Julianto**, NIM **501240013**, Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: "***Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid untuk Mensejahterakan Masyarakat Ponorogo (Studi Multisitus pada Masjid Baitul Mukhlisin dan Masjid NU Ponorogo)***" ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 03 Maret 2026

Pembuat Pernyataan,

Putra Rizki Julianto
NIM 501240013

DAFTAR ISI

COVER DEPAN ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI ..... **iv**
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Kajian Terdahulu 12
F. Metode Penelitian 22
G. Sistematika Penulisan 26

BAB II PEMEBERDAYAAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN **29**
A. Alur Historis Teori 29
B. Deskripsi Teori Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid 30
C. Kesejahteraan Masyarakat 49
D. Kajian Literatur Teoretik 53

BAB III BENTUK PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI OLEH MASJID BAITUL MUKHLISIN DAN MASJID NU PONOROGO 56
A. Paparan data Umum 56
B. Data Bentuk Program Pemberdayaan Ekonomi Oleh Masjid Baitul Mukhlisin Dan Masjid Nu Ponorogo. 59
C. Analisis Bentuk Program Pemberdayaan Ekonomi Oleh Masjid Baitul Mukhlisin Dan Masjid NU Ponorogo 88

BAB IV KENDALA DAN TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DI MASJID BAITUL MUKHLISIN DAN MASJID NU 111

A. Data Kendala Dan Tantangan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Di Masjid Baitul Mukhlisin Dan Masjid Nu 111

B. Analisis Kendala Dan Tantangan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Di Masjid Baitul Mukhlisin Dan Masjid NU 134

BAB V DAMPAK DAN SOLUSI ATAS KENDALA TANTANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASJID TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR 154

A. Data Dampak dan Solusi atas kendala dan Tantangan Program Pemberdayaan Ekonomi Masjid Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar 154

B. Analisis Dampak dan Solusi atas kendala dan Tantangan Program Pemberdayaan Ekonomi Masjid Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar 180

BAB VI PENUTUP 204

A. Kesimpulan 204

B. Rekomendasi 206

DAFTAR PUSTAKA 208

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masjid dipahami bukan hanya sebagai bangunan fisik tempat ibadah, melainkan sebagai pusat aktivitas umat yang mencakup dimensi spiritual, sosial, pendidikan, budaya, hingga ekonomi.[1] Dalam konteks komunitas Muslim, masjid memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan, mengingat masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga simpul sosial dan ekonomi umat.[2] Ketika masjid kehilangan perannya dalam ranah ekonomi, maka struktur ekonomi di sekitarnya pun menjadi rapuh. Masjid yang lemah dalam fungsi pemberdayaan ekonomi tidak mampu menopang umatnya dari jeratan kemiskinan dan keterbelakangan. Maka dari itu, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid adalah keniscayaan dalam membangun masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.[3]

Selain berfungsi sebagai tempat bersujud kepada Allah Ta'ala, hal tersebut dibuktikan pada masa Rasulullah saw., masjid memiliki peran sentral dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.[4] Oleh karena itu, seluruh aktivitas yang berlangsung di dalam masjid perlu dikelola secara terencana dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memperkuat ajaran Islam, mencerminkan kemuliaan agama, serta meningkatkan kualitas pengabdian umat kepada Allah. Dengan demikian, masjid

[1] Muhammad Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), 5.

[2] Muhammad Syafar, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Untuk Menangkal Radikalisme Islam Di Banten," *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, No. 2 (2018): 103–22.

[3] Agus Suman dkk., *Ekonomi lokal: pemberdayaan dan kolaborasi* (Universitas Brawijaya Press, 2019).

[4] Aisyah N. Handryant, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat: Integrasi Konsep Habluminallah, Habluminannas, Dan Habluminal'alam* (Uin-Maliki Press, 2010).

dapat menjadi penggerak partisipasi aktif dan menumbuhkan rasa tanggung jawab umat dalam mendukung pembangunan bangsa.[5]

Masjid sebagai pusat pengembangan ekonomi umat sejatinya memiliki peran strategis, namun hingga kini belum sepenuhnya menampilkan aktivitas nyata dalam bentuk kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Fungsi ekonomi masjid masih lebih banyak berada pada tataran normatif yakni penanaman nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Nilai-nilai tersebut sesungguhnya sangat penting dalam membentuk karakter, etos kerja, dan semangat kemandirian seorang Muslim dalam memenuhi kebutuhan hidup secara islami. Di samping itu, dalam bidang politik dan keamanan, masjid juga memiliki potensi sebagai ruang konsolidasi kekuatan umat, baik secara fisik maupun mental.[6] Namun, dalam kenyataannya, banyak masyarakat mulai menjauhi masjid karena merasa kehadiran masjid belum memberikan manfaat langsung terhadap kompleksitas persoalan hidup mereka. Salah satu penyebabnya adalah sistem pengelolaan masjid yang masih konvensional dan bersifat simbolik. Fungsi masjid lebih banyak terbatas pada dimensi vertikal berupa kegiatan ibadah ritual, sementara dimensi horizontal seperti pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat cenderung diabaikan. Akibatnya, masjid hanya digunakan sebagai tempat salat berjamaah, kemudian dikunci atau ditutup setelahnya, tanpa ada aktivitas yang berkelanjutan dan menyentuh kehidupan masyarakat secara menyeluruh.[7]

Pemberdayaan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas ekonomi individu, kelompok, komunitas menuju kemandirian, keberdayaan, kesejahteraan melalui akses sumberdaya demi terciptanya struktur ekonomi.[8] Pemberdayaan juga merupakan upaya untuk membangun serta mendorong, memotivasi dan

---

[5] Denny Hermawan Ritonga Denny Dan Zulkarnain Abdurrahman, "Peran Badan Kemakmuran Masjid Dalam Membudayakan Salat Berjamaah Di Masyarakat Kampung Padang Labuhan Batu," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, No. 4 (13 Juli 2024): 1331–42, Https://Doi.Org/10.38035/Jmpis.V5i4.2233.

[6] Ali Al-Jumbulati, "Abdul Futuh At-Tuwaanisi," *Dirasatun Muqaaranatun Fit-Tarbiyyati Al-Islamiyah*, 2002.

[7] Nana Rukmana DW, "Masjid dan dakwah: merencanakan, membangun, dan mengelola masjid: mengemas substansi dakwah, upaya pemecahan krisis moral dan spiritual," *(No Title)*, 2002.

[8] Muhazzab Alief Faizal Dkk., "Peran Masjid Sebagai Tempat Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 6, No. 1 (3 Mei 2023): 123–34, Https://Doi.Org/10.31949/Maro.V6i1.3964.

membangkitkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki oleh masyarakat.[9] Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara optimal akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.[10] Efektivitas dari upaya pemberdayaan tersebut dapat dikenali melalui beberapa indikator, seperti adanya keuntungan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal, peningkatan pendapatan finansial di kalangan warga sekitar, serta munculnya tanda-tanda perbaikan ekonomi yang terlihat dari perputaran uang tunai yang dihasilkan. Ketika indikator-indikator tersebut belum tampak, maka program pemberdayaan belum dapat dikatakan berhasil bahkan tidak dapat disebut sebagai pemberdayaan yang sesungguhnya.[11] Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum powerless untuk memperolah surplus value sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh surplus value dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi dan perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik.[12]

Dalam proses pemberdayaan, terdapat hubungan timbal balik yang saling terkait antara berbagai aspek yang mempengaruhi. Pemberdayaan bukanlah proses yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari interaksi sejumlah elemen yang saling memengaruhi dalam diri individu.[13] Interaksi inilah yang kemudian membentuk suatu siklus atau perputaran pemberdayaan. Faktor-faktor yang terlibat dalam siklus ini bervariasi pengaruhnya, tergantung pada latar belakang ekonomi, kondisi sosial,

---

[9] Lavia Vega Aldana, Iza Hanifuddin, dan Amin Wahyudi, "Pemberdayaan Komunitas Peternak Sapi Perah oleh Dompet Dhuafa di Desa Singolangu, Kabupaten Magetan," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 3, no. 1 (2024): 2.

[10] Hastuti Mulang, Ajmal As'ad, Dan Rahmi Razak, "Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Pengrajin Eceng Gondok," *Seiko: Journal Of Management & Business* 6, No. 1 (2023): 403–13.

[11] Rachel Dodds Dan Regina Scheyvens, "Richard Butler, Emeritus Professor Of Tourism, University Of Strathclyde, Glasgow, Scotland, United Kingdom."Has Island Tourism Shifted Since The Covid-19 Pandemic? Is The Industry Intent To'build Back Better'or Has It Become Even More Unsustainable? Whichever The Case, Archipelagos Offer Illuminating Insights To Such Questions.," T.T., Diakses 21 April 2025.

[12] I. Putu Gede Diatmika Dan Sri Rahayu, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Peran Pemerintah* (Ahlimedia Book, 2022), \.

[13] Ahmad Supriyadi, "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, Dan 55 Pp. Nomor14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanakaan Uu Nomor 23 Tahun 2011tentang Pengelolaan Zakat)," *Iain Tulungagung Research Collections* 3, No. 2 (2017): 210–29.

tingkat kepercayaan, serta lingkungan tempat individu tersebut berada.[14] Terdapat lima hal yang saling berhubungan untuk memastikan tetap berlangsungnya proses pemberdayaan, yaitu: 1) adanya keikutsertaan secara aktif dari seseorang yang membuat program pemberdayaan bersama dengan masyarakat sekitar, 2) adanya usaha untuk mengontrol setiap proses dalam setiap perjalanan program pemberdayaan, 3) adanya kesetaraan jaminan kesejahteraan yang dirasakan oleh semua masyarakat tanpa adanya ketimpangan, 4) tersedianya keterjangkauan akses, serta 5) adanya ketekunan dan keteletiain dari orang-orang yang mengadakan program pemberdayaan dengan senantiasa menjadikan hati nurani sebagai tolok ukur

Siklus pemberdayaan sebagaiman dijelaskan tersebut, jika dapat dilaksanakan dengan baik, maka dapat melahirkan dua macam pemberdayaan, yaitu pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan non ekonomi. Pemberdayaan ekonomi merujuk pada tidak adanya ketimpangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan pemberdayaan non ekonomi akan dapat meningkatkan sikap bertanggung jawab pada individu, kesadaran (*leadership awareness*) dan pengetahuan kepemimpinan (*leadership knowledge*), serta kemampuan dalam membuat keputusan (skill of making decision).[15] Jusuf Kalla menegaskan bahwa peran masjid dalam bidang ekonomi perlu ditingkatkan, tidak hanya terbatas sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Masjid idealnya mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya melalui penyelenggaraan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Upaya pemberdayaan tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemanfaatan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), pengembangan usaha mikro, serta penyelenggaraan kegiatan sosial seperti bazar

[14] Mohamad Akbar F. Ibrahim, Sri Dewi Yusuf, Dan Yusran Zainuddin, "Peran Masjid Sabilil Huda Boki Owutango Dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah Di Tamalate," *Islamic Economics And Finance Journal* 3, No. 1 (2024): 1–15.

[15] Al-Dajani Haya Dan Marlow Susan, "Empowerment And Entrepeneurship: A Theoretical Framecowrk," *International Journal Of Entrepreneurial Behaviour And Research, Emerald Group Publishing Limited, Vol. 19, No. 5*, 2013.

amal.[16] Masjid memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai sarana (washilah) dalam pengembangan ekonomi umat. Selain berfungsi sebagai tempat pelatihan keterampilan usaha dan pengelolaan modal, masjid juga dapat dimanfaatkan untuk membangun jejaring pemasaran. Dengan demikian, fungsi masjid tidak hanya terbatas pada aktivitas ibadah ritual, tetapi juga dapat diperluas mencakup berbagai bidang kehidupan lainnya. Namun, hal ini hanya dapat terwujud jika terdapat kekuatan yang mampu menggerakkan dan mengorganisirnya. Tantangan utama terletak pada bagaimana membangun kesadaran kolektif dan memulai langkah nyata dalam implementasinya. Proses ini memang tidak mudah, tetapi jika dilakukan secara bersama-sama dengan semangat dan komitmen yang kuat, maka pemberdayaan ekonomi berbasis masjid sangat mungkin diwujudkan. Pada akhirnya, masjid dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[17]

Masjid Baitul Mukhlisin yang terletak di Kabupaten Ponorogo merupakan masjid yang menjalankan peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo merupakan pusat kegiatan keagamaan sekaligus wadah pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan pembinaan umat. Dibangun atas semangat gotong royong warga, masjid ini berkembang menjadi ruang yang mengikat jamaah dari berbagai kalangan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta melaksanakan beragam kegiatan seperti salat berjamaah, pengajian, tadarus, hingga TPQ untuk anak-anak. Selain fungsi spiritual, masjid ini aktif dalam kegiatan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah untuk kesejahteraan bersama. Meski menghadapi tantangan berupa keterbatasan dana, keterlibatan generasi muda, dan kebutuhan manajemen yang lebih profesional, Masjid Baitul Mukhlisin memiliki potensi besar sebagai pusat

[16] "Hal Ini Disampaikan Oleh Jusuf Kalla Dalam Sambutannya Pada Acara Pelantikan Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (Pw-Dmi) Provinsi Sulut Periode 2018-2023 Dalam Rangkaian Kunjungan Kerja Ketua Umum Pimpinan Pusat Dmi Ke Manado, , Sulawesi Utara, 14 November 2019," T.T., Diakses 22 April 2025.

[17] Emon Saputra Dan Dian Agustina, "Peran Institusi Masjid Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta," *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies* 2, No. 2 (2021): 174–95.

pemberdayaan ekonomi umat melalui koperasi syariah, zakat produktif, dan pelatihan kewirausahaan. Dengan demikian, masjid ini menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat serta menjaga nilai-nilai Islam di tengah perubahan zaman.[18]

Masjid Al-Hidayah NU di Jalan Sultan Agung, Ponorogo, merupakan salah satu masjid yang menjalankan peran keagamaannya menjadi pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi. Masjid NU Ponorogo merupakan salah satu pusat keagamaan dan sosial yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Kehadirannya tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang dakwah, pendidikan, serta pemberdayaan umat. Lahir dari inisiatif tokoh-tokoh NU setempat, masjid ini menghadirkan suasana kebersamaan dengan berlandaskan nilai Ahlussunnah wal Jama'ah. Lokasinya yang strategis memudahkan akses bagi jamaah dari berbagai kalangan, baik santri, pedagang, mahasiswa, maupun masyarakat umum.[19] Salah satu masjid NU yang menonjol adalah Masjid Al-Hidayah NU di Jalan Sultan Agung, Ponorogo, yang menjadikan peran keagamaannya sebagai pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi. Melalui pembentukan BMT Al-Hidayah, masjid ini mendukung pelaku UMKM lokal dengan skema pembiayaan syariah, bermodal awal Rp75 juta dari LPNU dan donatur. Kegiatan sosial seperti Jumat Barokah, santunan yatim, dan pesantren kilat juga menjadi bagian dari dakwah kultural yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, masjid NU di Ponorogo tampil sebagai simbol spiritual sekaligus motor penggerak kesejahteraan umat.[20]

Meskipun masjid pada dasarnya merupakan pusat ibadah, di beberapa wilayah seperti Ponorogo, telah muncul inisiatif masjid yang meluaskan fungsinya menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial umat. Contohnya adalah Masjid Baitul Mukhlisin di Jalan Lawu dan Masjid NU di Jalan Sultan Agung. Masjid Baitul Mukhlisin menginisiasi BankZiska LAZISMU, sebuah lembaga keuangan

---

[18] "Masjid Baitul Mukhlisin Nologaten Ponorogo, Sediakan Makan Minum Buka Dan Sahur, Full Selama Romadhon - Gema Surya Fm," T.T., Diakses 22 April 2025.

[19] "Masjid Nu Ponorogo Arsip," Lp Maarif Nu Ponorogo, Diakses 4 Mei 2025, Https://Maarif.Nuponorogo.Or.Id/Tag/Masjid-Nu-Ponorogo/.

[20] "Mediaponorogo.Com Informasi Berita Ponorogo," T.T., Diakses 22 April 2025.

mikro syariah yang mendukung usaha mikro dan kecil, serta berbagai kegiatan sosial seperti makan gratis saat Ramadan dan program Subuh Ceria. Sementara itu, Masjid NU Ponorogo yang merupakan bagian dari jaringan Nahdlatul Ulama juga aktif dalam pengelolaan aset wakaf, kegiatan sosial seperti buka puasa massal, dan menjadi pusat kegiatan LAZISNU. Bahkan, masjid ini meraih penghargaan Masjid Award Jawa Timur kategori pemberdayaan ekonomi. Kedua masjid tersebut menunjukkan bahwa institusi keagamaan memiliki potensi besar untuk memainkan peran signifikan dalam transformasi sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, realitanya masih banyak masjid di Ponorogo yang belum mengoptimalkan peran ini, tetap terbatas pada fungsi ritual semata. Ketimpangan ini mengindikasikan perlunya kajian lebih lanjut mengenai model manajemen masjid berbasis pemberdayaan ekonomi, agar dapat direplikasi secara luas dan berkelanjutan.

Masjid Baitul Mukhlisin dan Masjid NU Ponorogo layak dijadikan studi kasus karena keduanya yang sudah menjalankan peran masjid sebagai pusat ibadah sekaligus penggerak ekonomi dan sosial. Masjid Baitul Mukhlisin menonjol di tingkat nasional dengan raihan Juara 3 CRM Award 2024 berkat inovasi seperti program makan gratis, lonjakan infaq hingga 1.000%, bantuan keuangan bagi RT, serta pengelolaan unit usaha mandiri.[21] Sementara itu, Masjid NU Ponorogo meraih Juara 2 Masjid Award Jawa Timur kategori pemberdayaan ekonomi, menunjukkan kekuatan pada manajemen kelembagaan dan jejaring organisasi [22]. Perbandingan keduanya penting karena masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan yang dapat saling melengkapi. Baitul Mukhlisin unggul dalam inovasi dan kemandirian ekonomi namun perlu memperluas kemitraan, sedangkan Masjid NU memiliki legitimasi dan jaringan kuat namun inovasi program belum seagresif Baitul Mukhlisin. Dengan menggabungkan kreativitas dan kemandirian Baitul Mukhlisin dengan kekuatan kelembagaan Masjid NU, dapat terbentuk model

[21] Redaksi Media Ponorogo, *Layaknya Jogokariyan, Sugiri: Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo Banget | Berita Ponorogo*, 13 Desember 2024.

[22] NU Ponorogo, "Masjid NU Ponorogo Terbaik 2 Masjid Award Provinsi Jatim Kategori Pemberdayaan Ekonomi Masjid - NU PONOROGO NU Online Ponorogo- Mengurus masjid bukan sekedar secara fisik, tetapi juga melengkapi administrasi masjid. Padatnya jadwal kegiatan,."

pemberdayaan ekonomi masjid yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan mampu menutup kekurangan masing-masing pihak.

Dalam jurnal yang di tulis oleh Adinda Maharani, Abrista Devi Universitas Ibn Khaldun Bogor yang berjudul Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Masjid AlMuhajirin Bogor. Yang di jelaskan Masjid Al-Muhajirin berada di tengah pedesaan dan memiliki strategi permberdayaan ekonomi umat secara sederhana dengan membantu masyarakat nya dalam hal financial dan memberikan pinjaman beberapa logistik untuk sebuah acara pribadi. Dilihat dari strategi tersebut, masjid Al-Muhajirin mempunyai konsep tolong-menolong dalam pemberdayaan ekonomi umat. Masjid Al-Muhajirin pun mengfungsikan masjid untuk hal pendidikan Islam serta tempat untuk bersilaturahim antar jamaah. Dengan potensi yang ada, diharapkan masjid Al-Muhajirin dapat memiliki strategi khusus agar masjid dapat optimal dalam memberdayakan ekonomi umat.[23] Dari sini terlihat bahwa peran masjid sebagai pusat kegiatan umat sangat penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seperti halnya Masjid Al-Muhajirin yang berada di wilayah pedesaan dan telah menjalankan fungsi pemberdayaan secara sederhana, melalui bantuan finansial dan penyediaan logistik untuk keperluan acara warga. Masjid ini juga berperan dalam pendidikan Islam serta menjadi ruang silaturahim bagi jamaahnya. Strategi yang diterapkan mencerminkan semangat tolong-menolong dalam menguatkan ekonomi umat, meskipun masih bersifat informal. Dengan potensi yang dimiliki, Masjid Al-Muhajirin diharapkan mampu mengembangkan strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam agar dapat menjadi inspirasi bagi masjid-masjid lain dalam mengoptimalkan perannya sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Secara teoritis, masjid dalam perspektif ekonomi Islam bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat, melalui pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, serta penyediaan program-program pelatihan dan

[23] Adinda Maharani Dan Abrista Devi, "Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Masjid Al-Muhajirin Bogor," *Al-Urban* 5, No. 2 (2021): 98–111.

bantuan usaha.[24] Dalam idealnya, masjid mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Namun, dalam praktik di lapangan, seperti yang terjadi di Masjid Baitul Mukhlisin dan Masjid NU Ponorogo, pelaksanaan peran tersebut tidak selalu sejalan dengan teori. Benturan muncul karena adanya keterbatasan sumber daya manusia, minimnya kapasitas kelembagaan masjid, serta kurangnya sinergi antara pengurus masjid dan masyarakat dalam mengelola program pemberdayaan ekonomi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara harapan normatif dalam teori ekonomi Islam dengan realitas implementasi di tingkat lokal.[25]

Masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pemberdayaan umat, tidak hanya dalam aspek spiritual tetapi juga dalam bidang sosial dan ekonomi, sebagaimana tercermin dalam konsep pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang menekankan pentingnya optimalisasi fungsi masjid untuk mensejahterakan masyarakat.[26] Namun, dalam praktiknya di Masjid Baitul Mukhlisin dan Masjid NU di Ponorogo, implementasi program pemberdayaan ekonomi seringkali menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam manajemen ekonomi, minimnya pendanaan, serta lemahnya partisipasi aktif jamaah dan masyarakat sekitar. Di sisi lain, kurangnya integrasi antara visi keummatan dan strategi ekonomi yang konkret menyebabkan pelaksanaan program tidak maksimal, sehingga tujuan ideal kesejahteraan ekonomi berbasis masjid masih jauh dari harapan. Benturan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme teori dan realitas di lapangan yang perlu dicermati secara kritis.[27]

---

[24] Amalia Rizka, Haris Hidayatulloh Muhammad, dan Djalaluddin Ahmad, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Mengurangi Ketergantungan Terhadap Rentenir (Studi Masjid Jami' Al-Umari Kelayu Lombok Timur Ntb)," *INASJIF Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance*, 2024.

[25] admin, *Disaksikan Ketua LPCR PP Muhammadiyah, Program BankZiska LAZISMU Jatim Resmi Beroperasi di Masjid Baitul Muhlisin Ponorogo*, t.t., diakses 11 Mei 2025, https://info.lazismujatim.org/disaksikan-ketua-pp-muhammadiyah-program-bankziska-lazismu-jatim-resmi-beroperasi-di-masjid-baitul-muhlisin-ponorogo/.

[26] Aki Edi Susanto, *Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah*, t.t.

[27] Tempo, "Di Bawah Lindungan Masjid," diakses 11 Mei 2025, https://www.tempo.co/mingguan/edisi/6512.

Masjid memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengingat fungsinya yang tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat sosial, pendidikan, dan ekonomi umat. Teori-teori ekonomi Islam menekankan peran institusi keagamaan, seperti masjid, dalam mendistribusikan kekayaan secara adil melalui program zakat, infaq, sedekah, dan kegiatan produktif lainnya untuk mendorong kesejahteraan umat. Namun dalam praktiknya, tidak semua program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Di daerah seperti Ponorogo, terdapat kendala implementasi seperti kurangnya manajemen profesional, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan akses permodalan dan pelatihan usaha. Hal ini menunjukkan adanya benturan antara konsep ideal pemberdayaan ekonomi masjid dalam teori dan realitas pelaksanaan di lapangan, yang menjadi alasan penting untuk diteliti lebih lanjut.[28] Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Pemeberdayaan ekonomi dan masjid dengan mengangkat judul "**Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Untuk Mengsejahterakan Masyarakat Ponorogo (Studi Multisitus pada Masjid Baitul Mukhlisin dan Masjid NU Ponorogo)**"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka masalah difokuskan pada rumusan berikut:

1. Bagaimana bentuk program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh Masjid Baitul Mukhlisin dan Masjid NU Ponorogo?
2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi di Masjid Baitul Mukhlisin dan Masjid NU ?
3. Bagaimana dampak dan sulusi atas kendala dan tantangan program pemberdayaan ekonomi masjid terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar?

[28] Abdul Mutalib Ahmad, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Masjid di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Bimas Islam Vol 16 No.1*, 2923.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian disusun sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan program-program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh Masjid Baitul Mukhlisin dan Masjid NU Ponorogo.
2. Untuk menganalisis kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.
3. Untuk mengetahui dampak dan solusi atas kendala dan tantangan dari program pemberdayaan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar Masjid Baitul Mukhlisin dan Masjid NU Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, baik dalam bentuk hal praktis maupun teoritis yang di berikan kepada pigak pihak berikut:

1. Kajian Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat berbasis institusi keagamaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi studi-studi sejenis yang mengkaji peran masjid dalam pembangunan ekonomi masyarakat secara holistik dan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ditujukan kepada pihak berikut:

a. Bagi Pengelola Masjid: Memberikan panduan atau inspirasi dalam merancang dan mengimplementasikan program-program ekonomi produktif berbasis masjid yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat sekitar.
b. Bagi Masyarakat Ponorogo: Membuka peluang baru dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi oleh masjid.

c. Bagi Pemerintah Daerah: Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
d. Bagi Lembaga Pendidikan: Menjadi bahan ajar atau referensi untuk membangun kurikulum atau pelatihan yang berkaitan dengan ekonomi komunitas dan peran strategis masjid dalam pemberdayaan umat.

E. Kajian Terdahulu

Dalam memperkuat penelitian ini, maka dari itu peneliti melakukan telaah pustaka. Penelitian yang pernah dilakukan yang relevan dengan penelitian ini diantara nya sebagai berikut:

1. Artikel yang ditulis oleh Mufti Afif, Meichio Lesmana, Abdul Basith, Maula Falih Rizqullah Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo tahun 2022 yang berjudul " *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pendekatan Analisis SWOT* " Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data memalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisa menggunakan analisis SWOT dan triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa strategi pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang dilakukan Masjid Al Falah Sragen dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu d engan menganalisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Perlu diketahui, dengan adanya beberapa program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, bahwa dampak pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat sekitar setelah diadakannya program tersebut yang dilakukan oleh Masjid Raya Al Falah Sragen sangat berdampak positif dan signifikan bagi masyarakat sekitar. Perbedaan peneliti dan peneliti terdahulu ialah lingkup lembaga yang diteliti berbeda, penelitian terdahulu mengambil fokus di analisi SWOT nya sedangkan prnrliti saat ini fokus kepada kesejahtraan masyarakat saja, variable penelitian yang saat ini dilakukan peneliti adalah pemberdayaan saja sedangkan penelitian terdahulu membahas strategi pemberdayaan. Sedangkan persamaannya ialah salah satu variable yang diteliti sama yaitu pemeberdayaan

ekonomi berbasisi masjid metode penelitian, jenis penelitian dan pendekatannya sama yaitu kualitatif dan studi kasus.[29]

2. Artikel yang ditulis oleh Ajengesti Latifah Sabrinasyah, Dini Lestari Hasibuan, Rani Febrianti Siagian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2022 yang berjudul " *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid: Studi pada Masjid Besar Al Amin Sei Kera Hulu, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara* " Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Besar Al Amin Medan merepresentasikan masjid yang mampu menghidupkan semangat gerakan pemberdayaan masyarakat dalam bidang spiritual keagamaan, ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan pengembangan seni budaya. Keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid di Masjid Besar Al Amin didukung oleh sumber daya manusia yang memadai yang tergambar dalam struktur organisasi dewan pengurus masjid yang ideal serta ditunjang kemampuan komunikasi efektif dari para da'i. Perbedaan penelitian penulis dan penelitian terdahulu ialah tempat penelitian yang berbeda. Penelitian saat ini dilakukan di Masjid di Ponorogo, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan pada Masjid Al Amin di kota Medan, penelitian terdahulu dilakukan pada Masjid Al Amin di kota Medan. Sedangkan persamaannya ialah salah satu variable yang diteliti sama yaitu pemeberdayaan ekonomi berbasisi masjid, metode penelitian, jenis penelitian dan pendekatannya sama yaitu kualitatif dan studi kasus.[30]
3. Tesis yang ditulis oleh Nur Taufiq Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2021 yang berjudul " *Manajemen* Pemberdayaan *Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Kasus Masjid Paripurna Kecamatan di Kota Pekanbaru)* " Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif,

[29] Mufti Afif Dkk., "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pendekatan Analisis Swot: (Studi Kasus Masjid Raya Al Falah Sragen)," *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10, No. 02 (2022): 205–18.

[30] Ajengesti Latifah Sabrinasyah, Dini Lestari Hasibuan, Dan Rani Febrianti Siagianrani, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid: Studi Pada Masjid Besar Al Amin Sei Kera Hulu, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara," *Dakwatussifa: Journal Of Da'wah And Communication* 2, No. 1 (2023): 11–21.

dengan teknik *non-probability sampling* yaitu *sampling* purposive (Pengambilan sampel berdasarkan seleksi khusus). Hasil penelitian manajemen pemberdayaan ekonomi masyarkat berbasis masjid di Masjid Paripurna Kecamatan Kota Pekabaru yaitu (a). *Planning* dilakukan dengan melihat peluang dan potensi yang dimiliki masjid (b). *Organizing*, untuk efektifitas maka pengurus masjid membuat struktur lain sebagai team pelaksana program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid, bagi masjid yang tidak memiliki SDM cukup maka mereka masih menggunakan bagian dari struktur organisasi pengurus masjid. (c). *Actuating* atau Pelaksanaan pemberdayaan ini dengan beberap aspek. (1). Sarana : Menggunakan gedung, aula, kios, area dan lahan. (2). Prasarana : memfungsikan program kajian dan pembelajaran. (3). SDM : Memanfaatkan SDM Pengurus dan Masyarakat Setempat (d) controlling, memantau setiap program baik secara harian, mingguan maupun bulanan dengan menggunakan fungsi sturktur masjid yang ada.perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah Penelitian terdahulu berfokus pada variabel manajemen sedangkan penelitian ini pada peningkatan kesejahtaan masyarakat dan pemberdayaan. Sedangkan persamaanya ialah sama-sama membahas pemeberdayaan ekonomi berbasis masjid, menggunakan metode penelitian dan pendekatan yang sama yaitu kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.[31]

4. Tesis yang ditulis oleh Elok Fardilah Ika Saputro Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021 yang berjudul "*Analisis Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Masjid (*Studi *Kasus Masjid Besar Al Mukhlasin Sukorejo Pasuruan)*" Metode yang di gunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan: 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkah analisisnya yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Model

[31] Fardialh Ika Saputro Elok, "Analisis Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Masjid (Studi Kasus Masjid Besar Al Mukhlasin Sukorejo Pasuruan)," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021.

pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar masjid yang dilakukan oleh takmir masjid Besar Al Mukhlasin diantaranya yaitu (a) Penyediaan sarana prasarana kegiatan ekonomi melalui Sentra Kuliner Masjid Besar Al Mukhlasin, (b) Pemberdayaan masyarakat sekitar masjid sebagai petugas kerumahtanggaan, keamanan/penjaga parkir, dan kebersihan masjid, serta (c) Pemberian bantuan langsung tunai setiap bulan. (2) Pemberdayaan ekonomi tersebut berimplikasi positif bagi masyarakat yang terlibat di dalamya. Implikasi yang dirasakan oleh masyarakat antar lain (a) Mempunyai pekerjaan tetap, (b) Mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan seharisehari, (c) Tingkat kesejahteraan meningkat, (d) Selain itu mereka merasa kebutuhan rohani juga terpenuhi. Perebedaan penelitian penulis dan penelitian terdahulu ialah Penelitian ini hanya berfokus pada pemberdayaan nya saja sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada analisis model pemeberdayaan. Sedangkan persamaannya ialah salah satu variable yang diteliti sama yaitu pemeberdayaan ekonomi, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.[32]

5. Tesis yang ditulis oleh Siti Insani Akbar UIN Sunan Gunung Djati tahun 2020 yang berjudul "*Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Deskriptif di Koperasi Masjid Salman ITB Kota Bandung)*" Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif. Dan pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara serta analisis dokumen. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Koperasi Salman Bersatu melakukan program pemberdayaan ekonomi. Tujuan pemberdayaan ekonomi Koperasi Salman Bersatu adalah mengembangkan potensi para karyawan Salman dengan memberikan pelatihan sehingga para anggota tersadarkan akan pentingnya mengatur keuangan. Dari sisi proses, pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Salman Bersatu yaitu melalui tahapan Pembentukan, Pelatihan, Kemandirian, dan ada beberapa kegiatan pengadaan. Dan dari sisi keberhasilan yang dicapainya adalah terpenuhinya

[32] Elok Fardilah Ika Saputro, "Analisis Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Masjid (Studi Kasus Masjid Besar Al Mukhlasin Sukorejo Pasuruan)," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021.

kebutuhan sekunder para anggota dan adanya perubahan yang ditemukan baik dari peningkatan financial maupun peningkatan keanggotaan yang mempengaruhi keberjalanan Koperasi. Perebedaan penelitian peneliti dan kajian terdahulu ialah Tempat penelitian yang berbeda penelitian ini di lakukan masjid di Ponorogo sedangkan penelitian terdahulu di koprasi Masjid kota bandung. Sedangkan persamaanya ialah sama-sama membahas pemeberdayaan ekonomi berbasis masjid Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. [33]

6. Artikel yang ditulis oleh Mohamad Akbar F. Ibrahim, Sri Dewi Yusuf, Yusran Zainuddin IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan judul "Peran Masjid Sabilil Huda Boki Owutango dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah di Tamalate". Dengan metode penelitian pendekatan kualitatif. Dengan hasil penelitian studi ini menunjukkan bahwa masjid ini berhasil meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan keadilan distribusi kekayaan. Partisipasi aktif jamaah dalam program-program tersebut membuktikan efektivitas upaya masjid dalam memberdayakan masyarakat, menjadikannya pusat kegiatan sosial dan ekonomi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tamalate. Perbedaan penelitian peneliti dan penelitian terdahulu ialah tempat penelitian yang berbeda peneliti meneliti di masji di ponorogo sedangkan penelitian terdahulu meneliti fokus. Sedangkan persamaanya ialah sama-sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi dan menggunakan metode penelitian yang sama.[34]
7. Artikel yang diteliti oleh Emon Saputra, Dian Agustina Universitas Gadjah Mada tahun 2021 dengan judul "*Peran Institusi Masjid dalam Pembangunan Ekonomi Lokal: Studi Kasus pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta*". Menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus.

---

[33] Insani Akbar Siti, "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Deskriptif Di Koperasi Masjid Salman Itb Kota Bandung)," *Uin Sunan Gunung Djati*, 2020.

[34] Mohamad Akbar F. Ibrahim, Sri Dewi Yusuf, Dan Yusran Zainuddin, "Peran Masjid Sabilil Huda Boki Owutango Dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah Di Tamalate," *Islamic Economics And Finance Journal* 3, No. 1 (2024): 1–15.

Deangan hasil penelitian Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat empat dampak atas peranan yang dilakukan oleh institusi Masjid Jogokariyan dalam upaya pembangunan ekonomi lokal yaitu perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha, perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, keberdayaan lembaga usaha mikro dalam proses produksi dan pemasaran dan keberdayaan lembaga jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, entitas swasta, dan masyarakat lokal. Perbedaan penelitian penelitidan penelitian terdahulu ialah Penelitian terdahahulu berfokus kepada pembangunan ekonomi lokal sedangkan peneliti berfokus pada kesejahteraan masyarakat Peneliti berfokus pada pemeberdayaan ekonomi sedangkan peneliti terdahulu berfokus pada peran institu masjid terhadap pembangunan ekonomi lokal. Sedangkan persamaanya ialah sama-sama menggunkan metode penelitian kualitatif dan dengan objek yang sama yaitu masjid.[35]

8. Artikel yang ditulis oleh Asep Suryanto, Asep Saepulloh Universitas Siliwangi, Indonesia dengan judul "*Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya*". Dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian grouded yakni bergerak dari level empirikal menuju ke level konseptual-teoritikal. Dengan hasil penelitian Potensi kegiatan masjid yang dapat mendukung untuk pemberdayaan ekonomi masjid adalah pengalaman DKM masjid dalam peneglolaan zakat fitrah dan kegiatan rutin majlis taklim baik dalam bentuk kelompok pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, dan kelompok pengajian remaja serta pemuda masjid. Adapun mengenai memfungsikan masjid untuk pemberdayaan ekonomi jamaah sebanyak 86% responden menyatakan setuju, sedangkan sisanya tidak setuju dan abstain. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah Penelitian terdahulu berfokus pada pengoptimalan fungsi dan potensi masjid sedangkan peneliti berfokus pada pemberdayaannya saja dengan metode penelian yang sama tetapi dengan

[35] Emon Saputra Dan Dian Agustina, "Peran Institusi Masjid Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta," *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies* 2, No. 2 (2021): 174–95.

menggunakan pendekatan yang berbeda. Sedangkan persamaanya ialah Sama-sama menggunkan penelitian kualitatif dengan fokus tentang pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.[36]

9. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Syafar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2018 dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Untuk Menangkal Radikalisme Islam Di Banten". Dengan metode pendekatan kesejahteraan sosial, yaitu filantropi sosial, administrasi sosial, dan bakti social. Dengan hasil pemberdayaan masyarakat tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai-nilai Islam tetapi juga peningkatan ekonomi sosial jamaah yang diikuti melalui penguatan kelembagaan DKM, modal sosial masyarakat, kewirausahaan, dan ketahanan sosial untuk mencegah radikalisme dalam kerangka pemahaman Islam dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Perbedaan penelitian peneliti dan penelitian terdahulu ialah Metode penelitian penulis dan penelitian terdahulu berbedan dan pendekatantapun berbeda dan lokasi penelitian yang berbeda. Sedangkan persamaanya ialah sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dengan kapasitan penelitain yang sama yaitu pada masjid di kota.[37]
10. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Affan Satria, A. Syifau'ul Qulub Universitas Airlangga tahun 2019 dengan judul "*Program Pemberdayaan Ekonomi Mualaf: Studi Kasus Program Kampung Inspiratif Dan Mandiri Desa Klepu Oleh Lmi*". Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Dengan hasil Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LMI berperan dalam pemberdayaan ekonomi mualaf Klepu, meliputi: sebagai fasilitator masyarakat, sebagai penghubung atau pendukung antara muslim yang tertopang secara ekonomi dengan bantuan mualaf yang merupakan salah satu golongan yang dapat menerima zakat; memanfaatkan sumber daya dan keterampilan yang ada di Desa Klepu;

[36] Asep Suryanto Dan Asep Saepulloh, "Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5, No. 2 (2016): 150_176-150_176.

[37] Muhammad Syafar, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Untuk Menangkal Radikalisme Islam Di Banten," *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, No. 2 (2018): 103–22.

mendukung kesepakatan para pemangku kepentingan, LMI; dan memberikan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan oleh penerima program LMI di Desa Klepu. Perbedaan penelitian peneliti dan penelitian terdahulu ialah peneliti terdahulu membahas tentang pemberdayaan ekonomi mualaf sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dan studi kasus yang berbeda. Sedangkan persamaanya ialah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi.[38]

11. Artikel yang ditulis oleh Adinda Maharani, Abrista Devi Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 2021 dengan judul penelitian "Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Masjid AlMuhajirin Bogor". Dengan metode penelitian kualitatif jenis studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Wawancara, observasi dan dokumentasi dilakukan untuk pengambilan data. Dengan hasil hasil penelitian sesuai dengan fakta yang ada. Masjid Al-Muhajirin berada di tengah pedesaan dan memiliki strategi permberdayaan ekonomi umat secara sederhana dengan membantu masyarakat nya dalam hal financial dan memberikan pinjaman beberapa logistik untuk sebuah acara pribadi. Dilihat dari strategi tersebut, masjid Al-Muhajirin mempunyai konsep tolong-menolong dalam pemberdayaan ekonomi umat. Masjid Al-Muhajirin pun mengfungsikan masjid untuk hal pendidikan Islam serta tempat untuk bersilaturahim antar jamaah. Dengan potensi yang ada, diharapkan masjid Al-Muhajirin dapat memiliki strategi khusus agar masjid dapat optimal dalam memberdayakan ekonomi umat. Perebedaan penelitian peneliti dan penelitian terdahulun ialah Lokasi penelitian terdahulu berfokus pada satu masjid saja sedangkan peneliti bebrapa masjid yang ada di ponorog, penelitian terdahulu berfokus pada strategi masjid dalam penerapan pemberdayaanj sedangkan peneliti bagaima pemeberdayaanya di masjid yang di teliti. Sedangkan persamaanya ialah sama-

[38] Muhammad Affan Satria Dan A. Syifa'ul Qulub, "Program Pemberdayaan Ekonomi Mualaf: Studi Kasus Program Kampung Inspiratif Dan Mandiri Desa Klepu Oleh Lmi," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, No. 3 (2019): 555–67.

sama membahas tentang pemberdayaan masjid berbasis masjid dan memiliki metode penelitian yang sama.[39]

12. Artikel yang ditulis oleh Sulastiningsih, Muhammadaree Waeno, Suci Utami Wikaningtyas, Rio Dewangga, Muhammad Fadhil Adli Yanuar, Ekawati Nurjanah STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2024 dengan judul penelitian "Pemberdayaan Dan Pengembangn Ekonomi Umat Berbasis Koperasi Syariah Masjid". Dengan metode penelitian Pengabdian kepada masyarakat. Dengan hasil penelitian Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan mengenai pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat berbasis koperasi syariah masjid yang diikuti oleh 42 orang peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota koperasi Masjid Ar Rasul Kotagede menghasilkan luaran dalam bentuk literasi mengenai kemampuan manajerial pengelolaan koperasi syariah masjid. Materi pelatihan berkaitan dengan prinsip-prinsip, konsep, proses serta teknik yang terkait dengan manajemen pemasaran, manajemen sumberdaya, penyusunan laporan keuangan serta prinsip-prinsip manajemen keuangan yang mendukung peningkatan kinerja koperasi. Setelah mengikuti pelatihan peserta memiliki komitmen untuk bekerjasama memajukan koperasi syariah sehingga dapat mencapai tujuan dan mensejahterakan seluruh anggota dan pengurus koperasi. Setelah mengikuti pelatihan baik pengurus maupun anggota koperasi memiliki pengetahuan yang baik mengenai konsep dan manajemen koperasi syariah sehingga memiliki potensi besar untuk memajukan koperasi syariah masjid sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat. Perbedaan penelitian peneliti dan penelitian terdahulu ialah Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian pengbdian masyarakat sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif, peneliti hanya membahas masjid sedangkan penelitian terdahulu membahas objek koprasi syariah masjid. Sedangkan pesamaanya ialah sama sama membahas tentang pemeberdayaan ekonomi berbasis masjid.[40]

---

[39] Adinda Maharani Dan Abrista Devi, "Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Masjid Al-Muhajirin Bogor," *Al-Urban* 5, No. 2 (2021): 98–111.

[40] Sulastiningsih Sulastiningsih Dkk., "Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi Umat Berbasis Koperasi Syariah Masjid," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Widya Wiwaha* 2, No. 3 (2024): 106–13.

13. Artikel yang ditulis oleh Ahmad Abdul Mutalib Institut Agama Islam Negeri Bone tahun 2023 dengan judul penelitian "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Masjid di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan". Dengan metode penelitian lapangan dan jenisnya deskriptif kualitatif. Dengan hasil menunjukkan bahwa peran dan fungsi masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah melalui pemberdayaan koperasi umat, pemanfaatan usaha percetakan, klinik kesehatan, penyewaan aula serbaguna, usaha laundry, usaha kuliner, dan pendidikan TK/TPA.perebedaan penelitain peneliti dan penelitian terdahulu ialah Penelitian terdahulu berlokasi di kabupaten Bone sedangkan peneliti berlokasi kabupaten Ponorogo. Sedangkan persamaanya ialah sama-sama meneliti tentang pemeberdayaan ekonomi berbasis masjid dan menggunakan metode yang sama.[41]
14. Artikel yang ditulis M. Asiddiki Mubarak, Mustapa Khamal Rokan, Muhammad Ikhsan Harahap Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2023 dengan judul penelitian "Analisis pemberdayaan Umat Berbasis Masjid Melalui Pengelolaan Zakat (Studikasuspadamasjidagungat-Taqwa Kab. Acehtenggara)". Dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis kualitatif deskriptif. Jenis Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan dengan subjek penelitian pengelola zakat pada Masjid AT-Taqwa. Hasil penelitian Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Masjid At-Taqwa tidak hanya mengelola zakat namun ikut serta melakukan pemberdayaan umat berbasis masjid melalui zakat yang diberikan. Pemberdayaan juga diwujudkan melalui program-program pemberdayaan dalam bidang ekonomi seperti zakat produktif, gerobak sehat hingga pemberian pelatihan kepada mustahiq. Pemberdayaan ekonomi yang baik menandakan bahwa mustahiq memiliki mutu perekonomian yang baik pula. Hal demikian dikarenakan adanya perubahan mindset masyarakat yang semakin berkembang tentang upaya untuk

[41] Ahmad Abdul Mutalib, "Democratization Of Community Economic Empowerment Through A Mosque In Bone Regency, South Sulawesi Province: The Community Economic Empowerment Through Mosques In Bone Regency, South Sulawesi Province," *Jurnal Bimas Islam* 16, No. 1 (2023): 95–122.

meningkatkan taraf kehidupan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka dari itu, pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan, pendapatan, dan kemandirian mustahiq. Perbedaan penelitian peneliti dan penelitian terdahulu ialah Penelitian terdahulu membhas pemeberdayaan umat sedangkan penelitian membhas pemberdayaan ekonomi, penelitian terdahulu berfokus melalui peneglolaan zakat sedangkan peneliti melalui pemeberdayaan ekonomi saja. Sedangkan persamaanya ialah sama-sam menggunakan metode penelitian kualitatif dan memiliki objek yang sama.[42]

15. Artikel yang ditulis Acep Zoni Saeful Mubarok, Anwar Taufik Rakhmat Universitas Siliwangi tahun 2023 dengan judul "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Dewan Masjid Indonesia di Kabupaten Tasikmalaya". Dengan metode penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Dengan hasil Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa program yang dilaksanakan oleh PD DMI Kabupaten Tasikmalaya yang berhasil mendongkrak perekonomian masyarakat masjid, melalui program digitalisasi ekonomi, program pengembangan kelembagaan ekonomi, dan program pemberdayaan ekonomi masjid. Perbedaan penelitian peneliti dan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu mengmbil lokasi penelitian di Tasikmalaya sedangkan peneliti di kabupaten Ponorogo. Sedangkan persamaaanya ialah Sama-sama memiliki tema pemeberdayaan ekonomi dan menggunakan metode yang sama.[43]

F. Metode Penelitian

Dalam metode ini dipaparkan beberapa aspek pembahasan berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

[42] M. Asiddiki Mubarak, Mustapa Khamal Rokan, Dan Muhammad Ikhsan Harahap, "Analisis Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid Melalui Pengelolaan Zakat Pada Bidang Ekonomi (Studi Kasus Masjid Agung At-Taqwa Kabupaten Aceh Tenggara)," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, No. 4 (2023), Https://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Mas/Article/View/20841.

[43] Anwar Taufik Rakhmat, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Dewan Masjid Indonesia Di Kabupaten Tasikmalaya," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 1 (2023): 755–65.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pemahaman makna suatu fenomena, bukan pada pengukuran atau perhitungan statistik.[44] Pendekatan ini menggambarkan masjid sebagi alat pemeberdayaan ekonomi untuk masyarakat. Jenis penelitian ini ialah penelitian riset ekonomi islam dengan objek penelitian lapangan *(field research)*. Fokus yang dikaji berupa pemeberdayaan yang di lakukan, kendala, dan dampak pemeberdayaan tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dengan fokus pada dua masjid yaitu Masjid Baitul Mukhlisin, JL. Lawu No.38, Hasanudin. Nologaten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur.[45] dan Masjid NU Jl. Sultan Agung No. 83, Kelurahan Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur.[46] yang sudah melakukan pemeberdayaan ekonomi. Pemilihan lokasi didasarkan pada keterlibatan dalam pelaksanaan pemeberdayaan ekonomi masjid di Ponorogo dalam memperkuat kesejahtraan masyarakat melelui masjid. Pemeberdayaan ekonomi masjid mencerminkan untuk pengembangan ekonomi nasional.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data utama yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui interaksi peneliti dengan subjek penelitian.[47] Data ini bertujuan menggali pengalaman, pandangan, dan peran pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masjid di Ponorogo, untuk memperoleh informasi otentik yang dapat merepresentasikan topik ini. Data primer penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui:

---

[44] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

[45] "Masjid Baitul Mukhlisin Nologaten Ponorogo,."

[46] "Masjid NU Ponorogo," NU Online.

[47] Masayu Rosyidah dan Rafiqa Fijra, *Metode penelitian* (Deepublish, 2021), 35.

1) Responden utama, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pemeberdayaan ekonomi masjid, seperti ta'mir masjid dan masyarakat sekitar masjid.
2) Informan tambahan, yaitu pihak yang memiliki keterkaitan tidak langsung namun relevan, seperti tokoh masyarakat, marbot masjid, yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pemeberdayaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis dan dokumentasi resmi yang telah tersedia sebelumnya.[48] Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen yang meliputi laporan kegiatan dan dokumentasi saat pelakasanaan kegiatan masjid serta berita. Literatur ilmiah dan referensi yang sejalan kajian ini juga turut digunakan sebagai informasi tambahan untuk memperkaya pemahaman tentang topik ini.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi komprehensif mengenai pemeberdayaan antara masjid dan masyarakat dalam proses berjalannya pemeberdayaan ekonomi masjid.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang terdiri dari ketua ta'mir masjid, pengurus masjid, serta masyarakat. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali persepsi, peran, dan pengalaman para pihak dalam pemeberdayaan tersebut.[49]

b. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap kegiatan pemeberdayaan yang di lakukan oleh masjid. Observasi ini digunakan untuk mencatat interaksi, metode pendekatan, serta pelaksanaan program di lapangan secara objektif.[50]

---

[48] Ibid., 41.

[49] Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 75.

[50] Ibid., 108.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen resmi, laporan kegiatan, foto kegiatan, dan arsip lain yang relevan. Dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi data kualitatif dan memberikan bukti yang valid atas pelaksanaan kolaborasi antar lembaga.[51]

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi yang terdiri atas beberapa jenis sebagai berikut:[52]

a. Triangulasi sumber yang dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber, seperti ta'mir, marbot, pengurus masjid dan masyarakat.
b. Triangulasi teknik yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Perbandingan hasil dari ketiga teknik ini kemudian digunakan untuk melihat konsistensi dan kedalaman informasi yang diperoleh.

6. Teknik Analisis Data

Data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diolah menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:[53]

a. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Ponorogo. Data yang dipertahankan meliputi: peran pengurus masjid dan jenis program ekonomi yang dijalankan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
b. Penyajian Data yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, dan metrik untuk memberikan gambaran utuh tentang fenomena yang terjadi serta mempermudah identifikasi pemeberdayaan ekonomi dan penarikan kesimpulan sementara.

---

[51] Ibid., 145.
[52] Ibid., 214.
[53] Ibid., 235.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, penarikan kesimpulan dilakukan berdasar pola, kategori, dan temuan yang muncul, serta dapat berubah jika ada data baru. Verifikasi dilakukan melalui perbandingan data, validasi dengan informan, dan triangulasi untuk memastikan kesimpulan yang valid.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, diperlukan penjelasan mengenai susunan sistematika penulisannya. Sistematika penulisan dalam penelitian ini dirancang sedemikian rupa agar pembaca dapat mengikuti alur pemikiran dan analisis yang dilakukan oleh penulis secara lebih jelas dan terstruktur. Adapun susunan sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar yang memberikan pemahaman awal mengenai topik yang diteliti. Di dalamnya terdapat beberapa komponen penting, yaitu latar belakang masalah yang menggambarkan konteks dan urgensi penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, serta tujuan dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memaparkan kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini serta memberikan gambaran umum mengenai sistematika penulisan. Dengan demikian, bab ini bertujuan untuk memberikan peta atau gambaran awal bagi pembaca mengenai ruang lingkup, arah, serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kajian teori yang membahas teori-teori yang menjadi landasan pemikiran dalam menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pembahasan dalam bab ini meliputi konsep-konsep dasar mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, teori-teori terkait pemeberdayaan ekonomi, serta kesejahtraan masyarakat. Dalam kajian ini, peneliti menerapkan seperti tujuan dan indikator pemeberdayaan lalu fungsi dan potensi masjid serta kesejahtraan ekonomi masyarakat di Ponorogo.

Bab ketiga berisi paparan dan analisis rumusan masalah pertama. Bab ini memaparkan hasil temuan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk program

pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh Masjid Baitul Mukhlisin dan Masjid NU Ponorogo dalam upaya mensejahterakan masyarakat sekitar. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengurus masjid, tokoh masyarakat, serta penerima manfaat program, ditambah dengan observasi langsung dan dokumentasi kegiatan pemberdayaan. Hasil temuan menunjukkan bahwa kedua masjid tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Bentuk program pemberdayaan yang dijalankan mencakup pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha mikro, pendampingan UMKM, serta pembentukan koperasi berbasis masjid. Berbagai inisiatif tersebut merupakan bentuk konkret adaptasi masjid terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat Ponorogo, khususnya di tengah ketimpangan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya. Bab ini menguraikan secara rinci bagaimana masjid mampu mengambil peran aktif dalam memperkuat ketahanan ekonomi umat melalui pendekatan yang holistik dan berbasis nilai-nilai keislaman.

Bab keempat tentang paparan dan analisis rumusan masalah kedua. Bab ini membahas secara mendalam kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi di Masjid Baitul Mukhlisin dan Masjid NU. Analisis dilakukan dengan menggali berbagai aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas program, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, minimnya dukungan kelembagaan, serta kendala komunikasi antara pengurus masjid dan masyarakat .Selain itu, juga akan dianalisis faktor-faktor lain seperti kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana masjid, kendala birokrasi, serta ketergantungan pada donatur. Dengan pendekatan kualitatif, paparan ini menggambarkan tantangan riil yang dihadapi di lapangan, baik dari segi teknis, sosial, maupun budaya, yang dapat menghambat optimalisasi fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi.

Bab kelima tentang paparan dan analisis rumusan masalah ketiga. Bab ini memaparkan dampak dan sulusi atas kendala dan tantangan dari program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid terhadap kesejahteraan masyarakat di

sekitar Masjid Baitul Mukhlisin dan Masjid NU. Penulis menganalisis dampak dan solusi atas kendala dan tantangan tersebut dari berbagai dimensi: ekonomi, sosial, dan spiritual. Dari segi ekonomi, akan dibahas bagaimana program-program seperti pelatihan kewirausahaan, koperasi masjid, dan pemberian modal usaha mikro mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari sisi sosial, dianalisis peningkatan solidaritas, partisipasi aktif warga dalam kegiatan masjid, serta munculnya jejaring ekonomi komunitas. Sementara itu, dari dimensi spiritual, dilihat sejauh mana keberadaan program ini memperkuat hubungan masyarakat dengan masjid sebagai pusat ibadah sekaligus pusat pengembangan ekonomi umat. Paparan ini bertujuan memberikan solusi atas kendala dan gambaran konkret mengenai kontribusi program masjid dalam mengurangi kemiskinan, mendorong kemandirian ekonomi, dan menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan di lingkungan sekitarnya.

Bab keenam merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, serta jawaban atas rumusan masalah kedua dan ketiga. Penulis merangkum bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, upaya tersebut tetap memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, baik secara ekonomi maupun sosial. Bab ini juga menyajikan rekomendasi praktis, seperti pentingnya peningkatan kapasitas pengurus masjid dalam manajemen program ekonomi, perlunya sinergi antara masjid dan pemerintah daerah, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi agar program berjalan efektif dan berkelanjutan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat peran masjid sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat dan menjadi model inspiratif bagi masjid lain di Ponorogo maupun wilayah lainnya.

BAB II
PEMEBERDAYAAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN

A. Alur Historis Teori

Teori yang menjadi dasar dalam pemberdayaan ekonomi berbasis masjid adalah teori pemberdayaan (*empowerment theory*) dalam perspektif ekonomi Islam. Teori ini menekankan pada penguatan kapasitas individu maupun kelompok masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal, termasuk peran masjid sebagai pusat kegiatan ibadah sekaligus pusat sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, masjid tidak hanya dipandang sebagai tempat ibadah *mahdhah*, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan jamaah melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta pengembangan unit usaha produktif.[54]

Teori pemberdayaan pada dasarnya banyak dikembangkan oleh para pakar sosiologi dan ekonomi pembangunan seperti Rappaport (1987) yang menekankan konsep *empowerment* sebagai upaya mengontrol kehidupan dan mengambil keputusan secara mandiri. Dalam konteks Islam, tokoh seperti Quraish Shihab juga menekankan fungsi masjid sebagai pusat kehidupan umat, termasuk dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan menggabungkan perspektif Barat dan Islam, teori ini memberi kerangka bahwa pemberdayaan harus berbasis nilai spiritual sekaligus praktis untuk kesejahteraan masyarakat.[55]

Munculnya teori pemberdayaan dapat ditelusuri sejak era 1970-1980-an ketika muncul kritik terhadap pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi mengabaikan kesejahteraan masyarakat kecil. Konsep *empowerment* kemudian berkembang sebagai respon terhadap marginalisasi kelompok lemah agar mereka memiliki akses terhadap sumber daya dan

[54] AL AMIN, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Masjid Baitus Salam Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru)" (PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024).

[55] Holy Rafika Dhona dkk., "Islam Dalam Studi Komunikasi," UII Press, 2022.

kesempatan yang sama. Dalam Islam, jejak pemberdayaan ini sudah ada sejak masa Rasulullah saw., ketika masjid dijadikan pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi dengan mendirikan pasar Islami, mengelola zakat, serta memperkuat solidaritas sosial umat.[56]

Pemilihan teori pemberdayaan ini adalah karena teori tersebut relevan dengan kondisi umat Islam yang masih menghadapi tantangan kemiskinan, keterbelakangan ekonomi, dan ketimpangan sosial. Teori pemberdayaan memberikan pendekatan yang komprehensif, sebab tidak hanya menekankan aspek ekonomi tetapi juga penguatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat. Dengan masjid sebagai basis penerapan teori ini, pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif karena masjid memiliki legitimasi spiritual, kedekatan dengan masyarakat, serta jaringan sosial yang luas sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi umat.[57]

B. Deskripsi Teori Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid

1. Definisi- Definisi

a. Definisi Pemeberdayaan

Pemberdayaan didefinisikan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu, baik dari aspek ekonomi maupun sosial, sehingga mereka memiliki kekuatan, kemampuan, serta kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi lebih pada proses membangun kesadaran, kapasitas, dan partisipasi aktif masyarakat agar mereka dapat mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri.[58] Pemberdayaan juga dipahami sebagai proses transfer kekuatan dan akses terhadap sumber daya. Masyarakat diberi kesempatan untuk mendapatkan kontrol lebih besar terhadap kehidupan mereka, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam memanfaatkan potensi ekonomi di

---

[56] M. Si Suaib, *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat* (Penerbit Adab, 2023).

[57] Mochamad Chazienul Ulum dan Niken Lastiti Veri Anggaini, *Community empowerment: teori dan praktik pemberdayaan komunitas* (Universitas Brawijaya Press, 2020).

[58] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 28.

sekitarnya. Dengan demikian, pemberdayaan mendorong terciptanya kemandirian, sehingga masyarakat tidak selamanya bergantung pada pihak luar.[59]

Dalam perspektif Islam, pemberdayaan dikaitkan erat dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, di mana umat Islam dituntut untuk saling tolong-menolong, meningkatkan kesejahteraan bersama, serta mengelola amanah berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Masjid kemudian diposisikan sebagai pusat pemberdayaan yang strategis karena memiliki kedekatan dengan jamaah dan legitimasi moral. Dengan basis keimanan dan ibadah, pemberdayaan dalam Islam tidak hanya bertujuan pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pembentukan akhlak dan solidaritas sosial.[60] Selain itu, ditekankan bahwa pemberdayaan adalah proses jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan. Artinya, pemberdayaan bukan kegiatan sesaat atau proyek singkat, melainkan usaha sistematis untuk mengubah pola pikir, meningkatkan keterampilan, serta memperluas akses terhadap modal, pasar, dan jaringan sosial. Dengan cara ini, masyarakat dapat bergerak dari kondisi ketidakberdayaan menuju kondisi yang lebih mandiri dan berdaya saing.[61]

Quraisy Shihab menyebutkan bahwa esensi masjid dalam al-Quran adalah tempat untuk melaksanakan semua kegiatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala (Q.S al-Jin: 18). Secara sosiologis masjid dapat didefinisikan sebagai tempat shalat, baik wajib maupun sunnah baik secara sendiri-sendiri maupun jemaah. Jika di masjid tersebut dilaksanakan shalat jumat maka dinamakan sebagai masjid jami' namun jika hanya dilaksanakan shalat wajib dan rawatib saja maka dinamakan mushalla. Berangkat dari definisi yang diberikan oleh Quraisy Shihab tantang esensi dari masjid sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah SWT maka pandangan terhadap masjid dapat diperluas sebagai pusat untuk melakukan aktifitas beribadah baik yang sifatnya mahdhah maupun yang ghairu mahdhah semisal melakukan pembinaan perekonomian umat bahkan sampai pada pemajuan peradaban. Hal ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw., ketika pertama kali membangun Negara Madinah. Rasulullah SAW., terlebih

---

59 Ibid., 29.
60 Ibid., 29–30.
61 Ibid., 30.

dahulu membangun masjid dan menjadikannya sebagai pusta aktifitas kaum muslimin pada saat itu. Termasuk melaksanakan pemerintahan, parlemen untuk bermusyawarah.[62]

Sebelum membahas mengenai model pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh masjid, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian serta maksud dari konsep pemberdayaan itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, istilah "pemberdayaan" dikenal dengan kata *empowerment*, yang berarti pemberian kekuasaan atau wewenang. Kekuasaan dalam konteks ini bukan hanya sekadar memberikan kemampuan, tetapi juga mencakup pemberian kewenangan atau kuasa. Menurut Webster dan Oxford English Dictionary, istilah *empower* memiliki dua makna utama. Pertama, berarti memberikan kekuasaan atau wewenang kepada pihak lain, termasuk pengalihan kekuatan atau pendelegasian otoritas. Kedua, berarti memberikan kemampuan atau memberdayakan, yaitu suatu usaha untuk meningkatkan kapasitas atau potensi seseorang agar mampu bertindak secara mandiri.[63] Dengan demikian, pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mengoptimalkan potensi yang telah dimiliki oleh masyarakat agar mereka mampu mencapai kemandirian. Dalam hal ini, masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama atau subjek aktif yang berperan secara langsung dalam mengarahkan diri menuju perubahan yang lebih baik.[64]

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian; (1) *to give power atau authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.[65] Konsep pemberdayaan mulai

---

[62] Ibid., 31.

[63] Hutomo Mardi Yatmo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoriris Dan Implementasi* (Jakarta:Bappenas, 2000, 3, T.T.).

[64] Fauzi Adnan, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Geger Kec. Kedungadem-Bojonegoro)," Dalam *Interdisciplinary And Multidisciplinary Studies: Conference Series*, Vol. 2, 2024, 222–27, Https://Proceeding.Uns.Ac.Id/Imscs/Article/View/530.

[65] Kartasasmita Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996, 249., T.T.).

menjadi diskursus pembangunan, ketika orang-orang mulai mempertanyakanmakna pembangunan. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumberdaya alam dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh model pemberdayaan ekonomi penguasa. Karena pemahanan mengenai pemberdayaan belum tepat, maka dalam wacana praktik pembangunan, pemberdayaan dipahami secara beragam. Yang paling umum adalah pemberdayaan disepadankan dengan partisipasi. Padahal keduanya mengandung pengertian dan spirit yang berbeda.[66]

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya kata pemberdayaan memiliki arti sebuah cara, proses, perbuatan memberdayakan.[67] Rappaport mendefinisikan pemberdayaan adalah "*empowerment is viewed as a process: the mecanism by which people, organization, dan communities gain mastery over their live*". Artinya pemberdayaan dipandang sebagai suatu proses mekanisme bagaimana orang, organisasi, dan masyarakat, memperoleh penguasaan atas kehidupan mereka.[68]

Mengacu kepada Michael Sheraden bahwa dalam proses menjalankan pemberdayaan terdapat tiga bidang, antara lain:[69]

1) Aset sumber daya manusia (*human asset*). Titik berat dalam bidang ini lebih mengacu pada background pendidikan, nalar, pengetahuan, keterampilan, pengetahuan dan lain-lain. Oleh karena itu, program pendidikan dan pelatihan keterampilan seperti pelatihan dan penyuluhan dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada.
2) Aset keuangan (*financial asset*). Pemberdayaan dalam bidang keuangan bersifat realisitis dan kuantitatif. Seumpama halnya tanah, bangunan, mesin produksi,

---

[66] Diatmika Dan Rahayu, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Peran Pemerintah*.

[67] "Arti Kata Daya - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online," Diakses 1 Mei 2025, Https://Kbbi.Web.Id/Daya.

[68] Raffaele Pisano Dan Paolo Bussotti, "Introduction To He Issue, Prevention In Human Issue," *Advances In Historical Studies* 04, No. 02 (2015): 65–67.

[69] Firdaus Ismet Dan Zaki Ahmad, *Upaya Meningkatkan Equity Perempuan Dhuafa Desa Bojong Indah, Parung* ((Jakarta: Dakwah Press, 2008), 226., T.T.).

modal usaha, dan lainnya. Akan tetapi, tidak jarang terjadi pemasalan pokok yang dialami pelaku usaha, yakni kesulitan menemukan modal usaha. Hal ini disebabkan oleh beratnya memenuhi persyaratan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan.

3) Aset sosial (*social asset*). Relasi dengan sesama manusia seperti halnya kolega, rekan, relasi sosial bahkan keluarga menjadi titik berat dalam meningkatkan kualitas individu, seperti halnya informasi, dukungan emosional, kredit, permodalan dan akses menuju kemudahan pekerjaan.

Ketiga aspek dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena ketiganya saling melengkapi dan mendukung. Melakukan pemberdayaan hanya pada satu aspek dengan mengabaikan yang lain akan menjadi tidak efektif. Hal ini disebabkan karena esensi dari pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat guna meraih kesejahteraan, menciptakan kemaslahatan, serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari definisi pemberdayaan yang telah di paparkan di atas, maka dapat disimpulkan arti pemberdayaan menurut peneliti disini bahwa pemberdayaan merupakan suatu gerakan untuk memperkuat posisi sosial masyarakat, terutama mereka yang sebelumnya berada dalam kondisi lemah baik secara sosial, ekonomi, maupun politik agar menjadi lebih berdaya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan potensi masyarakat sehingga mereka mampu mengambil keputusan dan tindakan yang tepat guna mencapai keberhasilan, khususnya dalam meraih kemandirian. Sedangkan Pemberdayaan ekonomi sendiri adalah suatu upaya untuk mendorong kemampuan ekonomi masyarakat sehingga menghasilkan nilai tambah dan pendapatan yang lebih tinggi

b. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi

Ada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah prilaku masyarakat, dan memberi perlindungan terhadap masyarakat.[70]

Tujuan utama pemberdayaan adalah menciptakan masyarakat yang berdaya, yaitu masyarakat yang mampu mengenali potensi dirinya, mengelolanya, serta menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan demikian, pemberdayaan berorientasi pada pembentukan individu dan kelompok yang mandiri, produktif, serta tidak bergantung pada pihak luar. Selain itu, pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan diberikan kesempatan agar dapat mengakses modal, pendidikan, informasi, serta jaringan usaha. Hal ini bertujuan agar mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan keluar dari lingkaran kemiskinan.[71]

Tujuan pemberdayaan juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga melatih masyarakat agar memiliki kesadaran kritis, partisipasi aktif, dan keberanian dalam menentukan arah kehidupannya sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan dapat memperkuat posisi tawar masyarakat di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang dinamis. Dalam perspektif Islam yang ditegaskan dalam buku ini, tujuan pemberdayaan adalah terwujudnya kesejahteraan umat secara menyeluruh, dengan masjid sebagai pusat aktivitas. Masjid bukan sekadar tempat ibadah ritual, tetapi juga menjadi institusi sosial yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk kepentingan masyarakat. Tujuan ini sejalan dengan misi Islam yang menginginkan terbangunnya masyarakat adil, sejahtera, dan berakhlak mulia.[72]

---

[70] Gunawan Sumodiningrat Dan Randy R. Wrihatnolo, *Membangun Indonesia Emas: Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-Bangsa Yang Unggul Dalam Persaingan Global* (Elex Media Komputindo, 2005).

[71] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 39.

[72] Ibid., 35.

Tujuan pemberdayaan masyarakat secara singkat adalah untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan hidup secara berkelanjutan.[73] Pemberdayaan dalam konteks Undang-Undang (UU) di Indonesia, khususnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.[74]

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemberdayaan ekonomi, khususnya dalam konteks UMKM, diartikan sebagai: "*Segala upaya yang diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menjalankan* kegiatan *usahanya secara produktif dan berkelanjutan*." Jadi, pemberdayaan ekonomi menurut undang-undang berfokus pada penguatan kapasitas pelaku ekonomi kecil agar mampu bersaing, mandiri, dan berkelanjutan dalam aktivitas ekonomi.[75] Menurut Hutomo, salah satu tujuan utama pemberdayaan ekonomi adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang kurang berdaya. Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal dari dua sumber utama, yaitu upah atau gaji, serta keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha.[76] Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat ialah untuk memandirikan

---

[73] Elok Perwirawati, Bantors Sihombing, Dan Prietsaweny Riris T. Simamora, "Perencanaan Komunikasi Pariwisata Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Hilisataro Nandisa Menuju Desa Wisata Berbasis Sustainable Tourism Development.," *Jurnal Darma Agung* 30, No. 2 (2022): 321–38.

[74] "Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang - Paralegal.Id," 30 November 2022, Https://Paralegal.Id/Pengertian/Pemberdayaan-Masyarakat/.

[75] Cirprandy Riopaldo Tambunan, "Kontribusi Umkm Dalam Perekonomian Indonesia," 27 Juni 2023.

[76] Arif Nuraini, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Pondok Pesantren (Studi Di Koperasi Pondok Pesantren Putri Pusat Zainul Hasan Genggong)," *At Tujjar* 12, No. 2 (2024): 1–26.

warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya.[77]

Berdasarkan berbagai definisi dan pandangan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi yang mereka miliki. Baik melalui penguatan aspek sosial, ekonomi, maupun politik, pemberdayaan diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan hidup secara aktif. Pada akhirnya, inti dari seluruh upaya pemberdayaan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kesejahteraan berarti kondisi ketika individu atau kelompok masyarakat dapat hidup dengan aman, sehat, sejahtera secara ekonomi, serta memiliki akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan lingkungan yang layak.[78] Dengan demikian, kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat berarti kebutuhan masyarakat terpenuhi melalui kegiatan yang dilakukan oleh pengurus masjid tertentu.

c. Indikator Pemeberdayaan

Dalam rangka mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, terdapat sejumlah indikator penting yang dapat dijadikan acuan, yaitu:[79]

1) Terjadinya penurunan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
2) Tumbuh dan berkembangnya usaha peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lingkungan mereka.
3) Meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat untuk secara aktif berupaya memperbaiki kesejahteraan keluarga miskin di sekitarnya.

---

[77] Linatul Chariro, Aji Damanuri, dan Ely Masykuroh, "Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tunagrahita dalam Kerangka Sustainable Development Goals di Desa Karangpatihan Ponorogo," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 3, no. 1 (2024): 50.

[78] Muhammad Japar, Abdul Haris Semendawai, Dan Muhammad Fahruddin, "Hukum Kesehatan Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, No. 1 (2024): 952–61.

[79] Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial* (Gramedia Pustaka Utama, 1999).

4) Meningkatnya kemandirian kelompok, yang tercermin dari berkembangnya usaha produktif para anggota, penguatan modal kelompok, sistem administrasi yang semakin tertata, serta terbukanya interaksi yang lebih luas antar kelompok dalam masyarakat.
5) Meningkatnya kapasitas kerja masyarakat serta pemerataan pendapatan, yang ditunjukkan melalui peningkatan penghasilan keluarga miskin sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial secara layak.

d. Pengertian Masjid

Masjid adalah rumah Allah (bāyṭūllāḥ) yang berfungsi sebagai tempat suci bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah, terutama shalat. Masjid bukan sekadar bangunan fisik untuk ritual keagamaan, tetapi juga merupakan simbol persatuan umat, pusat pembinaan spiritual, serta wadah penguatan ukhuwah Islamiyah. Sebagai institusi sosial-keagamaan, masjid memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam karena menjadi pusat segala aktivitas kehidupan umat.[80] Sejak masa Rasulullah saw., masjid memiliki peran yang multidimensional. Selain menjadi tempat ibadah mahdhah seperti shalat, tilawah, dan dzikir, masjid juga digunakan sebagai pusat pendidikan, dakwah, musyawarah, bahkan aktivitas ekonomi dan politik. Dengan demikian, masjid tidak hanya dilihat dari aspek sakralitas ibadah, tetapi juga dari sisi kemasyarakatan, di mana jamaah dibina untuk menjadi masyarakat yang beriman, berilmu, dan berdaya.[81]

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, masjid dipahami sebagai institusi strategis yang mampu mengelola dan menyalurkan berbagai instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Melalui masjid, potensi ekonomi umat dapat dihimpun dan didistribusikan secara adil untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, masjid bukan hanya berfungsi sebagai ruang ibadah, melainkan juga sebagai pusat pemberdayaan dan transformasi sosial-ekonomi umat.[82]

---

[80] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 21.

[81] Ibid., 21–22.

[82] Ibid., 25.

Secara epistemologis, istilah masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata *sajada-yasjudu-sujudan* yang berarti "*sujud*", dan dalam bentuk isim makan menjadi *masjidun*, yang bermakna tempat untuk bersujud. Dengan demikian, secara bahasa, masjid diartikan sebagai tempat di mana seorang hamba merendahkan diri di hadapan Tuhannya melalui ibadah sujud. Sementara secara terminologis, masjid dipahami sebagai tempat ibadah umat Islam, khususnya untuk melaksanakan shalat, namun fungsinya tidak terbatas pada aktivitas ibadah semata. Masjid juga menjadi pusat berbagai kegiatan umat Islam, meliputi aktivitas pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya, yang mencerminkan peran masjid sebagai pilar penting dalam kehidupan masyarakat Muslim.[83]

Secara esensial, masjid adalah tempat seorang hamba menjalin hubungan spiritual dengan Tuhannya. Dalam arti leksikal, kata "*masjid*" berasal dari akar kata *sajada-yasjudu*, yang berarti sujud, dan dalam bentuk *isim makan* disebut *masjidun*, yakni tempat untuk bersujud. Menurut Quraish Shihab, masjid merupakan tempat berlangsungnya berbagai aktivitas umat Islam yang mencerminkan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Swt., Hal ini menunjukkan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas keagamaan umat Muslim.[84] Pendapat lain dikemukakan oleh Abu Bakar, yang memandang masjid sebagai tempat yang mendorong motivasi spiritual dan memperkuat kekuatan ruhani serta keimanan seorang Muslim. Sementara itu, Moh. E. Ayub menyebutkan bahwa masjid adalah tempat berkumpulnya umat Islam untuk melaksanakan shalat berjamaah, mempererat ukhuwah, dan memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat Muslim. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa masjid tidak semata-mata menjadi tempat ibadah shalat, melainkan juga menjadi pusat kegiatan umat, mencakup aktivitas ibadah baik *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah*, serta kegiatan pendidikan, sosial, pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan.[85]

---

[83] @Dminwebmhs, "Masjid Dalam Fungsi, Arti Dan Tonggak Sejarahnya," *Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan (Dpk) Uii* (Blog), 13 Agustus 2021.

[84] Kh Nasaruddin Umar, *Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2022).

[85] Adinda Maharani Dan Abrista Devi, "Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Masjid Al-Muhajirin Bogor," *Al-Urban* 5, No. 2 (2021): 98–111.

Dengan disahkannya undang-undang zakat baik secara *de facto* maupun *de jure*, masjid memperoleh legitimasi sebagai institusi yang berperan dalam mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat. Masjid memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat karena beberapa alasan. Pertama, masjid merupakan tempat pelaksanaan shalat lima waktu, yang menjadi titik pertemuan rutin masyarakat sehingga memudahkan komunikasi dan penyampaian kebutuhan antarwarga. Kedua, para jamaah yang datang ke masjid termotivasi oleh keimanan dan keinginan untuk meraih ridho Allah Swt., sehingga kebutuhan masjid cenderung cepat terpenuhi. Ketiga, para pengurus atau takmir masjid memiliki informasi dan data yang akurat mengenai kondisi warga, khususnya yang fakir dan miskin, sehingga memungkinkan dilakukannya kolaborasi dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Tujuannya adalah menjembatani kebutuhan masyarakat yang berkecukupan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Hasyr/59 : 7.

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٧

Artinya:

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk *Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu* tidak hanya *beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*

Allah lalu menjelaskan apa itu *fai'* dan peruntukannya. Harta rampasan dari mereka, musuh-musuh Allah yang meninggalkan hartanya tanpa perlawanan, maka harta itu diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri seperti Bani Quraizah, Bani Nadir, penduduk Fadak dan Khaibar,

penyalurannya adalah untuk Allah, untuk kepentingan fasilitas umum dan fasilitas sosial; untuk Rasul guna menopang perjuangan Islam; untuk kerabat Rasul yang membutuhkan bantuan; untuk anak-anak yatim guna menopang pendidikan mereka; untuk orang-orang miskin agar bisa mengembangkan diri; dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan guna mencari penghidupan yang lebih baik. Singkatnya, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, tetapi harus memiliki fungsi sosial seperti air mengalir ke tempat yang lebih rendah sehingga bermanfaat bagi kaum duafa. Allah mengajarkan prinsip dalam mengamalkan Islam: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, perintah maupun anjuran dalam ibadah dan muamalah, maka terimalah sebagai pedoman dalam ber-Islam. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah sebagai sesuatu yang harus dijauhi, karena di balik perintah dan larangan itu ada hikmah yang sangat berharga bagi manusia, dunia akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya bagi kaum yang menolak beriman kepada Rasulullah padahal mereka mengetahui bahwa beliau sebenarnya utusan Allah seperti kaum Yahudi di Madinah.[86]

e. Fungsi Masjid

Salah satu fungsi utama masjid adalah sebagai tempat pelaksanaan ibadah mahdhah, seperti bersujud kepada Allah Swt., melaksanakan shalat, dan menjalankan berbagai bentuk ibadah lainnya yang bersifat ritual. Di samping itu, masjid juga berperan dalam aktivitas ibadah ghair mahdhah atau muamalah. Padahal sejak zaman Nabi Muhammad saw., masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah namun juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, pusat perekonomian, pusat militer, pusat perdamaian, pusat kesehatan, dan bahkan sebagai pusat perdagangan dengan memanfaatkan luasnya halaman yang dimiliki masjid. Oleh karena itu, secara umum, masjid memiliki dua peran penting, yaitu sebagai tempat utama ibadah dan sebagai pusat aktivitas penunjang dalam

[86] "Surat Al-Hasyr Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 14 Mei 2025, https://quran.nu.or.id/al-hasyr/7.

kehidupan bermasyarakat.[87] Hal ini sama halnya yang dinyatakan oleh Ifendi bahwa masjid mempunyai makna yang sangat strategis dalam merajut serta meningkatkan ajaran Islam, paling utama dikala di Madinah. Masjid tidak cuma berperan bagaikan tempat beribadah serta serentetan aktivitas religious yang lain, namun masjid pula berperan bagaikan fasilitas pendidikan serta politik Islam.[88]

Masjid memiliki beragam peran dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai tempat utama untuk beribadah, masjid juga dapat difungsikan sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya. Masjid bahkan bisa berperan sebagai pusat pelayanan, seperti tempat pengobatan, aktivitas ekonomi, hingga wadah pembinaan masyarakat melalui dakwah Islamiyah. Karena masjid memiliki posisi yang istimewa dalam kehidupan umat Islam yakni sebagai tempat pembentukan karakter dan kepribadian yang islami maka keberadaan dan fungsinya perlu dioptimalkan secara maksimal agar manfaatnya lebih luas dan mendalam bagi masyarakat.[89]

Faktor yang mendukung optimalisasi fungsi masjid antara lain adalah adanya tujuan yang jelas dalam pengelolaannya, keikhlasan, kesadaran, serta loyalitas para pengurus masjid dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, dukungan jaringan kerja yang luas, lokasi masjid yang strategis, serta keterbukaan terhadap semua lapisan masyarakat juga menjadi unsur penting dalam memperkuat peran masjid. Di sisi lain, terdapat pula beberapa kendala yang dapat menghambat pengembangan fungsi masjid, seperti keterbatasan lahan, ketidakseimbangan antara kapasitas masjid dengan jumlah jamaah, rendahnya motivasi pengurus, rasa cepat puas terhadap pencapaian yang telah diraih, serta ketiadaan studi banding yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai sejauh mana upaya pemberdayaan masjid telah berhasil diimplementasikan.[90]

---

[87] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 51.

[88] Ibid., 51–52.

[89] Aswan Haidi, "Peran Masjid Dalam Dakwah Menurut Pandangan Mohammad Natsir," *Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat* 2, no. 02 (2019): 45–58.

[90] Sri Hartono, Titi Rapini, dan Rizki Listyono Putro, "Evaluasi Pengelolaan Dan Problematika Laporan Keuangan Masjid Di Kabupaten Ponorogo Berdasarkan Psak 45," *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 5, no. 2 (November 2020).

f. Potensi Masjid

Dengan meningkatnya kesadaran akan potensi ekonomi yang dimiliki masjid, sejumlah masjid di Indonesia mulai memberikan perhatian serius terhadap upaya pemberdayaan ekonomi umat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Beberapa masjid telah menjadi contoh nyata dalam menjalankan peran ini, seperti Masjid Jogokariyan di Yogyakarta, Masjid Nurul Jannah di Gresik, dan Masjid Wahidiyah di Kediri. Ketiganya terbukti sukses dalam membantu masyarakat kurang mampu, antara lain melalui pendirian Koperasi Syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT), serta pemberian pelatihan dan dukungan kewirausahaan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah.[91]

Agar misi ekonomi masjid dapat terlaksana dengan baik, diperlukan dukungan dari manajemen masjid yang profesional. Tanpa adanya profesionalisme dalam pengelolaan, berbagai upaya pemberdayaan ekonomi umat akan sulit mencapai hasil yang optima.[92] Untuk memaksimalkan peran ekonomi masjid, diperlukan kerja sama yang erat dengan lembaga keuangan syariah. Melalui kemitraan ini, masjid dapat meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola lembaga ekonomi yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, sekaligus memperkuat upaya meningkatkan kesejahteraan jamaah. Kemitraan semacam ini sangat strategis, mengingat masjid memiliki potensi besar sebagai unit bisnis keumatan yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana, mirip dengan peran yang dijalankan oleh bank syariah.[93]

2. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan berangkat dari pemahaman bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki potensi dan kekuatan yang dapat dikembangkan, namun sering kali terhambat oleh keterbatasan akses, pengetahuan, maupun kesempatan. Oleh karena itu, pemberdayaan dipandang sebagai proses untuk mengaktifkan, mengembangkan, dan memperkuat potensi tersebut sehingga masyarakat mampu

---

[91] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 54.

[92] Muhammad Munir, *Manajemen dakwah* (Prenada Media, 2021), 19.

[93] Muhazzab Alief Faizal dkk., "Peran Masjid Sebagai Tempat Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 6, no. 1 (2023): 123–34.

mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar. Dalam kerangka ekonomi Islam, konsep pemberdayaan menekankan pada pemanfaatan instrumen-instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai modal sosial dan finansial untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Masjid ditempatkan sebagai pusat kegiatan yang tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai pusat ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dengan demikian, pemberdayaan berbasis masjid berarti mengoptimalkan fungsi masjid agar jamaah bisa memperoleh manfaat yang lebih luas.[94]

Menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses partisipatif. Artinya, masyarakat bukan hanya objek yang menerima bantuan, tetapi menjadi subjek yang aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan. Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari identifikasi masalah hingga pengelolaan hasil. Selain itu, pemberdayaan dipahami sebagai proses berkelanjutan yang tidak berhenti pada satu kegiatan, melainkan terus berkembang sesuai kebutuhan dan tantangan zaman. Dengan menempatkan masjid sebagai basis pemberdayaan, konsep ini menghubungkan aspek spiritual dengan aspek praktis kehidupan sehari-hari, sehingga program pemberdayaan tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan nilai-nilai keislaman dalam masyarakat.[95]

3. Macam-Macam Program Ekonomi pada Masjid

Masjid memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi jamaah. Bentuk program pemberdayaan ekonomi yang dapat dijalankan masjid umumnya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya sosial umat dan pengembangan usaha produktif. Program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan, tetapi juga sebagai media penguatan ukhuwah serta kemandirian umat. Salah satu bentuk program yang paling utama adalah pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dana ini tidak

[94] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 77.

[95] Ibid., 72.

hanya digunakan untuk konsumsi langsung, tetapi juga diarahkan pada kegiatan produktif seperti modal usaha kecil, bantuan pendidikan, dan pengembangan usaha mikro jamaah. Dengan demikian, fungsi masjid tidak berhenti pada aspek ibadah ritual, melainkan hadir secara nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan di sekitarnya.[96]

Selain itu, masjid dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi masjid atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Lembaga ini berperan memberikan layanan simpan pinjam, pembiayaan usaha mikro, hingga mendukung kegiatan wirausaha jamaah. Dengan sistem berbasis syariah, keberadaan lembaga tersebut menjaga prinsip keadilan sekaligus memperkuat rasa saling percaya antaranggota jamaah. Bentuk program lainnya adalah unit usaha produktif yang dikembangkan oleh masjid. Unit usaha ini bisa berupa toko serba guna, pertanian, peternakan, hingga jasa penyewaan fasilitas masjid. Pemanfaatan aset wakaf produktif, seperti tanah dan bangunan, menjadi salah satu model pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan manajemen modern dan transparan, unit usaha masjid dapat menjadi sumber pendapatan tetap yang menopang kegiatan ibadah sekaligus kegiatan sosial.[97]

Tidak kalah penting, masjid juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi jamaah. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, manajemen usaha, literasi fiqh muamalah, serta pendampingan dalam mengembangkan usaha kecil. Dengan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, jamaah diharapkan mampu mandiri dan lebih berdaya dalam bidang ekonomi. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa bentuk program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan berkelanjutan. Masjid berfungsi sebagai pusat pengelolaan dana umat, penyedia layanan keuangan syariah, pengelola unit usaha produktif, serta fasilitator pendidikan dan pelatihan. Dengan kombinasi program tersebut, masjid mampu menjadi pilar penting dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan umat.[98]

---

[96] Ibid., 29–30.
[97] Ibid., 88.
[98] Ibid., 68.

4. Kendala dan Tantangan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid

a. Keterbatasan Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid adalah keterbatasan kapasitas manajemen dan sumber daya manusia (SDM). Banyak pengurus masjid lebih berfokus pada aktivitas ibadah mahdhah seperti shalat, pengajian, atau perayaan hari besar Islam, sementara kemampuan mengelola program ekonomi masih terbatas. Akibatnya, program yang dirancang sering tidak berkesinambungan dan tidak memiliki sistem pengelolaan profesional. Hal ini berimplikasi pada lemahnya daya saing unit usaha yang dibangun melalui masjid.[99]

b. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Jamaah

Tantangan berikutnya adalah masih rendahnya kesadaran jamaah untuk terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi. Sebagian besar jamaah memandang masjid hanya sebatas rumah ibadah, bukan sebagai pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi. Akibatnya, partisipasi jamaah dalam mendukung kegiatan ekonomi sangat minim, baik dalam bentuk modal, tenaga, maupun ide. Stigma bahwa aktivitas ekonomi tidak pantas dilakukan di lingkungan masjid juga menjadi penghalang bagi berkembangnya program pemberdayaan.[100]

c. Keterbatasan Dana dan Akses Permodalan

Banyak masjid menghadapi keterbatasan dana untuk membiayai program pemberdayaan ekonomi. Dana masjid sering kali hanya terkumpul melalui infak, zakat, atau sedekah jamaah, dan sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan fisik masjid. Sementara itu, dana yang dialokasikan untuk kegiatan produktif masih sangat minim. Kesulitan akses terhadap permodalan eksternal juga menjadi kendala serius, sehingga program pemberdayaan sering terhenti di tengah jalan karena keterbatasan biaya operasional.[101]

---

[99] Ibid., 5.
[100] Ibid., 13.
[101] Ibid., 7–8.

d. Lemahnya Kelembagaan Ekonomi Masjid

Program pemberdayaan ekonomi membutuhkan kelembagaan yang kuat agar dapat berjalan dengan terarah. Namun, dalam praktiknya, banyak masjid belum memiliki unit usaha atau lembaga keuangan mikro yang terstruktur, seperti koperasi syariah atau BMT berbasis masjid. Akibatnya, program pemberdayaan cenderung sporadis, tidak terarah, dan sulit dievaluasi keberhasilannya. Lemahnya kelembagaan ini juga berdampak pada kurangnya legitimasi dan kepercayaan jamaah untuk ikut serta.[102]

e. Minimnya Jaringan dan Sinergi Eksternal

Tantangan lain adalah kurangnya kemitraan antara masjid dengan lembaga eksternal, baik pemerintah, lembaga keuangan syariah, maupun organisasi masyarakat sipil. Padahal, kerja sama strategis sangat diperlukan untuk memperkuat dukungan modal, pelatihan manajemen, hingga akses pasar. Tanpa sinergi eksternal, program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid akan sulit berkembang secara optimal karena hanya mengandalkan sumber daya internal yang terbatas.[103]

f. Hambatan Regulasi dan Tata Kelola

Selain faktor internal, kendala eksternal juga muncul dari aspek regulasi dan tata kelola. Hingga kini belum terdapat regulasi khusus yang secara detail mengatur model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, sehingga pelaksanaannya sering berjalan tanpa standar yang jelas. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam kebijakan, lemahnya pengawasan, dan kurangnya dukungan formal dari pihak berwenang. Akibatnya, masjid yang ingin mengembangkan unit usaha sering kali kesulitan dari sisi legalitas maupun perlindungan hukum.[104]

---

[102] Ibid., 9.
[103] Ibid., 10.
[104] Ibid., 6.

5. Dampak Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid dan Kontribusinya bagi Kesejahteraan Masyarakat

a. Dampak Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi yang dikelola masjid, seperti pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF), koperasi syariah, dan usaha produktif, berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Masjid tidak hanya menyalurkan bantuan konsumtif, tetapi juga mengarahkan dana sosial umat untuk kegiatan produktif, sehingga jamaah dapat membangun kemandirian ekonomi. Dengan adanya akses permodalan dan pelatihan usaha, masyarakat terbantu dalam mengembangkan usaha mikro maupun sektor produktif lainnya.[105]

b. Dampak Sosial

Dari sisi sosial, pemberdayaan berbasis masjid memperkuat solidaritas jamaah. Penyaluran zakat, infak, dan wakaf tidak hanya mengurangi kesenjangan, tetapi juga menumbuhkan rasa kepedulian dan kebersamaan di antara jamaah. Masjid menjadi pusat interaksi sosial yang menampung kegiatan pemberdayaan seperti pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Dengan demikian, masjid menghadirkan fungsi sosial yang konkret, bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual.[106]

c. Dampak Spiritual

Kesejahteraan dalam Islam tidak semata-mata diukur dari aspek material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual. Pemberdayaan ekonomi melalui masjid mengajarkan jamaah bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Dengan adanya program ini, masyarakat semakin dekat dengan masjid, serta menyadari bahwa keberhasilan ekonomi harus diimbangi dengan penguatan iman dan akhlak.[107]

---

[105] Ibid., 85–87.
[106] Ibid., 102–4.
[107] Ibid., 115–17.

C. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dapat diartikan secara luas. Prabawa mengartikan kesejahteraan sebagai kemakmuran, kebahagiaan dan kualitas hidup manusia pada tingkatan individu, kelompok, atau masyarakat. Kondisi sejahtera dapat dimanifestasikan dalam kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang merupakan kebutuhan penting dalam keluarga.[108]

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya.Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mendapatkan kesejahteraan itu memang tidak gampang. Tetapi bukan berarti mustahil didapatkan. Tak perlu juga melakukan hal-hal yang haram, sebab yang halal masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencapai kesejahteraan. Kita hanya perlu memperhatikan indikator kesejahteraan itu.[109]

Adapun indikator tersebut di antaranya jumlah dan pemerantaan pendapatan, pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

1. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan.

Pembahasan mengenai pendapatan dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan adanya keterkaitan erat antara jumlah serta pemerataan pendapatan dengan ketersediaan lapangan kerja, produktivitas tenaga kerja, modal usaha, dan akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya. Peningkatan produktivitas dan pemanfaatan faktor produksi terbukti mampu memperbesar pendapatan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat. Selain itu, inovasi ekonomi, termasuk pengelolaan sumber daya alternatif, dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menambah penghasilan.[110]

---

[108] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal* (Muhammadiyah University Press, t.t.), 7.

[109] Ibid., 9–10.

[110] Ibid., 10.

Di samping aspek ekonomi, implementasi kebijakan pembangunan juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi ini mencakup keterlibatan emosional, kontribusi nyata terhadap tujuan bersama, dan tanggung jawab dalam memanfaatkan hasil pembangunan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah tercapai apabila terdapat sinergi antara peningkatan faktor ekonomi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang aspiratif serta partisipatif.[111]

Menurut Cohen & Uphoff, bentuk partisipasi masyarakat dapat dibagi ke dalam empat aspek utama:[112]

1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan,
2) Partisipasi dalam pelaksanaan,
3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, dan
4) Partisipasi dalam evaluasi.

Keterlibatan masyarakat dalam keempat aspek tersebut mencakup dimensi emosional, kontribusi terhadap kepentingan bersama, serta tanggung jawab sosial. Dengan adanya partisipasi yang aktif, pembangunan desa tidak hanya bersifat top-down, melainkan juga aspiratif dan partisipatif. Hal ini memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya kesejahteraan yang merata.

2. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangka

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Akses pendidikan yang mudah dan terjangkau memungkinkan setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas diri. Pendidikan yang tinggi tidak hanya memperluas peluang kerja, tetapi juga menentukan kualitas dan tingkat imbalan finansial yang diterima, yang pada

[111] Ibid., 11.
[112] Ibid., 13.

akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan.[113] Lebih jauh, pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang karena memberikan manfaat berkelanjutan setelah seseorang menyelesaikan proses belajar dan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Pendidikan yang merata juga mencerminkan adanya keadilan sosial, sebab setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun domisili, memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan pendidikan[114]

Selain itu, pendidikan berkontribusi dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu bangsa. Dengan meningkatnya kualitas tenaga kerja, kesempatan untuk mengakses pekerjaan yang lebih berkualitas semakin terbuka, dan hal itu berimplikasi langsung pada kesejahteraan individu maupun masyarakat secara kolektif. Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai kunci utama pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.[115]

3. Kualiatas Kesehatan Yang Semakin Maningkat Dan Merata

Kesehatan merupakan faktor fundamental dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, karena berhubungan langsung dengan kemampuan memperoleh pendidikan dan pendapatan. Pemerintah memiliki kewajiban utama untuk menjamin ketersediaan layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.[116] Melalui sistem jaminan kesehatan nasional, negara diharapkan mampu memberikan kepastian akses pelayanan yang adil dan berkesinambungan. Tujuan utama dari sistem ini adalah memastikan masyarakat dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Namun demikian, tantangan yang muncul adalah ketidakmerataan fasilitas dan tenaga kesehatan di berbagai wilayah, khususnya daerah terpencil, sehingga memunculkan ketidakadilan akses layanan. Oleh karena itu, penyelenggaraan jaminan kesehatan harus terus ditingkatkan baik dari aspek pemerataan, mutu pelayanan, maupun keterjangkauan, agar benar-benar

[113] Ibid., 14–15.
[114] Ibid., 15.
[115] Ibid., 17.
[116] Ibid., 19.

dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.[117]

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi ideal yang mencakup kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup baik pada tingkat individu maupun kolektif. Peningkatan kesejahteraan tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga merupakan kewajiban negara untuk mewujudkannya. Tiga indikator utama kesejahteraan adalah pemerataan pendapatan, akses pendidikan yang mudah dijangkau, serta kualitas kesehatan yang merata. Ketiga aspek ini saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kesejahteraan dimaknai sebagai pencapaian kebahagiaan manusia secara menyeluruh, yang mencakup aspek material, spiritual, dan moral. Konsep kesejahteraan ini tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai ekonomi semata, tetapi juga dibangun di atas nilai-nilai ruhani dan etika. Pemahaman tentang kesejahteraan atau *falah* merujuk pada tujuan utama syariat Islam, yang tercermin dalam lima prinsip maqashid syari'ah: perlindungan terhadap agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*).[118] Lebih lanjut, tujuan dari ekonomi Islam mencakup:[119]

a. tercapainya kesejahteraan ekonomi bagi individu, masyarakat, dan negara.
b. terpenuhinya kebutuhan pokok manusia seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan, dalam sistem yang menjamin keadilan.
c. pemanfaatan sumber daya secara efisien, optimal, dan hemat serta menghindari pemborosan.
d. pemerataan distribusi kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan.
e. jaminan kebebasan individu.
f. persamaan hak dan kesempatan.
g. penerapan prinsip keadilan dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat.

---

[117] Ibid., 21–22.

[118] Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial: berwawasan iman dan takwa* (Amzah, 2022).

[119] Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, No. 2 (2021): 321–34.

Secara umum, kesejahteraan adalah kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat dapat hidup dengan layak, aman, dan sejahtera, ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman, serta adanya kesempatan untuk berkembang secara sosial dan ekonomi.[120] Selain itu juga di jelaskan dalam QS, Al- Anbiya: 107:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ١٠٧

Artinya:

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam

Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengamalan Islam yang baik dan benar.[121]

D. Kajian Literatur Teoretik

Buku *Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid* karya Dr. Syahidin (2003) menekankan masjid sebagai pusat kegiatan umat yang mencakup aspek spiritual, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Dengan manajemen profesional dan partisipatif, masjid diarahkan menjadi motor kemandirian umat serta wadah solidaritas sosial demi kesejahteraan masyarakat Muslim.[122] Buku *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat* karya Muhammad Yasir Yusuf dkk. (Ar-Raniry Press, 2021) membahas peran masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat sosial dan ekonomi umat. Isinya menekankan pentingnya literasi muamalah, manajemen masjid modern, serta pengembangan unit usaha dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk memberdayakan jamaah

[120] Ridwan M.Si S. Pd, *Tingkat Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalin Kerukunan Umat Beragama* (Cv. Azka Pustaka, 2021).

[121] "Surat Al-Anbiya' Ayat 107: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 14 Mei 2025, https://quran.nu.or.id/al-anbiya/107.

[122] Syahidin, *Pemberdayaan umat berbasis masjid* (Alfabeta, 2003).

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[123] Buku *Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid* karya Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, M.A. (2021) menyoroti peran masjid sebagai pusat ibadah sekaligus pemberdayaan sosial, ekonomi, dan budaya. Terinspirasi dari fungsi masjid masa Rasulullah, penulis mendorong optimalisasi ratusan ribu masjid Indonesia sebagai motor kesejahteraan modern. [124]

Buku *Panduan Memakmurkan Masjid Berkesan bagi Umat* karya Ali Iskandar (2023) membahas langkah-langkah praktis dalam menjadikan masjid lebih hidup, bukan sekadar tempat ibadah ritual. Diterbitkan oleh CV Jejak, buku ini menekankan peran masjid sebagai pusat spiritual, sosial, dan ekonomi yang bermanfaat bagi umat.[125] Buku *Manajemen Masjid: Panduan dalam Membangun dan Memakmurkan Masjid* karya Abdul Khakim, diterbitkan oleh Basya Media Utama pada tahun 2022, menghadirkan pemahaman komprehensif mengenai tata kelola masjid yang profesional dan berdaya guna. Isinya menekankan pentingnya peran manajemen modern dalam merencanakan, mengorganisasi, serta mengembangkan fungsi masjid, sehingga masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan umat secara berkelanjutan.[126]

Alasan pemilihan buku *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat* karya Muhammad Yasir Yusuf dkk. (Ar-Raniry Press, 2021) adalah karena buku ini memberikan kajian yang lebih spesifik mengenai dimensi ekonomi masjid dibandingkan dengan literatur lainnya. Buku karya Syahidin (2003), Nasaruddin Umar (2021), Ali Iskandar (2023), maupun Abdul Khakim (2022) pada dasarnya menekankan peran masjid sebagai pusat ibadah, sosial, pendidikan, dan budaya, dengan fokus pada fungsi spiritual dan manajemen kelembagaan. Namun, buku karya Yasir Yusuf dkk. secara komprehensif membahas aspek literasi muamalah, manajemen masjid modern, pengelolaan zakat,

---

[123] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*.

[124] Prof K. H. Nasaruddin Umar, *Pemberdayaan umat berbasis masjid* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2022).

[125] Ali Iskandar, *Masjid Tematik : Panduan Memakmurkan Masjid Berkesan Bagi Umat* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2024).

[126] Abdul Khakim dan Siti Yumnah, *Manajemen Masjid (Panduan dalam Membangun dan Memakmurkan Masjid)* (Basya Media Utama, 2024).

infak, sedekah, wakaf, serta pengembangan unit usaha berbasis masjid yang jarang disentuh secara mendalam oleh karya lainnya. Dengan demikian, buku ini menjadi rujukan penting karena tidak hanya menempatkan masjid sebagai pusat spiritual dan sosial, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi jamaah. Relevansinya sangat tinggi terhadap penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid, sebab menyajikan kerangka konseptual sekaligus arahan aplikatif yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer.

BAB III
BENTUK PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI OLEH MASJID BAITUL MUKHLISIN DAN MASJID NU PONOROGO

Dalam bab ini, akan membahas fokus penelitian yang pertama mengenai, bagaimana bentuk program pemeberdayaan ekonomi oleh Masjid Baitul Mukhlisisn dan Masjid NU Ponorogo.

A. Paparan data Umum

1. Profil Masjid Baitul Mukhlisin

Masjid Baitul Mukhlisin, yang berlokasi di Jalan Lawu No. 28, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Kota, Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu masjid berpengaruh di wilayah tersebut, terutama di bawah naungan Ranting Muhammadiyah Nologaten. Masjid ini berdiri sejak tahun 1969 di atas lahan seluas kurang lebih 800 meter persegi. Seiring dengan pertumbuhan jumlah jamaah, bangunan masjid telah mengalami beberapa tahap renovasi dan kini memiliki dua lantai yang mampu menampung lebih dari seribu jamaah. Secara arsitektural, masjid ini menggabungkan unsur tradisional dan modern, dilengkapi dengan fasilitas seperti ruang multimedia, pendingin ruangan, CCTV, serta karpet Turki yang menambah kenyamanan beribadah.[127]

Dalam perjalanannya, Masjid Baitul Mukhlisin bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga berkembang sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Visi masjid ini adalah mewujudkan masyarakat Islam yang berkemajuan, dengan misi memperkuat peran masjid sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pemberdayaan umat. Melalui semangat tersebut, berbagai kegiatan

[127] "Masjid Baitul Mukhlisin - Nologaten Ponorogo," diakses 2 November 2025, https://masjidbaitulmukhlisin.com

keagamaan dan sosial rutin dilaksanakan, antara lain kajian tafsir, pengajian umum, serta kegiatan remaja masjid yang produktif.[128]

Salah satu program unggulan yang menarik perhatian publik adalah "Subuh Ceria", yakni kegiatan yang menggabungkan ibadah shalat subuh berjamaah dengan aktivitas sosial berupa sarapan bersama dan pemberian uang saku bagi anak-anak sekolah yang hadir. Program ini menjadi bentuk inovasi dakwah dan pendidikan karakter yang menginspirasi banyak pihak.[129]Selain itu, setiap bulan Ramadan, masjid ini juga aktif menyediakan hidangan buka puasa gratis bagi masyarakat sekitar tanpa memandang latar belakang sosial, sebagai wujud nyata semangat ukhuwah Islamiyah dan kepedulian sosial.[130]

Dalam bidang pemberdayaan ekonomi, Masjid Baitul Mukhlisin turut menginisiasi beberapa unit usaha seperti SuryaMart dan RestoMu, yang beroperasi dengan prinsip ekonomi syariah. Keuntungan dari unit usaha tersebut dialokasikan untuk mendukung kegiatan masjid dan membantu masyarakat sekitar. Konsep ini menunjukkan bagaimana masjid dapat berfungsi sebagai pusat penggerak ekonomi umat, bukan hanya sebagai tempat ritual keagamaan. Selain itu, kegiatan sosial seperti layanan kesehatan gratis, santunan anak yatim, dan program kemanusiaan lainnya menjadi bagian integral dari kiprah masjid dalam meningkatkan kesejahteraan jamaah.[131]

Peran Masjid Baitul Mukhlisin sebagai pusat aktivitas umat semakin kuat karena dukungan masyarakat dan manajemen yang profesional. Masjid ini juga aktif di ranah digital melalui situs resmi dan media sosial untuk memperluas jangkauan dakwah serta transparansi pengelolaan donasi. Dengan demikian, masjid

---

[128] "Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo: Dari Ranting Untuk Ummat," Suara Muhammadiyah, 29 Oktober 2025, https://www.suaramuhammadiyah.id/read/masjid-baitul-mukhlisin-ponorogo-dari-ranting-untuk-ummat.

[129] Redaksi Media Ponorogo, *Subuh Ceria: Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo Tawarkan Sarapan Dan Uang Saku | Berita Ponorogo*, 6 November 2024, https://mediaponorogo.com/2024/11/06/subuh-ceria-masjid-baitul-mukhlisin-ponorogo-tawarkan-sarapan-dan-uang-saku/.

[130] "Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo: Dari Ranting Untuk Ummat," Suara Muhammadiyah, 29 Oktober 2025, https://www.suaramuhammadiyah.id/read/masjid-baitul-mukhlisin-ponorogo-dari-ranting-untuk-ummat.

[131] Ibid.

ini menjadi contoh nyata transformasi fungsi masjid di era modern dari sekadar tempat ibadah menjadi pusat spiritual, sosial, dan ekonomi umat Islam.[132]

2. Profil Masjid NU Ponorogo

Masjid NU Ponorogo merupakan salah satu masjid representatif di Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Sultan Agung No. 81, Bangunsari Nologaten, Ponorogo, Jawa Timur. Masjid ini berada di bawah naungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo dan dikelola secara aktif oleh takmir serta marbot yang berkomitmen menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi umat.

Sejak awal berdirinya, Masjid NU Ponorogo dikenal sebagai pusat kegiatan keagamaan yang rutin menggelar berbagai pengajian dan kegiatan keummatan. Salah satu kegiatan unggulan yang paling dikenal masyarakat adalah Pengajian Ahad Pon, yaitu pengajian rutin setiap hari Ahad Pon dalam kalender Jawa yang dihadiri ribuan jamaah dari berbagai wilayah. Kegiatan ini bahkan sering dihadiri tokoh daerah, termasuk Bupati Ponorogo, sebagai wujud dukungan terhadap penguatan dakwah dan ukhuwah Islamiyah di masyarakat.[133]

Dalam bidang sosial dan ekonomi, Masjid NU Ponorogo berhasil menunjukkan kinerja luar biasa melalui program-program pemberdayaan jamaah. Keberhasilan tersebut diakui secara resmi ketika masjid ini meraih penghargaan Juara 2 kategori Pemberdayaan Ekonomi Masjid tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dalam ajang Masjid Award yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Penghargaan ini mencerminkan peran penting masjid dalam mengembangkan potensi ekonomi umat, termasuk pengelolaan kegiatan produktif berbasis jamaah dan penguatan kelembagaan masjid.[134]

---

[132] "Masjid Baitul Mukhlisin - Nologaten Ponorogo," diakses 2 November 2025, https://masjidbaitulmukhlisin.com

[133] Muh Shulthon Rachmandhani, "OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KECAMATAN PONOROGO," *Muslim Heritage* 7, no. 2 (Desember 2022): 459–86, https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i2.3887.

[134] Jihan Ranna Shafira, "Masjid NU Ponorogo Sediakan 300 Porsi untuk Bukber Gratis Tiap Hari," Ponorogo News, diakses 2 November 2025, https://ponorogo.pikiran-rakyat.com/ngulik-ponorogo/pr-3137893803/masjid-nu-ponorogo-sediakan-300-porsi-untuk-bukber-gratis-tiap-hari.

Secara kelembagaan, Masjid NU Ponorogo memiliki visi untuk menjadi pusat ibadah, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Misinya meliputi penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang rutin dan edukatif, peningkatan kesejahteraan jamaah melalui kegiatan ekonomi syariah, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat, pemerintah, dan lembaga keagamaan lainnya. Pengelolaan masjid dilakukan secara profesional dan transparan oleh takmir di bawah bimbingan PCNU Ponorogo, dengan fokus pada pelayanan, kebersihan, serta administrasi yang tertib.

Kini, Masjid NU Ponorogo terus bertransformasi menjadi model masjid pemberdayaan di Ponorogo. Melalui kombinasi antara kegiatan spiritual, sosial, dan ekonomi, masjid ini berhasil menegaskan peran strategisnya sebagai pusat peradaban umat di era modern. Aktivitasnya yang konsisten, keaktifannya di media sosial, serta keberhasilannya meraih prestasi tingkat provinsi menunjukkan bahwa masjid ini bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga simbol kemajuan dan kemandirian umat.[135]

B. Data Bentuk Program Pemberdayaan Ekonomi Oleh Masjid Baitul Mukhlisin Dan Masjid Nu Ponorogo.

1. Masjid Baitul Mukhlisin

a. Program Usaha Berkelanjutan Berbasis Masjid (BUMM)

Program Usaha Berkelanjutan Berbasis Masjid (BUMM) merupakan bentuk transformasi dari kegiatan ekonomi yang semula bersifat insidental menjadi usaha yang terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Pada tahap awal, kegiatan bazar murah diselenggarakan sebagai respons atas kondisi ekonomi masyarakat, khususnya ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok. Bazar tersebut tidak hanya membantu meringankan beban jamaah, tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap peran ekonomi masjid. Melihat tingginya antusiasme serta dampak sosial yang konsisten, pengurus masjid kemudian mengevaluasi peluang untuk mengembangkan kegiatan tersebut agar tidak berhenti

[135] Administrator, "Arah Kiblat Langsung Ditentukan Hadratussyekh Hasyim Asyari - Radar Madiun," Arah Kiblat Langsung Ditentukan Hadratussyekh Hasyim Asyari - Radar Madiun, diakses 2 November 2025, https://radarmadiun.jawapos.com/ponorogo/801198525/arah-kiblat-langsung-ditentukan-hadratussyekh-hasyim-asyari.

pada pola musiman. Dari sinilah muncul gagasan untuk membentuk unit usaha permanen yang dikelola secara profesional, memiliki sistem administrasi yang lebih tertata, serta mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masjid dan jamaah. Transformasi ini menjadi langkah strategis agar aktivitas ekonomi masjid tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga produktif dan mandiri secara kelembagaan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suwardi selaku ketua takmir:

> *"Dari kegiatan bazar tersebut, muncul ide untuk membentuk usaha yang berkelanjutan. Dulu sifatnya bazar, tapi kemudian kita kembangkan jadi toko. Namanya Masjid Sejahtera, sekarang menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Masjid (BUMM). Semua hasil usaha 100% untuk masjid, tidak ada yang masuk ke pribadi.*"[136]

Perkembangan BUMM tidak berhenti pada pendirian Toko Masjid Sejahtera sebagai unit usaha pertama, tetapi terus mengalami ekspansi ke berbagai sektor yang lebih luas dan profesional. Keberhasilan transformasi dari bazar murah menjadi toko permanen mendorong pengurus masjid untuk mengembangkan model usaha yang lebih variatif, seperti Suryamart dan restoran. Langkah ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program tidak hanya dimaknai sebagai kelangsungan operasional, tetapi juga sebagai perluasan manfaat ekonomi bagi jamaah dan institusi masjid. Dalam proses pengembangannya, masjid tetap menjaga prinsip dasar pemberdayaan, yakni menjadikan usaha sebagai instrumen kemaslahatan, bukan sekadar orientasi profit. Namun demikian, untuk memastikan profesionalitas dan daya saing, pengelolaan unit usaha dilakukan melalui pola kemitraan dengan pelaku bisnis yang berpengalaman. Model ini memungkinkan adanya pembagian peran yang jelas antara manajemen usaha dan otoritas takmir, sehingga usaha tetap berjalan secara akuntabel sekaligus berorientasi sosial. Bapak Khairul Anwar selaku penanggung jawab masjid menjelaskan:

> "*Kemarin yang di Banjarmasin juara 1 karena ada tambahan Suryamart dan resto itu amal usahanya masjid tapi manajemennya dengan orang yang punya*

[136] Suwardi, *Wawancara*, Ketua Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 18 April 2025

bisnis, keuntungan berapa persen untuk masjid. Seperti karyawan Suryamart itu yang menggaji dari Suryamart, itu yang megang langsung pak ketua takmir."[137]

Perkembangan unit usaha tersebut dipandang sebagai langkah progresif yang menunjukkan keberhasilan masjid dalam menjaga keberlanjutan program ekonominya. Perubahan dari bazar yang bersifat sementara menjadi unit usaha permanen dinilai sebagai bukti adanya perencanaan jangka panjang dan komitmen pengelola dalam membangun kemandirian ekonomi masjid. Jamaah melihat bahwa transformasi ini bukan sekadar perubahan bentuk kegiatan, melainkan peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan kelembagaan. Kehadiran toko yang dikelola secara tetap memungkinkan pelayanan kepada masyarakat berlangsung lebih konsisten, tidak terbatas pada momen tertentu saja. Selain itu, keberlanjutan usaha ini juga memperluas manfaat ekonomi, baik melalui penyediaan kebutuhan pokok yang terjangkau maupun melalui dukungan terhadap berbagai program sosial dan keagamaan masjid. Bagi jamaah, langkah ini mempertegas peran masjid sebagai pusat pemberdayaan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan umat. Bapak Amam selaku ketua RT sekaligus masyarakat sekitar menyampaikan apresiasinya:

"Saya melihat perkembangan masjid ini memang luar biasa. Dulu hanya ada bazar, sekarang sudah ada toko Masjid Sejahtera dan Suryamart. Menurut saya itu bagus sekali, karena hasilnya kembali lagi untuk kegiatan masjid dan membantu masyarakat. Jadi kita sebagai jamaah merasa ikut memiliki dan ikut merasakan manfaatnya."[138]

Lebih jauh, keberlanjutan bazar yang kemudian berkembang menjadi unit usaha permanen melalui BUMM tidak hanya berdampak pada kelembagaan masjid, tetapi juga memberikan efek ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Transformasi dari kegiatan bazar insidental menjadi toko dan unit usaha seperti Suryamart serta restoran masjid menunjukkan adanya pergeseran pola pengelolaan ekonomi yang semakin profesional dan terencana. Keberadaan unit usaha ini menciptakan perputaran ekonomi baru di lingkungan sekitar masjid, baik melalui

[137] Khairul Anwar, *Wawancara*, Penanggung Jawab Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 28 Oktober 2025

[138] Amam, *Wawancara*, Ketua RT Sekaligus Warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 1 Desember 2025

penyerapan tenaga kerja, kemitraan dengan pemasok lokal, maupun meningkatnya arus konsumen yang datang. Dengan sistem yang lebih stabil dibandingkan bazar musiman, usaha permanen ini mampu memberikan kontribusi yang berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Dampak tersebut turut dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kecil yang berinteraksi dengan ekosistem ekonomi masjid. Bapak Husain selaku pedagang sekaligus warga sekitar masjid, mengungkapkan:

> *"Sebagai pedagang kecil, saya merasa terbantu dengan adanya usaha masjid seperti Suryamart dan resto itu. Memang dikelola secara profesional, tapi tetap ada unsur sosialnya. Keuntungannya sebagian untuk masjid, dan suasana ekonomi di sekitar sini jadi lebih hidup. Masjid sekarang bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan ekonomi warga."*[139]

Program Usaha Berkelanjutan Berbasis Masjid (BUMM) merepresentasikan transformasi strategis dari kegiatan bazar murah yang bersifat insidental menuju unit usaha permanen yang terstruktur, profesional, dan berorientasi jangka panjang. Keberlanjutan ini lahir dari respons atas kebutuhan ekonomi jamaah, yang kemudian berkembang menjadi model kemandirian ekonomi masjid melalui pendirian Toko Masjid Sejahtera, Suryamart, dan restoran. Pengelolaan dilakukan secara profesional melalui pola kemitraan, namun tetap menjaga prinsip bahwa keuntungan usaha sepenuhnya kembali untuk kemaslahatan masjid dan masyarakat. Ekspansi unit usaha menunjukkan adanya perencanaan kelembagaan yang matang serta komitmen terhadap tata kelola yang akuntabel. Dampaknya tidak hanya memperkuat institusi masjid, tetapi juga menghidupkan ekosistem ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan dukungan terhadap pedagang kecil. Dengan demikian, BUMM menegaskan peran masjid sebagai pusat ibadah sekaligus pusat pemberdayaan ekonomi umat yang adaptif, produktif, dan berkelanjutan.

---

[139] Husain, *Wawancara*, Pedagang Sekaligus warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 14 Novembar 2025

b. Program Usaha Air Minum Isi Ulang (Airku)

Program Usaha Air Minum Isi Ulang "Airku" merupakan salah satu bentuk diversifikasi unit usaha produktif yang dikembangkan masjid dalam kerangka Badan Usaha Milik Masjid (BUMM). Kehadiran usaha ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat terhadap air minum layak konsumsi dengan harga yang terjangkau, sekaligus sebagai peluang usaha yang memiliki prospek keberlanjutan tinggi. Berbeda dengan bazar yang bersifat musiman, usaha air minum isi ulang dijalankan secara rutin dengan sistem operasional yang lebih stabil dan terstandar. Masjid melihat bahwa kebutuhan air minum merupakan kebutuhan pokok harian, sehingga pengelolaannya berpotensi memberikan manfaat ekonomi jangka panjang sekaligus pelayanan sosial yang nyata. Selain memperkuat kemandirian finansial masjid, program ini juga dirancang untuk membantu jamaah mengakses produk berkualitas tanpa harus terbebani harga pasar yang relatif lebih tinggi. Dengan demikian, usaha "Airku" tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga wujud kepedulian sosial masjid terhadap kesejahteraan warga sekitar. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suwardi selaku ketua takmir:

> *"Selain toko, masjid juga mendirikan usaha air minum isi ulang 'Airku' dengan dua jenis produk. Produk ini dijual dengan harga terjangkau untuk jamaah, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari."*[140]

Keberadaan usaha air minum isi ulang "Airku" tidak hanya dipandang sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga sebagai simbol penguatan ekonomi berbasis masjid yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dalam praktiknya, usaha ini mampu menjawab dua aspek sekaligus, yakni aspek ekonomis dan aspek sosial-religius. Dari sisi harga, produk "Airku" menawarkan tarif yang relatif lebih terjangkau dibandingkan beberapa penyedia lain di sekitar wilayah tersebut, sehingga membantu meringankan pengeluaran rutin warga. Sementara itu, dari sisi sosial, masyarakat menilai bahwa setiap transaksi yang dilakukan turut berkontribusi pada keberlangsungan program dan kegiatan masjid. Rasa memiliki terhadap usaha ini tumbuh karena pengelolaannya

[140] Suwardi, *Wawancara*, Ketua Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 18 April 2025

transparan dan hasilnya kembali untuk kemaslahatan bersama. Kombinasi antara manfaat ekonomi dan nilai keberkahan inilah yang kemudian memperkuat kepercayaan serta loyalitas warga terhadap program usaha "Airku" sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Bapak Amam selaku ketua RT sekaligus warga sekitar menuturkan:

> *"Kami sering beli air minum isi ulang 'Airku' itu. Selain harganya murah, kami juga merasa lebih tenang karena ini usaha milik masjid. Jadi kalau beli di situ, rasanya seperti ikut mendukung kegiatan masjid juga. Lumayan membantu untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, terutama bagi warga sekitar sini."*[141]

Lebih lanjut, keberadaan usaha air minum isi ulang "Airku" menunjukkan bahwa pengembangan unit usaha masjid tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan finansial, tetapi juga kemudahan akses dan kenyamanan masyarakat. Lokasi usaha yang berada di lingkungan masjid menjadikannya mudah dijangkau oleh jamaah dan warga sekitar, sehingga distribusi produk dapat dilakukan secara efisien. Hal ini memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pelayanan umat yang responsif terhadap kebutuhan sehari-hari. Selain itu, harga yang relatif terjangkau dibandingkan dengan produk sejenis di pasaran menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terutama bagi keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Keberadaan "Airku" juga menciptakan rasa memiliki di kalangan jamaah, karena usaha tersebut dikelola atas nama masjid dan hasilnya dikembalikan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Dengan demikian, program ini tidak hanya memperluas kemandirian ekonomi masjid, tetapi juga mempererat hubungan sosial antara masjid dan masyarakat. Bapak Husain selaku pedagang sekaligus warga sekitar masjid menyampaikan:

> *"Menurut saya, adanya usaha air minum isi ulang 'Airku' ini sangat bermanfaat. Selain harganya lebih terjangkau, lokasinya juga dekat jadi tidak perlu jauh-jauh membeli. Kami sebagai warga merasa senang karena masjid tidak hanya mengurus kegiatan ibadah, tapi juga memikirkan kebutuhan sehari-*

---

[141] Amam, *Wawancara,* Ketua RT Sekaligus Warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 1 Desember 2025

hari masyarakat. Jadi ada rasa bangga juga karena usaha ini milik masjid dan hasilnya kembali untuk kepentingan bersama."[142]

Program Usaha Air Minum Isi Ulang "Airku" merupakan bentuk diversifikasi usaha masjid yang mengintegrasikan tujuan ekonomi dan sosial dalam satu model pemberdayaan. Berbeda dengan kegiatan bazar yang bersifat sementara, "Airku" dikelola secara rutin dan terstandar sehingga mampu memberikan kontribusi finansial yang lebih stabil bagi masjid. Kehadirannya menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan air minum layak konsumsi dengan harga terjangkau, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi kelembagaan masjid. Manfaat program ini tidak hanya terletak pada aspek ekonomis, tetapi juga pada nilai sosial dan religius yang menyertainya, karena setiap transaksi dipahami sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan masjid. Akses yang mudah, lokasi yang strategis, serta pengelolaan yang transparan menumbuhkan rasa memiliki dan loyalitas jamaah. Dengan demikian, "Airku" tidak sekadar unit usaha, melainkan representasi peran masjid sebagai pusat pelayanan umat yang adaptif, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

c. Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga (BankZiska / Sistem Keuangan Masjid)

Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga melalui BankZiska (Sistem Keuangan Masjid) merupakan salah satu inovasi strategis Masjid Baitul Mukhlisin dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi jamaah berbasis nilai-nilai syariah. Program ini hadir sebagai respons atas keterbatasan akses masyarakat kecil terhadap lembaga keuangan formal yang umumnya mensyaratkan agunan dan menerapkan sistem bunga. Melalui skema internal masjid, pembiayaan diberikan secara sederhana, transparan, dan berorientasi pada penguatan usaha mikro warga sekitar. Tujuan utamanya bukan semata-mata menyalurkan dana, tetapi membangun kemandirian ekonomi jamaah secara bertahap dan berkelanjutan. Sistem ini juga mengintegrasikan aspek pembinaan spiritual dengan kegiatan ekonomi, sehingga proses pengembalian pinjaman tidak terlepas dari nilai edukasi

[142] Husain, *Wawancara*, Pedagang Sekaligus warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 14 Novembar 2025

dan kebersamaan. Dengan pendekatan kekeluargaan dan tanpa tekanan komersial, BankZiska menjadi alternatif solusi keuangan yang lebih inklusif serta mencerminkan fungsi masjid sebagai pusat pelayanan umat yang holistik, mencakup dimensi ibadah sekaligus pemberdayaan ekonomi. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suwardi selaku ketua takmir:

> *"Masjid juga menyalurkan bantuan modal usaha kepada warga di sekitar lingkungan masjid. Dana itu digunakan untuk usaha kecil warga, dan tidak ada bunganya, tidak pakai agunan. Malah setiap bulan kami dikumpulkan untuk pengajian sambil nyicil pinjaman. Program ini dijalankan melalui BankZiska (Sistem Keuangan Masjid), sebuah lembaga mikro internal masjid yang memberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa sita, dan tanpa riba."*[143]

Lebih lanjut, keberadaan BankZiska tidak hanya dipahami sebagai program pembiayaan mikro semata, tetapi sebagai simbol konkret kepedulian masjid terhadap persoalan ekonomi warga. Di tengah keterbatasan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil, sistem keuangan masjid ini menghadirkan pendekatan yang lebih humanis, berbasis kepercayaan, dan nilai kebersamaan. Masyarakat merasakan bahwa masjid tidak berhenti pada tataran wacana pemberdayaan, melainkan benar-benar hadir melalui tindakan nyata yang langsung menyentuh kebutuhan mereka. Skema tanpa bunga dan tanpa agunan memberikan rasa aman sekaligus menghindarkan warga dari jeratan praktik pinjaman yang memberatkan. Selain itu, kedekatan relasi antara pengelola dan peminjam menciptakan suasana saling mendukung, bukan hubungan kreditur-debitur yang kaku. Legitimasinya tumbuh dari pengalaman langsung warga yang merasakan manfaat program tersebut dalam menopang usaha dan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Bapak Khairul Anwar selaku penangung jawab menegaskan:

> *"Sekarang yang dilihat dari masyarakat bukan apanya tapi langsung tindakannya begitu mas, livenya dengan masyarakat simpan pinjam pada masyarakat kan ada lagi disebut juga ya kayak Bank Siska itu. Program pemberdayaan ekonomi dari Masjid Baitul Mukhlisin sangat dirasakan*

[143] Suwardi, *Wawancara*, Ketua Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 18 April 2025

manfaatnya oleh warga, banyak warga yang terbantu lewat pinjaman tanpa bunga"[144]

Dari perspektif penerima manfaat, Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga melalui BankZiska tidak hanya dipandang sebagai bantuan modal usaha, tetapi juga sebagai sistem keuangan yang menghadirkan rasa aman dan keadilan. Berbeda dengan lembaga pembiayaan konvensional yang kerap membebani pelaku usaha kecil dengan bunga, denda, maupun ancaman penyitaan, skema yang diterapkan masjid lebih menekankan pada pendekatan kekeluargaan dan tanggung jawab bersama. Proses pengajuan yang sederhana serta persyaratan yang tidak memberatkan membuat warga kecil merasa lebih percaya diri untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, adanya pendampingan dan pertemuan rutin dalam suasana pengajian menciptakan ikatan sosial sekaligus kontrol moral yang mendorong kedisiplinan dalam pengembalian pinjaman. Model ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis masjid tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga membangun rasa saling percaya dan solidaritas antarjamaah sebagai fondasi keberlanjutan program. Bapak Husain selaku pedagang sekaligus warga sekitar mengungkapkan:

"Program simpan pinjam dari masjid itu sangat membantu warga kecil seperti kami. Kalau butuh tambahan modal, tidak perlu takut dengan bunga atau denda. Pengurusnya juga terbuka dan tidak mempersulit. Jadi kami merasa benar-benar dibantu, bukan ditekan."[145]

Pada akhirnya, implementasi Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga melalui BankZiska tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi yang terukur, seperti meningkatnya keberlangsungan usaha kecil dan bertambahnya modal kerja warga, tetapi juga membawa implikasi sosial yang lebih luas. Skema tanpa bunga, tanpa agunan, dan tanpa praktik sita memberikan rasa aman bagi masyarakat kecil yang sebelumnya merasa khawatir mengakses lembaga keuangan formal. Pola pengembalian yang disertai pembinaan dan pengajian rutin turut membangun

[144] Khairul Anwar, *Wawancara*, Penanggung Jawab Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 28 Oktober 2025

[145] Husain, *Wawancara*, Pedagang Sekaligus warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 14 Novembar 2025

kedekatan emosional antara pengelola masjid dan penerima manfaat. Interaksi yang intens dalam suasana religius tersebut memperkuat solidaritas serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Kepercayaan sosial terhadap institusi masjid pun meningkat, karena masyarakat melihat adanya konsistensi antara nilai yang diajarkan dengan praktik nyata di lapangan. Program ini menjadi bukti bahwa masjid mampu berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang tidak hanya solutif secara ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial umat. Sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Amam selaku ketua RT sekaligus warga sekitar:

> *"Menurut saya, yang membuat program ini bagus itu karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Bukan hanya omong kosong, tapi benar-benar ada tindakan nyata. Banyak warga yang usahanya bisa jalan lagi karena pinjaman tanpa bunga dari masjid. Jadi kepercayaan masyarakat ke masjid juga semakin kuat."*[146]

Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga melalui BankZiska (Sistem Keuangan Masjid) merepresentasikan inovasi pemberdayaan ekonomi berbasis syariah yang mengintegrasikan aspek finansial dan sosial secara simultan. Skema tanpa bunga, tanpa agunan, dan tanpa praktik riba menjadi solusi alternatif bagi masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal usaha, tetapi juga sebagai sarana pembinaan spiritual dan penguatan solidaritas jamaah melalui pertemuan rutin dan pengajian. Pendekatan kekeluargaan yang diterapkan menciptakan hubungan berbasis kepercayaan, bukan relasi kreditur-debitur yang kaku. Dampaknya terlihat pada meningkatnya keberlangsungan usaha mikro serta tumbuhnya rasa aman dan percaya diri warga dalam mengembangkan usaha. Lebih dari itu, konsistensi masjid dalam menghadirkan tindakan nyata memperkuat legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi masjid sebagai pusat pelayanan umat yang holistik, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

---

[146] Amam, *Wawancara*, Ketua RT Sekaligus Warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 1 Desember 2025

d. Program Dana Lingkungan Berbasis RT

Program Dana Lingkungan Berbasis RT merupakan inovasi pemberdayaan yang dirancang untuk memperluas manfaat ekonomi masjid secara merata hingga ke tingkat lingkungan terkecil. Berbeda dengan program yang bersifat individual, skema ini menempatkan Rukun Tetangga (RT) sebagai basis distribusi dan pengelolaan dana, sehingga partisipasi masyarakat dapat terlibat secara kolektif. Tujuan utama program ini adalah mendorong kemandirian lingkungan dalam memenuhi kebutuhan sosial maupun ekonomi yang bersifat lokal, seperti perbaikan fasilitas umum, kegiatan sosial, atau dukungan bagi warga kurang mampu. Selain itu, mekanisme penyaluran dana dilakukan secara terbuka di hadapan warga guna memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana masjid sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam pemanfaatannya. Dengan model distribusi yang merata dan sistem pelaporan yang jelas, program ini menunjukkan bahwa masjid tidak hanya berperan sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai institusi sosial yang aktif membangun kesejahteraan berbasis komunitas. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suwardi selaku ketua takmir:

> *"Termasuk RT yang dapat bantuan dari masjid, sebesar 11 juta rupiah. Itu kemarin 13 RT masing-masing RT diberikan 11 juta, yang satu juta khusus pak RT, yang 10 juta itu untuk keperluan lingkungan."*[147]

Skema pembagian dana dalam Program Dana Lingkungan Berbasis RT tidak hanya menekankan aspek distribusi yang merata, tetapi juga memberikan keleluasaan kepada masing-masing lingkungan untuk menentukan prioritas kebutuhan mereka. Model ini mencerminkan pendekatan desentralisasi pengelolaan dana, di mana keputusan penggunaan anggaran diserahkan kepada musyawarah warga di tingkat RT. Dengan demikian, program tidak bersifat top-down, melainkan berbasis kebutuhan riil masyarakat setempat. Fleksibilitas tersebut memungkinkan dana dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sosial, mulai dari pengadaan fasilitas umum hingga pembentukan dana sosial yang dapat diputar

[147] Suwardi, *Wawancara*, Ketua Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 18 April 2025

kembali bagi kepentingan warga. Selain memperkuat rasa tanggung jawab kolektif, pola ini juga mendorong transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Melalui mekanisme ini, masjid berperan sebagai fasilitator pemberdayaan, sementara warga menjadi subjek utama dalam menentukan arah pemanfaatan dana secara mandiri dan berkelanjutan. Sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Suwardi selaku ketua takmir:

> *"Pada saat itu pertama kali pembagiannya di forum ketua RT serta masyarakat. Yang 10 juta untuk keperluan masyarakat itu terserah lingkungan mau digunakan untuk apa, silakan untuk dibelikan sound system untuk kematian, untuk simpan dana sosial atau pinjaman tanpa bunga."*[148]

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Amam selaku ketua RT sekaligus masyarakat sekiar masjid:

> *"Sistemnya gini, menyerahkan dari pengurus takmir ke lingkungan langsung ada ruang pertemuan supaya masyarakat tahu kalau dapat uang dari masjid agar blak-blakan"*[149]

Dari sisi mekanisme pelaksanaan, Program Dana Lingkungan Berbasis RT dirancang dengan sistem yang menekankan prinsip keterbukaan, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif. Penyaluran dana tidak dilakukan secara tertutup, melainkan melalui forum pertemuan yang melibatkan pengurus RT dan perwakilan warga agar seluruh proses dapat diketahui bersama. Model ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi kesalahpahaman sekaligus memperkuat legitimasi sosial program di tingkat lingkungan. Setelah dana diterima, pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing RT dengan tetap mengedepankan hasil musyawarah warga sebagai dasar pengambilan keputusan. Fleksibilitas penggunaan dana memungkinkan setiap lingkungan menyesuaikan dengan kebutuhan prioritasnya, baik untuk kegiatan sosial, perbaikan fasilitas umum, maupun penguatan ekonomi warga. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi bentuk distribusi bantuan, tetapi juga sarana pembelajaran tata kelola keuangan komunitas yang

---

[148] Suwardi, *Wawancara*, Ketua Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 18 April 2025

[149] Amam, *Wawancara*, Ketua RT Sekaligus Warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 1 Desember 2025

partisipatif dan akuntabel. Bapak Amam selaku ketua RT sekaligus warga sekitar menjelaskan:

> *"Waktu itu kami dari 13 RT memang masing-masing menerima bantuan sebesar 11 juta rupiah dari masjid. Satu juta untuk operasional RT, sedangkan 10 juta digunakan untuk kebutuhan lingkungan. Penggunaannya fleksibel, sesuai musyawarah warga. Ada yang dipakai untuk dana sosial, ada juga yang dibuat simpan pinjam tanpa bunga untuk warga yang butuh."*[150]

Dalam praktiknya, pelaksanaan Program Dana Lingkungan Berbasis RT memperlihatkan adanya ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat dalam menentukan arah pemanfaatan dana. Setiap lingkungan diberikan kewenangan untuk bermusyawarah dan menyepakati prioritas kebutuhan yang dianggap paling mendesak dan bermanfaat bagi warga. Model ini tidak hanya menyalurkan bantuan secara finansial, tetapi juga mendorong proses pengambilan keputusan yang demokratis dan kolektif. Transparansi penyerahan dana di ruang terbuka memperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Selain itu, fleksibilitas penggunaan dana memungkinkan tiap RT menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing, sehingga program tidak bersifat seragam, melainkan adaptif. Melalui mekanisme ini, masjid berperan sebagai fasilitator pemberdayaan, sementara masyarakat menjadi subjek utama yang mengelola dan merasakan langsung manfaatnya. Bapak Husain selaku pedagang sekaligus warga sekitar menjelaskan,

> *"Penyerahan dananya dilakukan secara terbuka di ruang pertemuan, jadi warga tahu langsung kalau lingkungan kami mendapat bantuan dari masjid. Itu membuat semuanya transparan. Dana 10 juta itu dibahas bersama mau dipakai untuk apa. Di tempat kami sebagian digunakan untuk perlengkapan seperti sound system untuk keperluan kematian, dan sebagian lagi disimpan sebagai dana sosial atau pinjaman tanpa bunga bagi warga."*[151]

---

[150] Amam, *Wawancara*, Ketua RT Sekaligus Warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 1 Desember 2025

[151] Husain, *Wawancara*, Pedagang Sekaligus warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 14 Novembar 2025

Program Dana Lingkungan Berbasis RT menunjukkan model pemberdayaan ekonomi masjid yang menekankan distribusi merata, partisipasi kolektif, dan transparansi pengelolaan. Dengan menempatkan RT sebagai basis penerima dan pengelola dana, masjid mendorong pendekatan desentralisasi yang memberi ruang musyawarah bagi warga dalam menentukan prioritas kebutuhan lingkungan. Skema pembagian dana yang jelas sebagian untuk operasional RT dan sebagian besar untuk kepentingan masyarakat, memungkinkan pemanfaatan yang fleksibel sesuai kondisi masing-masing wilayah. Proses penyerahan dana dilakukan secara terbuka melalui forum pertemuan, sehingga memperkuat akuntabilitas dan legitimasi sosial program. Variasi penggunaan dana, mulai dari pengadaan fasilitas umum hingga pembentukan dana sosial atau simpan pinjam tanpa bunga, mencerminkan kreativitas dan kemandirian warga. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi instrumen bantuan finansial, tetapi juga sarana pembelajaran tata kelola keuangan komunitas yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan bersama.

e. Program Sosial Produktif dan Pemberdayaan SDM Lokal

Program sosial produktif dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal yang dijalankan masjid merefleksikan pendekatan pembangunan berbasis komunitas yang lebih komprehensif. Masjid tidak hanya memfokuskan diri pada distribusi bantuan sesaat, tetapi juga berupaya menciptakan dampak berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas masyarakat. Kegiatan sosial seperti layanan kesehatan gratis dan santunan bagi dhuafa dipadukan dengan program pembinaan dan pelatihan yang mendorong kemandirian ekonomi warga. Selain itu, masjid turut membuka ruang bagi tenaga kerja lokal untuk terlibat dalam unit-unit usaha yang dikembangkan, sehingga tercipta peluang kerja di lingkungan sekitar. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada aspek material, melainkan juga menyentuh dimensi edukatif dan motivasional. Melalui pengajian, pelatihan keterampilan, dan pendampingan, masjid berupaya menumbuhkan etos kerja, kepercayaan diri, serta semangat berusaha di kalangan jamaah. Dengan demikian, program sosial produktif ini menjadi instrumen strategis dalam

membangun masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Bapak Suwardi selaku ketua takmir masjid menjelaskan bahwa,

> *"Selain itu, masjid juga mengembangkan program sosial produktif, seperti pengobatan gratis, santunan dhuafa, dan pemberdayaan tenaga kerja lokal bagi warga yang kesulitan ekonomi. Masjid aktif membina masyarakat lewat pengajian dan pelatihan, sehingga warga makin semangat berusaha dan mandiri secara ekonomi."*[152]

Penjelasan tersebut semakin menegaskan bahwa program sosial produktif yang dijalankan masjid tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar diimplementasikan melalui struktur organisasi yang aktif dan partisipatif. Keterlibatan para pengurus dalam berbagai divisi menunjukkan bahwa pengelolaan masjid dibangun atas semangat voluntarisme dan pengabdian sosial. Meski bersifat sukarela, struktur ini mampu mendukung pelaksanaan program secara terorganisir dan berkelanjutan. Pembagian tugas dalam divisi tamu, parkir, dan kebersihan mencerminkan adanya manajemen internal yang tertata, sekaligus membuka ruang kontribusi bagi masyarakat sekitar. Selain menjalankan fungsi pelayanan operasional masjid, para pengurus juga menjadi saksi langsung bagaimana program sosial dan pemberdayaan SDM memberikan dampak nyata. Bantuan kesehatan, santunan, hingga akses kesempatan kerja di unit usaha masjid memperlihatkan bahwa pendekatan yang diambil bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan upaya sistematis untuk membangun kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Bapak Amam selaku ketua RT sekaligus warga sekitar masjid menyampaikan:

> *"Saya juga ketua di bagian abdi dalamnya masjid, anggotanya 24 orang ada tiga divisi tamu, parkir, dan kebersihan itu sukarela. Saya merasakan sendiri manfaat program sosial dari masjid ini. Pernah ada pengobatan gratis dan santunan untuk warga yang kurang mampu. Selain itu, beberapa tetangga saya*

[152] Suwardi, *Wawancara*, Ketua Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 18 April 2025

juga dibantu untuk bisa bekerja di unit usaha masjid. Jadi bukan hanya diberi bantuan, tapi juga diberi kesempatan supaya bisa mandiri"[153]

Lebih lanjut, dimensi pembinaan kapasitas masyarakat dalam Program Sosial Produktif dan Pemberdayaan SDM Lokal tercermin melalui kegiatan pengajian rutin yang dipadukan dengan pelatihan kewirausahaan dan penguatan keterampilan praktis. Pola ini menunjukkan bahwa masjid tidak memisahkan antara pembinaan spiritual dan peningkatan kapasitas ekonomi, melainkan mengintegrasikan keduanya dalam satu rangkaian kegiatan yang saling melengkapi. Pengajian tidak hanya menjadi ruang peningkatan pemahaman keagamaan, tetapi juga media motivasi untuk membangun etos kerja, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam berusaha. Sementara itu, pelatihan usaha memberikan wawasan teknis yang dapat langsung diterapkan oleh warga dalam mengembangkan usaha kecil atau meningkatkan produktivitas kerja. Interaksi yang berlangsung secara rutin menciptakan lingkungan belajar yang partisipatif dan suportif, sehingga masyarakat merasa didampingi dalam proses perubahan ekonomi mereka. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan berbasis masjid diarahkan pada transformasi mentalitas sekaligus peningkatan keterampilan praktis warga. Bapak Amam juga menambahkan:

"Kami juga sering ikut pengajian dan kadang ada pelatihan usaha, itu membuat kami lebih semangat untuk memperbaiki ekonomi keluarga."[154]

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Program Sosial Produktif dan Pemberdayaan SDM Lokal tidak hanya dipahami sebagai rangkaian kegiatan bantuan sosial, tetapi sebagai proses transformasi peran masjid dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan santunan dhuafa dan layanan kesehatan gratis menjadi pintu masuk untuk membangun kedekatan sosial, sementara pelatihan dan pembinaan usaha menjadi strategi jangka panjang dalam meningkatkan kapasitas individu. Program ini dirancang agar warga tidak selamanya bergantung pada bantuan, melainkan terdorong untuk mengembangkan potensi diri dan menciptakan

[153] Amam, *Wawancara*, Ketua RT Sekaligus Warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 1 Desember 2025

[154] Amam, *Wawancara*, Ketua RT Sekaligus Warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 1 Desember 2025

sumber penghasilan mandiri. Masjid berperan sebagai fasilitator yang menyediakan ruang belajar, motivasi, serta dukungan moral bagi masyarakat. Interaksi yang terjalin melalui pengajian dan pelatihan juga memperkuat solidaritas antarwarga, sehingga tercipta lingkungan sosial yang saling mendukung. Dengan pendekatan ini, pemberdayaan SDM lokal menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Bapak Husain selaku pedagang sekaligus warga sekiatr masjid juga menyatakan:

> *"Menurut saya, kegiatan masjid sekarang tidak hanya soal ibadah, tapi juga pembinaan masyarakat. Ada santunan dhuafa, pengobatan gratis, dan pelatihan-pelatihan yang mendorong warga supaya punya usaha sendiri. Jadi dampaknya terasa, warga jadi lebih percaya diri dan punya motivasi untuk mandiri secara ekonomi. Masjid benar-benar hadir di tengah masyarakat."*[155]

Program Sosial Produktif dan Pemberdayaan SDM Lokal menegaskan transformasi peran masjid sebagai pusat ibadah sekaligus pusat pembangunan sosial-ekonomi berbasis komunitas. Program ini mengintegrasikan bantuan sosial seperti pengobatan gratis dan santunan dhuafa dengan strategi pemberdayaan jangka panjang melalui pelatihan, pembinaan usaha, dan pembukaan peluang kerja di unit usaha masjid. Pendekatan tersebut tidak hanya menyentuh kebutuhan material, tetapi juga membangun kapasitas, etos kerja, dan kepercayaan diri masyarakat. Struktur organisasi masjid yang partisipatif dan berbasis voluntarisme turut mendukung keberlanjutan program secara terorganisir. Integrasi antara pengajian dan pelatihan kewirausahaan memperlihatkan sinergi pembinaan spiritual dan peningkatan keterampilan praktis. Dampaknya, warga tidak sekadar menjadi penerima bantuan, melainkan terdorong untuk mandiri dan produktif. Dengan demikian, program ini menciptakan perubahan yang bersifat struktural dan kultural, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun fondasi kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan.

---

[155] Husain, *Wawancara*, Pedagang Sekaligus warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 14 Novembar 2025

2. Masjid NU Ponorogo

a. Program Pembiayaan Syariah (Koperasi Simpan-Pinjam Tanpa Bunga)

Program Pembiayaan Syariah yang dijalankan dalam bentuk koperasi simpan-pinjam tanpa bunga merupakan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang dirancang untuk menjawab kebutuhan permodalan jamaah kecil. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan alternatif, tetapi juga sebagai sarana dakwah ekonomi yang menanamkan nilai-nilai keadilan, tolong-menolong, dan tanggung jawab bersama. Dalam praktiknya, pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan partisipatif, dengan melibatkan pengurus serta anggota jamaah dalam proses pengambilan keputusan. Skema pembiayaan yang diterapkan menekankan pada prinsip tanpa bunga, sehingga cicilan yang dibayarkan anggota bersifat tetap sesuai kesepakatan awal tanpa adanya tambahan yang memberatkan. Selain itu, sistem ini juga disertai dengan pembinaan dan pengawasan sederhana agar modal yang diberikan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif. Berdasarkan hasil wawancara, program ini lahir dari inisiatif takmir untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip syariah dan terbebas dari praktik riba. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Imron selaku pengurus, koperasi tersebut dibentuk untuk membantu pedagang kecil dan jamaah sekitar masjid dalam memperoleh tambahan modal usaha. Bapak H. Imron Husnussairi salah satu takmir Ia menjelaskan:

> *"Ada beberapa program yang kami jalankan, salah satunya koperasi syariah kecil yang memang kami bentuk untuk membantu pedagang dan jamaah sekitar masjid. Koperasi ini melayani simpan-pinjam, terutama untuk tambahan modal usaha kecil seperti jualan makanan, sembako, atau usaha rumahan lainnya. Sistemnya kami buat sesuai prinsip syariah, jadi tidak ada bunga seperti di lembaga konvensional. Biasanya jamaah yang butuh modal datang langsung ke takmir, lalu kami musyawarahkan dulu, dilihat kebutuhannya apa dan kemampuannya bagaimana. Harapannya, dengan adanya koperasi ini, pedagang kecil tidak perlu lagi meminjam ke rentenir atau lembaga yang*

memberatkan. Memang skalanya masih kecil, tapi alhamdulillah sudah cukup membantu beberapa jamaah untuk mengembangkan usahanya."[156]

Keberadaan koperasi ini dirasakan memberikan kemudahan nyata dalam memenuhi kebutuhan usaha yang bersifat mendesak maupun produktif. Program ini dinilai mampu menjadi solusi ketika pelaku usaha kecil menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal yang prosedurnya relatif lebih rumit. Selain proses pengajuan yang sederhana, kedekatan emosional antaranggota jamaah juga menumbuhkan rasa saling percaya dan tanggung jawab dalam pengembalian dana. Skema tanpa bunga memberikan ketenangan bagi penerima manfaat karena tidak ada tambahan beban cicilan di luar kesepakatan awal. Koperasi tidak hanya membantu dari sisi permodalan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan semangat kemandirian ekonomi di lingkungan masjid. Ibu Erlik selaku pedagang menyampaikan:

"Ada koperasi kecil yang dikelola takmir, jadi kalau butuh modal tambahan, bisa pinjam tanpa bunga. Itu sangat membantu kami kaya mau beli kompor atau apa gitu mas"[157]

Hasil wawancara juga mengungkap adanya tantangan dalam aspek sosialisasi dan pemerataan informasi. Tidak semua jamaah mengetahui keberadaan program ini, terutama mereka yang jarang mengikuti kegiatan rutin masjid atau berdomisili agak jauh dari pusat aktivitas. Keterbatasan media komunikasi serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penyebaran informasi program. Selain itu, sebagian jamaah masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai mekanisme koperasi syariah sehingga memerlukan pendekatan edukatif yang lebih intensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh sistem pembiayaan yang baik, tetapi juga oleh efektivitas strategi sosialisasi yang dilakukan pengurus. Bapak Ilham selaku jamaah masjid beliau mengungkapkan:

---

[156] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025
[157] Erlik, *Wawancara*, Pedagang Masjid NU, Ponorogo, 26 November 2025

"Kalau koperasi syariah di masjid itu saya kurang tahu ya, mas. Saya tahunya cuma kegiatan pengajian sama Jumat berkah saja. Soal pinjam-meminjam tanpa bunga itu saya belum pernah dengar. Sejauh yang saya tahu memang ada kegiatan ekonomi di masjid, tapi kalau ada koperasi untuk simpan-pinjam saya belum pernah ikut atau dapat informasi. Mungkin ada, tapi tidak semua jamaah tahu."[158]

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian di atas, Program Pembiayaan Syariah dalam bentuk koperasi simpan-pinjam tanpa bunga menunjukkan peran strategis masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi jamaah. Program ini tidak hanya menghadirkan alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip syariah dan terbebas dari riba, tetapi juga memperkuat nilai solidaritas, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif di lingkungan masjid. Dari sisi pengelola, koperasi dirancang secara sederhana dan partisipatif untuk membantu pedagang kecil mengakses modal usaha secara lebih mudah dan adil. Sementara itu, penerima manfaat merasakan dampak langsung berupa keringanan beban finansial dan kemudahan prosedur. Namun, efektivitas program masih menghadapi tantangan pada aspek sosialisasi dan pemerataan informasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih sistematis dan inklusif agar manfaat koperasi dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh jamaah.

b. Program Usaha Produktif Berbasis Masjid

Program Usaha Produktif Berbasis Masjid merupakan manifestasi dari visi kelembagaan yang menempatkan masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi jamaah. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa masjid memiliki potensi besar sebagai simpul pergerakan umat, baik dalam aspek spiritual maupun kesejahteraan ekonomi. Melalui berbagai kegiatan usaha produktif, pengurus berupaya menghadirkan program yang mampu menciptakan peluang pendapatan, membuka ruang partisipasi jamaah, serta memperkuat kemandirian komunitas secara berkelanjutan. Program ini juga dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi yang berbasis

[158] Ilham, *Wawancara*, Jamaah Masjid NU, Ponorogo, 22 November 2025

nilai-nilai syariah, seperti kejujuran, kebersamaan, dan keadilan distribusi manfaat. Dengan demikian, masjid tidak hanya berperan sebagai tempat pembinaan akhlak, tetapi juga sebagai motor penggerak kesejahteraan sosial yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat sekitar. Orientasi ini ditegaskan secara langsung oleh Bapak H. Imron Husnussairi selaku salah satu pengurus takmir yang menyatakan:

> *"Masjid ini dari dulu tidak hanya fokus untuk kegiatan ibadah saja, tapi juga bagaimana caranya supaya bisa membantu ekonomi jamaah. Jadi kita ingin masjid ini bisa jadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat"*[159]

Salah satu bentuk konkret dari implementasi program usaha produktif berbasis masjid adalah pengelolaan unit usaha sederhana yang melibatkan langsung partisipasi jamaah. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan menambah pemasukan kas masjid, tetapi juga memberikan ruang ekonomi bagi kelompok tertentu, seperti ibu-ibu dan remaja masjid, agar lebih mandiri dan produktif. Pola pengelolaan dilakukan secara kolaboratif dengan pembagian hasil yang proporsional, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan kelembagaan dan kesejahteraan pelaku usaha. Momentum Ramadan juga dimanfaatkan sebagai peluang ekonomi musiman yang mampu meningkatkan pendapatan jamaah sekaligus menghidupkan suasana kebersamaan di lingkungan masjid. Bapak H. Imron Husnussairi menjelaskan:

> *"Ada kantin jamaah yang dikelola ibu-ibu Muslimat NU, hasilnya sebagian masuk kas masjid dan sebagian untuk mereka sendiri. Lalu setiap Ramadan, kita buka pasar takjil yang diorganisasi remaja masjid."*[160]

Selain usaha berbasis perdagangan, masjid juga mengoptimalkan aset fisiknya sebagai sumber pendapatan produktif yang berkelanjutan. Strategi ini menunjukkan adanya pengelolaan kelembagaan yang lebih profesional, di mana aset tidak hanya dipandang sebagai fasilitas ibadah, tetapi juga sebagai potensi ekonomi yang dapat dikelola secara syariah. Pemanfaatan aula dan halaman masjid dilakukan dengan sistem administrasi yang tertata, sehingga pendapatan yang diperoleh dapat tercatat secara transparan dan dimanfaatkan untuk menunjang operasional serta program sosial lainnya. Dalam pelaksanaannya, takmir tetap

[159] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025
[160] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025

menerapkan batasan normatif agar aktivitas yang berlangsung tetap selaras dengan nilai-nilai keislaman dan menjaga marwah masjid sebagai ruang ibadah. Bapak H. Imron Husnussairi menuturkan:

> *"Masjid juga menyewakan aula dan area halaman untuk acara seperti pernikahan, khitanan, dan kegiatan pengajian besar. Pengelolaannya dilakukan langsung oleh takmir masjid, tidak diserahkan ke pihak luar. Jadi semua pendapatan masuk ke kas masjid untuk operasional dan kegiatan sosial. Kita tetap jaga supaya semua kegiatan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi sifatnya tetap untuk kemaslahatan umat, bukan komersial semata."*[161]

Sinergi kelembagaan juga tampak dalam pola kolaborasi antara masjid, organisasi keagamaan, dan lembaga pendidikan di sekitarnya. Keterlibatan PCNU serta kedekatan geografis dengan kompleks pendidikan Ma'arif menciptakan ekosistem sosial-ekonomi yang saling terhubung. Masjid tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari jaringan institusi yang memperkuat aktivitas keagamaan sekaligus ekonomi masyarakat. Interaksi antara jamaah, pelajar, tenaga pendidik, dan wali murid membentuk dinamika ekonomi yang tumbuh secara alami di sekitar lingkungan masjid. Aktivitas tersebut tidak hanya meningkatkan perputaran ekonomi lokal, tetapi juga memperluas basis partisipasi jamaah dalam kegiatan produktif. Dengan demikian, masjid berfungsi sebagai pusat integrasi antara pendidikan, organisasi keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Bapak H. Imron Husnussairi menjelaskan:

> *"Jadi PCNU Ponorogo ikut berperan di sekitar masjid ini. Mereka membuka lapak-lapak usaha kecil di sekitar masjid, jadi jamaah bisa berjualan di sana. Tempatnya berdekatan dengan kompleks pendidikan Ma'arif ada SD, MI, MTs, dan SMA Ma'arif. Nah, dari situ muncul kegiatan ekonomi baru. Anak-anak sekolah, guru, wali murid, dan jamaah jadi ramai, banyak yang jual makanan, minuman, alat tulis, dan sebagainya. Sebagian dari hasil usaha itu juga disumbangkan ke masjid. Jadi antara masjid dan lembaga pendidikan saling*

[161] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025

mendukung. Sekolah Ma'arif jadi ramai karena dekat dengan masjid, sementara masjid juga mendapat manfaat ekonomi dari aktivitas sekolah-sekolah itu."[162]

Keberhasilan model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid ini tidak hanya dirasakan oleh jamaah internal, tetapi juga mendapat apresiasi dari pihak eksternal. Pengakuan tersebut menjadi indikator bahwa program yang dijalankan memiliki dampak nyata, sistem pengelolaan yang terstruktur, serta keberlanjutan yang terjaga. Konsistensi pelaksanaan, partisipasi jamaah, dan sinergi kelembagaan menjadi faktor penting yang memperkuat posisi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, capaian ini turut meningkatkan kepercayaan diri pengurus serta memperluas jejaring kolaborasi dengan masjid-masjid lain. Penghargaan tersebut sekaligus menjadi motivasi untuk terus mengembangkan inovasi program yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Bapak H. Imron Husnussairi mengungkapkan:

"Alhamdulillah. Beberapa waktu lalu masjid kami mendapat Juara 2 Pemberdayaan Ekonomi Masjid se-Jawa Timur. Kami juga kaget waktu itu, karena banyak masjid lain yang programnya juga bagus-bagus. Tapi mungkin karena kegiatan ekonomi di sini berjalan konsisten dan bisa dirasakan manfaatnya, jadi dinilai layak. Setelah itu banyak masjid lain yang datang ke sini ingin belajar dan meniru model pemberdayaan ekonomi yang kami lakukan. Kita senang, karena berarti usaha kecil-kecilan yang kami jalankan bisa jadi inspirasi untuk yang lain juga."[163]

Dari perspektif jamaah, dampak ekonomi program usaha produktif berbasis masjid tidak hanya dipahami sebagai konsep kelembagaan, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar masjid menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan interaksi sosial, serta memperluas sumber pendapatan bagi warga sekitar. Keberadaan kantin, pasar takjil, penyewaan aula, hingga kedekatan dengan lembaga pendidikan menjadikan lingkungan masjid lebih dinamis dan produktif. Jamaah melihat bahwa masjid mampu menghadirkan manfaat nyata yang melampaui fungsi ritual, sehingga

[162] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025
[163] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025

kehadirannya semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa masjid berperan sebagai pusat pemberdayaan yang menggerakkan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Bapak Ilham selaku jamaah masjid menyatakan:

> *"Iya, saya tahu masjid ini memang bukan cuma untuk shalat saja. Dari dulu memang kelihatan kalau pengurusnya ingin masjid jadi pusat kegiatan warga juga. Ada kantin yang dikelola ibu-ibu, terus kalau Ramadan itu ramai sekali karena ada pasar takjil. Kami yang punya usaha kecil jadi ikut terbantu, kadang bisa jualan di sekitar masjid. Aula juga sering dipakai untuk acara pernikahan atau pengajian besar, jadi masjid selalu hidup kegiatannya. Apalagi karena dekat dengan sekolah-sekolah Ma'arif, jadi setiap hari memang ramai anak sekolah, guru, dan wali murid. Banyak warga yang buka usaha kecil-kecilan di situ. Menurut saya memang terasa sekali dampaknya, ekonomi warga jadi ikut bergerak"*[164]

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa aktivitas ekonomi yang terpusat di masjid menciptakan multiplier effect terhadap pertumbuhan usaha kecil di sekitarnya. Perputaran ekonomi yang terjadi tidak hanya menguntungkan kas masjid, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi pedagang kecil untuk memasarkan produk mereka. Kebijakan pengurus yang memberikan ruang usaha secara terbuka menunjukkan adanya keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan. Selain itu, dukungan non-finansial seperti promosi dan koordinasi melalui jaringan jamaah memperkuat daya saing pelaku usaha kecil. Pola ini mencerminkan model pemberdayaan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Erlik selaku pedagang:

> *"Di masjid ini memang ada program ekonomi jamaah. Kami para pedagang kecil sering dilibatkan. Misalnya, waktu Ramadan, pengurus kasih kesempatan jualan di halaman masjid tanpa dipungut biaya sewa. Bahkan kadang dibantu promosi juga lewat grup jamaah."*[165]

---

[164] Ilham, *Wawancara*, Jamaah Masjid NU, Ponorogo, 22 November 2025
[165] Erlik, *Wawancara*, Pedagang Masjid NU, Ponorogo, 26 November 2025

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara, Program Usaha Produktif Berbasis Masjid menunjukkan transformasi fungsi masjid dari sekadar pusat ibadah ritual menjadi pusat pemberdayaan sosial-ekonomi yang terintegrasi. Program ini dijalankan melalui berbagai unit usaha seperti kantin jamaah, pasar takjil Ramadan, penyewaan aula, serta optimalisasi sinergi dengan organisasi keagamaan dan lembaga pendidikan di sekitarnya. Model pengelolaan yang partisipatif, transparan, dan berbasis nilai syariah memperkuat legitimasi kelembagaan sekaligus meningkatkan kepercayaan jamaah. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bentuk peningkatan kas masjid, tetapi juga terciptanya peluang usaha, perputaran ekonomi lokal, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan produktif. Pengakuan di tingkat regional semakin menegaskan keberhasilan model ini. Secara keseluruhan, program ini menghadirkan efek pengganda (multiplier effect) yang mendorong kemandirian ekonomi jamaah serta memperkuat posisi masjid sebagai pusat kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

c. Program Penguatan Dana Sosial Produktif

Program Penguatan Dana Sosial Produktif merupakan fondasi utama yang menopang keberlanjutan berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang dijalankan masjid. Tanpa sistem pendanaan yang kuat dan terkelola dengan baik, program pemberdayaan jamaah akan sulit berkembang secara konsisten. Oleh karena itu, takmir masjid merancang strategi penguatan dana melalui pendekatan yang terencana, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Penguatan ini tidak hanya mengandalkan satu sumber pemasukan, tetapi dilakukan melalui diversifikasi pendapatan agar kas masjid tetap stabil meskipun terdapat fluktuasi pada periode tertentu. Selain itu, pengelolaan dana dilakukan secara akuntabel dengan pencatatan yang rapi, sehingga meningkatkan kepercayaan jamaah dan donatur. Stabilitas dana inilah yang kemudian memungkinkan masjid menjalankan program sosial produktif secara berkesinambungan, mulai dari kegiatan santunan hingga dukungan terhadap usaha ekonomi jamaah. Bapak H. Imron Husnussairi selaku takmir masjid menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber pemasukan utama yang menopang operasional dan kegiatan sosial masjid:

"Ada beberapa sumber pendapatan tetap. Yang pertama dari kotak amal yang kami sebar di sekitar masjid, terutama saat kegiatan Jumat pagi dan juga waktu Ramadan. Biasanya saat bulan Ramadan itu kotak amal penuh karena banyak jamaah yang bersedekah. Yang kedua dari persewaan ruko dan lapak mesin ATM yang ada di area masjid. Itu kontraknya sistemnya lima tahun sekali. Jadi setiap lima tahun ada pembaruan perjanjian dan pemasukan besar masuk ke kas masjid. Kemudian yang ketiga dari sumbangan Ramadan, biasanya meningkat menjelang Idul Fitri, banyak donatur dan jamaah yang berinfak. Dan yang keempat dari shodaqoh masyarakat atau jamaah tetap yang rutin memberi sumbangan, walaupun jumlahnya tidak menentu."[166]

Pengelolaan dana sosial tersebut tidak hanya berhenti pada penghimpunan sumber pemasukan, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai kegiatan rutin yang menyentuh langsung kebutuhan jamaah. Distribusi dana dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan skala prioritas dan momentum kegiatan. Program seperti Jumat Berkah dan pengajian subuh menjadi contoh konkret bagaimana dana sosial dimanfaatkan untuk memperkuat partisipasi jamaah sekaligus membangun suasana kebersamaan. Pola pendanaan yang berbeda antara kegiatan satu dengan lainnya menunjukkan adanya manajemen yang adaptif, di mana sebagian kegiatan bertumpu pada donasi sukarela, sementara sebagian lainnya menggunakan dana kas masjid sebagai stimulus partisipasi. Hal ini memperlihatkan keseimbangan antara swadaya jamaah dan dukungan kelembagaan. Bapak H. Imron Husnussairi menambahkan:

"Terkait Jumat berkah itu biasanya sukarela warga yang mau sedekah langsung saja mengantarkan ke masjid kalau Jumat berkah seperti itu kalau pengajian subuh itu memakai dana masjid secara supaya menarik minat warga jadi ada makanan-makanan ketika pengajian subuh roti atau apa seperti itu tapi khusus minggu depan itu soto itu dananya dari takmir jadi kalau hari Jumat itu dari sedekah tidak dari masjid jadi kalau yang sedekah banyak itu kadang sampai sisa tapi kalau sedikit ya kadang rebutan begitu mas"[167]

---

[166] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025
[167] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025

Dari perspektif penyewa aset masjid, tata kelola dana sosial produktif tidak hanya dipahami sebagai mekanisme internal pengurus, tetapi juga terlihat nyata dalam praktik administrasi dan pemanfaatannya. Sistem kontrak yang jelas, pembaruan perjanjian secara berkala, serta kejelasan alur pemasukan menunjukkan adanya manajemen yang terstruktur. Transparansi ini menumbuhkan rasa percaya dan kenyamanan bagi para penyewa karena mereka mengetahui bahwa kontribusi yang dibayarkan tidak semata menjadi pendapatan pasif, melainkan dikelola kembali untuk mendukung operasional dan kegiatan sosial masjid. Persepsi positif tersebut memperkuat legitimasi kelembagaan sekaligus menjaga hubungan harmonis antara takmir dan pihak penyewa. Ibu Erlik, yang menyewa ruko di area masjid, menyampaikan:

> *"Saya kebetulan menyewa ruko di area masjid ini, jadi cukup tahu bagaimana pengelolaannya. Sistem sewanya memang kontrak lima tahunan, dan waktu perpanjangan biasanya ada pembaruan perjanjian dengan takmir. Setahu saya, hasil sewa ruko dan juga lapak ATM itu masuk ke kas masjid untuk operasional dan kegiatan sosial. Selain itu, pemasukan masjid juga banyak dari kotak amal, apalagi kalau Jumat pagi dan bulan Ramadan, biasanya penuh karena jamaah banyak yang bersedekah. Menjelang Idul Fitri juga infaknya meningkat. Saya juga lihat ada kegiatan Jumat berkah, itu biasanya dari sedekah warga, kadang sampai sisa kalau yang memberi banyak. Menurut saya pengelolaannya cukup terbuka, dan kami sebagai penyewa juga merasa nyaman karena tahu dana yang masuk dipakai lagi untuk kegiatan masjid dan masyarakat sekitar."*[168]

Hal senada disampaikan oleh Bapak Ilham yang menilai bahwa pengelolaan dana masjid menunjukkan siklus yang produktif dan berorientasi pada kemaslahatan jamaah. Menurutnya, pemasukan yang bersumber dari berbagai kanal tidak berhenti pada aspek administratif semata, melainkan benar-benar dikembalikan dalam bentuk kegiatan sosial dan keagamaan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Persepsi ini memperlihatkan adanya akuntabilitas substantif, di mana jamaah dapat melihat keterkaitan antara dana yang

[168] Erlik, *Wawancara*, Pedagang Masjid NU, Ponorogo, 26 November 2025

dihimpun dan program yang dijalankan. Transparansi penggunaan dana juga memperkuat kepercayaan publik serta mendorong partisipasi yang lebih luas dalam bentuk infak dan sedekah. Dengan demikian, penguatan dana sosial produktif tidak hanya memperkuat kas masjid, tetapi juga memperkokoh hubungan timbal balik antara pengurus dan jamaah. Bapak Ilham menyampaikan:

> *"Setahu saya, masjid dapat pemasukan dari kotak amal, apalagi kalau Jumat dan Ramadan biasanya lebih banyak. Selain itu juga dari sewa ruko dan aula. Saya lihat dana itu dipakai lagi untuk kegiatan seperti Jumat berkah dan pengajian. Jadi memang bukan hanya untuk operasional saja, tapi juga kembali ke masyarakat."*[169]

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara, Program Penguatan Dana Sosial Produktif menunjukkan bahwa keberlanjutan pemberdayaan masjid sangat ditentukan oleh sistem pendanaan yang terdiversifikasi, transparan, dan akuntabel. Sumber pemasukan yang beragam mulai dari kotak amal, infak Ramadan, sedekah rutin jamaah, hingga persewaan ruko, aula, dan lapak ATM menciptakan stabilitas kas yang memungkinkan program sosial dan ekonomi berjalan secara konsisten. Pengelolaan dana tidak hanya berhenti pada penghimpunan, tetapi juga diwujudkan dalam distribusi yang adaptif melalui kegiatan seperti Jumat Berkah dan pengajian subuh. Dari perspektif jamaah dan penyewa aset, tata kelola yang jelas dan terbuka menumbuhkan kepercayaan serta rasa memiliki terhadap masjid. Siklus penghimpunan dan pemanfaatan dana yang kembali kepada masyarakat memperlihatkan akuntabilitas substantif. Dengan demikian, program ini tidak hanya memperkuat kapasitas finansial masjid, tetapi juga memperkokoh legitimasi sosial dan partisipasi jamaah secara berkelanjutan.

d. Program Pengembangan dan Digitalisasi Ekonomi Masjid (Rencana Strategis)

Program Pengembangan dan Digitalisasi Ekonomi Masjid merupakan tahapan lanjutan dari proses transformasi kelembagaan yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan internal, tetapi juga pada adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks ini,

[169] Ilham, *Wawancara*, Jamaah Masjid NU, Ponorogo, 22 November 2025

masjid diposisikan sebagai institusi yang responsif terhadap perubahan zaman, termasuk dalam hal pengelolaan informasi, transparansi program, serta perluasan akses partisipasi jamaah. Digitalisasi dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan akuntabilitas, memperluas jaringan donatur, dan mempermudah komunikasi antara pengurus dan masyarakat. Selain itu, pengembangan ini juga diarahkan untuk mendorong regenerasi pelaku ekonomi berbasis masjid, khususnya generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Dengan memanfaatkan platform daring, masjid diharapkan mampu membangun citra kelembagaan yang lebih terbuka, profesional, dan inklusif. Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkuat keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi dalam jangka panjang. Bapak H. Imron Husnussairi selaku takmir masjid menegaskan bahwa arah pengembangan ke depan bertumpu pada peningkatan kemandirian dan perluasan manfaat program:

> *"Harapannya, masjid bisa semakin mandiri dan bisa bantu jamaah lebih luas lagi. Kami sedang rencanakan untuk buat website masjid supaya masyarakat bisa tahu kegiatan kami, dan mungkin bisa ikut berdonasi secara online."*[170]

Selain aspek digital, strategi pengembangan juga diarahkan pada penguatan sumber daya manusia sebagai pilar keberlanjutan program ekonomi masjid. Pengurus menyadari bahwa inovasi kelembagaan tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan generasi muda yang memiliki energi, kreativitas, dan literasi teknologi yang lebih baik. Oleh karena itu, upaya regenerasi dilakukan dengan membuka ruang partisipasi bagi pelajar dan remaja untuk terlibat langsung dalam kegiatan usaha maupun manajerial. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mencetak pelaku usaha baru, tetapi juga menanamkan nilai kewirausahaan berbasis syariah sejak dini. Dengan demikian, masjid berfungsi sebagai laboratorium sosial tempat pembelajaran praktik ekonomi yang beretika dan kolaboratif. Bapak H. Imron Husnussairi menyampaikan:

> *"Kami juga ingin melibatkan lebih banyak anak muda dan pelajar dari sekolah Ma'arif supaya mereka ikut belajar wirausaha dari kegiatan di masjid ini. Jadi*

[170] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025

masjid bukan hanya tempat shalat, tapi juga tempat belajar, bekerja, dan berbuat baik bersama."[171]

Program Pengembangan dan Digitalisasi Ekonomi Masjid menunjukkan arah transformasi kelembagaan yang adaptif dan berorientasi masa depan. Pengembangan tidak hanya difokuskan pada penguatan unit usaha dan stabilitas dana, tetapi juga pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perluasan partisipasi jamaah. Rencana pembuatan website serta sistem donasi daring menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan informasi dan dukungan masyarakat secara lebih inklusif. Di sisi lain, penguatan sumber daya manusia, khususnya generasi muda, menjadi pilar penting dalam menjaga keberlanjutan program. Keterlibatan pelajar dan remaja dalam kegiatan kewirausahaan berbasis masjid mencerminkan upaya regenerasi sekaligus pendidikan ekonomi syariah secara praktis. Dengan demikian, program ini tidak hanya memperkuat kemandirian finansial masjid, tetapi juga membangun fondasi kelembagaan yang inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

C. Analisis Bentuk Program Pemberdayaan Ekonomi Oleh Masjid Baitul Mukhlisin Dan Masjid NU Ponorogo

1. Masjid Baitul Mukhlisin

a. Program Usaha Berkelanjutan Berbasis Masjid (BUMM)

Transformasi BUMM dari bazar insidental menuju unit usaha permanen menunjukkan praktik pemberdayaan yang sejalan dengan konsep Yasir Yusuf, yakni proses peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui penguatan partisipasi dan pengelolaan potensi secara mandiri.[172] Inisiatif pengurus masjid yang mengubah bazar menjadi toko "Masjid Sejahtera" menandakan pergeseran dari bantuan konsumtif menuju model produktif berkelanjutan, sehingga jamaah tidak hanya menerima manfaat sesaat, tetapi turut terlibat dalam ekosistem ekonomi masjid.[173] Hal ini juga konsisten dengan temuan studi Suarni dkk bahwa masjid yang dikelola secara profesional dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan

[171] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025

[172] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 2–3.

[173] Ibid., 4.

sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.[174] Dengan demikian, BUMM merepresentasikan integrasi antara nilai spiritual, tata kelola kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi partisipatif yang berorientasi pada kemandirian umat, sehingga masjid tidak lagi bersifat reaktif, melainkan menjadi motor transformasi sosial-ekonomi berbasis komunitas.

Ekspansi BUMM dari toko menuju Suryamart dan restoran menunjukkan bahwa masjid tidak lagi menjalankan kegiatan ekonomi secara sporadis, tetapi telah memasuki tahap pemberdayaan yang terstruktur. Hal ini selaras dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan merupakan proses peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui akses terhadap sumber daya serta partisipasi aktif masyarakat.[175] Model kemitraan bisnis yang diterapkan juga memperkuat transfer pengetahuan manajerial sehingga jamaah tidak hanya menerima manfaat ekonomi, tetapi turut memperoleh pembelajaran kewirausahaan.[176] Temuan ini sejalan dengan studi Suarni dkk yang menegaskan bahwa pengelolaan masjid yang profesional dan kolaboratif mampu menjadikan masjid sebagai agen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.[177] Dengan demikian, praktik BUMM mencerminkan integrasi antara orientasi sosial-keagamaan dan tata kelola bisnis modern, sehingga keberlanjutan usaha tidak hanya menjaga operasional masjid, tetapi juga memperluas dampak pemberdayaan ekonomi jamaah secara sistematis.

Transformasi unit usaha masjid dari bazar temporer menjadi toko permanen menunjukkan praktik pemberdayaan yang substantif, bukan sekadar aktivitas karitatif. Dalam perspektif Yasir Yusuf, langkah ini mencerminkan proses peningkatan kapasitas dan kemandirian jamaah melalui perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi serta penguatan partisipasi masyarakat, sehingga masjid berfungsi sebagai pusat pemberdayaan yang berorientasi keberlanjutan.[178]

---

[174] Agusdiwana Suarni dkk., "Community Empowerment Based on Muhammadiyah Mosque in Maros-Pangkep, South Sulawesi," *Jurnal Ar-Ribh* 8, no. 1 (Juni 2025): 75.

[175] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 9.

[176] Ibid., 33.

[177] Suarni dkk., "Community Empowerment Based on Muhammadiyah Mosque in Maros-Pangkep, South Sulawesi," 77.

[178] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 142.

Apresiasi jamaah terhadap keberadaan toko dan Suryamart menandakan terbangunnya *sense of ownership* yang merupakan indikator penting keberhasilan *empowerment*.[179] Temuan ini diperkuat oleh Arsam dkk yang menegaskan bahwa pengelolaan masjid yang profesional dan disertai pendampingan mampu mendorong masyarakat "menuju kemandirian finansial dan operasional" serta membedakan pemberdayaan dari sekadar bantuan konsumtif.[180] Dengan demikian, perkembangan unit usaha tersebut mensintesiskan dimensi kelembagaan, partisipatif, dan keberlanjutan, sehingga masjid semakin kokoh berperan sebagai pusat transformasi sosial-ekonomi umat.

Transformasi bazar menjadi unit usaha permanen melalui BUMM menunjukkan praktik pemberdayaan yang sejalan dengan konsep Yasir Yusuf, yakni proses meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui akses terhadap sumber daya ekonomi.[181] Keberadaan Suryamart dan restoran masjid tidak sekadar memberi bantuan, tetapi membuka ruang partisipasi ekonomi, memperluas jaringan usaha, dan menciptakan perputaran ekonomi lokal, sehingga masyarakat menjadi subjek yang berdaya.[182] Hal ini menguatkan posisi masjid sebagai pusat pemberdayaan umat yang tidak hanya berorientasi ibadah mahdhah, tetapi juga penguatan ekonomi sosial.[183] Temuan ini selaras dengan studi Safi'i yang menegaskan bahwa model pemberdayaan berbasis masjid yang partisipatif mampu meningkatkan keterampilan hingga 70% dan menurunkan pengangguran sekitar 20%, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi komunitas.[184] Dengan demikian, sinergi antara pengelolaan usaha profesional dan nilai sosial-keagamaan membentuk ekosistem pemberdayaan berkelanjutan yang memperkuat fungsi masjid sebagai pusat transformasi ekonomi umat.

---

[179] Ibid., 184–85.

[180] Arsam Arsam, Nik Suhaida Nik Abdul Majid, dan Asep Amaludin, "The nexus of management model and social transformation: A case study of da'wah strategy at the Jogokariyan mosque," *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2025, 253.

[181] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 9.

[182] Ibid., 169.

[183] Ibid., 15.

[184] Muhammad Aris Safi'i dkk., "Strengthening the Role of Mosques for Community Economic Empowerment," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 13, no. 1 (Juni 2025): 40.

b. Program Usaha Air Minum Isi Ulang (Airku)

Program Usaha Air Minum Isi Ulang "Airku" mencerminkan praktik pemberdayaan sebagaimana dikemukakan Yasir Yusuf, yakni bukan sekadar bantuan konsumtif, tetapi proses meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi jamaah melalui penyediaan kebutuhan pokok yang berkelanjutan.[185] Unit usaha ini memberi akses produk terjangkau sekaligus membuka ruang partisipasi ekonomi masyarakat, sehingga sejalan dengan konsep transfer kekuatan dan akses sumber daya.[186] Selain itu, inisiatif ini menegaskan fungsi masjid sebagai pusat aktivitas ghairu mahdhah yang mengintegrasikan pelayanan sosial dan ekonomi umat.[187] Temuan oleh Safi'i dkk riset internasional juga menguatkan bahwa masjid memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian jamaah melalui pengembangan usaha mikro.[188] Dengan demikian, usaha "Airku" dapat disintesis sebagai model pemberdayaan produktif berbasis masjid yang berorientasi keberlanjutan, memperkuat kemandirian finansial lembaga, sekaligus memperluas akses kesejahteraan masyarakat secara partisipatif.

Praktik usaha air minum isi ulang "Airku" menunjukkan implementasi pemberdayaan yang sejalan dengan konsep Yasir Yusuf, karena tidak sekadar menyediakan produk murah, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dan partisipasi jamaah dalam mendukung kemandirian ekonomi masjid.[189] Persepsi warga bahwa membeli "Airku" berarti turut menopang kegiatan masjid menegaskan adanya proses transfer akses dan kontrol ekonomi kepada komunitas, sehingga masyarakat berperan sebagai subjek pemberdayaan.[190] Hal ini menguatkan dimensi sosial-religius yang menumbuhkan rasa memiliki dan

[185] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 18.

[186] Ibid., 136.

[187] Ibid., 64.

[188] Muhammad Aris Safi'i dkk., "Strengthening the Role of Mosques for Community Economic Empowerment," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 13, no. 1 (Juni 2025): 41.

[189] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 175–76.

[190] Ibid., 64.

solidaritas.[191] Temuan ini juga sejalan dengan temuan Hasibuan dan Muniruddin yang menegaskan bahwa masjid memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi melalui unit usaha dan partisipasi jamaah untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas.[192] Dengan demikian, usaha "Airku" merepresentasikan model pemberdayaan berbasis masjid yang integrative menggabungkan manfaat ekonomi, legitimasi religius, dan partisipasi social sehingga berpotensi berkelanjutan dalam memperkuat kemandirian ekonomi umat.

Keberadaan unit usaha air minum isi ulang "Airku" merefleksikan praktik pemberdayaan sebagaimana dikemukakan Yasir Yusuf, yakni proses peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui akses ekonomi yang inklusif dan partisipatif.[193] Program ini tidak sekadar memberi bantuan konsumtif, tetapi membuka akses layanan murah, memperkuat rasa memiliki jamaah, serta mengalirkan manfaat ekonomi kembali ke kegiatan sosial masjid.[194] Hal ini sejalan dengan perluasan fungsi masjid sebagai pusat ibadah sekaligus aktivitas ghair mahdhah yang responsif terhadap kebutuhan umat.[195] Temuan ini diperkuat oleh Mulauddin dkk yang menegaskan bahwa masjid memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi ketika mampu mengintegrasikan fungsi sosial, finansial, dan komunitas secara berkelanjutan.[196] Dengan demikian, "Airku" tidak hanya memperkuat kemandirian finansial masjid, tetapi juga membangun kohesi sosial dan partisipasi ekonomi jamaah secara berkelanjutan.

---

[191] Ibid., 56–57.

[192] Burju Amar Ma'ruf Hasibuan dan Muniruddin Muniruddin, "Mosque-Based Community Empowerment in Improving the Economy of the Muhammadiyah Taqwa Mosque Dolok Masihul, Serdang Bedagai Regency," *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 6, no. 1 (April 2025): 223.

[193] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 66.

[194] Ibid., 183.

[195] Ibid., 39.

[196] Aforisma Mulauddin, Atep Hendang Waluya, dan Muhammad Reza Prima Matondang, "Mosque Transformation for Community Economic Empowerment: Integrating Islamic Social Finance, Digitalization, and Pentahelix Collaboration," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 12, no. 2 (Desember 2025): 193.

c. Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga (BankZiska / Sistem Keuangan Masjid)

Program BankZiska di Masjid Baitul Mukhlisin merefleksikan konsep pemberdayaan sebagaimana dijelaskan Yasir Yusuf, yakni proses peningkatan kapasitas masyarakat melalui perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi, bukan sekadar bantuan finansial.[197] Skema tanpa bunga dan tanpa agunan menunjukkan adanya transfer kekuatan kepada jamaah agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada lembaga eksternal.[198] Integrasi pengajian dengan cicilan pinjaman juga memperkuat dimensi spiritual dan sosial, sejalan dengan pandangan bahwa masjid merupakan pusat pemberdayaan holistik.[199] Temuan ini diperkuat studi Wardiyah dkk yang menegaskan bahwa inovasi keuangan syariah berbasis masjid mampu meningkatkan akses pembiayaan halal, membuka peluang usaha, dan memperkuat solidaritas sosial masyarakat.[200] Dengan demikian, BankZiska tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan mikro, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi sosial-ekonomi berbasis masjid yang berkelanjutan dan partisipatif.

Keberadaan BankZiska sebagai sistem keuangan masjid menunjukkan praktik pemberdayaan yang substantif dan selaras dengan konsep Yasir Yusuf yang menekankan bahwa pemberdayaan bukan sekadar bantuan, tetapi proses transfer akses dan penguatan kapasitas masyarakat.[201] Skema tanpa bunga dan berbasis kepercayaan memperlihatkan upaya meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus membangun partisipasi aktif jamaah, sehingga warga tidak sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi subjek yang berdaya.[202] Pendekatan humanis dan relasional juga memperkuat legitimasi sosial masjid sebagai pusat pemberdayaan

---

[197] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 125.

[198] Ibid., 4–5.

[199] Ibid., 45.

[200] Mia Lasmi Wardiyah dkk., "Mosque-Based Sharia Financial Innovation To Improve The Welfare Of Village Communities In Indonesia," *(JIEI) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. No. 05 2025, 216.

[201] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 125.

[202] Ibid., 74.

umat.[203] Temuan ini sejalan dengan studi Poojha Chaturvedi dkk yang menegaskan bahwa "*bridging social capital directly enhances credit access*" serta menempatkan kepercayaan relasional sebagai ambang utama inklusi keuangan.[204] Dengan demikian, BankZiska tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan mikro, tetapi sebagai mekanisme pembangunan modal sosial yang memperkuat inklusi keuangan berbasis komunitas.

Dari perspektif penerima manfaat, praktik BankZiska menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada distribusi modal, tetapi telah memasuki tahap penguatan kapasitas dan kepercayaan sosial jamaah. Hal ini sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan, partisipasi, dan kemandirian masyarakat melalui perluasan akses terhadap sumber daya.[205] Pendekatan kekeluargaan, kemudahan prosedur, serta pengajian rutin dalam program ini merefleksikan proses transfer kekuatan yang mendorong masyarakat menjadi subjek aktif, bukan sekadar penerima bantuan.[206] Temuan ini juga diperkuat studi Afdawaiza dkk yang menegaskan bahwa integrasi pendidikan dan layanan mikrofinansial penting untuk menciptakan perubahan berkelanjutan pada masyarakat miskin dan tidak cukup hanya menyediakan kredit semata.[207] Dengan demikian, BankZiska dapat disintesis sebagai model pemberdayaan berbasis masjid yang efektif karena menggabungkan akses keuangan inklusif, pembinaan moral, dan penguatan modal sosial secara berkelanjutan.

Implementasi Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga melalui BankZiska menunjukkan praktik pemberdayaan yang selaras dengan konsep Yasir Yusuf, karena tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga mentransfer kekuatan dan

---

[203] Ibid., 45.

[204] Poojha Chaturvedi Shharma dkk., "Exploring the Roles of Social Capital, Social Interaction and Financial Literacy in Shaping Access to Finance for Indian SMEs," *Discover Sustainability*, 11 Februari 2026, 67.

[205] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 45.

[206] Ibid., 89.

[207] Afdawaiza Afdawaiza dkk., "From Social Trust to Halal Industry Dynamic: The Synergy of Islamic Social Capital and Financial Capability in Small Enterprises Sectors," *Mazahib* 24, no. 2 (Desember 2025): 253.

kepercayaan kepada masyarakat melalui skema tanpa agunan dan pembinaan rutin.[208] Pendekatan ini memperlihatkan bahwa jamaah diposisikan sebagai subjek aktif yang didorong menuju kemandirian ekonomi dan sosial, bukan sekadar penerima bantuan.[209] Selain itu, temuan studi Mulauddin dkk menegaskan bahwa lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT berfungsi sebagai instrumen perjuangan ekonomi bagi kelompok akar rumput sekaligus sarana sosialisasi praktik ekonomi Islam untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat.[210] Dengan demikian, BankZiska tidak hanya meningkatkan keberlangsungan usaha warga, tetapi juga memperkuat modal sosial, kepercayaan kolektif, dan kohesi komunitas. Sintesisnya, program ini merepresentasikan model pemberdayaan berbasis masjid yang integrative menggabungkan inklusi keuangan, pembinaan spiritual, dan penguatan solidaritas sehingga berpotensi menciptakan kemandirian jamaah yang berkelanjutan.

d. Program Dana Lingkungan Berbasis RT

Program Dana Lingkungan Berbasis RT di Masjid Baitul Mukhlisin mencerminkan praktik pemberdayaan yang sejalan dengan konsep Yasir Yusuf, yakni proses peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui distribusi akses sumber daya secara kolektif.[211] Skema penyaluran dana kepada 13 RT menunjukkan adanya transfer kekuatan ekonomi dari masjid kepada komunitas lokal sehingga warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pengelola kebutuhan lingkungannya sendiri.[212] Pendekatan transparansi di hadapan warga memperkuat kontrol sosial dan akuntabilitas, yang merupakan unsur penting dalam pemberdayaan partisipatif.[213] Temuan ini juga didukung oleh penelitian Hamzah Haz dkk yang menyatakan bahwa program pemberdayaan berbasis masjid efektif

---

[208] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 114–15.

[209] Ibid., 9.

[210] Aforisma Mulauddin, Atep Hendang Waluya, dan Muhammad Reza Prima Matondang, "Mosque Transformation for Community Economic Empowerment: Integrating Islamic Social Finance, Digitalization, and Pentahelix Collaboration," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 12, no. 2 (Desember 2025): 201.

[211] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 127.

[212] Ibid., 62.

[213] Ibid., 81–82.

ketika mengintegrasikan partisipasi jamaah, pembinaan spiritual, dan dukungan ekonomi sehingga mampu "*foster entrepreneurial spirit and increase the congregation's readiness to face economic challenges*".[214] Dengan demikian, program berbasis RT ini tidak hanya bersifat distributif, tetapi transformasional karena memperkuat kemandirian kolektif, kepercayaan sosial, dan keberlanjutan kesejahteraan berbasis komunitas masjid.

Skema pembagian Dana Lingkungan Berbasis RT menunjukkan praktik pemberdayaan yang sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf, karena program tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi mentransfer kontrol pengelolaan kepada masyarakat melalui musyawarah RT.[215] Keleluasaan menentukan prioritas penggunaan dana mencerminkan proses peningkatan kapasitas, partisipasi aktif, dan kemandirian warga sebagaimana esensi pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama.[216] Peran masjid sebagai fasilitator juga menguatkan fungsi sosial-keagamaan dalam perspektif Islam yang menekankan tolong-menolong dan penguatan ukhuwah.[217] Temuan ini diperkuat studi Dipa dkk yang menyatakan bahwa desentralisasi membuka ruang partisipasi warga agar program pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, meskipun tetap perlu memastikan inklusivitas kelompok lemah.[218] Dengan demikian, model ini merefleksikan pemberdayaan partisipatif berbasis masjid yang adaptif, transparan, dan berpotensi berkelanjutan apabila mekanisme partisipasi terus dijaga inklusif.

Program Dana Lingkungan Berbasis RT menunjukkan praktik pemberdayaan yang sejalan dengan konsep Yasir Yusuf, karena tidak berhenti pada distribusi bantuan, tetapi mendorong transfer akses dan kontrol kepada masyarakat

---

[214] Abdul Hamzah Haz dkk., "Mosque-Based Community Empowerment to Improve Welfare in Pringsewu Regency, Lampung Province," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 15, no. 12 (Desember 2025): 2409.

[215] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 59.

[216] Ibid., 62.

[217] Ibid., 91.

[218] Pradeka Reza Dipa, Saipul Saipul, dan Indarto Kus, "Strategic Governance Through Communities and Sustainable Community Empowerment in Prapatan Subdistrict, Balikpapan City," *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 7, no. 2 (November 2025): 407.

melalui mekanisme musyawarah dan pengelolaan mandiri di tingkat RT.[219] Keterlibatan warga dalam penentuan penggunaan dana memperkuat partisipasi aktif dan kapasitas kolektif, sehingga masyarakat berperan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.[220] Hal ini mempertegas orientasi pemberdayaan menuju kemandirian sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Temuan ini juga selaras dengan studi Purnamasari dkk yang menegaskan bahwa keberhasilan program berbasis komunitas sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.[221] Dengan demikian, Program Dana Lingkungan Berbasis RT dapat dipahami sebagai model pemberdayaan partisipatif yang memperkuat legitimasi sosial, akuntabilitas lokal, dan ketahanan ekonomi komunitas secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Program Dana Lingkungan Berbasis RT menunjukkan praktik pemberdayaan yang sejalan dengan konsep Yasir Yusuf, karena masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi dilibatkan aktif dalam musyawarah penentuan penggunaan dana sehingga terjadi transfer akses dan kontrol terhadap sumber daya.[222] Model ini memperkuat kemandirian kolektif sekaligus meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan warga, yang merupakan inti pemberdayaan partisipatif.[223] Selain itu, transparansi penyerahan dana di ruang terbuka mencerminkan akuntabilitas sosial yang memperkuat legitimasi masjid sebagai fasilitator pemberdayaan.[224] Perspektif studi oleh Astawa dkk juga menegaskan bahwa partisipasi warga, transparansi, dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam tata kelola inklusif untuk meningkatkan akses kelompok berpendapatan rendah terhadap layanan dan sumber daya.[225] Dengan demikian, program ini tidak

---

[219] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 59.

[220] Ibid., 45.

[221] Irma Purnamasari dkk., "COMMUNITY PARTICIPATION IN SMART VILLAGE IMPLEMENTATION," *Jurnal Governansi* 11, no. 1 (April 2025): 89–90.

[222] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 169.

[223] Ibid., 192.

[224] Ibid., 153.

[225] I. Wayan Astawa, Gede Wirata, dan Sri Sulandari, "Digital Public Participation and Responsive Governance in Village Development Planning," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 14, no. 1 (Januari 2026): 659.

hanya bersifat distributif, tetapi transformatif karena mendorong kemandirian, solidaritas sosial, dan tata kelola komunitas yang berkelanjutan.

e. Program Sosial Produktif dan Pemberdayaan SDM Lokal

Program sosial produktif dan pembinaan SDM lokal yang dijalankan masjid mencerminkan makna pemberdayaan menurut Yasir Yusuf, yakni bukan sekadar distribusi bantuan, tetapi proses membangun kapasitas, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat agar mereka mampu mengenali dan mengembangkan potensi diri secara mandiri serta meningkatkan kesejahteraan.[226] Pendekatan yang menyentuh dimensi material, edukatif, dan motivasional memperkuat kemandirian jamaah secara holistik.[227] Konsep ini selaras dengan studi oleh Bakhtiar Hadi yang menunjukkan bahwa masjid berfungsi sebagai pusat pemberdayaan komunitas yang tidak hanya menguatkan ikatan spiritual tetapi juga mendukung inovasi sosial dan pembangunan berkelanjutan melalui pelatihan keterampilan, usaha mikro, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang beragam.[228] Dengan demikian, program sosial produktif masjid menjadi instrumen strategis pemberdayaan berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai keislaman dengan pengembangan kapasitas ekonomi dan sosial jamaah, membentuk masyarakat yang tidak hanya berdaya secara ekonomi tetapi juga kokoh secara sosial dan spiritual.

Analisis terhadap implementasi pengurus masjid yang aktif dalam menjalankan program sosial produktif tersebut menunjukkan keterkaitan kuat dengan konsep pemberdayaan yang dijelaskan Yasir Yusuf, yaitu pemberdayaan bukan sekadar bantuan sesaat tetapi proses sistematis yang membangun kapasitas, partisipasi aktif, serta kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat.[229] Keterlibatan pengurus sukarela dalam berbagai divisi serta dampak nyata bantuan kesehatan, santunan, dan kesempatan kerja mencerminkan adanya transfer kemampuan dan

---

[226] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 176.

[227] Ibid., 4.

[228] Bakhtiar Hadi, "The Role of Mosques as Centers of Social Innovation in the Development of Urban Islamic Communities," *Journal on Islamic Studies* 1, no. 4 (Februari 2025): 248.

[229] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 32.

kontrol kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.[230] Selain itu, penelitian oleh Mardi empiris menunjukkan bahwa masjid yang dijadikan pusat pemberdayaan mampu memfasilitasi pengembangan usaha mikro dan pengelolaan dana umat secara produktif, serta meningkatkan partisipasi komunitas dalam aktivitas ekonomi dan sosial yang mendukung kesejahteraan jamaah.[231] Sintesisnya, pengelolaan masjid yang melibatkan pengurus secara aktif serta fokus pada pemberdayaan ekonomi dan sosial jamaah memperkuat posisi masjid sebagai agen transformasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ibadah tetapi juga berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas hidup komunitas.

Integrasi pembinaan spiritual dengan peningkatan kapasitas ekonomi dalam kegiatan pengajian dan pelatihan usaha di masjid mencerminkan esensi pemberdayaan sebagaimana dijelaskan Yasir Yusuf, yaitu proses yang tidak hanya memberikan bantuan tetapi juga memperkuat kemampuan, kesadaran, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola potensi mereka sendiri.[232] Pendekatan ini mendorong jamaah untuk mengenali dan mengembangkan keterampilan praktis yang menunjang kemandirian ekonomi sambil tetap dibingkai oleh nilai-nilai keislaman, sehingga pemberdayaan bersifat holistik dan berkelanjutan.[233] Hal ini juga di perkuat oleh penelitian Fathor Rozi yang menunjukkan bahwa pelatihan kewirausahaan berbasis masjid efektif dalam meningkatkan keterampilan dan kapasitas ekonomi komunitas serta mendorong pertumbuhan usaha mikro di sekitar lingkungan masjid, memperkuat keterlibatan jamaah dalam kegiatan produktif yang berdampak pada kesejahteraan mereka.[234] Sintesis ini menegaskan bahwa integrasi pembinaan spiritual dan pelatihan praktis merupakan strategi pemberdayaan yang

---

[230] Ibid., 109.

[231] Moh Mardi, "Peran Masjid Dalam Pengembangan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat," *Journal of Economic and Islamic Research* 3, no. 1 (Desember 2024): 396.

[232] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 14.

[233] Ibid., 17.

[234] Fathor Rozi, "Revitalizing the Role of the Mosque in Local Potential-Based Community Economic Empowerment," *GUYUB: Journal of Community Engagement* 6, no. 2 (Juni 2025): 501.

komprehensif dan relevan dengan peran masjid sebagai pusat transformasi ekonomi umat.

Kalimat di atas menggambarkan konsep pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan penjelasan Yasir Yusuf tentang pemberdayaan sebagai proses yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian individu, bukan sekadar bantuan sosial.[235] Program yang digambarkan masjid ini tidak hanya memberi santunan dan layanan kesehatan sebagai bentuk bantuan, tetapi menggabungkannya dengan pembinaan usaha jangka panjang yang mendorong warga untuk mengoptimalkan potensi dirinya serta menciptakan sumber penghasilan mandiri, sehingga mendukung transformasi peran masjid sebagai fasilitator perubahan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.[236] Yasir Yusuf menekankan bahwa pemberdayaan harus memungkinkan masyarakat mendapatkan kontrol lebih besar terhadap kehidupannya dan berpartisipasi aktif dalam perencanaan serta pelaksanaan program pemberdayaan.[237] Selain itu, studi Safi'i menunjukkan bahwa masjid dapat berfungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi komunitas melalui pelatihan keterampilan, pengelolaan dana umat, serta dukungan untuk UMKM yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.[238]

2. Masjid NU Ponorogo

a. Program Pembiayaan Syariah (Koperasi Simpan-Pinjam Tanpa Bunga)

Konsep pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan penjelasan Yasir Yusuf tentang pemberdayaan sebagai proses yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian individu, bukan sekadar bantuan sosial.[239] Program yang digambarkan masjid ini tidak hanya memberi santunan dan layanan kesehatan sebagai bentuk bantuan, tetapi menggabungkannya dengan pembinaan usaha jangka panjang yang mendorong warga untuk mengoptimalkan potensi dirinya serta

---

[235] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 34.

[236] Ibid., 110.

[237] Ibid., 8.

[238] Muhammad Aris Safi'i dkk., "Strengthening the Role of Mosques for Community Economic Empowerment," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 13, no. 1 (Juni 2025): 41.

[239] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 4–5.

menciptakan sumber penghasilan mandiri, sehingga mendukung transformasi peran masjid sebagai fasilitator perubahan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.[240] Yasir Yusuf menekankan bahwa pemberdayaan harus memungkinkan masyarakat mendapatkan kontrol lebih besar terhadap kehidupannya dan berpartisipasi aktif dalam perencanaan serta pelaksanaan program pemberdayaan.[241] Studi akademik oleh Mulauddin menunjukkan bahwa masjid dapat berfungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi komunitas melalui pelatihan keterampilan, pengelolaan dana umat, serta dukungan untuk UMKM yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.[242]

Praktik pemberdayaan yang selaras dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan bukan sekadar bantuan finansial, melainkan proses meningkatkan kemampuan dan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.[243] Keberadaan koperasi masjid dengan skema tanpa bunga tidak hanya memberi modal, tetapi juga mentransfer kekuatan ekonomi melalui kemudahan akses, rasa percaya, dan partisipasi jamaah sehingga mendorong kemandirian pelaku usaha kecil. Hal ini memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan sosial-ekonomi umat.[244] Temuan dalam studi oleh Nawawi dkk juga menguatkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah berperan penting dalam program pemberdayaan karena mampu memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kelompok rentan.[245] Dengan demikian, koperasi masjid dapat dipahami sebagai instrumen pemberdayaan berkelanjutan yang tidak hanya menyelesaikan kebutuhan modal jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas ekonomi, solidaritas sosial, dan kemandirian jamaah secara sistematis.

---

[240] Ibid., 6.

[241] Ibid., 87.

[242] Aforisma Mulauddin, Atep Hendang Waluya, dan Muhammad Reza Prima Matondang, "Mosque Transformation for Community Economic Empowerment: Integrating Islamic Social Finance, Digitalization, and Pentahelix Collaboration," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 12, no. 2 (Desember 2025): 191.

[243] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 88.

[244] Ibid., 93.

[245] Zuhrinal M. Nawawi, Andri Soemitra, dan Mahfuzah, "Women Economic Empowerment Through Sharia Micro-Finance Institutions in Indonesia: A Qualitative Research," *IQTISHADIA*, t.t., 268.

Rendahnya pengetahuan jamaah tentang koperasi syariah mencerminkan belum optimalnya proses pemberdayaan, khususnya pada aspek transfer kesadaran dan akses informasi. Dalam perspektif Yasir Yusuf, pemberdayaan seharusnya membangun kapasitas, partisipasi, dan kontrol masyarakat terhadap sumber daya; sehingga kondisi jamaah yang "belum pernah dengar" menandakan proses tersebut belum sepenuhnya tercapai.[246] Hal ini juga mengindikasikan bahwa fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan masih menghadapi kesenjangan komunikasi program. Sejalan dengan itu, kajian dalam buku oleh Kunhibava dkk tentang *Islamic Microfinance* menekankan bahwa tantangan utama lembaga keuangan mikro syariah sering berkaitan dengan isu implementasi dan hambatan operasional yang memengaruhi efektivitas program di lapangan.[247] Dengan demikian, dapat disintesis bahwa keberhasilan pemberdayaan berbasis masjid tidak hanya ditentukan oleh desain pembiayaan syariah, tetapi sangat bergantung pada strategi literasi, sosialisasi partisipatif, dan penguatan komunikasi agar jamaah benar-benar bertransformasi menjadi subjek yang berdaya dan mandiri.

b. Program Usaha Produktif Berbasis Masjid

Orientasi Program Usaha Produktif Berbasis Masjid sebagaimana disampaikan pengurus menunjukkan keselarasan kuat dengan konsep pemberdayaan menurut Yasir Yusuf. Upaya menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial-ekonomi mencerminkan proses transfer akses dan penguatan kapasitas jamaah, bukan sekadar bantuan karitatif.[248] Dalam kerangka ini, program usaha produktif berfungsi membuka peluang partisipasi ekonomi sekaligus membangun kemandirian komunitas secara berkelanjutan, sejalan dengan pandangan bahwa pemberdayaan harus meningkatkan kontrol masyarakat atas sumber daya.[249] Temuan ini juga diperkuat oleh studi oleh Cokrohadisumarto dan Sari yang menegaskan bahwa model pemberdayaan berbasis masjid memposisikan masjid sebagai "*a place of productive empowerment to overcome poverty*",

---

[246] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 101.

[247] Sherin Kunhibava dkk., "Islamic Microfinance," *Springer Books*, 2024, 97–98.

[248] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 42.

[249] Ibid., 119.

sehingga fungsi religius terintegrasi dengan penguatan ekonomi.[250] Dengan demikian, sintesis menunjukkan bahwa transformasi peran masjid menuju pusat ekonomi jamaah merupakan strategi pemberdayaan yang normatif secara teoretis dan relevan secara empiris untuk membangun kemandirian umat.

Praktik pengelolaan kantin jamaah dan pasar takjil menunjukkan bahwa program usaha produktif berbasis masjid telah bergerak pada pola pemberdayaan partisipatif. Keterlibatan ibu-ibu Muslimat NU dan remaja masjid mencerminkan gagasan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan bukan sekadar bantuan, tetapi proses transfer akses dan penguatan kapasitas agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi.[251] Skema bagi hasil yang proporsional juga memperlihatkan adanya distribusi manfaat yang adil sekaligus peningkatan kontrol ekonomi pada level jamaah.[252] Temuan ini sejalan dengan studi oleh Rozi yang menegaskan bahwa pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal mampu "*improve the community's skills and confidence in developing products*" sehingga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekitar masjid.[253] Dengan demikian, unit usaha kolaboratif yang diinisiasi takmir tidak hanya berfungsi menambah kas masjid, tetapi juga menjadi instrumen strategis pembentukan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian ekonomi jamaah secara berkelanjutan.

Pemanfaatan aset fisik masjid melalui penyewaan aula dan halaman menunjukkan praktik pemberdayaan yang sejalan dengan konsep Yasir Yusuf, karena pengelolaan tersebut tidak berhenti pada penghimpunan dana, tetapi mengarah pada penguatan kemandirian kelembagaan dan keberlanjutan manfaat ekonomi bagi jamaah.[254] Transparansi administrasi serta kontrol langsung oleh takmir mencerminkan proses transfer akses sumber daya yang memungkinkan

---

[250] Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto dan Yuli Indah Sari, *Mosque-Based Integrated Community Empowerment Model | Islamic Social Finance*, 11 Maret 2024, 7.

[251] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 135.

[252] Ibid., 39.

[253] Rozi, "Revitalizing the Role of the Mosque in Local Potential-Based Community Economic Empowerment," 504.

[254] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 51.

masjid memiliki daya kelola ekonomi sendiri.[255] Sejalan dengan temuan penelitian oleh Suarni dkk masjid yang dikelola secara profesional dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, bukan sekadar ruang ibadah ritual.[256] Dengan demikian, strategi optimalisasi aset ini memperlihatkan integrasi antara nilai syariah, tata kelola modern, dan orientasi kemaslahatan umat, sehingga masjid bergerak dari fungsi konsumtif menuju institusi pemberdayaan ekonomi yang mandiri dan berorientasi jangka panjang.

Sinergi antara masjid, PCNU, dan kompleks pendidikan Ma'arif menunjukkan praktik pemberdayaan yang bersifat partisipatif dan berbasis jaringan sosial. Pola ini sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan bukan sekadar bantuan, melainkan proses transfer akses dan penguatan kapasitas masyarakat melalui keterlibatan aktif berbagai pihak.[257] Kehadiran lapak usaha di sekitar masjid memperluas peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kontrol masyarakat terhadap sumber daya lokal, sehingga mendorong kemandirian ekonomi jamaah.[258] Temuan ini diperkuat oleh temuan Cokrohadisumarto dan Sari yang menegaskan bahwa model pemberdayaan berbasis masjid perlu melibatkan banyak aktor institusional secara terpadu untuk memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan produktif.[259] Dengan demikian, kolaborasi kelembagaan di sekitar masjid tidak hanya menciptakan keramaian ekonomi, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Keberhasilan model pemberdayaan ekonomi masjid telah menghasilkan dampak nyata dan pengakuan eksternal, yang sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan bukan sekadar bantuan, tetapi proses peningkatan

---

[255] Ibid., 125.

[256] Suarni dkk., "Community Empowerment Based on Muhammadiyah Mosque in Maros-Pangkep, South Sulawesi," 74.

[257] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 167.

[258] Ibid., 7.

[259] Cokrohadisumarto dan Sari, *Mosque-Based Integrated Community Empowerment Model | Islamic Social Finance*, 8.

kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat.[260] Konsistensi program dan kunjungan masjid lain untuk belajar menandakan terjadinya transfer akses dan penguatan kontrol jamaah terhadap potensi ekonomi mereka. Hal ini menegaskan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan strategis sebagaimana ditekankan Yusuf.[261] Temuan ini juga diperkuat oleh temuan Safi'i dkk yang menyatakan bahwa model pemberdayaan berbasis masjid yang partisipatif dan berkelanjutan efektif memperkuat kapasitas ekonomi jamaah serta "*can be replicated by other mosques as centers for driving the Muslim economy*".[262] Dengan demikian, capaian penghargaan tersebut bukan hanya simbol prestasi, tetapi bukti transformasi kelembagaan masjid menuju ekosistem pemberdayaan ekonomi umat yang mandiri dan replikatif.

Dari perspektif jamaah, dampak ekonomi yang dirasakan menunjukkan bahwa program usaha produktif masjid telah bergerak pada level pemberdayaan substantif. Hal ini selaras dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan menekankan proses peningkatan kapasitas dan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga mampu mandiri secara ekonomi.[263] Kesaksian jamaah mengenai peluang berjualan, ramainya aktivitas, dan keterlibatan ibu-ibu dalam pengelolaan kantin mencerminkan terjadinya transfer akses ekonomi yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan.[264] Temuan ini sejalan dengan studi oleh Suarni dkk yang menegaskan bahwa masjid yang mengembangkan aktivitas ekonomi komunitas mampu meningkatkan kesejahteraan lokal sekaligus memperkuat kohesi sosial masyarakat.[265] Dengan demikian, pengalaman empiris jamaah memperlihatkan bahwa fungsi masjid telah melampaui peran ritual menuju pusat pemberdayaan

---

[260] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 14.

[261] Ibid., 41.

[262] Muhammad Aris Safi'i dkk., "Strengthening the Role of Mosques for Community Economic Empowerment," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 13, no. 1 (Juni 2025): 38–39.

[263] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 41.

[264] Ibid., 93.

[265] Suarni dkk., "Community Empowerment Based on Muhammadiyah Mosque in Maros-Pangkep, South Sulawesi," 74.

ekonomi yang hidup, inklusif, dan berdampak nyata bagi kemandirian ekonomi warga di sekitarnya.

Aktivitas ekonomi berbasis masjid telah menghasilkan efek pengganda (*multiplier effect*) melalui perluasan akses pasar bagi pedagang kecil dan dukungan non-finansial yang memperkuat daya saing mereka. Praktik ini selaras dengan pandangan Yasir Yusuf yang menegaskan bahwa pemberdayaan bukan sekadar bantuan, melainkan proses transfer akses, peningkatan kapasitas, dan partisipasi aktif masyarakat menuju kemandirian.[266] Kebijakan pengurus yang membuka ruang usaha gratis dan memfasilitasi promosi melalui jaringan jamaah mencerminkan upaya membangun kontrol ekonomi di tingkat akar rumput.[267] Temuan ini juga sejalan dengan studi oleh Efiyanti dkk yang menegaskan bahwa keterlibatan institusi masjid dalam aktivitas ekonomi mampu membantu pedagang kecil keluar dari keterbatasan akses modal dan mengurangi ketergantungan ekonomi.[268] Dengan demikian, pola pemberdayaan yang dilakukan masjid memperlihatkan integrasi antara nilai keislaman, penguatan kapasitas ekonomi, dan strategi inklusif yang berorientasi pada kemandirian serta kesejahteraan jamaah secara berkelanjutan.

c. Program Penguatan Dana Sosial Produktif

Penguatan Dana Sosial Produktif yang dilakukan takmir menunjukkan praktik pemberdayaan yang sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Yasir Yusuf, yakni pemberdayaan sebagai proses sistematis untuk membangun kapasitas dan kemandirian melalui penguatan akses sumber daya.[269] Diversifikasi sumber pendapatan mulai dari kotak amal, sewa aset, hingga infak rutin merefleksikan upaya transfer kekuatan ekonomi agar program masjid tidak bergantung pada bantuan sesaat, tetapi berkelanjutan.[270] Temuan ini juga didukung penelitian oleh Arsam dkk yang menegaskan bahwa pengelolaan dana ZIS secara produktif dan

---

[266] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 176.

[267] Ibid., 182.

[268] Alfiana Yuli Efiyanti, Muhammad Ali, dan Saiful Amin, "Institution Reinforcement of Mosque in Social Economic Empowerment of Small Traders Community," *Journal of Socioeconomics and Development* 4, no. 2 (Juli 2021): 193.

[269] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 42.

[270] Ibid., 7–8.

berkelanjutan memungkinkan masjid menciptakan ekosistem pemberdayaan yang mendorong penerima manfaat menjadi mandiri dan bahkan bertransformasi menjadi donatur baru.[271] Dengan demikian, strategi penguatan dana masjid tidak hanya menopang kegiatan sosial, tetapi juga membangun siklus kemandirian ekonomi jamaah yang berkesinambungan.

Pengelolaan dana sosial yang fleksibel melalui program Jumat Berkah dan pengajian subuh menunjukkan praktik pemberdayaan yang sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf, karena masjid tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi mendorong partisipasi aktif jamaah melalui kombinasi swadaya dan stimulus kelembagaan.[272] Skema donasi sukarela pada Jumat Berkah memperlihatkan transfer akses dan kesadaran kolektif, sementara penggunaan kas masjid untuk konsumsi pengajian berfungsi sebagai strategi peningkatan partisipasi, sehingga jamaah didorong menjadi subjek yang terlibat.[273] Temuan ini diperkuat oleh temuan Saerozi yang menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan berbasis masjid sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dan dukungan manajerial yang memadai untuk mengoptimalkan program sosial-ekonomi.[274] Dengan demikian, pola pendanaan adaptif tersebut mencerminkan proses pemberdayaan partisipatif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan langsung, tetapi juga memperkuat kemandirian dan kohesi sosial jamaah secara berkelanjutan.

Praktik pengelolaan dana sosial produktif yang dirasakan oleh penyewa menunjukkan bahwa masjid tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi ekonomi jamaah. Hal ini sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan merupakan proses transfer akses dan penguatan kapasitas masyarakat agar tidak sekadar menjadi penerima

---

[271] Arsam, Suhaida Nik Abdul Majid, dan Amaludin, "The nexus of management model and social transformation: A case study of da'wah strategy at the Jogokariyan mosque," 250.

[272] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 8.

[273] Ibid., 15.

[274] Saerozi dkk., "Mosque Management for the Prosperity of the Congregation in Mosque Typology in Kendal Regency, Community Empowerment Perspective," *Prosperity: Journal of Society and Empowerment*, 2025, 136.

manfaat, tetapi turut merasakan kontrol atas sumber daya.[275] Transparansi kontrak, alur pemasukan, dan pemanfaatan dana untuk kegiatan sosial memperlihatkan adanya upaya sistematis menuju kemandirian kelembagaan dan penguatan legitimasi sosial masjid.[276] Perspektif ini diperkuat oleh temuan Darmawan dkk yang menegaskan bahwa "*social capital theory emphasizes the significance of trust, networks, and collective action in promoting community-based economic development*".[277] Dengan demikian, tata kelola yang transparan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat modal sosial dan keberlanjutan pemberdayaan berbasis masjid.

Pengelolaan dana masjid telah bergerak menuju pola pemberdayaan yang produktif dan akuntabel, karena dana yang dihimpun tidak berhenti pada fungsi administratif, tetapi didistribusikan kembali dalam bentuk program sosial-keagamaan yang dirasakan langsung oleh jamaah. Praktik ini sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf yang menegaskan bahwa pemberdayaan bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan proses transfer akses dan penguatan kapasitas masyarakat menuju kemandirian. [278] Transparansi dan siklus pemanfaatan dana tersebut juga memperlihatkan adanya partisipasi jamaah sebagai subjek, bukan sekadar objek.[279] Temuan ini diperkuat oleh Abu Risky dkk yang menyatakan bahwa masjid yang dikelola secara transparan dan partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan jamaah serta memperkuat kepercayaan komunitas dalam program ekonomi berbasis masjid .[280] Dengan demikian, praktik pengelolaan dana yang dikemukakan Bapak Ilham merepresentasikan model pemberdayaan

[275] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 14–15.

[276] Ibid., 15.

[277] Hendra Darmawan, Muhammad Aziz, dan Nurkholis, "Fiqh Discourse on Water: Integrating Social Capital and Mosque-Based Charity through Concurrent Triangulation," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 21, no. 2 (Desember 2025): 218.

[278] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 170.

[279] Ibid., 176.

[280] Abu Risky dkk., "Islamic Educational Values in the Empowerment of MSMEs at Masjid Jogokariyan: Reviving the Mosque as a Center of Community Prosperity," *Unisia* 43, no. 1 (Juni 2025): 207.

berbasis masjid yang berorientasi pada keberlanjutan, akuntabilitas substantif, dan penguatan modal sosial jamaah.

d. Program Pengembangan dan Digitalisasi Ekonomi Masjid (Rencana Strategis)

Praktik digitalisasi ekonomi masjid yang direncanakan menunjukkan pergeseran pengelolaan menuju model pemberdayaan yang lebih modern dan berkelanjutan. Sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf, langkah pembuatan website dan donasi daring tidak sekadar bersifat administratif, tetapi merupakan proses memperluas akses, partisipasi, dan kontrol jamaah terhadap sumber daya masjid.[281] Upaya ini memperlihatkan transfer kekuatan melalui transparansi informasi dan perluasan jaringan donatur sehingga jamaah berpotensi menjadi subjek aktif dalam ekosistem ekonomi masjid.[282] Temuan kajian oleh Moses Adeolu Agoi dkk juga menegaskan bahwa masjid secara historis bersifat multifungsi dan berperan dalam "*education, social welfare, governance, and economic redistribution*" sehingga adaptasi teknologi merupakan kelanjutan logis dari fungsi sosial-ekonominya.[283] Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas kelembagaan, tetapi juga memperkuat basis pemberdayaan partisipatif berbasis masjid yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kemandirian jamaah dalam jangka panjang.

Keterlibatan generasi muda dalam program ekonomi masjid sebagaimana disampaikan pengurus menunjukkan praktik pemberdayaan yang sejalan dengan konsep Yasir Yusuf, yaitu pemberdayaan sebagai proses peningkatan kapasitas dan partisipasi aktif masyarakat, bukan sekadar pemberian bantuan.[284] Upaya membuka ruang bagi pelajar untuk belajar wirausaha mencerminkan transfer akses dan penguatan kontrol sosial-ekonomi jamaah sejak dini, sehingga mendorong terbentuknya kemandirian berkelanjutan.[285] Selain itu, fungsi masjid sebagai

---

[281] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 185.

[282] Ibid., 194.

[283] Moses Adeolu Agoi dkk., "Empowering Mosque Committees' Economy through Digital Technology and Eco-Friendly Architecture Implementation in Nigeria," *Dharmahita: Journal of Community Service and Development*, 29 Desember 2025, 182.

[284] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 42.

[285] Ibid., 49.

“laboratorium sosial” menegaskan perannya tidak hanya sebagai ruang ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan ekonomi dan karakter umat.[286] Temuan ini diperkuat oleh Sumiah Nasution yang menunjukkan bahwa pelatihan kewirausahaan berbasis masjid mampu meningkatkan kompetensi pemuda secara signifikan, dengan skor peserta naik dari 58,4 menjadi 84,7 serta 96% peserta menyatakan puas terhadap program.[287] Dengan demikian, integrasi regenerasi pemuda dan edukasi kewirausahaan menegaskan bahwa strategi masjid telah bergerak dari pola karitatif menuju pemberdayaan partisipatif yang berorientasi keberlanjutan

[286] Ibid., 64.

[287] Sumiah Nasution dkk., “Pelatihan Kewirausahaan Syariah bagi Remaja Masjid DKM AlIkhlas sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Islam,” *Juragan* Vol. 2, No. 2 (2025): 391.

BAB IV
KENDALA DAN TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DI MASJID BAITUL MUKHLISIN DAN MASJID NU

A. Data Kendala Dan Tantangan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Di Masjid Baitul Mukhlisin Dan Masjid Nu

1. Masjid Baitul Mukhlisin

a. Program Usaha Berkelanjutan Berbasis Masjid (BUMM)

Program Usaha Berkelanjutan Berbasis Masjid (BUMM) yang dijalankan dalam bentuk usaha air isi ulang dan Toko MBS menunjukkan adanya semangat kemandirian ekonomi jamaah serta komitmen masjid dalam membangun basis ekonomi yang lebih produktif. Program ini dirancang tidak hanya sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang melibatkan partisipasi aktif jamaah dalam pengelolaan dan pengembangan aset masjid. Melalui BUMM, masjid berupaya menciptakan sumber pendapatan mandiri yang dapat menopang kegiatan sosial dan keagamaan secara berkelanjutan. Namun demikian, dalam implementasinya program ini menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek struktural dan manajerial. Pada tahap awal pelaksanaan, keterbatasan modal usaha membuat skala pengembangan berjalan secara bertahap dan hati-hati. Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas dalam hal manajemen usaha, pencatatan keuangan, serta perencanaan bisnis juga menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut diakui langsung oleh pengurus, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Suwardi selaku ketua takmir:

> *"Kendala utama yang kami rasakan itu soal modal dan sumber daya manusia. Di awal menjalankan program, kami sebagai pengurus juga masih belajar, belum punya pengalaman manajemen yang cukup. Usaha seperti air isi ulang dan toko masjid masih dikelola secara sederhana oleh jamaah dengan sistem*

gotong royong, bahkan belum ada upah tetap. Karena belum ada struktur pengelolaan usaha yang jelas, jadi beberapa kegiatan sempat berjalan agak lambat dan belum bisa dikelola secara profesional maupun berkelanjutan."[288]

Keterbatasan modal tersebut semakin terasa ketika program memasuki tahap pengembangan fisik usaha yang lebih serius dan membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar. Pada fase ini, BUMM tidak lagi sekadar menjalankan operasional harian, tetapi mulai berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar usaha yang dijalankan mampu bersaing serta memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada jamaah dan masyarakat sekitar. Renovasi Toko MBS menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas ruang usaha, memperbaiki tata letak, serta meningkatkan kenyamanan konsumen. Namun, kebutuhan anggaran yang tinggi membuat pengurus harus berpikir lebih kreatif dan kolaboratif dalam mencari sumber pendanaan. Ketergantungan pada kas internal masjid tentu tidak memungkinkan untuk menutup seluruh kebutuhan biaya tersebut. Oleh karena itu, diperlukan dukungan eksternal melalui kerja sama kelembagaan dan partisipasi donatur agar proses pengembangan tetap dapat berjalan tanpa mengganggu stabilitas program yang sudah ada. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Khairul Anwar:

"Waktu renovasi Toko MBS itu biayanya cukup besar, sekitar 900 juta rupiah. Jadi kami tidak bisa jalan sendiri, akhirnya bekerja sama dengan Muhammadiyah dan juga mencari donatur untuk membantu pembiayaannya."[289]

Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program tidak hanya bertumpu pada kekuatan internal masjid, tetapi juga pada jejaring kelembagaan dan dukungan eksternal. Di sisi lain, untuk mengatasi persoalan manajerial dan operasional, pengurus membangun mekanisme koordinasi yang intensif. Bapak Khairul Anwar juga menambahkan:

---

[288] Suwardi, *Wawancara*, Ketua Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 18 April 2025

[289] Khairul Anwar, *Wawancara*, Penanggung Jawab Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 28 Oktober 2025

"Selain itu, karena kegiatannya cukup padat, kami pengurus rutin mengadakan rapat dua kali seminggu yang biasa kami sebut 'rapat pakdet'. Di situ kami membahas kendala-kendala yang ada di lapangan supaya bisa segera dicarikan solusinya."[290]

Dari perspektif masyarakat, keberadaan usaha masjid melalui Program Usaha Berkelanjutan Berbasis Masjid (BUMM) dinilai memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam mendukung kebutuhan ekonomi warga sekitar. Kehadiran unit usaha seperti toko masjid menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan toko pada umumnya. Selain faktor harga, kedekatan emosional antara jamaah dan pengelola usaha juga menjadi nilai tambah tersendiri, karena masyarakat merasa memiliki dan ikut mendukung keberlangsungan usaha tersebut. Namun demikian, pada masa awal pelaksanaan program, masih terdapat beberapa kendala teknis, terutama terkait jam operasional dan konsistensi pelayanan yang belum stabil. Hal ini dipengaruhi oleh proses penyesuaian sistem pengelolaan yang masih berkembang. Seiring waktu, pembenahan manajemen mulai dilakukan sehingga pelayanan menjadi lebih teratur dan profesional. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Amam selaku ketua RT sekaligus warga sekitar:

"Kalau menurut saya, usaha masjid ini bagus karena bisa membantu warga dapat barang dengan harga lebih terjangkau. Tapi kadang buka tokonya belum tentu setiap hari, jadi kalau pas butuh cepat kadang agak kesulitan diawal awal menjalankan program tapi sekarang sudah bagus sudah di kelola baik seperti surya mart pada umumnya"[291]

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Husain yang melihat Program Usaha Berkelanjutan Berbasis Masjid (BUMM) sebagai langkah positif dalam membangun kemandirian ekonomi jamaah, namun tetap memerlukan pembenahan di beberapa aspek teknis dan operasional. Menurutnya, keberadaan usaha air isi

---

[290] Khairul Anwar, *Wawancara*, Penanggung Jawab Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 28 Oktober 2025

[291] Amam, *Wawancara*, Ketua RT Sekaligus Warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 1 Desember 2025

ulang dan Toko MBS telah memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar karena memudahkan akses terhadap kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau. Meski demikian, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kekurangan yang menunjukkan bahwa sistem pengelolaan belum sepenuhnya berjalan optimal. Keterbatasan stok barang, pola pelayanan yang belum konsisten, serta manajemen distribusi yang masih sederhana menjadi catatan penting bagi keberlanjutan program. Evaluasi tersebut bukan bentuk kritik negatif, melainkan dorongan agar BUMM dapat berkembang menjadi unit usaha yang lebih profesional, tertata, dan mampu bersaing secara sehat di tingkat lokal. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Husain selaku pedagang sekaligus warga sekitar:

> *"Kami senang ada usaha dari masjid, tapi kadang pelayanan atau stok barangnya masih terbatas. Semoga ke depannya bisa lebih rapi dan profesional supaya kita warga makin terbantu."*[292]

Program Usaha Berkelanjutan Berbasis Masjid (BUMM) merupakan inisiatif strategis dalam membangun kemandirian ekonomi jamaah melalui pengelolaan unit usaha produktif seperti air isi ulang dan Toko MBS. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan masjid, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Namun, dalam implementasinya, BUMM menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan modal, kapasitas manajerial, dan sistem operasional yang pada awalnya belum tertata secara profesional. Upaya renovasi dan pengembangan usaha menunjukkan adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, meskipun memerlukan dukungan eksternal dan jejaring kelembagaan. Dari perspektif masyarakat, program ini dinilai memberikan manfaat nyata, terutama dalam penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Meski masih terdapat evaluasi terkait konsistensi pelayanan dan pengelolaan stok, secara umum BUMM memperlihatkan proses pembelajaran kelembagaan yang progresif menuju tata kelola usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan.

---

[292] Husain, *Wawancara*, Pedagang Sekaligus warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 14 Novembar 2025

b. Program Usaha Air Minum Isi Ulang (Airku)

Program Usaha Air Minum Isi Ulang (Airku) merupakan salah satu bentuk konkret pengembangan ekonomi berbasis masjid yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan mandiri bagi lembaga. Kehadiran unit usaha ini tidak hanya bertujuan menyediakan air minum layak konsumsi dengan harga terjangkau, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan jamaah melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas ekonomi produktif. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Airku masih berada pada tahap penguatan sistem dan kelembagaan. Proses operasional, mulai dari produksi hingga distribusi, dijalankan secara sederhana dengan memanfaatkan tenaga sukarela dari jamaah. Kondisi ini mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan dan gotong royong, namun di sisi lain juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam aspek profesionalitas dan pembagian kerja yang terstruktur. Belum adanya sistem pengupahan tetap serta standar operasional yang baku menjadi salah satu tantangan dalam menjaga konsistensi pelayanan dan keberlanjutan usaha. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Suwardi,

> *"Unit usaha seperti air isi ulang dan toko dikelola secara sederhana oleh jamaah dengan sistem gotong royong tanpa upah tetap."*[293]

Dari sisi masyarakat sebagai pengguna layanan, keberadaan Airku dirasakan membawa manfaat yang cukup signifikan, khususnya dalam hal kemudahan akses dan efisiensi waktu. Lokasinya yang berada di lingkungan masjid membuat warga sekitar tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan air minum isi ulang dengan harga terjangkau. Hal ini tentu membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus memperkuat hubungan antara masjid dan masyarakat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala teknis yang dirasakan oleh pengguna. Salah satu persoalan yang cukup sering muncul adalah ketidakpastian jam operasional, yang dipengaruhi oleh sistem pengelolaan berbasis partisipasi jamaah. Karena belum adanya jadwal kerja yang terstruktur dan petugas tetap, pelayanan

[293] Suwardi, *Wawancara*, Ketua Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 18 April 2025

terkadang tidak konsisten. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi peningkatan kualitas layanan ke depan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Amam selaku ketua RT sekaligus warga sekitar:

> *"Kami merasa terbantu dengan adanya Airku karena lokasinya dekat dari rumah. Tapi kadang jam operasionalnya tidak menentu, jadi kalau datang pas tutup, harus cari tempat lain."*[294]

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Bapak Husain yang melihat Program Usaha Air Minum Isi Ulang (Airku) sebagai salah satu unit usaha masjid yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, keberadaan Airku bukan hanya sekadar alternatif penyedia air minum, tetapi telah menjadi pilihan utama warga karena faktor kedekatan lokasi, kemudahan akses, serta harga yang relatif terjangkau dibandingkan dengan usaha sejenis di sekitar lingkungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa program Airku memiliki potensi pasar yang kuat dan tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi. Namun demikian, di balik apresiasi tersebut, tetap terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas pelayanan, ketersediaan sarana, serta pengelolaan yang lebih profesional agar mampu bersaing dan bertahan dalam jangka panjang. Keberlanjutan usaha sangat bergantung pada pembenahan sistem manajemen serta penguatan sumber daya yang terlibat di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Husain selaku pedagang sekaligus warga sekitar:

> *"Sejak ada Airku dan Airmu berdiri yang berjalan hanya Airku saja yang dari masjid, kami lebih pilih isi ulang di sini karena lebih dekat dan harganya juga terjangkau."*[295]

Pernyataan ini menegaskan bahwa Airku memiliki keunggulan kompetitif dari sisi kedekatan dan harga. Akan tetapi, kendala teknis juga masih ditemukan, sebagaimana Bapak Husain tambahkan:

> *"Tapi kadang kalau mesin lagi perawatan, kami harus cari tempat lain dulu."*[296]

---

[294] Amam, *Wawancara*, Ketua RT Sekaligus Warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 1 Desember 2025

[295] Husain, *Wawancara*, Pedagang Sekaligus warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 14 Novembar 2025

[296] Husain, *Wawancara*, Pedagang Sekaligus warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 14 Novembar 2025

Program Usaha Air Minum Isi Ulang (Airku) merupakan bentuk nyata penguatan ekonomi masjid yang berorientasi pada pelayanan kebutuhan dasar sekaligus penciptaan pendapatan mandiri. Program ini memiliki keunggulan kompetitif dari sisi kedekatan lokasi dan harga yang terjangkau, sehingga memperoleh tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi dan menjadi pilihan utama warga. Partisipasi jamaah dalam pengelolaan mencerminkan nilai gotong royong serta memperkuat hubungan sosial antara masjid dan masyarakat. Namun demikian, model pengelolaan yang masih berbasis sukarela tanpa sistem kerja terstruktur menimbulkan sejumlah kendala, seperti ketidakpastian jam operasional, belum adanya standar layanan baku, serta gangguan teknis ketika mesin mengalami perawatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Airku memiliki potensi pasar yang kuat, keberlanjutannya sangat bergantung pada pembenahan manajerial, penetapan jadwal operasional yang jelas, serta penguatan sistem pemeliharaan agar kualitas pelayanan dapat terjaga secara konsisten dan profesional.

c. Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga (BankZiska / Sistem Keuangan Masjid)

Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga (BankZiska/Sistem Keuangan Masjid) dirancang sebagai solusi alternatif terhadap praktik pinjaman berbunga yang selama ini menjerat sebagian masyarakat kecil dalam lingkaran utang berkepanjangan. Kehadiran program ini menjadi bentuk kepedulian masjid dalam melindungi jamaah dari beban finansial yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Namun, dalam implementasinya, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan dana, mekanisme pengembalian, atau keberlanjutan modal bergulir, melainkan juga menyangkut aspek sosial dan kultural. Sebagian warga telah terbiasa dengan sistem pinjaman konvensional yang menawarkan proses cepat meskipun berbunga tinggi. Mengubah kebiasaan tersebut membutuhkan pendekatan persuasif, edukasi keuangan, serta pembinaan yang berkelanjutan agar masyarakat memahami risiko riba dan manfaat sistem tanpa bunga. Proses transformasi ini tentu tidak dapat dilakukan secara instan dan memerlukan

komitmen kolektif dari pengurus maupun jamaah. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Suwardi selaku ketua takmir:

> *"Terutama dalam mengubah kebiasaan warga yang terbiasa dengan sistem pinjaman berbunga. Warga sini ada yang dulu terjerat rentenir. Masjid bantu menalangi utang mereka sampai lunas. Tapi untuk mengubah pola pikir biar gak pinjam ke bank konvensional itu gak gampang. Perlu waktu dan pembinaan terus-menerus."*[297]

Dari sisi penerima manfaat, Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga (BankZiska/Sistem Keuangan Masjid) memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan usaha kecil masyarakat. Skema pembiayaan yang tidak membebankan bunga dinilai mampu meringankan tekanan finansial, terutama bagi pelaku usaha mikro yang perputaran modalnya terbatas dan rentan terhadap fluktuasi pendapatan. Selain membantu dalam aspek permodalan, program ini juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa dana yang dipinjam merupakan amanah bersama yang harus dikelola dan dikembalikan secara bertanggung jawab. Namun demikian, tetap terdapat tantangan dalam menjaga kedisiplinan pengembalian agar dana bergulir dapat terus dimanfaatkan oleh warga lain. Pengurus perlu melakukan pendampingan serta penguatan komitmen moral agar sistem ini berjalan secara berkelanjutan. Pengalaman tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Husain selaku pedagang sekaligus warga sekitar:

> *"Saya pernah mengajukan pinjaman tanpa bunga dari masjid untuk tambahan modal jualan. Alhamdulillah sangat membantu, karena tidak ada beban bunga seperti di luar. Tapi tetap ada rasa tanggung jawab untuk mengembalikan tepat waktu supaya bisa dipakai warga lain."*[298]

Namun demikian, dalam praktiknya Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga (BankZiska/Sistem Keuangan Masjid) juga menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kedisiplinan dan komitmen pengembalian dana oleh sebagian penerima manfaat. Meskipun sistem ini dirancang tanpa bunga dan berlandaskan

---

[297] Suwardi, *Wawancara*, Ketua Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 18 April 2025

[298] Husain, *Wawancara*, Pedagang Sekaligus warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 14 Novembar 2025

asas tolong-menolong, tetap diperlukan tanggung jawab moral agar dana yang berputar dapat dimanfaatkan oleh jamaah lainnya secara berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, terdapat penerima pembiayaan yang mengalami kesulitan ekonomi lanjutan sehingga pembayaran cicilan tidak selalu tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi masyarakat bersifat kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemberian modal, tetapi juga membutuhkan pendampingan, pengawasan, serta penguatan karakter dan etos kerja. Di sisi lain, terdapat pula kisah positif di mana masjid tidak hanya membantu melunasi utang dari rentenir, tetapi juga mengintegrasikan penerima manfaat ke dalam aktivitas produktif masjid sebagai bentuk pemberdayaan lanjutan. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Bapak Amam selaku ketua RT sekaligus warga sekirat:

> *"Program pinjaman itu sangat baik tapi kayaknya ada yang bayarnya kurang tepat da nada juga yeng terbelit dengan rintenis terus di bayarkan dulu sama masjid sekarang oranya juga kerja di masjid mas itu kalo hari jumat yang masak beliau beliau itu mas"*[299]

Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga (BankZiska/Sistem Keuangan Masjid) merepresentasikan model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan modal, tetapi juga pada transformasi sosial dan kultural masyarakat. Program ini hadir sebagai alternatif terhadap praktik pinjaman berbunga yang menjerat warga dalam lingkaran utang, sekaligus menjadi sarana edukasi keuangan berbasis prinsip syariah. Meskipun demikian, implementasinya menghadapi tantangan berupa perubahan pola pikir masyarakat yang telah terbiasa dengan sistem konvensional serta persoalan kedisiplinan pengembalian dana. Dampak positifnya terlihat pada meningkatnya akses modal usaha tanpa beban bunga dan tumbuhnya rasa tanggung jawab kolektif atas dana bergulir. Di sisi lain, kasus keterlambatan pembayaran menunjukkan perlunya pendampingan berkelanjutan dan penguatan komitmen moral. Dengan demikian, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh sinergi antara manajemen yang

[299] Amam, *Wawancara*, Ketua RT Sekaligus Warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 1 Desember 2025

profesional, pembinaan intensif, dan partisipasi aktif jamaah dalam menjaga keberlanjutan sistem keuangan masjid.

d. Program Dana Lingkungan Berbasis RT

Program Dana Lingkungan Berbasis RT merupakan strategi penguatan ekonomi komunitas yang menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya secara kolektif di tingkat rukun tetangga. Skema ini dirancang untuk menjawab kebutuhan riil warga secara langsung, baik yang bersifat sosial, konsumtif bersama, maupun penunjang kegiatan kemasyarakatan. Pengelolaan dana dilakukan secara partisipatif dan transparan melalui forum rutin warga, sehingga setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya tetap terdapat dinamika dan kendala, terutama dalam menentukan skala prioritas penggunaan dana agar dapat mengakomodasi kepentingan seluruh warga secara adil. Perbedaan kebutuhan antaranggota RT terkadang memerlukan diskusi yang cukup intens agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, forum arisan RT menjadi ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi, mengevaluasi kendala, serta merumuskan rencana penggunaan dana secara terbuka. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Amam selaku ketua RT sekaligus warga sekitar:

> *"Terkait kendala itu langsung dirapatkan ketika arisan RT ini untuk apa saja yang penting cocok terhadap warga ya sudah ada juga untuk beli alat masak RT karena kas RT-nya mereka kan sudah banyak kalau yang di sini saya belikan seperti itu."*[300]

Di sisi lain, dana RT juga dikembangkan dalam bentuk pinjaman bergulir yang ditujukan untuk membantu kebutuhan ekonomi warga secara lebih langsung dan praktis. Skema ini menjadi alternatif pembiayaan skala kecil bagi warga yang membutuhkan dana cepat untuk keperluan mendesak, seperti kebutuhan usaha, pendidikan, maupun kebutuhan rumah tangga. Pengelolaannya dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi peminjam, sehingga sistem pembayaran tidak bersifat kaku, melainkan menggunakan mekanisme tempo yang

[300] Amam, *Wawancara*, Ketua RT Sekaligus Warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 1 Desember 2025

disepakati bersama. Meskipun pendekatan ini mencerminkan nilai kekeluargaan dan saling percaya antarwarga, dalam praktiknya tetap muncul tantangan, terutama terkait kedisiplinan pembayaran. Keterlambatan pengembalian dana dapat memengaruhi perputaran kas dan berpotensi menghambat warga lain yang juga membutuhkan pinjaman. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama serta pengawasan yang bijak agar dana tetap berputar dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Husain selaku pedagang sekaligus warga sekitar:

> *"Kalau di RT saya saya buat pinjam untuk warga saya buat bayarnya pake tempo gitu tapi kadang ada yang molor molor bayarnya tapi tetep saya tagih karna akan di pinjam warga lagi"*[301]

Program Dana Lingkungan Berbasis RT merupakan model penguatan ekonomi komunitas yang menekankan prinsip partisipasi, musyawarah, dan solidaritas sosial di tingkat paling mikro. Pengelolaan dana dilakukan secara kolektif melalui forum rutin seperti arisan RT, sehingga setiap keputusan penggunaan anggaran didasarkan pada kebutuhan bersama dan kesepakatan warga. Skema ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan fasilitas bersama, tetapi juga dikembangkan dalam bentuk pinjaman bergulir guna membantu kebutuhan ekonomi individu warga. Fleksibilitas sistem pembayaran mencerminkan nilai kekeluargaan dan saling percaya, namun sekaligus menghadirkan tantangan berupa kedisiplinan pengembalian dana. Keterlambatan pembayaran berpotensi menghambat perputaran kas dan akses warga lain terhadap pembiayaan. Dengan demikian, keberlanjutan program sangat bergantung pada transparansi, komitmen kolektif, serta mekanisme pengawasan yang bijak agar keseimbangan antara solidaritas sosial dan tanggung jawab finansial tetap terjaga.

e. Program Sosial Produktif dan Pemberdayaan SDM Lokal

Program Sosial Produktif dan Pemberdayaan SDM Lokal merupakan wujud komitmen masjid dalam membangun kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu dan kelompok secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya

[301] Husain, *Wawancara*, Pedagang Sekaligus warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 14 Novembar 2025

berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga menekankan aspek pembinaan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan agar masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki. Melalui kegiatan yang terstruktur, masjid berupaya menciptakan ruang belajar bersama yang dapat mendorong tumbuhnya kepercayaan diri, etos kerja, dan semangat kewirausahaan di kalangan warga. Namun demikian, pada fase awal pelaksanaan, program ini belum berjalan secara optimal karena keterbatasan pengalaman pengurus dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi kegiatan. Sistem pelaksanaan masih bersifat sederhana dan belum memiliki standar operasional yang jelas. Seiring waktu, proses pembelajaran kelembagaan mulai terbentuk dan program dijalankan lebih rutin serta terjadwal. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suwardi selaku ketua takmir:

> *"Pada tahap awal, pengurus belum memiliki kemampuan manajerial yang memadai jadi masi bersifat biasa lama lama sudah sudah mulai berkembang dan rutin di kerjakan 1 bulan sekali pada hari jumat ahir bulan"*[302]

Meskipun berbagai program sosial produktif dan pemberdayaan SDM lokal yang diinisiasi masjid telah dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam aspek partisipasi warga. Salah satu hambatan yang cukup dominan berkaitan dengan keterbatasan waktu yang dimiliki masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor formal maupun informal dengan jam kerja yang tidak fleksibel. Kondisi ini menyebabkan tingkat kehadiran dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan belum merata. Akibatnya, peserta yang mengikuti program cenderung berasal dari kelompok yang sama, sementara sebagian warga lainnya belum dapat terlibat secara optimal. Situasi tersebut menjadi evaluasi penting bagi pengurus agar dapat menyesuaikan jadwal atau merancang strategi alternatif yang lebih inklusif, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Amam selaku katua RT sekaligus warga sekitar:

---

[302] Suwardi, *Wawancara*, Ketua Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 18 April 2025

"Program pembinaan dan pelatihan dari masjid itu sebenarnya bagus, tapi tidak semua warga bisa ikut karena waktunya sering bersamaan dengan jam kerja. Jadi yang ikut biasanya orang-orang yang itu saja."[303]

Selain persoalan partisipasi, keberlanjutan semangat dan konsistensi keterlibatan masyarakat juga menjadi tantangan penting dalam pelaksanaan Program Sosial Produktif dan Pemberdayaan SDM Lokal. Pada tahap awal, program biasanya disambut dengan antusiasme yang tinggi karena dianggap mampu memberikan manfaat langsung bagi warga, baik dalam bentuk pelatihan, bantuan sosial produktif, maupun peluang kerja berbasis komunitas. Namun, seiring berjalannya waktu, intensitas keterlibatan sebagian warga cenderung mengalami penurunan, terutama apabila tidak disertai pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara rutin. Kurangnya penguatan kapasitas dan motivasi berkelanjutan dapat membuat program berjalan stagnan dan tidak berkembang secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak cukup hanya dengan menyediakan program, tetapi juga membutuhkan strategi pembinaan yang konsisten agar semangat kolektif tetap terjaga. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Husain selaku pedagang sekaligus warga sekitar:

"Kadang semangat warga di awal tinggi, tapi lama-lama berkurang kalau tidak ada pendampingan rutin. Menurut saya, yang jadi kendala itu menjaga konsistensi dan motivasi masyarakat supaya tetap aktif."[304]

Program Dana Lingkungan Berbasis RT dan Program Sosial Produktif serta Pemberdayaan SDM Lokal menunjukkan bahwa keduanya merupakan instrumen penguatan ekonomi berbasis komunitas yang menekankan partisipasi, musyawarah, dan solidaritas sosial. Pada tingkat RT, pengelolaan dana dilakukan secara kolektif dan transparan, termasuk dalam bentuk pinjaman bergulir yang fleksibel. Namun, tantangan kedisiplinan pembayaran dan penentuan prioritas penggunaan dana menjadi faktor yang memengaruhi keberlanjutan program. Sementara itu, pada program sosial produktif dan pemberdayaan SDM, kendala utama terletak pada

[303] Amam, *Wawancara*, Ketua RT Sekaligus Warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 1 Desember 2025

[304] Husain, *Wawancara*, Pedagang Sekaligus warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 14 Novembar 2025

keterbatasan kapasitas manajerial di tahap awal, partisipasi warga yang belum merata karena faktor waktu, serta fluktuasi semangat masyarakat tanpa pendampingan rutin. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya bergantung pada ketersediaan program, tetapi juga pada konsistensi pembinaan, penguatan kelembagaan, serta komitmen kolektif warga agar manfaat ekonomi dan sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.

2. Masjid NU Ponorogo

a. Program Pembiayaan Syariah (Koperasi Simpan-Pinjam Tanpa Bunga)

Meskipun Program Pembiayaan Syariah (Koperasi Simpan-Pinjam Tanpa Bunga) telah memberikan manfaat bagi sebagian jamaah, implementasinya belum sepenuhnya berjalan optimal. Hasil wawancara menunjukkan adanya kendala yang bersifat struktural maupun manajerial yang memengaruhi kapasitas pengembangan program. Keterbatasan modal menjadi faktor yang paling mendasar, karena skala pembiayaan yang kecil membatasi jumlah penerima manfaat serta variasi usaha yang dapat didukung. Selain itu, belum terbangunnya jejaring kemitraan dengan lembaga eksternal baik lembaga keuangan syariah, pemerintah, maupun sektor swasta membuat sumber pendanaan alternatif masih minim. Dari sisi internal, pengurus masjid pada umumnya memiliki latar belakang keagamaan, sehingga kemampuan teknis dalam perencanaan bisnis, manajemen risiko, dan penyusunan laporan keuangan masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan agar program dapat berkembang secara lebih profesional dan berkelanjutan. Bapak H. Imron Husnussairi selaku takmir masjid secara terbuka mengakui bahwa aspek permodalan menjadi hambatan terbesar dalam pengembangan program:

> *"Kendala paling besar itu ya soal modal, kita di masjid ini tidak punya dana besar untuk memulai usaha yang bisa jalan terus. Kadang kami juga kesulitan mencari mitra yang mau bantu permodalan. Kita ini kebanyakan orangnya dari latar belakang keagamaan, bukan dari ekonomi. Jadi kalau urusan bisnis,*

pembukuan, itu kadang masih bingung. Belum semua bisa buat laporan atau rencana usaha dengan rapi.”[305]

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ibu Erlik yang menyoroti kendala serupa dari perspektif jamaah. Ia menilai bahwa keterbatasan modal bukan hanya memengaruhi kapasitas masjid dalam mengembangkan usaha, tetapi juga membatasi jangkauan manfaat bagi masyarakat sekitar. Selain itu, minimnya kemitraan dengan pihak eksternal membuat peluang untuk memperluas skala program menjadi terbatas. Dari sisi manajemen, pengurus masjid yang mayoritas berlatar belakang keagamaan masih menghadapi tantangan dalam aspek teknis seperti perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, dan pelaporan. Meski demikian, semangat pengurus untuk tetap menjalankan program meskipun dengan keterbatasan tetap diapresiasi oleh jamaah. Ibu Erlik selaku pedagang menyampaikan:

"Setahu saya memang kendalanya di modal dan pengelolaan, mas. Masjid ini ingin punya usaha yang lebih besar dan jalan terus, tapi dananya belum mencukupi. Kadang juga belum ada kerja sama dengan pihak luar untuk bantu permodalan. Pengurusnya kan kebanyakan orang yang fokus di kegiatan keagamaan, Tapi ya tetap jalan semampunya, pelan-pelan."[306]

Sementara itu, Bapak Ilham menyoroti bagaimana keterbatasan dana berdampak langsung terhadap laju pengembangan program masjid secara keseluruhan. Menurutnya, meskipun pengurus memiliki inisiatif dan niat untuk mengembangkan usaha atau meluncurkan program baru, realisasi sering terhambat oleh keterbatasan finansial. Ketergantungan pada pemasukan dari kegiatan rutin dan donasi jamaah membuat skala pengembangan program menjadi terbatas dan berlangsung secara bertahap. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan serta perluasan manfaat program memerlukan strategi pendanaan yang lebih stabil dan beragam. Bapak Ilham selaku jmaah masjid menyampaikan:

"Kalau tentang itu saya kurang tau ya mas mungkin ada program sepeti itu tapi mungkin saya yang kurang tau mas yang pasti itu soal kegiatan kegiatan atau

---

[305] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025
[306] Erlik, *Wawancara*, Pedagang Masjid NU, Ponorogo, 26 November 2025

program saya lihat pengurus masjid juga jalannya pelan-pelan karena mungkin dananya terbatas. Untuk mengembangkan usaha atau bikin program baru itu butuh biaya besar, sementara pemasukan masih tergantung kegiatan dan donasi kayanya si seperti itu yang saya ketahui"[307]

Program Pembiayaan Syariah (Koperasi Simpan-Pinjam Tanpa Bunga) meskipun memberikan manfaat bagi sebagian jamaah, masih menghadapi berbagai kendala yang membatasi efektivitasnya. Keterbatasan modal menjadi hambatan utama yang membatasi skala pembiayaan dan variasi usaha yang dapat didukung. Selain itu, minimnya kemitraan dengan lembaga eksternal dan kapasitas manajerial pengurus yang mayoritas berlatar belakang keagamaan menyulitkan perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, dan pelaporan. Dampak keterbatasan ini dirasakan langsung oleh jamaah, karena pengembangan program berlangsung secara bertahap dan sebagian besar tergantung pada donasi rutin. Meski demikian, semangat pengurus untuk tetap menjalankan program secara bertahap diapresiasi jamaah. Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan kemitraan eksternal, dan strategi pendanaan yang lebih stabil agar program dapat berjalan lebih profesional, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

b. Program Usaha Produktif Berbasis Masjid

Program Usaha Produktif Berbasis Masjid pada dasarnya dirancang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dengan memanfaatkan potensi kelembagaan masjid sebagai pusat aktivitas sosial dan keagamaan. Secara konseptual, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pembinaan dan penguatan kemandirian ekonomi jamaah. Namun dalam praktiknya, implementasi program ini tidak berjalan tanpa hambatan. Berbagai kendala muncul di lapangan, terutama yang berkaitan dengan aspek teknis dan kondisi lingkungan sekitar masjid. Keterbatasan infrastruktur menjadi persoalan mendasar, khususnya terkait ketersediaan lahan yang representatif untuk mendukung kegiatan usaha produktif. Selain itu, padatnya aktivitas jamaah dan

[307] Ilham, *Wawancara*, Jamaah Masjid NU, Ponorogo, 22 November 2025

kegiatan rutin masjid seringkali membuat pengelolaan ruang menjadi kurang fleksibel. Situasi ini diperparah dengan kebutuhan usaha tertentu yang memerlukan area khusus untuk produksi, penyimpanan, maupun pemasaran. Kondisi tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak H. Imron Husnussairi selaku takmir masjid:

> *"Lahan di sekitar masjid juga terbatas, jadi kalau mau bikin usaha yang butuh tempat luas seperti toko atau pelatihan produksi, ya susah."*[308]

Kondisi keterbatasan ruang tersebut semakin kompleks karena letak masjid yang berada di tengah lingkungan pendidikan. Keberadaan lembaga pendidikan di sekeliling masjid menuntut adanya pengaturan yang lebih hati-hati dalam penempatan aktivitas ekonomi jamaah. Aktivitas usaha tidak bisa dilakukan secara bebas tanpa mempertimbangkan ketertiban, kenyamanan, dan kondusivitas proses belajar mengajar. Hal ini menimbulkan dilema tersendiri, karena di satu sisi program usaha produktif bertujuan meningkatkan kesejahteraan jamaah, namun di sisi lain harus tetap menjaga fungsi sosial dan pendidikan di sekitar masjid. Oleh karena itu, pengurus perlu melakukan penyesuaian tata letak dan pembagian ruang agar tidak menimbulkan konflik kepentingan antaraktivitas. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Imron:

> *"Kita ini banyak yang jualan di sekitar masjid, tapi tempatnya memang terbatas karena di sini juga ada kompleks sekolah seperti SD Ma'arif, MI, dan MTs. Jadi kami harus menyesuaikan lokasi jualan supaya tidak mengganggu aktivitas belajar."*[309]

Di samping persoalan ruang dan penyesuaian lingkungan, dinamika internal antar pedagang juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program usaha produktif berbasis masjid. Persaingan usaha yang muncul akibat kesamaan jenis dagangan berpotensi menimbulkan ketegangan, meskipun masih dalam skala kecil. Situasi ini menuntut peran aktif pengurus masjid untuk menjaga kondusivitas serta memastikan prinsip keadilan tetap terjaga. Pengaturan yang bersifat sederhana namun tegas diperlukan agar setiap pedagang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Selain itu, aspek ketertiban, kebersihan, dan pengelolaan fasilitas umum

---

[308] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025
[309] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025

seperti listrik dan parkir juga menjadi perhatian penting demi menjaga kenyamanan jamaah. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Imron Husnussairi:

> *"Ya, kadang memang ada gesekan kecil antar pedagang, soalnya banyak yang jualan barang sama, seperti makanan atau minuman. Akhirnya dibuat aturan yang sederhana, siapa pun boleh jualan asal ikut aturan, jaga kebersihan, dan tidak mengganggu jamaah yang mau ibadah. Kalau pedagang yang pakai listrik itu bayar seikhlasnya, tapi tetap ada patokan biar adil untuk semuanya. Selain itu, beberapa pedagang baru kadang kurang disiplin, jadi ada masalah kebersihan dan parkir."*[310]

Di luar persoalan teknis dan manajerial, keberlangsungan usaha para pedagang juga sangat dipengaruhi oleh faktor situasional yang bersifat fluktuatif. Tingkat keramaian masjid yang tidak selalu stabil berdampak langsung pada jumlah konsumen yang datang. Pada momen-momen tertentu seperti peringatan hari besar Islam atau kegiatan pengajian akbar, omzet pedagang cenderung meningkat. Namun, pada hari-hari biasa ketika aktivitas masjid relatif sepi, penjualan menurun secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha yang bergantung pada keramaian jamaah memiliki tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Selain itu, faktor cuaca seperti musim hujan turut menjadi hambatan eksternal yang sulit dikendalikan, sehingga memperbesar risiko penurunan pendapatan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Imron Husnussairi:

> *"Tantangannya ada. Pertama, tempat jualan masih terbatas, jadi kalau ramai kadang rebutan lokasi. Kedua, kadang penjualan sepi kalau tidak ada kegiatan besar di masjid. Belum lagi kalau musim hujan, pembeli berkurang drastis."*[311]

Dari sudut pandang pelaku usaha, berbagai keterbatasan yang ada tidak serta-merta menghentikan aktivitas ekonomi, melainkan mendorong munculnya strategi adaptasi yang lebih fleksibel. Pedagang berupaya menyesuaikan waktu dan lokasi berjualan dengan kondisi lingkungan sekitar, khususnya dengan memperhatikan jadwal kegiatan sekolah dan aktivitas masjid. Penyesuaian ini dilakukan agar usaha tetap berjalan tanpa menimbulkan gangguan bagi pihak lain.

---

[310] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025
[311] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025

Pola usaha yang bersifat temporer dan mengikuti ritme keramaian menjadi pilihan rasional bagi sebagian pedagang kaki lima. Sementara itu, pedagang yang memiliki tempat usaha permanen cenderung memiliki stabilitas waktu operasional yang lebih terjamin. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Erlik selaku pedagang:

> *"Biasanya pedagang kaki lima itu jualan di area yang kosong atau di halaman masjid saat jam sekolah sudah selesai. Tapi kalau saya buka terus soanya saya di rukonya"*[312]

Pandangan tersebut diperkuat oleh pengamatan pihak lain yang melihat langsung dinamika pelaksanaan program di lapangan. Secara umum, keberadaan usaha di sekitar masjid dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian warga, terutama dalam menyediakan tambahan penghasilan. Namun demikian, keterbatasan fisik lahan tetap menjadi persoalan utama yang membatasi pengembangan usaha secara lebih optimal. Intensitas aktivitas perdagangan sangat bergantung pada momentum tertentu, seperti bulan Ramadan atau kegiatan keagamaan berskala besar. Di luar periode tersebut, aktivitas cenderung lebih terbatas dan terkonsentrasi di area tertentu saja. Selain itu, mekanisme penyelesaian konflik dilakukan secara persuasif oleh pengurus masjid guna menjaga keharmonisan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ilham selaku jamaah masjid:

> *"Saya lihat usaha di sekitar masjid ini cukup membantu warga, tapi memang lahannya tidak luas. Kalau lagi ramai, pedagang bisa penuh sampai halaman itu kalau pas bulan ramadhan tapi kalo hari biasa cuma di tepi jalan itu saja. Biasanya mereka jualan setelah jam sekolah selesai supaya tidak mengganggu. Tantangannya kalau tidak ada acara besar, pembeli sepi, apalagi musim hujan. Kadang juga ada kalau ada cekcok gitu biasanya ditegur baik-baik oleh takmir. Jadi walaupun ada kendala, tetap bisa dikendalikan."*[313]

Program Usaha Produktif Berbasis Masjid menunjukkan peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi jamaah, namun pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan teknis. Keterbatasan lahan

---

[312] Erlik, *Wawancara*, Pedagang Masjid NU, Ponorogo, 26 November 2025
[313] Ilham, *Wawancara*, Jamaah Masjid NU, Ponorogo, 22 November 2025

menjadi hambatan utama yang berdampak pada pengembangan usaha, terlebih karena masjid berada di lingkungan pendidikan yang menuntut penyesuaian tata ruang dan waktu operasional. Selain itu, dinamika antar pedagang, seperti persaingan jenis dagangan dan persoalan kedisiplinan, memerlukan regulasi internal yang adil dan pengawasan persuasif dari takmir. Faktor eksternal, seperti fluktuasi jumlah jamaah dan kondisi cuaca, turut memengaruhi stabilitas pendapatan pedagang. Meski demikian, para pelaku usaha menunjukkan kemampuan adaptasi melalui pengaturan waktu dan lokasi berjualan. Dengan pengelolaan yang komunikatif dan berbasis musyawarah, berbagai kendala tersebut relatif dapat dikendalikan, sehingga program tetap berjalan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar masjid.

c. Program Penguatan Dana Sosial Produktif

Program Penguatan Dana Sosial Produktif dirancang sebagai instrumen untuk menjaga keberlanjutan aktivitas sosial, keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi jamaah di lingkungan masjid. Melalui pengelolaan dana sosial yang terorganisir, masjid diharapkan mampu membiayai berbagai kebutuhan operasional sekaligus mendukung kegiatan produktif yang berdampak jangka panjang. Namun dalam praktiknya, keberlanjutan program ini masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama terletak pada struktur sumber pendanaan yang belum stabil dan masih sangat bergantung pada partisipasi spontan jamaah. Pola pemasukan yang fluktuatif menyebabkan perencanaan program menjadi kurang optimal, karena pengurus harus menyesuaikan kegiatan dengan kondisi kas yang tersedia. Ketergantungan pada momentum tertentu, seperti hari besar keagamaan atau pelaksanaan ibadah Jumat, turut memengaruhi kestabilan arus dana. Kondisi tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Bapak H. Imron Husnussairi selaku takmir masjid:

> *"Selama ini, kegiatan ekonomi yang ada masih bergantung pada donasi jamaah dan hasil dari kegiatan keagamaan, jadi jumlahnya naik turun. Jadi kalau hari*

Jumat yang sedekah banyak itu kadang sampai sisa tapi kalau sedikit ya kadang rebutan begitu mas.''[314]

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan keberlanjutan dana tidak hanya dirasakan oleh pengurus, tetapi juga dipahami oleh pihak yang berinteraksi langsung dengan aktivitas ekonomi masjid. Dari perspektif pelaku usaha, struktur pendanaan masjid dinilai masih belum memiliki sumber yang benar-benar stabil dan terukur. Meskipun terdapat pemasukan dari penyewaan ruko atau fasilitas usaha lainnya, jumlahnya belum mampu sepenuhnya menjadi penopang utama operasional program sosial produktif. Fluktuasi pendapatan ini berdampak pada kemampuan masjid dalam merencanakan kegiatan jangka panjang secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Kondisi tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Erlik selaku pedagang:

"Kalau soal dana kegiatan di masjid, setahu saya memang masih banyak bergantung pada sedekah jamaah. Dan pedapatan dari ruko ruko ini yang di sewakan seperti yang saya sewa ini jadi pemasukan itu tidak tetap, kadang banyak, kadang juga sedikit."[315]

Penegasan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan fluktuasi dana tidak hanya berdampak pada aspek operasional, tetapi juga pada perencanaan strategis program jangka menengah dan panjang. Ketika sumber pendanaan sangat bergantung pada momentum keagamaan tertentu, maka stabilitas pelaksanaan kegiatan menjadi kurang terjamin. Program sosial dan ekonomi yang seharusnya dirancang secara berkelanjutan sering kali harus menyesuaikan dengan kondisi kas yang tersedia. Situasi ini menuntut kehati-hatian pengurus dalam menyusun prioritas kegiatan agar tidak terjadi defisit anggaran. Selain itu, ketidakpastian pemasukan juga membatasi ruang inovasi dalam pengembangan program produktif yang lebih mandiri. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ilham selaku jamaah masjid:

"Menurut saya, kegiatan ekonomi dan sosial di masjid ini masih sangat tergantung pada donasi. Kalau lagi Ramadan atau ada acara besar biasanya

---

[314] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025
[315] Erlik, *Wawancara*, Pedagang Masjid NU, Ponorogo, 26 November 2025

dana cukup, tapi di hari biasa kadang terbatas. Jadi sifatnya naik turun, tergantung seberapa banyak jamaah yang bersedekah. Itu jadi tantangan tersendiri untuk keberlanjutan programnya."[316]

Program Penguatan Dana Sosial Produktif menghadapi tantangan utama pada aspek keberlanjutan pendanaan yang masih bersifat fluktuatif dan bergantung pada donasi jamaah. Struktur pemasukan yang tidak tetap, baik dari sedekah rutin maupun penyewaan ruko, menyebabkan arus kas masjid cenderung naik turun mengikuti momentum keagamaan tertentu. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan perencanaan program secara jangka panjang, karena pengurus harus menyesuaikan kegiatan dengan ketersediaan dana yang ada. Ketergantungan pada momen seperti Jumat atau Ramadan memperlihatkan belum kuatnya basis pendanaan produktif yang mandiri dan berkelanjutan. Akibatnya, inovasi dan pengembangan program sosial-ekonomi sering kali bersifat situasional. Meskipun demikian, kesadaran pengurus dan jamaah terhadap pentingnya pengelolaan dana yang hati-hati menjadi modal sosial penting untuk memperkuat sistem pendanaan yang lebih stabil di masa mendatang.

d. Program Pengembangan dan Digitalisasi Ekonomi Masjid (Rencana Strategis)

Program Pengembangan dan Digitalisasi Ekonomi Masjid dirumuskan sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masjid. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pengurus berupaya memperluas akses informasi mengenai kegiatan masjid, laporan keuangan, serta program sosial produktif agar dapat diakses secara lebih transparan oleh jamaah dan masyarakat luas. Digitalisasi juga dipandang sebagai sarana untuk membuka peluang donasi daring serta menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan platform digital. Namun, realisasi program ini tidak terlepas dari tantangan internal organisasi. Perbedaan latar belakang, usia, dan tingkat literasi teknologi dalam struktur kepengurusan memunculkan variasi pandangan terhadap urgensi transformasi digital. Sebagian pihak memandang inovasi ini sebagai kebutuhan mendesak, sementara yang lain masih merasa cukup

[316] Ilham, *Wawancara*, Jamaah Masjid NU, Ponorogo, 22 November 2025

dengan pola pengelolaan konvensional. Kondisi tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bapak H. Imron Husnussairi selaku takmir masjid:

"Rencananya itu kami buat website seperti itu tapi kadang imam imam di sini sudah sepuh jadi kuno jadi beliau ga paham sama yang ingin kami buat paling yawes urausah gitu. Tapi rencana itu sudah ada"[317]

Di samping tantangan internal dalam struktur kepengurusan, aspek sosialisasi kepada jamaah juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program digitalisasi. Kurangnya penyampaian informasi yang sistematis menyebabkan sebagian jamaah belum memahami secara utuh arah dan tujuan pengembangan berbasis teknologi tersebut. Padahal, partisipasi dan dukungan jamaah merupakan elemen kunci dalam mewujudkan transparansi serta optimalisasi manfaat program. Ketidaktahuan ini menunjukkan bahwa proses komunikasi dan edukasi publik masih perlu diperkuat agar rencana strategis tidak hanya berhenti pada tataran gagasan pengurus, tetapi juga dipahami sebagai kebutuhan bersama. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Erlik selaku pedagang:

"Kalau tetang itu saya kurang tau si kemungkinan rencana takmir supaya lebih berkembang supaya manfaatnya juga banyak"[318]

Kondisi tersebut semakin menegaskan adanya kesenjangan informasi antara perencanaan strategis yang dirumuskan pengurus dengan tingkat pemahaman jamaah di lapangan. Meskipun wacana digitalisasi telah mulai terdengar, pemahaman mengenai tujuan, mekanisme, serta manfaat konkret dari program tersebut masih belum tersampaikan secara komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa proses komunikasi publik belum berjalan optimal dan masih bersifat informal. Padahal, dukungan jamaah sangat dibutuhkan agar transformasi digital dapat diterima sebagai kebutuhan bersama, bukan sekadar inisiatif sebagian pengurus. Persepsi jamaah yang masih samar ini sebagaimana tergambar dalam pernyataan Bapak Ilham selaku jamaah masjid:

"Denger denger itu mau buat website masjid lalu imam imam seperti itu tapi saya kurang paham juga bagaimana yang jelas untuk kemajuan masjid la kan

---

[317] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025
[318] Erlik, *Wawancara*, Pedagang Masjid NU, Ponorogo, 26 November 2025

pada saat ini donasi rata rata dari lokalan saja mungkinkegunaanya bisa untuk itu"[319]

Program Pengembangan dan Digitalisasi Ekonomi Masjid masih berada pada tahap perencanaan dan menghadapi tantangan baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, perbedaan generasi dan tingkat literasi teknologi dalam struktur kepengurusan memengaruhi kecepatan dan kesepahaman dalam merealisasikan transformasi digital. Sementara itu, dari sisi eksternal, sosialisasi kepada jamaah belum berjalan optimal sehingga pemahaman mengenai tujuan dan manfaat digitalisasi masih terbatas. Kesenjangan informasi ini berpotensi menghambat dukungan kolektif yang dibutuhkan untuk keberhasilan program. Meskipun demikian, terdapat kesadaran bahwa digitalisasi dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, memperluas jangkauan donasi, dan memperkuat kemandirian ekonomi masjid. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi internal serta edukasi publik yang lebih sistematis agar rencana strategis ini dapat diterima dan diimplementasikan secara bertahap serta berkelanjutan.

B. Analisis Kendala Dan Tantangan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Di Masjid Baitul Mukhlisin Dan Masjid NU

1. Masjid Baitul Mukhlisin

a. Program Usaha Berkelanjutan Berbasis Masjid (BUMM)

Program BUMM melalui usaha air isi ulang dan Toko MBS mencerminkan upaya awal pemberdayaan yang sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan merupakan proses peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat, bukan sekadar bantuan ekonomi.[320] Keterlibatan jamaah dalam pengelolaan menunjukkan adanya transfer akses ekonomi, namun keterbatasan modal dan kompetensi manajerial menandakan proses pemberdayaan masih berada pada tahap penguatan kapasitas.[321] Temuan ini diperkuat studi

[319] Ilham, *Wawancara*, Jamaah Masjid NU, Ponorogo, 22 November 2025

[320] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 9.

[321] Ibid.

penelitian oleh Saerozi dkk menunjukkan program masjid akan sulit berkelanjutan ketika kapasitas manajemen dan partisipasi belum berkembang secara seimbang.[322] Sintesisnya, BUMM telah berada pada jalur pemberdayaan partisipatif, tetapi memerlukan penguatan SDM, kelembagaan, dan permodalan agar transformasi menuju kemandirian ekonomi jamaah dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Keterbatasan modal pada fase pengembangan BUMM mendorong pengurus melakukan strategi kolaboratif melalui kemitraan dan mobilisasi donatur. Kondisi ini selaras dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan bukan sekadar bantuan, melainkan proses memperluas akses terhadap sumber daya dan memperkuat partisipasi kolektif menuju kemandirian ekonomi.[323] Upaya renovasi Toko MBS melalui kerjasama eksternal mencerminkan proses transfer akses ekonomi sekaligus penguatan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan berbasis jamaah.[324] Namun, dari perspektif literature oleh Muhammad Zada dan Vasilii Erokhin tantangan akses pembiayaan merupakan hambatan umum bagi usaha kecil yang menegaskan bahwa "*access to finance mediates the relationship between financial literacy and the growth*" usaha kecil.[325] Artinya, tanpa dukungan pendanaan yang memadai, peningkatan kapasitas usaha sulit optimal. Sintesisnya, keberhasilan BUMM sangat bergantung pada integrasi penguatan kapasitas internal dan perluasan jejaring pembiayaan eksternal secara berkelanjutan.

Keberlanjutan program masjid dibangun melalui penguatan jejaring eksternal sekaligus tata kelola internal yang adaptif, khususnya melalui mekanisme "rapat pakdet" yang rutin. Praktik ini sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan bukan sekadar bantuan, melainkan proses sistematis untuk membangun kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat melalui

---

[322] Saerozi dkk., "Mosque Management for the Prosperity of the Congregation in Mosque Typology in Kendal Regency, Community Empowerment Perspective," 136–37.

[323] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 141.

[324] Ibid., 169.

[325] Muhammad Zada dan Vasilii Erokhin, "Empowering Small to Medium-Sized Forest Enterprises: Unveiling the Impact of Financial Literacy and Entrepreneur Knowledge on Sustainable Development in Developing Countries," *Journal of the Knowledge Economy* 16, no. 3 (2025): 11294.

pengelolaan potensi secara kolektif.[326] Intensitas koordinasi yang dilakukan pengurus mencerminkan adanya transfer kekuatan dalam bentuk peningkatan kapasitas manajerial dan pengambilan keputusan partisipatif di tingkat kelembagaan masjid.[327] Temuan ini juga diperkuat oleh temuan Dong W Kim dkk yang menegaskan bahwa kolaborasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (*co-creation*) berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi karena memperkuat keunggulan strategis dan kualitas pengelolaan.[328] Dengan demikian, sinergi antara koordinasi internal yang intensif dan dukungan jejaring eksternal menjadi fondasi penting bagi pemberdayaan ekonomi masjid yang berkelanjutan dan berorientasi kemandirian jamaah.

Temuan bahwa masyarakat merasakan manfaat ekonomi dari keberadaan toko masjid menunjukkan praktik pemberdayaan yang selaras dengan konsep Yasir Yusuf, yakni peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi sehingga mendorong kemandirian dan penguatan kapasitas sosial.[329] Harga yang lebih terjangkau dan kedekatan emosional antara jamaah dan pengelola mencerminkan proses partisipatif yang menempatkan masyarakat bukan sekadar objek, tetapi subjek dalam ekosistem ekonomi masjid.[330] Namun, kendala awal berupa jam operasional yang belum stabil menunjukkan bahwa proses pemberdayaan memang bersifat bertahap dan memerlukan penguatan manajerial agar berkelanjutan.[331] Hal ini sejalan dengan studi temuan Erwin Halim dkk yang menegaskan bahwa kualitas layanan dan kepuasan pelanggan menjadi faktor kunci keberhasilan usaha karena "*e-commerce Company can develop if customers are satisfied and the service quality is also good*".[332] Dengan demikian, BUMM tidak

---

[326] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 5–6.

[327] Ibid., 12.

[328] Dong W. Kim dkk., "Effects of co-creation on organizational performance of small and medium manufacturers," *Journal of Business Research* 109 (Maret 2020): 575.

[329] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 183.

[330] Ibid., 42.

[331] Ibid., 61.

[332] Erwin Halim, Lucyana Claudia, dan Marylise Hebrard, "THE IMPACT OF CUSTOMER SATISFACTION, CUSTOMER EXPERIENCE, E-SERVICE QUALITY TO CUSTOMER TRUST IN PURCHASING DIGITAL PRODUCT AT THE MARKETPLACE," *Jurnal Aplikasi Manajemen* 21, no. 3 (September 2023): 567.

hanya memperluas akses ekonomi warga, tetapi juga menuntut profesionalisasi layanan agar tujuan pemberdayaan berkelanjutan dapat tercapai.

Temuan bahwa Program Usaha Berkelanjutan Berbasis Masjid (BUMM) telah memberi manfaat namun masih menghadapi keterbatasan operasional sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan bukan sekadar menyediakan bantuan ekonomi, tetapi proses jangka panjang untuk membangun kapasitas, kemandirian, dan kualitas pengelolaan.[333] Masukan Bapak Husain menunjukkan adanya partisipasi masyarakat sekaligus kebutuhan peningkatan profesionalitas agar transfer akses ekonomi benar-benar menghasilkan kemandirian yang berkelanjutan.[334] Dalam literatur manajemen usaha kecil, penelitian Amy Zhaohui Zeng dan Jack C. Hayya juga menegaskan bahwa efektivitas layanan dan pengendalian persediaan merupakan faktor kunci daya saing, karena "*companies offering superior customer service remain competitive and profitable*".[335] Artinya, kelemahan stok dan pelayanan pada BUMM berpotensi menghambat nilai pemberdayaan. Secara sintesis, BUMM telah berada pada jalur pemberdayaan yang tepat, namun penguatan manajemen operasional menjadi prasyarat penting agar tujuan kemandirian ekonomi jamaah dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

b. Program Usaha Air Minum Isi Ulang (Airku)

Pengelolaan Program Airku yang masih mengandalkan tenaga sukarela jamaah menunjukkan adanya praktik partisipatif yang sejalan dengan konsep pemberdayaan menurut Yasir Yusuf, yakni mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi secara mandiri.[336] Keterlibatan jamaah tanpa upah tetap mencerminkan tumbuhnya kesadaran kolektif dan solidaritas sosial berbasis masjid, namun kondisi tersebut juga menandakan bahwa

---

[333] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 62.

[334] Ibid., 93.

[335] Amy Zhaohui Zeng dan Jack C. Hayya, "The performance of two popular service measures on management effectiveness in inventory control," *International Journal of Production Economics* 58, no. 2 (Januari 1999): 148.

[336] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 12.

proses transfer kapasitas belum sepenuhnya optimal karena belum didukung sistem profesional yang berkelanjutan.[337] Perspektif ini diperkuat oleh Aat Ruchiat Nungraha yang menegaskan bahwa organisasi nirlaba yang mengembangkan aktivitas komersial perlu membangun "*professionalized organizational form*" melalui prosedur operasional dan struktur kerja yang jelas agar praktik usaha berjalan efektif.[338] Dengan demikian, Program Airku telah berada pada jalur pemberdayaan partisipatif, tetapi membutuhkan penguatan manajerial dan standarisasi operasional agar mampu bertransformasi dari semangat voluntarisme menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Program Airku telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui kemudahan akses dan efisiensi biaya, yang selaras dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi.[339] Kedekatan lokasi dengan masjid memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan sosial-ekonomi, namun ketidakpastian jam operasional mengindikasikan bahwa proses pemberdayaan belum sepenuhnya mencapai aspek keberlanjutan dan penguatan kapasitas kelembagaan.[340] Perspektif penelitian oleh Yasser Halim juga menegaskan bahwa kualitas layanan merupakan fondasi kepuasan pelanggan, di mana atribut fungsional seperti ketersediaan dan efisiensi sangat memengaruhi pengalaman pengguna . Bahkan, peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan terbukti meningkatkan kepuasan pengguna dalam jangka panjang .[341] Dengan demikian, optimalisasi manajemen operasional menjadi kunci agar manfaat pemberdayaan Airku dapat bertransformasi dari sekadar akses ekonomi menuju layanan yang konsisten dan berkelanjutan.

---

[337] Ibid., 15.

[338] Aat Ruchiat Nungraha dkk., "HR Management Training for Social Organization to Improve Volunteer Effectiveness and Job Satisfcation," *Inovasi Sosial : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (Januari 2025): 1–2.

[339] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 41.

[340] Ibid., 114.

[341] Yasser Halim dkk., "Service Quality as a Driver of Customer Satisfaction and Purchase Intentions: A Mixed-Methods Longitudinal Study of the Egyptian Post Office (2013–2023)," *Future Business Journal* 11, no. 1 (Oktober 2025): 247.

Program Airku menunjukkan bahwa unit usaha masjid telah berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang nyata di tingkat akar rumput. Tingginya preferensi warga karena kedekatan lokasi dan harga terjangkau sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan bukan sekadar bantuan, melainkan proses membuka akses ekonomi dan memperkuat kemandirian masyarakat.[342] Kehadiran Airku memperlihatkan adanya transfer akses terhadap kebutuhan dasar sekaligus memperkuat posisi masjid sebagai pusat pelayanan sosial-ekonomi umat. Namun, keluhan terkait perawatan mesin menandakan bahwa aspek kapasitas dan keberlanjutan manajerial masih perlu diperkuat.[343] Hal ini selaras dengan temuan George Kankam yang menyatakan bahwa "*service quality reliability*" memiliki korelasi signifikan dengan kinerja usaha dan pertumbuhan pasar.[344] Dengan demikian, keberhasilan Airku perlu diikuti penguatan kualitas layanan dan manajemen agar fungsi pemberdayaan berbasis masjid dapat berkelanjutan dan semakin kompetitif.

c. Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga (BankZiska / Sistem Keuangan Masjid)

Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga (BankZiska) menunjukkan praktik pemberdayaan yang sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan bukan sekadar bantuan finansial, tetapi proses peningkatan kesadaran, kapasitas, dan kemandirian masyarakat.[345] Upaya masjid menalangi utang warga sekaligus melakukan pembinaan berkelanjutan mencerminkan transfer akses dan penguatan kontrol ekonomi jamaah.[346] Tantangan perubahan kebiasaan dari pinjaman berbunga juga menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses jangka panjang yang menuntut transformasi pola pikir, bukan intervensi instan.[347] Temuan ini diperkuat oleh Widi Prayoga dkk yang menyatakan bahwa rendahnya

---

[342] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 17.

[343] Ibid., 64.

[344] George Kankam, "Service quality and business performance: the mediating role of innovation," *Discover Analytics* 1 (Juli 2023): 7.

[345] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 42.

[346] Ibid., 34.

[347] Ibid., 90–91.

literasi keuangan berkorelasi dengan penggunaan kredit berbiaya tinggi, sehingga edukasi finansial menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman mahal.[348] Dengan demikian, keberhasilan BankZiska sangat bergantung pada integrasi bantuan modal, edukasi keuangan, dan pendampingan berkelanjutan agar tercapai kemandirian ekonomi jamaah secara struktural.

Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga menunjukkan praktik pemberdayaan yang sejalan dengan konsep Yasir Yusuf, karena skema tanpa bunga tidak hanya memberi bantuan modal, tetapi juga membangun kesadaran tanggung jawab dan partisipasi penerima manfaat.[349] Hal ini mencerminkan proses transfer akses ekonomi sekaligus penguatan kemandirian, sebagaimana ditegaskan Yusuf bahwa pemberdayaan bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat agar tidak bergantung pada pihak luar.[350] Testimoni Bapak Husain memperlihatkan internalisasi nilai amanah dan solidaritas sosial, yang dalam perspektif Islam menjadi fondasi keberlanjutan program berbasis masjid.[351] Sejalan dengan itu, penelitian Seyedmehrdad Mirpourian dkk menunjukkan bahwa struktur dan motivasi dalam pembiayaan mikro berperan penting dalam meningkatkan probabilitas pengembalian pinjaman secara tepat waktu, karena faktor motivasional terbukti memengaruhi perilaku bayar peminjam.[352] Dengan demikian, efektivitas BankZiska bertumpu pada integrasi pembiayaan, pendampingan moral, dan mekanisme disiplin sosial agar pemberdayaan berjalan berkelanjutan.

Program BankZiska telah bergerak ke arah pemberdayaan, namun masih menghadapi tantangan pada aspek kedisiplinan penerima manfaat. Hal ini selaras dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan bukan sekadar pemberian modal, melainkan proses peningkatan kapasitas, kesadaran, dan tanggung jawab

---

[348] Widi Prayoga, Budi Supriatono Purnomo, dan Imas Purnamasari, "The Impact of Financial Literacy and Financial Behavior on Investment Decision among Private Sector Employees in Tasikmalaya City," *JURNAL BISNIS STRATEGI* 34, no. 1 (Juli 2025): 64.

[349] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 90.

[350] Ibid., 101.

[351] Ibid., 129.

[352] Seyedmehrdad Mirpourian dkk., "Determinants of loan repayment performance among borrowers of microfinance institutions: Evidence from India," *World Development Perspectives* 1 (Maret 2016): 49, https://doi.org/10.1016/j.wdp.2016.06.002.

agar masyarakat mandiri.[353] Temuan adanya keterlambatan pembayaran menegaskan bahwa transfer akses finansial belum sepenuhnya diikuti penguatan karakter dan etos kerja, sehingga diperlukan pendampingan berkelanjutan.[354] Perspektif ini diperkuat oleh temuan Bal Ram Duwal dan Bharat Singh Thapa yang menyatakan bahwa kinerja pengembalian pinjaman sangat dipengaruhi oleh faktor monitoring dan karakteristik peminjam, sehingga pengawasan lembaga menjadi variabel signifikan dalam menjaga keberlanjutan program. Kisah penerima manfaat yang kemudian dilibatkan dalam aktivitas produktif masjid menunjukkan praktik pemberdayaan yang lebih komprehensif.[355] Dengan demikian, efektivitas BankZiska bergantung pada integrasi pembiayaan, pendampingan, dan pembinaan moral secara simultan.

d. Program Dana Lingkungan Berbasis RT

Program Dana Lingkungan Berbasis RT menunjukkan praktik pemberdayaan yang sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan merupakan proses peningkatan kapasitas dan partisipasi aktif masyarakat, bukan sekadar bantuan.[356] Mekanisme musyawarah dalam arisan RT memperlihatkan adanya transfer kontrol kepada warga dalam menentukan prioritas penggunaan dana, sehingga mereka menjadi subjek pengelolaan sumber daya.[357] Hal ini menegaskan tumbuhnya kemandirian kolektif dan penguatan solidaritas sosial di tingkat komunitas.[358] Temuan ini juga didukung kajian I Wayan Astawa dkk yang menekankan bahwa partisipasi publik dalam tata kelola lokal efektif ketika keputusan dihasilkan melalui proses deliberatif dan kolaboratif antarwarga.[359] Dengan demikian, forum RT tidak hanya berfungsi administratif, tetapi menjadi

---

[353] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 42.

[354] Ibid., 8.

[355] Bal Ram Duwal dan Bharat Singh Thapa, "Determinants of Loan Repayment: The Case of Microfinance Institutions in Nepal," *Nepal Journal of Multidisciplinary Research* 8, no. 4 (Oktober 2025): 21–22.

[356] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 47.

[357] Ibid., 173.

[358] Ibid., 12–13.

[359] I. Wayan Astawa, Gede Wirata, dan Sri Sulandari, "Digital Public Participation and Responsive Governance in Village Development Planning," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 14, no. 1 (Januari 2026): 654.

instrumen pemberdayaan berbasis komunitas yang memperkuat transparansi, legitimasi keputusan, serta keberlanjutan pengelolaan dana secara inklusif.

Praktik dana RT dalam bentuk pinjaman bergulir menunjukkan upaya nyata memperluas akses ekonomi warga secara partisipatif, yang sejalan dengan konsep pemberdayaan menurut Yasir Yusuf sebagai proses transfer kekuatan dan akses sumber daya agar masyarakat mampu mandiri.[360] Skema tempo yang fleksibel mencerminkan pendekatan berbasis kepercayaan dan solidaritas sosial, sehingga warga tidak sekadar menerima bantuan, tetapi diberi ruang mengelola kebutuhan ekonominya sendiri.[361] Namun, munculnya keterlambatan pembayaran mengindikasikan bahwa proses pemberdayaan masih memerlukan penguatan kapasitas disiplin finansial dan tata kelola.[362] Hal ini diperkuat oleh studi Yulizar D. Sanrego dan M. Syafi'i Antonio yang menegaskan bahwa faktor sosial dan modal sosial berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengembalian pinjaman dalam skema keuangan mikro.[363] Dengan demikian, keberhasilan dana bergulir tidak hanya bergantung pada fleksibilitas skema, tetapi juga pada penguatan komitmen kolektif, pengawasan komunitas, dan pembinaan berkelanjutan agar fungsi pemberdayaan ekonomi warga tetap terjaga.

e. Program Sosial Produktif dan Pemberdayaan SDM Lokal

Program Sosial Produktif telah bergerak dari pola bantuan karitatif menuju proses penguatan kapasitas yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf yang menegaskan bahwa pemberdayaan bukan sekadar pemberian bantuan, melainkan proses meningkatkan kemampuan, partisipasi, dan kemandirian masyarakat melalui transfer akses dan penguatan kapasitas.[364] Upaya masjid melalui pelatihan, pendampingan, serta pembentukan rutinitas program bulanan

---

[360] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 14.

[361] Ibid., 16.

[362] Ibid., 47.

[363] Yulizar D. Sanrego dan M. Syafi'i Antonio, "THE EFFECT OF SOCIAL CAPITAL ON LOAN REPAYMENT BEHAVIOR OF THE POOR (A Study on Group Lending Model (GLM) Application In Islamic Microfinance Institution)," *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)* 28, no. 2 (Mei 2013): 189.

[364] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 66.

mencerminkan proses pemberdayaan jangka panjang, meskipun pada tahap awal masih terkendala kapasitas manajerial pengurus.[365] Temuan ini juga sejalan dengan studi Lai Wan Hooi yang menyatakan bahwa "*managerial commitment and openness to experimentation have a direct positive impact on firm performance*", yang menegaskan pentingnya pembelajaran kelembagaan dalam meningkatkan kinerja program.[366] Dengan demikian, program masjid menunjukkan proses transisi menuju pemberdayaan yang lebih sistematis, di mana penguatan manajemen internal menjadi kunci keberlanjutan dan efektivitas pemberdayaan berbasis masjid.

Kondisi rendahnya partisipasi warga akibat keterbatasan waktu menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum sepenuhnya memenuhi prinsip partisipatif sebagaimana ditegaskan oleh Yasir Yusuf, bahwa pemberdayaan harus membangun kesadaran, kapasitas, dan keterlibatan aktif masyarakat agar mereka memperoleh kontrol atas pengembangan potensi secara mandiri.[367] Ketika kegiatan hanya diikuti kelompok tertentu, maka transfer akses dan penguatan kapasitas menjadi kurang merata sehingga tujuan kemandirian kolektif belum optimal.[368] Temuan ini sejalan dengan studi Shasha Li dkk dalam yang menegaskan bahwa ketidaksesuaian jadwal menjadi hambatan nyata, karena "*several participants were not able to attend the group sessions and suggested improving the tailoring of the schedule to better fit the needs who are still working*".[369] Dengan demikian, efektivitas pemberdayaan berbasis masjid menuntut desain program yang lebih fleksibel dan inklusif agar partisipasi meluas dan dampak kemandirian masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

Temuan bahwa antusiasme masyarakat menurun tanpa pendampingan menunjukkan bahwa Program Sosial Produktif masih menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan partisipasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf

---

[365] Ibid., 129.

[366] Lai Wan Hooi, "SME Performance: Does Organizational Learning Capability Really Matter?," *International Journal of Organizational Analysis* 29, no. 5 (Februari 2021): 196.

[367] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 138.

[368] Ibid., 117.

[369] Shasha Li dkk., "Constraints on Youth Participation in Evening Schools: Empirical Evidence from Shenyang, China," *Sustainability* 18, no. 1 (Januari 2026): 1–2.

yang menegaskan bahwa pemberdayaan bukan sekadar pemberian bantuan, melainkan proses jangka panjang yang menuntut pembangunan kesadaran, kapasitas, dan partisipasi aktif masyarakat agar tercapai kemandirian.[370] Melemahnya motivasi warga mengindikasikan bahwa proses transfer kapasitas belum sepenuhnya berkelanjutan, sehingga diperlukan penguatan pembinaan yang konsisten.[371] Perspektif ini diperkuat oleh studi Brighton Savayi Amuni dkk menyatakan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam monitoring dan evaluasi partisipatif terbukti meningkatkan keberlanjutan dan hasil program karena memperkuat rasa memiliki masyarakat.[372] Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan berbasis masjid sangat ditentukan oleh kesinambungan pendampingan, penguatan kapasitas, dan mekanisme evaluasi partisipatif agar semangat kolektif masyarakat tetap terpelihara dan program berkembang optimal.

2. Masjid NU Ponorogo

a. Program Pembiayaan Syariah (Koperasi Simpan-Pinjam Tanpa Bunga)

Keterbatasan modal, lemahnya jejaring kemitraan, dan rendahnya kapasitas manajerial pengurus menjadi faktor penghambat optimalisasi Program Pembiayaan Syariah. Kondisi ini selaras dengan pandangan Yasir Yusuf yang menegaskan bahwa pemberdayaan bukan sekadar pemberian bantuan, tetapi proses peningkatan kapasitas dan akses sumber daya agar masyarakat mampu mandiri secara berkelanjutan.[373] Dalam konteks ini, program masjid masih berada pada tahap awal karena transfer pengetahuan manajerial dan perluasan akses permodalan belum maksimal.[374] Perspektif ini diperkuat oleh George Okello Candiya Bongomin dkk menyatakan bahwa peningkatan literasi dan kapasitas keuangan memiliki "*positive and significant effects on growth of SMEs*" karena memperluas akses pembiayaan

---

[370] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 42.

[371] Ibid., 31.

[372] Brighton Savayi Amuni, Stella Silas Karimi, dan Felistus Mwikali Patrick, "Influence of Stakeholder Involvement in M&E on the Performance of Donor-Funded Projects in Informal Settlements in Kisumu Central Sub-County, Kisumu County, Kenya," preprint, 4 September 2025, 191.

[373] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 42.

[374] Ibid.

dan kualitas keputusan usaha.[375] Dengan demikian, penguatan kompetensi pengurus dan perluasan jejaring eksternal menjadi prasyarat penting agar pemberdayaan berbasis masjid bergerak dari pola bantuan terbatas menuju sistem ekonomi jamaah yang mandiri dan berkelanjutan.

Bahwa keterbatasan modal, lemahnya kemitraan eksternal, dan kapasitas manajerial pengurus masih menjadi hambatan struktural dalam pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf yang menegaskan bahwa pemberdayaan bukan sekadar bantuan, melainkan proses penguatan kapasitas, akses sumber daya, dan partisipasi agar masyarakat mencapai kemandirian. Artinya, ketika aspek permodalan dan kompetensi manajemen belum kuat, proses transfer kekuatan yang menjadi inti pemberdayaan belum berlangsung optimal.[376] Namun, apresiasi jamaah terhadap konsistensi pengurus menunjukkan adanya modal sosial dan komitmen kelembagaan yang penting dalam proses jangka panjang.[377] Hal ini diperkuat temuan studi Vera Silva Carlos dkk yang menyatakan bahwa kolaborasi dengan mitra eksternal memungkinkan organisasi "memperoleh keahlian dan sumber daya eksternal untuk menghasilkan nilai yang lebih berkualitas".[378] Dengan demikian, penguatan jejaring, kapasitas manajerial, dan akses modal menjadi kunci transformasi menuju pemberdayaan masjid yang berkelanjutan.

Keterbatasan dana menjadi faktor penghambat utama dalam percepatan program masjid, sehingga pengembangan berjalan bertahap dan bergantung pada donasi. Kondisi ini selaras dengan pandangan Yasir Yusuf yang menegaskan bahwa pemberdayaan sejati menuntut perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi agar masyarakat tidak terus bergantung pada pihak luar, melainkan mampu membangun

---

[375] George Okello Candiya Bongomin dkk., "The Relationship between Access to Finance and Growth of SMEs in Developing Economies," *Review of International Business and Strategy* 27, no. 4 (November 2017): 121.

[376] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 47.

[377] Ibid., 47–48.

[378] Vera Silva Carlos dkk., "The Impact of Entrepreneurial Ecosystems on Value Co-Creation in SME: The Moderating Role of Marketing Innovations," *Administrative Sciences* 15, no. 12 (Desember 2025): 17–18.

kemandirian secara berkelanjutan.[379] Ketika sumber pendanaan masih sempit, proses transfer kekuatan ekonomi kepada jamaah menjadi kurang optimal.[380] Perspektif ini diperkuat oleh penelitian Nanang Rusliana dkk yang menyatakan bahwa keterbatasan akses pembiayaan dapat menimbulkan kesulitan finansial yang lebih merugikan dibandingkan kendala aktual lainnya bagi pelaku usaha kecil.[381] Dengan demikian, menunjukkan bahwa penguatan strategi pendanaan yang lebih stabil, terdiversifikasi, dan terlembaga merupakan prasyarat penting agar masjid mampu menjalankan fungsi pemberdayaan secara efektif, berkelanjutan, dan benar-benar mendorong kemandirian ekonomi jamaah.

b. Program Usaha Produktif Berbasis Masjid

Keterbatasan lahan yang diungkapkan pengurus menunjukkan bahwa implementasi usaha produktif berbasis masjid masih menghadapi hambatan struktural yang dapat mengurangi efektivitas pemberdayaan. Menurut Yasir Yusuf, pemberdayaan menuntut proses transfer akses terhadap sumber daya agar masyarakat mampu mandiri namun ketika ruang fisik terbatas, kemampuan masjid untuk memperluas akses ekonomi jamaah menjadi kurang optimal.[382] Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya bergantung pada komitmen kelembagaan, tetapi juga kesiapan infrastruktur pendukung.[383] Temuan ini sejalan dengan kajian Zonghui Wang dkk yang menegaskan bahwa pelaku usaha mikro kerap menghadapi berbagai kendala operasional dan keterbatasan sumber daya yang menghambat peningkatan produktivitas usaha.[384] Dengan demikian, menunjukkan bahwa penguatan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan memerlukan strategi adaptif, seperti optimalisasi ruang, kemitraan eksternal, atau

---

[379] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 142.

[380] Ibid., 7.

[381] Nanang Rusliana dkk., "Performance of Small and Medium Enterprises in Indonesia Impacted by Financial Accessibility," *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan* 24, no. 2 (Desember 2023): 294.

[382] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 116–17.

[383] Ibid., 182.

[384] Zonghui Wang dkk., "Sustainability in Construction Economics as a Barrier to Cloud Computing Adoption in Small-Scale Building Projects," *Scientific Reports* 15, no. 1 (April 2025): 14–15.

model usaha berbasis digital, agar tujuan kemandirian ekonomi jamaah tetap dapat dicapai secara berkelanjutan.

Kondisi keterbatasan ruang yang dihadapi pengurus menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis masjid tidak dapat dilepaskan dari sensitivitas sosial dan konteks lingkungan. Penyesuaian lokasi jualan di tengah kawasan pendidikan mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan jamaah dan keberlangsungan fungsi sosial masjid. Hal ini sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan bukan sekadar pemberian bantuan ekonomi, melainkan proses membangun kapasitas dan partisipasi secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan bersama.[385] Keputusan pengurus menata ruang juga menunjukkan adanya transfer kontrol dan pengelolaan potensi secara bertanggung jawab.[386] Temuan ini diperkuat oleh studi Pauline Heger dkk yang menegaskan bahwa "*discussion and communication among stakeholders facilitate interaction, dialogue and the integration of feedback*", sehingga koordinasi ruang menjadi kunci.[387] Dengan demikian, praktik ini merefleksikan model pemberdayaan adaptif yang menjaga harmoni fungsi ekonomi, sosial, dan pendidikan secara berkelanjutan.

Dinamika persaingan antar pedagang dalam program usaha masjid merupakan bagian dari proses pemberdayaan yang menuntut pengelolaan partisipatif dan berkeadilan. Perspektif Yasir Yusuf menegaskan bahwa pemberdayaan bukan sekadar pemberian ruang ekonomi, tetapi proses membangun kapasitas, kesadaran, dan kontrol masyarakat atas aktivitas ekonominya.[388] Upaya pengurus membuat aturan sederhana, menjaga kebersihan, serta menetapkan kontribusi listrik mencerminkan transfer akses sekaligus penguatan tanggung jawab kolektif, sehingga pedagang tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga

---

[385] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 142.

[386] Ibid., 12.

[387] Pauline Heger dkk., "Co-Creating Urban Transformation: A Stakeholder Analysis for Germany's Heat Transition," *Buildings and Cities* 6, no. 1 (Desember 2025): 1046.

[388] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 42.

subjek yang berpartisipasi aktif.[389] Temuan ini sejalan dengan kajian Helen M. Haugh yang menekankan bahwa dalam usaha komunitas, perbedaan kepentingan antar anggota merupakan hal wajar dan perlu dikelola melalui mekanisme tata kelola partisipatif agar manfaat ekonomi dapat didistribusikan secara adil.[390] Dengan demikian, pengaturan internal yang adaptif dan inklusif menjadi kunci keberlanjutan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

Ketergantungan usaha pedagang pada fluktuasi keramaian masjid dan faktor cuaca menandakan tingkat kerentanan ekonomi yang masih tinggi. Dalam perspektif Yasir Yusuf, kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pemberdayaan belum sepenuhnya mencapai tujuan kemandirian karena masyarakat masih belum memiliki kontrol yang kuat terhadap sumber pendapatan dan akses pasar yang stabil.[391] Pemberdayaan seharusnya tidak berhenti pada penyediaan ruang usaha, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas adaptif agar pelaku usaha mampu mengelola risiko eksternal.[392] Temuan ini sejalan dengan penelitian Florian Badorf dan Kai Hoberg yang menegaskan bahwa "*weather has generally a complex effect on daily sales*" dan bahkan dapat memengaruhi penjualan hingga puluhan persen tergantung lokasi dan jenis usaha.[393] Dengan demikian, diperlukan strategi pemberdayaan yang lebih komprehensif melalui diversifikasi pasar, penguatan manajemen risiko, dan perluasan jaringan agar pedagang tidak sepenuhnya bergantung pada keramaian jamaah maupun kondisi cuaca.

Pelaku usaha mikro telah mengembangkan strategi adaptif melalui penyesuaian waktu dan lokasi berdagang, yang mencerminkan proses pemberdayaan sebagaimana dijelaskan Yasir Yusuf. Penyesuaian ini menandakan meningkatnya kapasitas, kesadaran, dan kemandirian pelaku usaha dalam

---

[389] Ibid., 64.

[390] Helen M. Haugh, "The governance of entrepreneurial community ventures: How do conflicting community interests influence opportunity exploitation?," *Journal of Business Venturing Insights* 16 (November 2021): 13.

[391] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 56.

[392] Ibid., 2.

[393] Florian Badorf dan Kai Hoberg, "The impact of daily weather on retail sales: An empirical study in brick-and-mortar stores," *Journal of Retailing and Consumer Services* 52 (Januari 2020): 203.

mengelola potensi ekonomi tanpa bergantung pada bantuan eksternal.[394] Praktik pedagang kaki lima yang mengikuti ritme keramaian serta stabilitas pedagang ruko menunjukkan adanya kontrol lebih besar atas keputusan usaha, yang merupakan inti dari pemberdayaan partisipatif.[395] Temuan ini sejalan dengan studi Syarifa Hanoum dkk yang menegaskan bahwa "*organizational ambidexterity allows firms to innovate while efficiently managing current operations*",[396] sehingga fleksibilitas operasional menjadi kunci keberlangsungan usaha kecil. Dengan demikian, adaptasi pedagang bukan sekadar strategi bertahan, tetapi merupakan indikator berkembangnya kemandirian ekonomi berbasis kapasitas internal dan respons terhadap dinamika lingkungan.

Keberadaan usaha di sekitar masjid telah memberi tambahan penghasilan bagi warga, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan lahan dan fluktuasi permintaan musiman. Kondisi ini selaras dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan harus meningkatkan kapasitas dan akses masyarakat agar mampu mandiri, bukan sekadar bantuan sesaat; dalam konteks ini, masjid telah membuka akses ekonomi, tetapi belum sepenuhnya memperluas kapasitas struktural pelaku usaha.[397] Selain itu, pengelolaan konflik secara persuasif oleh takmir mencerminkan dimensi sosial-spiritual pemberdayaan yang menekankan harmoni komunitas.[398] Dari perspektif akademik, studi temuan Florian Badorf dan Kai Hoberg menunjukkan bahwa performa penjualan usaha kecil sangat dipengaruhi faktor eksternal seperti cuaca dan pola musiman, yang dapat memengaruhi variasi penjualan harian secara signifikan.[399] Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid telah berjalan pada level akses dan sosial,

---

[394] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 142.

[395] Ibid., 93.

[396] Syarifa Hanoum dkk., "Enhancing SME Performance through E-Business: The Interplay of Ambidexterity and Entrepreneurial Orientation in Technology Parks," *Journal of Innovation and Entrepreneurship* 14, no. 1 (Juni 2025): 20–21.

[397] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 113.

[398] Ibid., 92.

[399] Florian Badorf dan Kai Hoberg, "The impact of daily weather on retail sales: An empirical study in brick-and-mortar stores," *Journal of Retailing and Consumer Services* 52 (Januari 2020): 101921.

namun untuk mencapai kemandirian berkelanjutan diperlukan penguatan kapasitas usaha, perluasan ruang ekonomi, serta strategi mitigasi terhadap volatilitas permintaan.

c. Program Penguatan Dana Sosial Produktif

Program Penguatan Dana Sosial Produktif belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemberdayaan sebagaimana dijelaskan Yasir Yusuf, karena ketergantungan pada donasi spontan jamaah menandakan kapasitas dan kemandirian kelembagaan masih terbatas. Menurut Yasir Yusuf, pemberdayaan harus berorientasi pada proses transfer kekuatan dan perluasan akses sumber daya agar masyarakat tidak terus bergantung pada pihak luar.[400] Ketika arus dana masjid bersifat fluktuatif, maka kemampuan pengurus dalam merancang program jangka panjang menjadi terhambat, sehingga fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan belum optimal.[401] Temuan ini selaras dengan studi Moosa Elayah dkk yang menegaskan bahwa keberlanjutan organisasi sosial sangat bergantung pada kemampuan memperoleh sumber pendanaan yang stabil dan terdiversifikasi, karena model pendanaan yang volatil membuat program hanya berjalan jangka pendek dan reaktif.[402] Dengan demikian, penguatan kelembagaan dan diversifikasi sumber dana menjadi prasyarat penting agar pemberdayaan ekonomi masjid bergerak dari pola karitatif menuju kemandirian berkelanjutan.

Ketergantungan masjid pada sedekah jamaah serta pendapatan sewa yang fluktuatif mencerminkan belum kuatnya basis kemandirian finansial program. Kondisi ini selaras dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan sejati menuntut proses jangka panjang yang memperkuat akses sumber daya dan kemandirian, bukan sekadar bergantung pada bantuan yang tidak stabil.[403] Ketika struktur pendanaan belum terdiversifikasi dan terukur, maka kapasitas masjid untuk

---

[400] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 75.

[401] Ibid., 167.

[402] Moosa Elayah dkk., "Financial Sustainability and Influence Dynamics in Yemen's Conflict-Affected NGO Landscape: Unveiling 'Sheikh' Organizations," *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 36, no. 2 (April 2025): 264.

[403] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 56.

mentransfer "kekuatan ekonomi" kepada jamaah menjadi terbatas.[404] Hal ini diperkuat oleh temuan Xintong Chen dkk yang menyatakan bahwa "*individual giving is a volatile source of funding for nonprofits,*" sehingga ketergantungan pada donasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian operasional.[405] Dengan demikian, diperlukan strategi diversifikasi pendapatan dan penguatan kelembagaan ekonomi masjid agar pemberdayaan tidak bersifat karitatif jangka pendek, tetapi benar-benar menghasilkan kemandirian dan keberlanjutan program sosial produktif.

Ketergantungan program pada fluktuasi donasi sebagaimana disampaikan Bapak Ilham menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masih berada pada tahap bantuan karitatif, belum sepenuhnya bertransformasi menuju kemandirian struktural. Hal ini sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan sejati menuntut proses transfer kapasitas dan akses agar masyarakat tidak terus bergantung pada sumber eksternal, melainkan mampu mengelola potensi secara mandiri dan berkelanjutan.[406] Ketika pemasukan masjid bersifat musiman, maka orientasi jangka panjang pemberdayaan menjadi rentan terganggu.[407] Temuan ini juga diperkuat oleh Xintong Chen dkk yang menegaskan bahwa organisasi berbasis donasi kerap menghadapi "*lack of funds and difficulties to grow and operate at scale*," sehingga inovasi model pendanaan diperlukan untuk mencapai otonomi finansial.[408] Dengan demikian, sintesisnya menunjukkan bahwa stabilitas pemberdayaan ekonomi masjid menuntut pergeseran dari ketergantungan donasi menuju penguatan sumber pendapatan produktif yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

d. Program Pengembangan dan Digitalisasi Ekonomi Masjid (Rencana Strategis)

Program Pengembangan dan Digitalisasi Ekonomi Masjid menunjukkan upaya strategis menuju pemberdayaan berkelanjutan melalui peningkatan

---

[404] Ibid., 68–69.

[405] Xintong Chen dkk., "True Grit: Exploring Nonprofit Sector Resilience Following Economic Recessions," *Nonprofit Policy Forum* 16, no. 4 (Oktober 2025): 574.

[406] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 75.

[407] Ibid., 67–68.

[408] Ezequiel Reficco, Francisco Layrisse, dan Andres Barrios, "From donation-based NPO to social enterprise: A journey of transformation through business-model innovation," *Journal of Business Research* 125 (Maret 2021): 720–21.

transparansi dan akses informasi. Inisiatif ini sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan bukan sekadar bantuan, melainkan proses peningkatan kapasitas, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat agar mampu mengelola potensi secara mandiri.[409] Digitalisasi website masjid berpotensi mentransfer akses informasi dan memperkuat kontrol jamaah terhadap pengelolaan ekonomi masjid. Namun, resistensi sebagian pengurus senior mencerminkan adanya kesenjangan kapasitas yang dapat menghambat proses pemberdayaan jangka panjang.[410] Studi oleh Saliya Nugawela dan Darshana Sedera menegaskan bahwa resistensi pengguna terhadap sistem digital sering dipengaruhi oleh kecenderungan mempertahankan status quo dalam organisasi.[411] Oleh karena itu, sintesis temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi masjid tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada strategi peningkatan literasi digital dan pendekatan partisipatif agar transformasi berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Kurangnya sosialisasi program digitalisasi kepada jamaah menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum sepenuhnya memenuhi prinsip partisipatif sebagaimana ditegaskan Yasir Yusuf. Ia menekankan bahwa pemberdayaan bukan sekadar pemberian bantuan, melainkan proses membangun kesadaran dan partisipasi aktif agar masyarakat memiliki kontrol terhadap program yang memengaruhi kehidupan mereka.[412] Pernyataan Ibu Erlik yang belum memahami rencana takmir menandakan masih adanya kesenjangan informasi yang berpotensi melemahkan transfer kekuatan dan akses kepada jamaah.[413] Temuan ini sejalan dengan studi Christopher Ifeanyi Ezekwe yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif dan keterlibatan pemangku kepentingan melalui informasi yang terbuka akan meningkatkan partisipasi dan dukungan terhadap tujuan organisasi.[414]

---

[409] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 52.

[410] Ibid., 113.

[411] Saliya Nugawela dan Darshana Sedera, "Status Quo Bias in Users Information Systems (IS) Adoption and Continuance Intentions: A Literature Review and Framework," arXiv:2212.03283, preprint, arXiv, 4 Desember 2022, 9.

[412] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 13.

[413] Ibid., 185.

[414] Christopher Ifeanyi Ezekwe, "Strategic Corporate Communication: A Tool for Enhancing Organizational Performance in Nigeria," *SSRN Electronic Journal*, 2025, 3192.

Dengan demikian, penguatan strategi komunikasi publik menjadi prasyarat penting agar digitalisasi masjid tidak berhenti pada level elit pengurus, tetapi benar-benar terinternalisasi sebagai kebutuhan bersama jamaah demi keberlanjutan pemberdayaan.

Kondisi kesenjangan informasi antara pengurus dan jamaah menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum sepenuhnya memenuhi prinsip partisipatif sebagaimana ditegaskan Yasir Yusuf, bahwa pemberdayaan harus membangun kesadaran, kapasitas, dan keterlibatan aktif masyarakat, bukan sekadar inisiatif elite pengelola.[415] Pernyataan jamaah yang masih "kurang paham" menandakan transfer pengetahuan dan akses belum optimal sehingga kontrol bersama atas program digital belum terbentuk.[416] Hal ini sejalan dengan temuan riset Sissel Hovik dan G. Anthony Giannoumis yang menegaskan bahwa adopsi inovasi digital sangat dipengaruhi oleh keterkaitan antara penerapan teknologi dan tingkat partisipasi warga dalam sistem informasi *("the introduction of ICT relates to citizen participation"*).[417] Dengan demikian, komunikasi publik yang masih informal berpotensi melemahkan legitimasi program. Sintesisnya, keberhasilan digitalisasi masjid menuntut strategi komunikasi yang sistematis, edukatif, dan partisipatif agar jamaah tidak hanya mengetahui, tetapi juga merasa memiliki dan terlibat aktif dalam transformasi tersebut

[415] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 15.

[416] Ibid., 185.

[417] Sissel Hovik dan G. Anthony Giannoumis, "Linkages Between Citizen Participation, Digital Technology, and Urban Development," dalam *Citizen Participation in the Information Society: Comparing Participatory Channels in Urban Development*, ed. oleh Sissel Hovik dkk. (Cham: Springer International Publishing, 2022), 16.

BAB V
DAMPAK DAN SOLUSI ATAS KENDALA TANTANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASJID TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR

A. Data Dampak dan Solusi atas kendala dan Tantangan Program Pemberdayaan Ekonomi Masjid Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar

1. Masjid Baitul Mukhlisin

a. Program Usaha Berkelanjutan Berbasis Masjid (BUMM)

Program Usaha Berkelanjutan Berbasis Masjid (BUMM) yang dijalankan oleh Masjid Baitul Mukhlisin menunjukkan pola pemberdayaan ekonomi yang terstruktur dan berorientasi pada keberlanjutan. Berdasarkan hasil wawancara, program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan pendapatan, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan kesejahteraan sosial jamaah secara kolektif. Dalam implementasinya, BUMM menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan modal usaha, kapasitas manajerial pengurus yang masih berkembang, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Namun, berbagai solusi terus diupayakan, antara lain melalui sistem pengelolaan yang lebih transparan, pelatihan kewirausahaan bagi pengurus dan jamaah, serta penguatan jaringan kemitraan dengan donatur maupun pelaku usaha lokal. Pendekatan partisipatif juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program. Secara umum, informan menegaskan bahwa keberadaan program ini telah memberikan dampak nyata terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suwardi selaku ketua takmir:

> *"Program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan di Masjid Baitul Mukhlisin telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.*

Kehadiran program pemberdayaan ekonomi di Masjid Baitul Mukhlisin terbukti membantu masyarakat keluar dari tekanan ekonomi."[418]

Dampak positif tersebut semakin terlihat ketika ditinjau dari aspek tata kelola dan kesinambungan program yang dijalankan. Dalam pelaksanaannya, BUMM tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menekankan pada penguatan sistem manajemen yang berkelanjutan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah menjaga konsistensi program agar tetap berjalan di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan dinamika kebutuhan jamaah. Untuk mengatasi hal tersebut, pengurus masjid menerapkan evaluasi rutin, pembagian tugas yang lebih jelas, serta strategi diversifikasi usaha guna meminimalkan risiko kerugian pada satu sektor tertentu. Upaya memperluas kemitraan dengan berbagai lembaga juga menjadi solusi penting dalam menjaga stabilitas modal dan operasional usaha. Dengan langkah-langkah tersebut, program tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara bertahap dan memberikan dampak yang semakin luas bagi jamaah. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Khairul Anwar selaku penanggung jawab masjid:

"Dari dampaknya mutunya seperti itu memakmurkan masjid dan memakmurkan lingkungan jamaah itu programnya banyak mas tidak pernah berhenti untuk kegiatan-kegiatan jadi tidak pernah istirahat. Masjid terus melakukan rapat rutin untuk evaluasi, memperkuat kemitraan dengan lembaga lain, serta melakukan diversifikasi usaha seperti membuka restoran dan warteg agar sumber pendapatan lebih stabil."[419]

Pada level implementasi, dampak Program Usaha Berkelanjutan Berbasis Masjid (BUMM) semakin nyata ketika dilihat dari manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehadiran unit-unit usaha yang dikelola masjid memberikan akses yang lebih mudah, harga yang relatif terjangkau, serta kedekatan lokasi yang memudahkan jamaah. Kondisi ini menjadi solusi atas kendala distribusi dan keterbatasan daya beli sebagian warga. Meski

[418] Suwardi, *Wawancara*, Ketua Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 18 April 2025
[419] Khairul Anwar, *Wawancara*, Penanggung Jawab Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 28 Oktober 2025

demikian, dalam praktiknya program tetap menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga bahan pokok, keterbatasan stok, serta persaingan dengan pelaku usaha lain di sekitar lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut, pengelola BUMM melakukan pengaturan stok yang lebih terencana, menjalin kerja sama dengan pemasok yang lebih stabil, serta menjaga kualitas pelayanan agar masyarakat tetap percaya dan loyal terhadap usaha masjid. Dengan pendekatan tersebut, program tidak hanya membantu kebutuhan ekonomi warga, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di lingkungan jamaah. Hal tersebut di sampaikan oleh Bapak Amam selaku ketua RT sekaligus warga di sekitar masjid:

> *"Melalui berbagai kegiatan usaha, warga kini dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan lokasi yang dekat dari belanja di situ kami juga merasa membantu program yang di buat oleh masjid"*[420]

Dimensi ketenagakerjaan menjadi salah satu dampak signifikan dari Program Usaha Berkelanjutan Berbasis Masjid (BUMM). Program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi ekonomi, tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja bagi warga sekitar yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses pekerjaan. Kehadiran unit usaha seperti toko, restoran, dan pengelolaan media masjid membuka peluang kerja tetap dengan sistem penggajian yang relatif stabil. Meski demikian, tantangan tetap muncul, terutama dalam menjaga keberlanjutan pendapatan usaha agar mampu membiayai operasional dan menggaji karyawan secara konsisten. Untuk mengatasi kendala tersebut, pengurus melakukan perencanaan keuangan yang lebih tertata, evaluasi kinerja secara berkala, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan. Dengan pendekatan tersebut, masjid tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan keluarga jamaah. Di perkuat lagi oleh Bapak Husain selaku pedagang sekaligus warga di sekitar masjid:

> *"Ada yang kerja di toko, di resto, di bagian media. Semua gajinya tetap dan hasilnya bisa membantu keluarga. Dari situ dapat kita lihat ternyata masjid juga*

---

[420] Amam, *Wawancara,* Ketua RT Sekaligus Warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 1 Desember 2025

memberikan lapangan pekerjaan untyuk warganya. Dulunya banyak yang ke masjid cuma untuk salat, tapi sekarang mereka lihat masjid ini juga bantu ekonomi jamaah."[421]

Secara keseluruhan, Program Usaha Berkelanjutan Berbasis Masjid (BUMM) di Masjid Baitul Mukhlisin merepresentasikan model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan tata kelola dan keberlanjutan sosial. Dampak program terlihat pada peningkatan kesejahteraan jamaah, kemudahan akses kebutuhan pokok, serta terbukanya lapangan kerja bagi warga sekitar. Meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, fluktuasi harga, dan kapasitas manajerial yang masih berkembang, pengurus masjid mampu merespons melalui evaluasi rutin, diversifikasi usaha, kemitraan strategis, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sinergi antara pengurus dan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan program. Dengan demikian, BUMM tidak hanya memakmurkan masjid secara finansial, tetapi juga memperkuat fungsi sosialnya sebagai pusat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan jamaah.

b. Program Usaha Air Minum Isi Ulang (Airku)

Program Usaha Air Minum Isi Ulang (Airku) merupakan salah satu unit usaha strategis yang dikembangkan masjid sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis komunitas. Berdasarkan hasil wawancara, program ini dirancang tidak hanya untuk menciptakan sumber pendapatan rutin, tetapi juga untuk memperluas manfaat sosial dan ekonomi bagi jamaah serta masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya, Airku menghadapi beberapa kendala, seperti persaingan dengan depot air minum lain, biaya perawatan alat filtrasi, serta kebutuhan pengawasan kualitas air yang konsisten agar tetap memenuhi standar kesehatan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pengurus masjid melakukan pengecekan rutin terhadap kualitas air, menjadwalkan perawatan berkala pada mesin, serta menerapkan strategi harga yang kompetitif tanpa mengabaikan mutu. Selain itu,

[421] Husain, *Wawancara*, Pedagang Sekaligus warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 14 Novembar 2025

pendekatan pelayanan yang ramah dan berbasis kepercayaan jamaah menjadi keunggulan tersendiri dalam menjaga loyalitas pelanggan. Secara konseptual, keberadaan Airku dilatarbelakangi oleh kebutuhan masjid akan usaha yang berkelanjutan dan berjalan setiap hari. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suwardi selaku ketua takmir:

> *"Program Air Minum Isi Ulang ini kami buat supaya masjid punya usaha yang jalan terus setiap hari. Airku ini bukan hanya untuk jamaah, tapi juga untuk warga sekitar. Harganya lebih murah dari luar, tapi kualitasnya tetap kami jaga."*[422]

Dari sisi tata kelola dan distribusi manfaat ekonomi, Program Usaha Air Minum Isi Ulang (Airku) menunjukkan bahwa orientasi pengelolaannya tidak semata-mata bersifat komersial, melainkan juga sosial. Keuntungan yang diperoleh tidak hanya difokuskan pada pengembangan usaha, tetapi dialokasikan kembali untuk mendukung berbagai kegiatan masjid dan program pemberdayaan jamaah. Dalam praktiknya, kendala yang muncul antara lain pengelolaan arus kas, pembagian tugas yang efektif, serta menjaga konsistensi kinerja pengelola. Untuk mengatasi hal tersebut, pengurus menerapkan sistem pencatatan keuangan yang lebih transparan, pembagian peran kerja yang jelas antara produksi dan distribusi, serta evaluasi berkala guna memastikan operasional berjalan optimal. Pelibatan warga dalam pengelolaan juga menjadi solusi strategis karena mampu menciptakan rasa tanggung jawab bersama sekaligus membuka peluang kerja. Dengan demikian, Airku tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi komunitas secara berkelanjutan. Hal tersebut di sampaikan juga oleh bapak Khairul Anwar selaku penanggung jawab masjid:

> *"Hasil dari usaha air minum ini masuk ke kas masjid dan dipakai lagi untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Kami juga melibatkan warga dalam pengelolaannya, jadi ada yang bertugas produksi, ada yang distribusi."*[423]

---

[422] Suwardi, *Wawancara*, Ketua Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 18 April 2025

[423] Khairul Anwar, *Wawancara*, Penanggung Jawab Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 28 Oktober 2025

Pada tataran penerima manfaat, Program Usaha Air Minum Isi Ulang (Airku) memberikan dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam akses air minum yang layak dan terjangkau. Kehadiran Airku di lingkungan masjid mempersingkat jarak distribusi sehingga warga tidak perlu membeli ke tempat yang lebih jauh. Selain itu, harga yang relatif lebih murah menjadi solusi atas meningkatnya biaya kebutuhan rumah tangga. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga konsistensi kualitas air, kebersihan galon, serta kepercayaan pelanggan di tengah persaingan usaha sejenis. Untuk menjawab kendala tersebut, pengelola melakukan kontrol kualitas secara berkala, menjaga standar sanitasi yang ketat, serta membuka ruang komunikasi dengan pelanggan apabila terdapat keluhan. Transparansi pengelolaan yang berbasis masjid juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Dengan pendekatan tersebut, Airku tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara masjid dan masyarakat. Sebagaimana di sampaikan oleh Bapak Amam selaku keta RT sekaligus warga di sekitar masjid:

> *"Sejak ada Airku, kami lebih mudah beli air minum karena dekat dan harganya lebih terjangkau. Kami juga senang karena usaha ini dikelola masjid, jadi kami percaya kebersihannya."*[424]

Lebih lanjut, dimensi penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu dampak penting dari keberadaan Program Usaha Air Minum Isi Ulang (Airku). Unit usaha ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pemasukan bagi kas masjid, tetapi juga membuka peluang kerja bagi warga sekitar yang membutuhkan tambahan penghasilan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengisian, pengantaran galon, hingga pelayanan pelanggan mencerminkan model pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Meski demikian, tantangan tetap muncul, seperti menjaga konsistensi jam operasional, memastikan kedisiplinan pekerja, serta menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan tingkat permintaan. Untuk mengatasi hal tersebut, pengurus menerapkan sistem pembagian tugas yang jelas, pengawasan kinerja secara berkala,

[424] Amam, *Wawancara*, Ketua RT Sekaligus Warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 1 Desember 2025

serta penyesuaian jadwal kerja yang fleksibel sesuai kebutuhan pasar. Dengan manajemen yang lebih terstruktur, Airku mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ekonomi keluarga jamaah sekaligus mendukung keberlanjutan usaha masjid. Hal tersebut juga di sampaikan oleh Bapak Husain selaku pedagang sekaligus warga di sekitar masjid:

> *"Ada warga yang ikut kerja di bagian pengisian dan antar galon, jadi bisa nambah penghasilan dan memperbaiki ekonomi warga sekitar masjid juga"*[425]

Secara keseluruhan, Program Usaha Air Minum Isi Ulang (Airku) menunjukkan model pemberdayaan ekonomi masjid yang terintegrasi antara aspek komersial dan sosial. Program ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan rutin bagi kas masjid, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat. Dampaknya terlihat pada kemudahan akses air minum yang terjangkau, meningkatnya kepercayaan warga terhadap kualitas produk, serta terbukanya peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Meskipun menghadapi kendala seperti persaingan usaha sejenis, biaya perawatan alat, pengelolaan arus kas, dan konsistensi kualitas layanan, pengurus mampu merespons melalui manajemen yang lebih transparan, evaluasi rutin, kontrol kualitas ketat, serta pembagian tugas yang jelas. Pelibatan warga dalam operasional turut memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, Airku tidak hanya menopang keberlanjutan ekonomi masjid, tetapi juga memperkuat fungsi sosialnya sebagai pusat pemberdayaan dan kesejahteraan komunitas.

c. Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga (BankZiska / Sistem Keuangan Masjid)

Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga (BankZiska/Sistem Keuangan Masjid) merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi yang mengintegrasikan aspek finansial dan spiritual dalam satu skema kelembagaan berbasis masjid. Berdasarkan hasil wawancara, program ini tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi jamaah, tetapi juga untuk membangun sistem keuangan yang selaras dengan prinsip syariah serta menjauhkan masyarakat dari

[425] Husain, *Wawancara*, Pedagang Sekaligus warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 14 Novembar 2025

praktik riba. Dalam implementasinya, program ini menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan modal bergulir, risiko keterlambatan pengembalian pembiayaan, serta perlunya peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan jamaah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pengurus menerapkan mekanisme seleksi dan pendampingan usaha secara lebih ketat, memperkuat sistem administrasi dan pencatatan keuangan, serta mengedepankan pendekatan pembinaan berbasis kepercayaan dan tanggung jawab moral. Selain itu, evaluasi berkala dilakukan guna menjaga keberlanjutan dana agar tetap dapat dimanfaatkan oleh jamaah lain secara bergilir. Secara normatif dan tujuan program, Bapak Suwardi menjelaskan bahwa orientasi pembiayaan ini melampaui aspek ekonomi semata. Ia menyampaikan:

> *"Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga mendorong masyarakat agar terbebas dari praktik riba dan mampu mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu, beberapa jamaah telah berhasil memulai usaha mandiri berkat bantuan modal dari masjid."*[426]

Dari sisi penerima manfaat, Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga (BankZiska/Sistem Keuangan Masjid) memberikan dampak signifikan terutama bagi masyarakat kecil yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Banyak warga yang kesulitan memperoleh modal usaha karena tidak memiliki jaminan, riwayat kredit, maupun kemampuan membayar bunga pinjaman. Kehadiran program ini menjadi solusi alternatif yang lebih inklusif dan berbasis kepercayaan. Meski demikian, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala, seperti risiko keterlambatan pengembalian dana, keterbatasan modal bergulir, serta perlunya pendampingan usaha agar dana yang diberikan benar-benar produktif. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pengelola menerapkan sistem seleksi dan survei sederhana, pendampingan berkala kepada penerima manfaat, serta mekanisme pengembalian yang fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan usaha. Dengan pendekatan tersebut, program tidak hanya membantu permodalan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi jamaah secara

[426] Suwardi, *Wawancara*, Ketua Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 18 April 2025

berkelanjutan. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Husain selaku pedagang sekaligus warga sekitar masjid:

> *"Warga merasa sangat terbantu karena kini dapat memperoleh modal usaha tanpa bunga melalui masjid."*[427]

Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga (BankZiska / Sistem Keuangan Masjid) dirancang tidak hanya sebagai skema bantuan modal usaha, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan yang menyentuh aspek spiritual dan moral penerima manfaat. Pendekatan ini menjadi pembeda utama dibandingkan lembaga pembiayaan konvensional, karena penguatan ekonomi berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai keagamaan. Dalam praktiknya, kendala yang dihadapi antara lain kedisiplinan pengembalian angsuran, pemahaman manajemen usaha yang masih terbatas, serta risiko pembiayaan macet. Untuk mengatasi hal tersebut, pengurus tidak hanya menerapkan sistem pendampingan dan monitoring usaha secara berkala, tetapi juga mengintegrasikan kegiatan kajian rutin sebagai sarana evaluasi bersama dan penguatan komitmen. Melalui pendekatan ini, hubungan antara pengelola dan penerima manfaat menjadi lebih personal dan berbasis kepercayaan. Dengan demikian, program tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi, tetapi juga membentuk karakter usaha yang berlandaskan nilai religius dan tanggung jawab social. Bapak Amam selaku keta RT sekaligus warga di sekitar masjid menyatakan:

> *"Selain bantuan finansial, program ini juga memberikan nilai tambah berupa kegiatan kajian rutin setiap bulan pada saat mengangsur, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan dukungan ekonomi, tetapi juga memperoleh ilmu agama dan bimbingan spiritual yang memperkuat aspek moral dan religius mereka dalam berusaha."*[428]

Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga (BankZiska/Sistem Keuangan Masjid) merepresentasikan model pemberdayaan ekonomi yang mengintegrasikan dimensi finansial dan spiritual dalam satu kerangka kelembagaan berbasis masjid.

---

[427] Husain, *Wawancara*, Pedagang Sekaligus warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 14 Novembar 2025

[428] Amam, *Wawancara*, Ketua RT Sekaligus Warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 1 Desember 2025

Program ini tidak hanya memberikan akses permodalan tanpa bunga bagi masyarakat kecil, tetapi juga menjadi instrumen pembebasan dari praktik riba serta penguatan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi. Dampaknya terlihat pada meningkatnya kemandirian usaha jamaah dan terbukanya peluang ekonomi bagi warga yang sebelumnya sulit mengakses lembaga keuangan formal. Meski menghadapi kendala seperti keterbatasan dana bergulir, risiko keterlambatan pengembalian, dan rendahnya literasi keuangan, pengurus merespons melalui seleksi penerima manfaat, pendampingan usaha, evaluasi berkala, serta pembinaan spiritual melalui kajian rutin. Dengan pendekatan berbasis kepercayaan dan tanggung jawab moral, program ini tidak hanya memperkuat kapasitas ekonomi jamaah, tetapi juga membentuk karakter usaha yang religius, disiplin, dan berkelanjutan.

d. Program Dana Lingkungan Berbasis RT

Program Dana Lingkungan Berbasis RT menjadi salah satu inovasi sosial-ekonomi yang cukup strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat berbasis masjid. Melalui pendekatan partisipatif, program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi bantuan, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan yang mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dana. Dampak positifnya terlihat dari meningkatnya kecepatan respons terhadap kebutuhan mendesak warga, seperti bantuan modal usaha kecil maupun dana darurat bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu, kedekatan sosial di tingkat RT turut memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dan transparansi pengelolaan dana. Program ini juga menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan kapasitas administrasi pengurus RT, potensi miskomunikasi, serta risiko ketidakseimbangan distribusi jika data tidak diperbarui secara berkala. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan evaluasi rutin, pembinaan manajerial sederhana, serta sistem pelaporan yang lebih terstruktur agar akuntabilitas tetap terjaga. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suwardi selaku ketua takmir masjdi:

> *"Program dana lingkungan berbasis RT ini kami buat supaya bantuan lebih merata dan tepat sasaran. Setiap RT punya data warganya, jadi kalau ada yang*

butuh modal atau bantuan darurat bisa cepat ditangani. Sistemnya saling percaya, tapi tetap ada laporan dan evaluasi supaya aman dan tertib."[429]

Tujuan Program Dana Lingkungan Berbasis RT tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan finansial semata, tetapi juga diarahkan untuk membangun fondasi kemandirian ekonomi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan. Melalui sistem desentralisasi di tingkat RT, warga memiliki akses yang lebih dekat terhadap informasi, proses pengajuan, serta mekanisme pengawasan dana. Dampaknya, partisipasi masyarakat menjadi lebih aktif dan rasa memiliki terhadap program semakin kuat. Warga tidak lagi diposisikan sebagai penerima pasif, melainkan sebagai bagian dari sistem yang ikut menjaga keberlangsungan program. Meskipun demikian, beberapa kendala tetap muncul, seperti keterbatasan pemahaman administrasi, perbedaan kapasitas antar-RT, serta tantangan menjaga konsistensi laporan keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendampingan berkala, pelatihan pengelolaan sederhana, serta forum koordinasi antar-RT agar standar pelaksanaan lebih seragam dan transparan. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Khairul Anwar selaku penanggung jawab masjid:

"Tujuan kami supaya lingkungan sekitar masjid ikut mandiri secara ekonomi, tidak hanya bergantung pada bantuan pusat. Dengan sistem RT seperti ini, kami merasa lebih diperhatikan karena bantuan tidak jauh-jauh."[430]

Dari perspektif implementasi, Program Dana Lingkungan Berbasis RT menunjukkan fleksibilitas yang cukup adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Dana yang tersedia tidak hanya digunakan untuk bantuan konsumtif atau kebutuhan darurat, tetapi juga diarahkan pada pengembangan usaha kecil sebagai upaya mendorong produktivitas ekonomi warga. Mekanisme pengajuan melalui RT dinilai efektif karena jalur koordinasi menjadi lebih sederhana, cepat, dan berbasis kedekatan sosial. Dampaknya, proses verifikasi kebutuhan relatif lebih akurat dan risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan melalui kontrol sosial di lingkungan terdekat. Memunculkan tantangan, seperti keterlambatan pengembalian

[429] Suwardi, *Wawancara*, Ketua Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 18 April 2025

[430] Khairul Anwar, *Wawancara*, Penanggung Jawab Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 28 Oktober 2025

dana, perbedaan komitmen antar-peminjam, serta potensi ketidakteraturan pencatatan administrasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan kesepakatan tertulis sederhana, pencatatan keuangan yang lebih rapi, serta evaluasi berkala agar keberlanjutan dana tetap terjaga. Pendekatan berbasis nilai sosial dan keagamaan tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan dan solidaritas warga. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Amam selaku keta RT sekaligus warga di sekitar masjid:

> *"Kalau ada kebutuhan mendesak atau mau usaha kecil-kecilan, bisa dibicarakan lewat RT lalu disampaikan ke masjid. Kadang ada juga sebagian RT dana bantuan RT itu buat pinjaman warganya pinjamanya juga tanpa bunga tapi kadang ada juga warga yang melebihi membayarnya sodakoh katanya"*[431]

Secara sosial, Program Dana Lingkungan Berbasis RT tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat relasi antara masyarakat dan masjid sebagai pusat pemberdayaan komunitas. Keterlibatan warga dalam proses musyawarah, pengambilan keputusan, hingga pengawasan dana menciptakan rasa memiliki (sense of belonging) yang semakin kuat terhadap program. Masjid tidak lagi dipandang sekadar sebagai tempat ibadah, melainkan sebagai institusi sosial yang hadir dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Dampaknya, solidaritas antarwarga meningkat dan budaya gotong royong semakin hidup. Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti menurunnya partisipasi sebagian warga karena kesibukan kerja atau kurangnya pemahaman terhadap mekanisme program. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sosialisasi berkelanjutan, transparansi laporan yang mudah dipahami, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam mendorong partisipasi aktif warga. Hal tersebut sebagaimana dirasakan oleh Bapak Husain selaku pedagang sekaligus warga di sekitar masjid:

> *"Kami merasa program ini mendekatkan warga dengan masjid karena semuanya saling terlibat dalam pengembangan program dan maafatnya sangat terasa sekali."*[432]

---

[431] Amam, *Wawancara*, Ketua RT Sekaligus Warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 1 Desember 2025

[432] Husain, *Wawancara*, Pedagang Sekaligus warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 14 Novembar 2025

Program Dana Lingkungan Berbasis RT merepresentasikan model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang mengintegrasikan aspek partisipasi, kedekatan sosial, dan nilai keagamaan dalam satu sistem yang relatif adaptif. Program ini tidak hanya berdampak pada percepatan distribusi bantuan dan penguatan usaha kecil warga, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi secara bertahap melalui mekanisme desentralisasi di tingkat RT. Fleksibilitas pengelolaan dana, termasuk skema pinjaman tanpa bunga, menunjukkan adanya praktik ekonomi sosial yang berlandaskan kepercayaan dan solidaritas. Keberlanjutan program sangat bergantung pada kualitas tata kelola, konsistensi administrasi, serta kapasitas pengurus di tingkat RT. Kendala seperti ketidakteraturan pencatatan, perbedaan komitmen pengembalian dana, dan variasi kapasitas antarwilayah menjadi tantangan yang perlu diantisipasi melalui pelatihan, pendampingan, serta sistem evaluasi berkala. Dengan penguatan manajerial dan transparansi yang berkelanjutan, program ini berpotensi menjadi model penguatan ekonomi jamaah yang tidak hanya produktif, tetapi juga mempererat hubungan sosial antara masjid dan masyarakat.

e. Program Sosial Produktif dan Pemberdayaan SDM Lokal

Program Sosial Produktif dan Pemberdayaan SDM Lokal yang dijalankan Masjid Baitul Mukhlisin menunjukkan perkembangan yang semakin terarah dan sistematis dalam membangun kemandirian ekonomi jamaah. Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sesaat, tetapi juga menekankan pada peningkatan kapasitas individu melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta penyediaan sarana pendukung kegiatan produktif. Dampaknya, sebagian masyarakat mulai memiliki peluang usaha mandiri dan tambahan penghasilan yang lebih stabil. Selain itu, keberhasilan program dalam menunjukkan hasil nyata turut meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi. Pelaksanaan program juga menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam pendampingan, fluktuasi partisipasi peserta, serta keterbatasan modal untuk memperluas cakupan program. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan jaringan kemitraan, transparansi laporan kegiatan, serta evaluasi berkala agar program tetap

berkelanjutan dan berkembang. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Khairul Anwar selaku penanggung jawab masjid:

> *"Keberhasilan program juga menarik dukungan donatur dari luar daerah, termasuk dari Jakarta, yang turut memberikan bantuan dana maupun perlengkapan usaha seperti alat masak dan peralatan dapur."*[433]

Selain memperoleh dukungan dari para donatur dan partisipasi aktif masyarakat, Program Sosial Produktif dan Pemberdayaan SDM Lokal juga mendapatkan pengakuan formal dalam ajang seleksi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan. Penghargaan tersebut tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga memperkuat legitimasi program sebagai praktik baik (best practice) dalam pengelolaan masjid berbasis pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dampaknya, kepercayaan publik terhadap manajemen program semakin meningkat, sehingga memudahkan dalam menjalin kemitraan serta memperluas jaringan kolaborasi. Pengakuan formal juga membawa tantangan baru, seperti tuntutan menjaga konsistensi kualitas program, peningkatan kapasitas pengelola, serta keberlanjutan inovasi agar tidak stagnan. Untuk menjawab kendala tersebut, diperlukan evaluasi berkelanjutan, penguatan sistem manajemen, dan regenerasi kepengurus. Hal tersebut di ungkapkan oleh Bapak Suwardi selaku ketua takmir masjid:

> *"Kemarin juara 1 versi Muhammadiyah di Banjarmasin sistemnya seperti ini Ponorogo masuk di seleksi-solosi perwakilan Jawa Timur terus Jogja terus masuk perwakilannya masih jadi Masjid Baitul Muklisin ini."*[434]

Penguatan Program Sosial Produktif dan Pemberdayaan SDM Lokal juga ditopang oleh tata kelola keuangan yang semakin transparan dan akuntabel. Transparansi ini menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program, terutama karena sebagian besar kegiatan bergantung pada dukungan donatur dan partisipasi masyarakat. Dengan sistem pelaporan yang lebih terbuka, pengurus masjid berupaya memastikan bahwa setiap dana yang masuk dan keluar dapat

---

[433] Khairul Anwar, *Wawancara*, Penanggung Jawab Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 28 Oktober 2025

[434] Suwardi, *Wawancara*, Ketua Ta'mir Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 18 April 2025

dipertanggungjawabkan secara jelas. Dampaknya, tingkat kepercayaan publik meningkat dan mendorong konsistensi dukungan finansial dari para donatur tetap. Publikasi kegiatan melalui media sosial turut memperluas jangkauan informasi sekaligus menjadi sarana kontrol sosial. Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan konten dan administrasi keuangan yang rapi serta berkelanjutan. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pembagian tugas yang jelas, peningkatan kapasitas pengelola media, serta standar pelaporan yang lebih sistematis. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Dalhar selaku ketua bidang kegiatan masjid:

> *"Selain itu, pengelolaan keuangan masjid juga semakin transparan karena melibatkan donatur tetap dan publikasi kegiatan melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok kalau tidak percaya silahkan cek aja mas ada itu."*[435]

Dampak paling nyata dari keseluruhan Program Sosial Produktif dan Pemberdayaan SDM Lokal adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap masjid sebagai institusi yang memiliki peran multidimensional. Masjid tidak lagi dipandang semata-mata sebagai ruang ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi, pengembangan kapasitas intelektual, serta penguatan solidaritas sosial. Berbagai kegiatan pelatihan, kajian rutin, serta program usaha produktif yang dijalankan secara konsisten telah menciptakan citra positif di tengah masyarakat. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan program. Meningkatnya ekspektasi publik juga menjadi tantangan tersendiri. Pengelola dituntut untuk terus menjaga kualitas kegiatan, konsistensi pelaksanaan program, serta transparansi pengelolaan agar kepercayaan tersebut tidak menurun. Solusi yang dapat dilakukan antara lain memperkuat perencanaan program, meningkatkan kapasitas SDM pengurus, serta melakukan evaluasi berkala berbasis partisipasi jamaah. Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak Amam selaku ketua RT sekaligus warga di sekiat majid:

---

[435] Dalhar Ashari, *Wawancara*, Ta'mir Bidang Kegiatan Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 28 Oktober 2025

"Bahwa dampak yang paling terasa di masyarakat itu mas meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap masjid selain tempat ibadah juga tempat pertumbuhan ekonomi dan banyak kajian kajiannya setiap pekannyadan kemarin juga dapat juara 1 mas di Banjarmasin kategori Muhammadiah baru baru ini aja."[436]

Program Sosial Produktif dan Pemberdayaan SDM Lokal di Masjid Baitul Mukhlisin menunjukkan model pemberdayaan yang terintegrasi antara penguatan ekonomi, peningkatan kapasitas individu, dan pembangunan kepercayaan sosial. Program ini tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga mendorong kemandirian melalui pelatihan, pendampingan usaha, serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Dukungan donatur dari berbagai daerah serta pengakuan formal di tingkat nasional semakin memperkuat legitimasi program sebagai praktik baik pengelolaan masjid berbasis pemberdayaan. Keberlanjutan program tetap menghadapi tantangan, seperti keterbatasan SDM pendamping, fluktuasi partisipasi, serta tuntutan menjaga kualitas di tengah meningkatnya ekspektasi publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen, regenerasi kepengurusan, perluasan kemitraan, dan evaluasi partisipatif secara berkala. Dengan langkah tersebut, program ini berpotensi menjadi model pemberdayaan masjid yang adaptif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi kesejahteraan jamaah.

2. Masjid NU Ponorogo

a. Program Pembiayaan Syariah (Koperasi Simpan-Pinjam Tanpa Bunga)

Program Pembiayaan Syariah dalam bentuk koperasi simpan-pinjam tanpa bunga menjadi salah satu pilar penting dalam penguatan ekonomi jamaah berbasis masjid. Skema ini dirancang untuk memberikan akses permodalan yang lebih adil dan bebas dari praktik riba, sehingga pedagang kecil dapat mengembangkan usahanya tanpa terbebani bunga pinjaman. Dari sisi dampak, program ini membantu menjaga keberlangsungan usaha mikro, meningkatkan perputaran ekonomi lokal, serta memperkuat solidaritas sosial antarjamaah. Namun demikian, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan modal koperasi, manajemen risiko

[436] Amam, *Wawancara*, Ketua RT Sekaligus Warga Area Masjid Baitul Mukhlisin, Ponorogo, 1 Desember 2025

pembiayaan, serta perlunya peningkatan literasi keuangan syariah bagi anggota. Untuk itu, dibutuhkan strategi penguatan kelembagaan, transparansi pengelolaan, serta perluasan partisipasi masyarakat agar manfaatnya lebih merata. Pendekatan yang inklusif juga diperlukan agar program tidak hanya dinikmati oleh jamaah aktif, tetapi menjangkau warga yang membutuhkan dukungan ekonomi. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Bapak H. Imron Husnussairi selaku takmir masjid:

> *"Ada juga pedagang kecil yang bisa pinjam modal tanpa bunga lewat koperasi syariah masjid. Jadi, secara sosial dan ekonomi, efeknya terasa. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih terarah agar manfaat ekonomi dari program-program masjid dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat sekitar, tidak hanya bagi mereka yang aktif dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga oleh warga lain yang membutuhkan dukungan ekonomi dan sosial."*[437]

Di samping penyediaan akses permodalan, penguatan aspek edukatif menjadi langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan program pembiayaan syariah. Pengurus menyadari bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, tetapi juga oleh pemahaman jamaah terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Literasi yang memadai akan mendorong anggota untuk mengelola usaha secara amanah, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pemahaman mengenai konsep halal, keadilan, dan keberkahan usaha diharapkan dapat membentuk budaya ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai masjid. Dengan demikian, program tidak sekadar menjadi fasilitas pinjaman, tetapi juga sarana pembinaan karakter ekonomi umat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak H. Imron Husnussairi:

> *"Upaya ini diiringi dengan peningkatan literasi ekonomi syariah bagi jamaah, agar mereka memahami prinsip usaha yang halal, etis, dan sesuai nilai-nilai Islam, sehingga masjid dapat menjadi pusat ekonomi umat yang mandiri dan berkelanjutan."*[438]

---

[437] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025
[438] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025

Program koperasi syariah dinilai memberikan kemudahan akses permodalan yang lebih manusiawi dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Skema cicilan yang ringan dan tanpa bunga dirasakan sangat membantu pelaku usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan operasional yang mendesak. Namun demikian, terdapat harapan agar program ini tidak berhenti pada skala terbatas, melainkan diperluas cakupannya agar lebih inklusif. Ketersediaan dana yang lebih besar serta sistem pengelolaan yang semakin profesional dipandang penting untuk meningkatkan kepercayaan dan pemerataan manfaat. Aspirasi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan penguatan kelembagaan agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Erlik selaku pedagang:

> *"Waktu butuh tambahan modal buat beli kompor baru, saya pinjam ke koperasi masjid dan dicicil ringan. Tapi memang menurut saya, program ini masih perlu dikembangkan lagi supaya lebih banyak pedagang yang bisa merasakan. Mungkin ke depan perlu dana yang lebih besar dan pengelolaan yang lebih rapi, supaya manfaatnya bisa merata, tidak hanya untuk yang sudah dekat dengan pengurus saja."*[439]

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa secara umum program koperasi syariah dipersepsikan positif oleh jamaah, meskipun tidak semua memahami secara rinci mekanisme dan dampaknya. Persepsi yang baik ini menjadi modal sosial yang penting bagi keberlanjutan program, karena mencerminkan adanya kepercayaan terhadap niat dan tujuan pengurus masjid. Namun di sisi lain, keterbatasan informasi juga mengindikasikan perlunya peningkatan transparansi dan sosialisasi agar manfaat serta mekanisme kerja koperasi dapat dipahami lebih luas. Dengan demikian, partisipasi jamaah tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga didasarkan pada pemahaman yang utuh. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ilham selaku jamaah masjid:

[439] Erlik, *Wawancara*, Pedagang Masjid NU, Ponorogo, 26 November 2025

"Setahu saya koperasi masjid itu niatnya sangat baik, tapi saya kurang menegtahui untuk hal hal itu ya pastinya banyak dampak dari program tersebut"[440]

Program Pembiayaan Syariah (Koperasi Simpan-Pinjam Tanpa Bunga) memberikan dampak nyata dalam memperkuat ekonomi jamaah, khususnya bagi pedagang kecil yang membutuhkan akses modal tanpa beban bunga. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen permodalan, tetapi juga sebagai sarana membangun solidaritas sosial dan budaya ekonomi yang selaras dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, tantangan masih terlihat pada keterbatasan modal, perlunya pengelolaan yang lebih profesional, serta pentingnya pemerataan akses agar manfaat tidak terpusat pada kelompok tertentu. Selain itu, peningkatan literasi ekonomi syariah dan transparansi informasi menjadi kunci keberlanjutan program. Persepsi positif jamaah menjadi modal sosial yang kuat, namun perlu diiringi dengan sosialisasi yang lebih luas agar partisipasi masyarakat meningkat. Dengan penguatan kelembagaan dan edukasi yang berkelanjutan, koperasi syariah berpotensi berkembang sebagai pilar ekonomi umat yang mandiri dan inklusif.

b. Program Usaha Produktif Berbasis Masjid

Program Usaha Produktif Berbasis Masjid secara bertahap telah mendorong perubahan paradigma mengenai peran masjid dalam kehidupan masyarakat. Tidak lagi terbatas sebagai tempat ibadah ritual, masjid mulai berfungsi sebagai ruang pemberdayaan ekonomi yang memberi peluang bagi jamaah untuk meningkatkan kesejahteraan. Kehadiran aktivitas usaha di sekitar masjid membuka akses ekonomi bagi pedagang kecil, menciptakan perputaran transaksi lokal, serta memperkuat interaksi sosial yang produktif. Meskipun demikian, dampak yang dihasilkan belum sepenuhnya merata dan masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang terlibat aktif dalam kegiatan masjid. Tantangan seperti keterbatasan lahan, fluktuasi keramaian, serta pengelolaan internal menjadi faktor yang memengaruhi perluasan manfaat program. Diperlukan strategi pengembangan yang lebih inklusif, penataan manajemen yang lebih sistematis, serta penguatan kolaborasi antarjamaah agar

[440] Ilham, *Wawancara*, Jamaah Masjid NU, Ponorogo, 22 November 2025

dampak sosial-ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Hal tersebut sebagaimana diakui oleh Bapak H. Imron Husnussairi selaku takmir masjid:

> *"Dampak ekonomi dari kegiatan masjid saat ini baru dirasakan oleh sebagian kecil jamaah, terutama oleh pedagang kecil dan pengurus yang aktif dalam kegiatan masjid. Meskipun begitu, arah pengembangan program sudah menunjukkan langkah positif. Kegiatan yang ada mulai membangkitkan semangat kemandirian ekonomi di kalangan jamaah."*[441]

Pandangan tersebut mempertegas bahwa transformasi peran masjid diarahkan pada integrasi antara fungsi spiritual dan fungsi sosial-ekonomi. Kesadaran kolektif yang mulai tumbuh di kalangan pengurus dan jamaah menjadi fondasi penting dalam membangun model pemberdayaan berbasis komunitas. Masjid diposisikan sebagai pusat pembinaan yang tidak hanya menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara normatif, tetapi juga menerjemahkannya ke dalam praktik nyata yang menyentuh kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, dakwah tidak hanya bersifat verbal, melainkan aplikatif dalam bentuk program ekonomi produktif yang berorientasi pada kesejahteraan. Arah pengembangan ini sebagaimana ditegaskan oleh Bapak H. Imron Husnussairi:

> *"Masjid diharapkan tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi umat. Nilai-nilai dakwah tidak berhenti di mimbar, melainkan diwujudkan dalam aktivitas nyata yang mendukung kesejahteraan jamaah."*[442]

Keberadaan program usaha produktif di lingkungan masjid mulai menunjukkan dampak yang lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Fasilitas yang diberikan oleh pengurus, seperti penyediaan tempat berjualan tanpa biaya sewa, menjadi bentuk dukungan konkret bagi pelaku usaha kecil. Kebijakan tersebut tidak hanya meringankan beban operasional, tetapi juga membuka ruang kesempatan bagi jamaah yang memiliki keterbatasan modal untuk tetap menjalankan usaha. Dalam konteks sosial, langkah ini memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antarwarga, karena masjid hadir sebagai ruang yang inklusif dan memberdayakan. Persepsi positif ini tercermin dalam pernyataan Bapak Ilham selaku jamaah masjid:

---

[441] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025
[442] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025

"Sekarang banyak jamaah kecil yang terbantu. Misalnya, ibu-ibu yang jual gorengan atau makanan buka puasa dapat tempat di area masjid tanpa bayar sewa."[443]

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pelaku usaha dalam kegiatan masjid tidak hanya bersifat insidental, tetapi telah membentuk hubungan yang saling menguatkan antara aktivitas keagamaan dan ekonomi. Kegiatan rutin maupun acara tertentu yang diselenggarakan di masjid menciptakan peluang usaha yang relatif stabil bagi pedagang kecil. Keberadaan jamaah sebagai konsumen tetap turut memberikan kepastian pasar, sehingga usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, masjid berperan sebagai ekosistem sosial-ekonomi yang hidup, di mana interaksi ibadah dan aktivitas ekonomi berlangsung secara harmonis. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Erlik selaku pedagang:

"Kalau terkait acara-acara itu yang disuruh saya kalau ada NU ada acara apa gitu yang disuruh saya seperti membuat makanan atau kopi dan lain sebagainya jadi kantinnya masjid itu di sini mas. Jamaah masjid juga jadi pelanggan tetap. Setiap habis salat, mereka beli makanan atau minuman ke kami. Jadi masjid ini bukan cuma tempat ibadah, tapi juga tempat hidup bagi pedagang kecil seperti saya."[444]

Secara keseluruhan, Program Usaha Produktif Berbasis Masjid menunjukkan adanya transformasi peran masjid sebagai pusat pemberdayaan yang mengintegrasikan fungsi spiritual dan sosial-ekonomi. Meskipun dampaknya belum merata dan masih menghadapi tantangan manajerial serta keterbatasan fasilitas, arah pengembangannya telah memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekonomi jamaah, khususnya pelaku usaha kecil. Dukungan berupa penyediaan tempat usaha, keterlibatan dalam kegiatan masjid, serta terciptanya pasar internal dari jamaah menjadi fondasi terbentuknya ekosistem ekonomi berbasis komunitas. Program ini juga menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya kemandirian dan solidaritas sosial. Dengan pengelolaan yang lebih sistematis,

[443] Ilham, *Wawancara*, Jamaah Masjid NU, Ponorogo, 22 November 2025
[444] Erlik, *Wawancara*, Pedagang Masjid NU, Ponorogo, 26 November 2025

strategi yang inklusif, serta kolaborasi yang berkelanjutan, masjid berpotensi menjadi model pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan, aplikatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan bersama.

c. Program Penguatan Dana Sosial Produktif

Program Penguatan Dana Sosial Produktif menjadi salah satu strategi masjid dalam memperluas fungsi sosialnya secara lebih terarah dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan dana yang bersumber dari partisipasi jamaah dan donatur, masjid berupaya membangun sistem distribusi bantuan yang tidak hanya bersifat insidental, tetapi juga terstruktur. Dampak sosial dari program ini mulai terlihat pada meningkatnya kepedulian kolektif dan keterlibatan aktif jamaah dalam kegiatan berbagi. Namun demikian, pelaksanaannya tidak terlepas dari sejumlah kendala, seperti keterbatasan dana yang fluktuatif, pendataan penerima manfaat yang belum sepenuhnya akurat, serta perlunya manajemen yang transparan dan akuntabel agar kepercayaan jamaah tetap terjaga. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penguatan sistem administrasi, perencanaan program yang matang, serta sinergi dengan berbagai pihak agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Bapak H. Imron Husnussairi selaku takmir masjid menjelaskan beberapa bentuk kegiatan sosial yang telah dan akan dijalankan, antara lain:

> *"Kegiatan sosial yang ada itu misalnya program ATM Beras yang akan di buat, Jumat Berkah, setiap Jumat jamaah dan donatur ikut nyumbang, lalu berasnya dibagikan ke warga sekitar"*[445]

Selain program rutin mingguan, penguatan dana sosial juga mengalami peningkatan intensitas pada momentum keagamaan yang memiliki nilai spiritual dan sosial tinggi, khususnya bulan Ramadan. Pada periode ini, partisipasi jamaah cenderung meningkat seiring dengan semangat berbagi dan kepedulian sosial yang lebih kuat. Dana yang terkumpul tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dirancang untuk mempererat ukhuwah dan menghadirkan kebersamaan di tengah masyarakat. Meski demikian, tantangan seperti peningkatan

[445] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025

jumlah penerima manfaat dan pengelolaan distribusi tetap memerlukan koordinasi yang baik agar bantuan tepat sasaran. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak H. Imron Husnussairi:

> *"Kalau bulan Ramadan, ya ada pembagian sembako, buka puasa bersama, sampai santunan anak yatim. Alhamdulillah Sekarang banyak jamaah kecil yang terbantu."*[446]

Dari perspektif jamaah sekaligus pelaku usaha di sekitar masjid, keberadaan program penguatan dana sosial produktif tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan secara langsung, tetapi juga berdampak pada dinamika sosial dan ekonomi lingkungan sekitar. Kegiatan berbagi yang dilakukan secara rutin menciptakan suasana masjid yang lebih aktif, hangat, dan penuh interaksi sosial. Solidaritas yang terbangun mendorong rasa memiliki di antara jamaah, sehingga partisipasi semakin meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, aktivitas sosial yang intensif juga turut menggerakkan aktivitas ekonomi kecil di sekitar masjid. Ibu Erlik selaku pedagang menegaskan dampak nyata program tersebut:

> *"Saya lihat sendiri program seperti Jumat Berkah sangat membantu warga yang membutuhkan. Setiap Jumat ada saja jamaah yang menyumbang, lalu dibagikan lagi ke masyarakat sekitar. Waktu Ramadan juga ada pembagian sembako dan buka puasa bersama. Sebagai pedagang yang menyewa ruko di sini, saya merasa kegiatan itu bukan cuma membantu warga, tapi juga membuat lingkungan masjid jadi lebih hidup dan penuh kepedulian"*[447]

Namun fektivitas dan pemerataan manfaat program masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Skala kegiatan yang relatif kecil serta sistem koordinasi yang belum optimal menyebabkan dampak program belum dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan, belum adanya perencanaan jangka panjang yang terstruktur, serta minimnya evaluasi berkala turut memengaruhi capaian program. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan manajemen, peningkatan kapasitas pengurus, serta penyusunan strategi distribusi

---

[446] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025
[447] Erlik, *Wawancara*, Pedagang Masjid NU, Ponorogo, 26 November 2025

yang lebih sistematis agar manfaatnya lebih merata. Bapak Ilham selaku jamaah masjid mengungkapkan:

> *"Masyarakat secara umum belum merasakan manfaat yang merata karena kegiatan ekonomi yang berjalan masih terbatas pada skala kecil dan belum terkoordinasi dengan baik."*[448]

Secara keseluruhan, Program Penguatan Dana Sosial Produktif mencerminkan upaya masjid dalam mengoptimalkan peran sosialnya melalui pengelolaan dana yang partisipatif dan berorientasi pada keberlanjutan. Program ini tidak hanya memperkuat solidaritas dan kepedulian jamaah, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat sekitar, terutama pada momentum rutin seperti Jumat Berkah dan bulan Ramadan. Kegiatan sosial yang terstruktur mampu membangun suasana masjid yang lebih hidup serta mendorong keterlibatan kolektif. Namun, efektivitas dan pemerataan manfaat masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan dana, koordinasi yang belum optimal, serta sistem pendataan dan distribusi yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penguatan manajemen, transparansi, serta perencanaan jangka panjang menjadi langkah strategis agar program dapat berkembang lebih inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Program Pengembangan dan Digitalisasi Ekonomi Masjid (Rencana Strategis)

Program Pengembangan dan Digitalisasi Ekonomi Masjid merupakan bagian dari rencana strategis jangka panjang yang bertujuan meningkatkan profesionalisme dan keberlanjutan pengelolaan program berbasis jamaah. Digitalisasi dipandang sebagai solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi, seperti keterbatasan akses informasi, kurangnya transparansi laporan keuangan, serta rendahnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan masjid. Dengan pemanfaatan teknologi, pengurus berharap proses administrasi, publikasi kegiatan, hingga pengelolaan donasi dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi, kebutuhan biaya pengembangan sistem, serta adaptasi

[448] Ilham, *Wawancara*, Jamaah Masjid NU, Ponorogo, 22 November 2025

jamaah terhadap platform digital menjadi aspek yang perlu dipersiapkan secara matang. Diperlukan perencanaan teknis yang sistematis, pelatihan pengurus, serta sosialisasi yang berkelanjutan agar transformasi digital dapat berjalan optimal dan inklusif. Bapak H. Imron Husnussairi selaku takmir masjid menjelaskan bahwa salah satu rencana konkret yang akan dilakukan adalah pembangunan sistem digital melalui website resmi masjid:

> *"Ke depan, pengurus masjid berencana mengembangkan sistem digital dengan membuat website resmi sebagai sarana informasi dan transparansi kegiatan. Melalui website ini, masyarakat dapat melihat laporan keuangan, mengikuti kegiatan masjid, serta berdonasi secara daring dengan lebih mudah dan terbuka."*[449]

Selain penguatan sistem digital, strategi pengembangan ekonomi masjid juga diarahkan pada pembangunan jejaring dan kolaborasi kelembagaan sebagai langkah memperluas kapasitas dan daya jangkau program. Kerja sama dengan institusi pendidikan dan organisasi keagamaan dipandang penting untuk memperkuat sumber daya manusia, baik dalam aspek manajerial, kewirausahaan, maupun literasi digital. Sinergi ini juga membuka peluang pembinaan generasi muda agar lebih terlibat dalam kegiatan produktif berbasis masjid. Tantangan seperti koordinasi antar lembaga, penyelarasan visi program, serta pembagian peran menjadi hal yang perlu dikelola secara profesional agar kolaborasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak H. Imron Husnussairi:

> *"Selain itu, masjid juga menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan Ma'arif dan PCNU untuk memperkuat sumber daya manusia serta memperluas jangkauan kegiatan ekonomi berbasis jamaah."*[450]

Lebih lanjut, pengembangan ekonomi masjid tidak hanya memerlukan inovasi program, tetapi juga perumusan strategi yang terstruktur dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Perencanaan yang sistematis menjadi kunci agar setiap program memiliki arah, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang jelas. Selama ini, beberapa kegiatan masih berjalan secara bertahap dan responsif

---

[449] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025
[450] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025

terhadap situasi, sehingga diperlukan penyusunan roadmap jangka menengah dan panjang agar dampaknya lebih terukur. Selain itu, pemetaan potensi jamaah dan lingkungan sekitar juga penting dilakukan guna memastikan bahwa program ekonomi benar-benar menjawab kebutuhan dan peluang yang ada. Bapak H. Imron Husnussairi menekankan:

> *"Ke depan, diperlukan strategi yang lebih terarah agar manfaat ekonomi dari program-program masjid dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat sekitar."*[451]

Program Pengembangan dan Digitalisasi Ekonomi Masjid menunjukkan adanya transformasi menuju tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Digitalisasi melalui website resmi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas, memperluas akses informasi, serta mempermudah partisipasi jamaah dalam kegiatan dan donasi. Di sisi lain, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan memperkuat kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperluas jaringan pemberdayaan ekonomi berbasis jamaah. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan teknis, peningkatan kompetensi pengurus, serta perumusan strategi yang terarah dan berbasis kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan roadmap yang sistematis, evaluasi berkelanjutan, dan penguatan sinergi kelembagaan menjadi kunci agar pengembangan ekonomi masjid dapat berjalan inklusif, terukur, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.

[451] Imron Husnussairi, *Wawancara*, Takmir Masjid NU, Ponorogo, 25 Oktober 2025

B. Analisis Dampak dan Solusi atas kendala dan Tantangan Program Pemberdayaan Ekonomi Masjid Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar

1. Masjid Baitul Mukhlisin

a. Program Usaha Berkelanjutan Berbasis Masjid (BUMM)

Program BUMM di Masjid Baitul Mukhlisin mencerminkan konsep pemberdayaan menurut Yasir Yusuf yang menekankan peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui penguatan akses modal, pelatihan, dan partisipasi masyarakat, sehingga tidak sekadar bersifat konsumtif tetapi produktif dan berkelanjutan.[452] Hal ini sejalan dengan pandangan Markhamah bahwa keberhasilan pemberdayaan ditentukan oleh tumbuhnya kesadaran kolektif, kemandirian kelompok, serta berkembangnya usaha produktif berbasis potensi lokal.[453] Dampak yang dirasakan masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan dan kemampuan keluar dari tekanan ekonomi, menunjukkan terpenuhinya indikator seperti peningkatan pendapatan dan kapasitas kerja.[454] Selain itu, temuan ini diperkuat oleh studi Theo Lynn dkk yang menyatakan bahwa "*empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions,*" yang menegaskan pentingnya partisipasi dan kontrol masyarakat.[455] BUMM telah menunjukkan keberhasilan relatif sebagai model pemberdayaan partisipatif yang berorientasi kemandirian, meskipun masih memerlukan penguatan kapasitas dan pemerataan partisipasi.

Keberlanjutan BUMM Masjid Baitul Mukhlisin telah mengarah pada model pemberdayaan berkelanjutan sebagaimana dikemukakan Yasir Yusuf, yaitu melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas organisasi, dan kesinambungan program yang tidak berhenti pada aspek ekonomi semata. Praktik evaluasi rutin,

---

[452] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 87.

[453] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 10–11.

[454] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 105.

[455] Theo Lynn dkk., "The Digital Citizen," dalam *Digital Towns: Accelerating and Measuring the Digital Transformation of Rural Societies and Economies*, ed. oleh Theo Lynn dkk. (Cham: Springer International Publishing, 2022), 6–7.

pembagian tugas, serta diversifikasi usaha mencerminkan proses peningkatan kemandirian dan kapasitas kelembagaan.[456] Hal ini sejalan dengan pandangan Markhamah yang menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan ditandai oleh tertatanya sistem administrasi, berkembangnya usaha produktif, serta meluasnya jaringan kemitraan.[457] Indikator keberhasilan juga terlihat dari meningkatnya kapasitas kerja dan peluang usaha jamaah melalui berbagai unit ekonomi. [458] Temuan ini juga diperkuat oleh Tiina Pajuste yang menegaskan bahwa "*levels of digital inequality caught many organisations off guard*," sehingga intervensi berkelanjutan berbasis kapasitas lokal sangat penting untuk menghindari ketimpangan baru.[459] Dengan demikian, konsistensi manajemen, partisipasi jamaah, dan inovasi usaha menjadi kunci sinergis bagi keberlanjutan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan kolektif.

Implementasi BUMM telah menghadirkan dampak ekonomi dan sosial yang selaras dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan masjid tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mendorong kemandirian ekonomi melalui akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi jamaah.[460] Kemudahan memperoleh kebutuhan pokok mencerminkan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat solidaritas sosial sebagaimana fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan.[461] Hal ini juga sejalan dengan Markhamah yang menegaskan bahwa kesejahteraan tercermin dari kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup melalui akses terhadap sumber daya ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan.[462] Lebih lanjut, kajian oleh Jan-René Schluchter dan Anselm Böhmer menekankan bahwa keberhasilan program

---

[456] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 123.

[457] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 22.

[458] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 87.

[459] Tiina Pajuste, "The Digital Divide: Reinforcing Vulnerabilities," dalam *Human Rights in the Digital Domain: Core Questions*, ed. oleh Tiina Pajuste (Cambridge: Cambridge University Press, 2025), 379.

[460] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 66.

[461] Ibid., 88.

[462] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 9.

komunitas bergantung pada akses, keterjangkauan, dan kemampuan masyarakat agar kelompok rentan tidak tertinggal dalam sistem ekonomi baru.[463] Dengan demikian, BUMM terbukti berkontribusi pada kesejahteraan, namun keberlanjutan menuntut penguatan manajemen, stabilitas pasokan, dan adaptasi terhadap dinamika pasar.

Dimensi ketenagakerjaan dalam BUMM menunjukkan keselarasan dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan ekonomi masjid tidak hanya bersifat distributif, tetapi produktif karena mampu meningkatkan pendapatan sekaligus kemandirian jamaah melalui penciptaan lapangan kerja.[464] Hal ini juga sejalan dengan Markhamah yang menegaskan bahwa kesejahteraan berkaitan erat dengan pemerataan pendapatan dan ketersediaan kesempatan kerja, sehingga keberadaan unit usaha masjid berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan keluarga.[465] Secara empiris, literature oleh Elvin Shava dan Tigere Paidamoyo Muringa menegaskan bahwa peluang kerja baru dalam komunitas hanya efektif meningkatkan kesejahteraan apabila diikuti peningkatan akses keterampilan dan keberlanjutan ekonomi lokal.[466] Dengan demikian, praktik BUMM menunjukkan integrasi fungsi ekonomi, sosial, dan kelembagaan masjid, di mana penciptaan kerja, penguatan kapasitas SDM, dan manajemen usaha yang berkelanjutan menjadi kunci transformasi masjid sebagai pusat kesejahteraan masyarakat.

b. Program Usaha Air Minum Isi Ulang (Airku)

Program Airku mencerminkan implementasi pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf, karena usaha produktif ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan rutin, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi jamaah sekaligus fungsi sosial masjid.[467] Strategi menjaga

---

[463] Jan-René Schluchter dan Anselm Böhmer, "Capitalism and Digital Inequality: Implications for Inclusive Education," *Seminar.Net* 21, no. 1 (Juni 2025): 9–10.

[464] John M. Bryson, Barbara C. Crosby, dan Melissa Middleton Stone, "Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed *and* Challenging," *Public Administration Review* 75, no. 5 (September 2015): 105, https://doi.org/10.1111/puar.12432.

[465] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 5.

[466] Elvin Shava dan Tigere Paidamoyo Muringa, "Digital empowerment of women in the South African public sector," *Frontiers In sociology*, 2025, 8.

[467] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 105.

kualitas dan harga kompetitif menunjukkan orientasi keberlanjutan yang mendukung dampak ekonomi dan sosial sebagaimana ditegaskan Yusuf.[468] Dari perspektif Markhamah, keberadaan Airku berkontribusi pada indikator kesejahteraan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak dan peluang distribusi pendapatan berbasis usaha komunitas, yang menegaskan pentingnya inovasi ekonomi dan partisipasi masyarakat.[469] Selain itu, kajian oleh Úrsula Oswald Spring menegaskan bahwa ketersediaan dan kualitas air merupakan faktor langsung yang memengaruhi kesehatan masyarakat dan sistem layanan air aman.[470] Dengan demikian, Airku tidak hanya berfungsi sebagai unit bisnis masjid, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan terpadu yang menghubungkan dimensi ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Pengelolaan Program Airku menunjukkan keselarasan dengan konsep pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang dikemukakan Yasir Yusuf, terutama pada dimensi ekonomi dan sosial. Orientasi distribusi keuntungan ke kas masjid serta pelibatan warga dalam produksi dan distribusi mencerminkan pengalihan dana umat ke kegiatan produktif yang mendorong kemandirian jamaah sekaligus memperkuat solidaritas komunitas.[471] Dari perspektif Markhamah, praktik ini berkontribusi pada indikator kesejahteraan melalui peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan partisipasi masyarakat dalam proses ekonomi. Transparansi keuangan dan pembagian peran juga memperkuat tata kelola partisipatif sebagaimana ditekankan dalam teori kesejahteraan berbasis keterlibatan masyarakat.[472] Temuan ini sejalan dengan kajian Lisa Govik dan Henrik Wallström yang menegaskan bahwa "*social enterprises pursue both financial sustainability and social value creation simultaneously*".[473] Dengan demikian, Program Airku

---

[468] Ibid., 55.

[469] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 34.

[470] Úrsula Oswald Spring, "On Health and Water Security," *Earth at Risk in the 21st Century: Rethinking Peace, Environment, Gender, and Human, Water, Health, Food, Energy Security, and Migration* 18 (Januari 2020): 386–87.

[471] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 61.

[472] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 41.

[473] Lisa Govik dan Henrik Wallström, "Barriers, Solutions and Benefits of Sharing Electric Vehicle Charging Infrastructure," *Transport Policy* 175 (Januari 2026): 7–8.

tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan yang memperkuat kesejahteraan kolektif jamaah secara berkelanjutan.

Program Airku menunjukkan keselarasan dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis masjid berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan melalui penyediaan layanan produktif yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat kedekatan jamaah dengan masjid.[474] Kemudahan akses dan harga terjangkau mencerminkan fungsi sosial-ekonomi masjid yang tidak sekadar konsumtif, tetapi memberdayakan.[475] Perspektif Markhamah juga relevan karena keberadaan Airku berkontribusi pada indikator kesejahteraan, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar dan efisiensi pengeluaran rumah tangga, yang berkaitan dengan pemerataan pendapatan serta partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan.[476] Tantangan kualitas dan kepercayaan telah direspons melalui kontrol sanitasi dan komunikasi pelanggan, yang memperkuat legitimasi sosial program. Temuan studi Adam Jabłoński dan Marek Jabłoński menegaskan bahwa kepercayaan merupakan "*key factor*" yang meningkatkan kinerja sosial dan ekonomi model bisnis air berbasis sosial.[477] Dengan demikian, Airku berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan yang integratif menggabungkan akses layanan, kepercayaan publik, dan pemberdayaan komunitas.

Program Usaha Air Minum Isi Ulang (Airku) menunjukkan fungsi pemberdayaan ekonomi yang selaras dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa usaha produktif berbasis masjid mampu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat solidaritas jamaah melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam aktivitas ekonomi.[478] Keterlibatan warga sebagai tenaga kerja mencerminkan dampak ekonomi dan sosial yang konkret, karena membuka akses penghasilan dan mempererat hubungan komunitas.[479] Perspektif Markhamah juga relevan, sebab

---

[474] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 109.

[475] Ibid., 87–88.

[476] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 46.

[477] Adam Jabłoński dan Marek Jabłoński, "Trust as a Key Factor in Shaping the Social Business Model of Water Supply Companies," *Sustainability* 11, no. 20 (Januari 2019): 43–44.

[478] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 142.

[479] Ibid., 112.

penciptaan lapangan kerja melalui Airku berkontribusi pada indikator kesejahteraan berupa peningkatan dan pemerataan pendapatan serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.[480] Selain itu Petra C. M. Neessen dkk menegaskan bahwa usaha sosial perlu menyeimbangkan tujuan sosial dan keberlanjutan bisnis agar mampu menghasilkan dampak kerja yang berkelanjutan dan bernilai ganda bagi masyarakat.[481] Dengan demikian, Airku tidak hanya menjadi unit ekonomi masjid, tetapi juga instrumen pemberdayaan inklusif yang memperkuat kesejahteraan komunitas.

c. Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga (BankZiska / Sistem Keuangan Masjid)

Implementasi Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga menunjukkan keselarasan kuat dengan kerangka pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang dijelaskan Yasir Yusuf, khususnya pada dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual. Penyediaan akses modal tanpa riba mendorong kemandirian usaha jamaah sekaligus memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pembinaan ekonomi dan moral.[482] Dari perspektif Markhamah, program ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan melalui perluasan akses modal produktif, penciptaan peluang usaha, dan partisipasi jamaah dalam proses pemberdayaan, yang berdampak pada pemerataan pendapatan. Penguatan seleksi, pendampingan, dan administrasi juga mencerminkan tata kelola partisipatif yang mendukung keberlanjutan program.[483] Hal ini sejalan dengan temuan Tesfaye Ginbare Gutu dkk yang menegaskan bahwa "*the economic and financial sustainability of Microfinance Institutions is a prerequisite for widening a potentially unlimited client base*".[484] Dengan demikian, BankZiska tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi mekanisme

---

[480] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 26–27.

[481] Petra C. M. Neessen, Cosmina L. Voinea, dan Els Dobber, "Business Models of Social Enterprises: Insight into Key Components and Value Creation," *Sustainability* 13, no. 22 (Januari 2021): 20.

[482] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 120.

[483] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 85.

[484] Tesfaye Ginbare Gutu, István Zsombor Hágen, dan Domicián Máté, "Sustainable Financial Inclusion Impact on SMEs' Performance: Systematic Literature Review," *Acta Carolus Robertus* 15, no. Különszám (Desember 2025): 113.

pemberdayaan terpadu yang memperkuat kemandirian dan kesejahteraan jamaah secara berkelanjutan.

Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga (BankZiska) menunjukkan kesesuaian dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan ekonomi masjid mampu meningkatkan pendapatan melalui akses permodalan produktif, sekaligus memperkuat solidaritas jamaah karena berbasis kepercayaan dan pendampingan.[485] Dari perspektif Markhamah, program ini berkontribusi pada indikator kesejahteraan terutama pemerataan pendapatan dan perluasan akses sumber daya ekonomi, karena warga yang sebelumnya tidak bankable kini memperoleh peluang usaha yang lebih adil dan inklusif.[486] Temuan Nicholas Bamegne Nambie dkk juga menegaskan bahwa microfinance meningkatkan ketahanan finansial kelompok rentan dengan memberi kesempatan meminjam dan mengakses layanan keuangan bagi mereka yang tidak terlayani bank formal.[487] Sintesisnya, BankZiska tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga mekanisme inklusi keuangan berbasis masjid yang mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat kohesi sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan meskipun tetap memerlukan penguatan manajemen risiko pengembalian.

Program Pembiayaan Mikro Tanpa Bunga (BankZiska) menunjukkan keselarasan dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan ekonomi masjid tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga memperkuat dimensi sosial dan spiritual jamaah melalui integrasi pembinaan usaha dan kajian rutin.[488] Pendekatan ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi diposisikan sebagai bagian dari ibadah yang mendorong kemandirian sekaligus kedekatan jamaah dengan masjid.[489] Sejalan dengan Markhamah, program ini berkontribusi pada

---

[485] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 8.

[486] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 25.

[487] Nicholas Bamegne Nambie, Kwaku Sarbeng-Adjebeng Akrofi, dan Racheal Amoah, "Effect of Financial Regulations, Risk Management, on Performance of Microfinance Institutions in Sub-Saharan African Countries," *International Journal of Economic Perspectives* 18, no. 11 (November 2024): 2283.

[488] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 173.

[489] Ibid., 189.

indikator kesejahteraan melalui perluasan akses modal, peningkatan kapasitas usaha, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembinaan.[490] Dari perspektif akademik, studi temuan Ma Celia López-Penabad dkk menegaskan bahwa lembaga keuangan mikro berperan penting dalam mengurangi kerentanan ekonomi kelompok rentan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.[491] Sintesisnya, BankZiska efektif sebagai model pemberdayaan integratif yang menggabungkan penguatan ekonomi, sosial, dan spiritual masyarakat secara berkelanjutan.

d. Program Dana Lingkungan Berbasis RT

Program Dana Lingkungan Berbasis RT menunjukkan sinkronisasi yang kuat dengan kerangka pemberdayaan ekonomi berbasis masjid sebagaimana dijelaskan Yasir Yusuf, terutama pada dimensi dampak ekonomi dan sosial, karena mekanisme distribusi yang cepat serta dukungan modal mikro berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi jamaah sekaligus memperkuat solidaritas komunitas.[492] Perspektif Markhamah juga relevan, sebab pendekatan partisipatif di tingkat RT mencerminkan indikator kesejahteraan berupa pemerataan pendapatan dan keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan.[493] Namun, kendala administrasi dan potensi ketidakseimbangan distribusi menegaskan pentingnya tata kelola yang akuntabel. Temuan studi Seng Boon Lim dkk menegaskan bahwa transparansi dan partisipasi publik "*facilitates social oversight and promotes citizen participation in local decision-making*," sehingga meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas kelembagaan.[494] Dengan demikian, program ini efektif mendorong kesejahteraan, tetapi membutuhkan penguatan sistem manajemen dan evaluasi partisipatif agar dampaknya berkelanjutan dan merata.

---

[490] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 95.

[491] Mª Celia López-Penabad dkk., "Microfinance Institutions and Corporate Social Responsibility. A Scientometric Study," *Future Business Journal* 10, no. 1 (Agustus 2024): 90, https://doi.org/10.1186/s43093-024-00374-w.

[492] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 142.

[493] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 72.

[494] Seng Boon Lim dkk., "PARTICIPATION IN E-GOVERNMENT SERVICES AND SMART CITY PROGRAMS: A CASE STUDY OF MALAYSIAN LOCAL AUTHORITY," *PLANNING MALAYSIA* 18 (Juli 2020): 300–301.

Program Dana Lingkungan Berbasis RT menunjukkan orientasi pemberdayaan yang sejalan dengan pandangan Yasir Yusuf bahwa program ekonomi masjid harus mendorong kemandirian ekonomi melalui akses yang lebih dekat terhadap sumber daya dan pendampingan produktif.[495] Desentralisasi di tingkat RT memperkuat dampak sosial berupa meningkatnya partisipasi dan solidaritas warga, sehingga fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan semakin konkret.[496] Temuan ini juga konsisten dengan Markhamah yang menekankan bahwa kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh pemerataan pendapatan dan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan,[497] keterlibatan warga dalam pengawasan dan pengelolaan dana mencerminkan partisipasi yang aspiratif dan partisipatif. Selain itu, studi Sissel Hovik dan G. Anthony Giannoumis menegaskan bahwa partisipasi warga dapat menurunkan hambatan keterlibatan dan menciptakan koneksi langsung antara masyarakat dan pengambil kebijakan, meskipun tetap membutuhkan koordinasi yang kuat agar hasil tidak suboptimal.[498] Dengan demikian, program berbasis RT berpotensi meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan apabila disertai penguatan kapasitas administrasi dan standardisasi pelaporan.

Program Dana Lingkungan Berbasis RT mencerminkan implementasi pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang selaras dengan pandangan Yasir Yusuf, karena dana sosial tidak hanya bersifat konsumtif tetapi diarahkan pada kegiatan produktif yang berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi warga.[499] Dari sisi sosial, mekanisme berbasis RT memperkuat solidaritas dan kedekatan jamaah sebagaimana ditegaskan Yasir Yusuf bahwa masjid berfungsi sebagai pusat interaksi sosial.[500] Perspektif Markhamah juga relevan, sebab keterlibatan RT

---

[495] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 8.

[496] Ibid., 52.

[497] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 8.

[498] Sissel Hovik dan G. Anthony Giannoumis, "Linkages Between Citizen Participation, Digital Technology, and Urban Development," dalam *Citizen Participation in the Information Society: Comparing Participatory Channels in Urban Development*, ed. oleh Sissel Hovik dkk. (Cham: Springer International Publishing, 2022), 91.

[499] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 142.

[500] Ibid., 183.

menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemanfaatan program, yang menjadi prasyarat tercapainya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan.[501] Namun, munculnya kendala pengembalian dan administrasi menegaskan pentingnya tata kelola. Studi Agus Eko Nugroho menunjukkan bahwa penguatan keuangan mikro berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh modal sosial berupa kepercayaan dan jaringan lokal yang mampu meningkatkan loyalitas serta disiplin pengembalian pinjaman.[502] Dengan demikian, program ini berdampak positif tetapi memerlukan penguatan sistem dan komitmen kolektif agar keberlanjutan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Secara analitis, temuan mengenai Program Dana Lingkungan Berbasis RT menunjukkan kesesuaian kuat dengan kerangka pemberdayaan berbasis masjid yang dijelaskan Yasir Yusuf, khususnya pada dimensi sosial yang menekankan penguatan solidaritas dan kedekatan jamaah dengan masjid.[503] Partisipasi warga dalam musyawarah dan pengawasan dana membuktikan bahwa masjid berfungsi sebagai pusat interaksi sosial yang konkret.[504] Perspektif Markhamah juga relevan karena peningkatan *sense of belonging* dan gotong royong mencerminkan indikator kesejahteraan berbasis partisipasi masyarakat sebagaimana konsep Cohen & Uphoff. Namun, penurunan partisipasi sebagian warga mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas partisipatif.[505] Hal ini sejalan dengan temuan Sarjiyanto dkk yang menyatakan bahwa "*empowerment initiatives optimize community resources ultimately reducing poverty and rural development*," sehingga program akan lebih efektif bila pemberdayaan dilakukan secara terintegrasi.[506] Dengan demikian, program ini berkontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial, tetapi keberlanjutannya sangat bergantung pada konsistensi partisipasi warga.

---

[501] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 100.

[502] Agus Eko Nugroho, "A CRITICAL REVIEW OF THE LINK BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND MICROFINANCE IN INDONESIA," *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)* 23, no. 2 (Februari 2015): 124.

[503] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 4.

[504] Ibid., 59.

[505] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 44.

[506] Sarjiyanto Sarjiyanto dkk., "The Role of Community Empowerment as Mediator on the Relationship Between Psychological, Social, and Financial Capital on Rural Community Well-Being," *Journal of Population and Social Studies [JPSS]* 34 (2026): 115.

e. Program Sosial Produktif dan Pemberdayaan SDM Lokal

Program Sosial Produktif di Masjid Baitul Mukhlisin mencerminkan praktik pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan Yasir Yusuf, di mana pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan peluang usaha mandiri tidak sekadar bantuan sesaat tetapi memberikan akses bagi jamaah untuk meningkatkan pendapatan serta kemandirian ekonominya.[507] Secara sosial, program ini memperkuat solidaritas jamaah karena kegiatan pemberdayaan menjadi basis interaksi dan kerja sama, sehingga peran masjid lebih dari sekadar tempat ibadah ritual.[508] Dari perspektif Markhamah, dampak tersebut relevan dengan indikator kesejahteraan yang mencakup kemampuan memenuhi kebutuhan hidup melalui peningkatan pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi, sekaligus menunjukkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang aspiratif.[509] Temuan ini juga didukung oleh Sveinung Legard yang menunjukkan bahwa program berbasis komunitas yang efektif "*enhance social capital and collective efficacy*," memperkuat jaringan sosial dan kapasitas bersama untuk beradaptasi secara ekonomi.[510] Sintesisnya, kombinasi pelatihan, peluang usaha, jaringan kemitraan, dan partisipasi aktif jamaah berdampak positif pada kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Pengakuan formal atas keberhasilan program pemberdayaan ekonomi Masjid Baitul Mukhlisin menunjukkan bahwa apresiasi ini berkontribusi memperkuat legitimasi sosial dan kepercayaan publik terhadap program sehingga memudahkan perluasan jejaring kemitraan dan kolaborasi.[511] Sesuai dengan penjelasan Yasir Yusuf, dampak pemberdayaan ekonomi berbasis masjid tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga pada penguatan solidaritas sosial

---

[507] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 114.

[508] Ibid., 169.

[509] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 12.

[510] Sveinung Legard, "Controlled and Responsive Interactivity: What Politicians and Bureaucrats in Oslo Say About Their Social Media Use, and What This Might Mean for Democracy," dalam *Citizen Participation in the Information Society: Comparing Participatory Channels in Urban Development*, ed. oleh Sissel Hovik dkk. (Cham: Springer International Publishing, 2022), 224.

[511] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 171–73.

serta penguatan peran masjid sebagai pusat interaksi masyarakat yang memperkokoh kohesi sosial dan spiritual jamaah.[512] Hal ini makin menegaskan bahwa penghargaan formal memberi sinyal positif atas efektivitas program, yang kemudian memperluas dukungan modal dan kemitraan dari berbagai pihak.[513] Ditinjau dari perspektif Markhamah, legitimasi dan kepercayaan publik ini berkorelasi dengan indikator kesejahteraan masyarakat seperti pemerataan pendapatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan karena meningkatnya keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.[514] Tambahan dari kajian Sabri Sabri dkk menunjukkan bahwa pengakuan formal meningkatkan *cognitive legitimacy* sebuah organisasi sosial, yang secara empiris dikaitkan dengan meningkatnya peluang kolaborasi dan akses sumber daya eksternal bagi program pemberdayaan sehingga memperkuat performa sosial-ekonomi secara berkelanjutan.[515]

Implementasi penguatan tata kelola keuangan masjid dalam narasi tersebut menunjukkan dimensi akuntabilitas dan transparansi yang krusial dalam pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Berdasarkan Yasir Yusuf, pemberdayaan ekonomi melalui masjid tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mempererat solidaritas sosial dan mendekatkan masyarakat pada aktivitas ibadah, sehingga setiap alokasi dan penggunaan dana secara produktif menjadi bagian dari ibadah dan kesejahteraan jamaah (aspek ekonomi, sosial, spiritual).[516] Pernyataan naratif bahwa publikasi kegiatan lewat media sosial dan pelaporan terbuka meningkatkan kepercayaan publik serta partisipasi donatur menegaskan kontribusi transparansi terhadap keberlanjutan program dan rasa kepemilikan jamaah terhadap masjid.[517] Menurut Markhamah, kesejahteraan masyarakat mencakup pemerataan

---

[512] Ibid., 169.

[513] Ibid., 180.

[514] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 34–35.

[515] Sabri Sabri dkk., "PENGUATAN EKONOMI DAN SOSIAL MELALUI PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA MITRA SASARAN," *PUAN INDONESIA* 7, no. 2 (Januari 2026): 625.

[516] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 14.

[517] Ibid., 8.

pendapatan dan partisipasi aktif dalam pembangunan, di mana keterbukaan pengelolaan sumber daya ekonomi dan pelibatan jamaah merupakan indikator partisipatif yang mendorong peningkatan kesejahteraan kolektif.[518] Penelitian dari Nuri Alam Siregar dkk menunjukkan bahwa informasi transparan yang lengkap, obyektif, dan dapat diverifikasi meningkatkan legitimasi organisasi non-profit di mata para pemangku kepentingan, sehingga memperkuat trust dan dukungan jangka panjang terhadap program pemberdayaan ekonomi.[519]

Dampak positif tersebut mencerminkan hal yang sangat relevan dengan teori pemberdayaan menurut Yasir Yusuf, bahwa program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga memperkuat fungsi sosial dan spiritual masjid sebagai pusat interaksi umat.[520] Dampak yang paling nyata berupa peningkatan kepercayaan masyarakat menunjukkan bahwa masjid berhasil melampaui peran ritual semata dan menjadi institusi multidimensional yang mendukung kesejahteraan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan usaha produktif yang konsisten.[521] Pandangan Markhamah tentang kesejahteraan juga sejalan, karena keterlibatan jamaah dalam pengelolaan dan partisipasi aktif menunjukkan pemerataan pendapatan dan keterlibatan bersama dalam pembangunan, yang merupakan indikator penting kesejahteraan kolektif.[522] Selain itu, studi Nasfi Nasfi menunjukkan bahwa kepercayaan dan keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting dalam pemberdayaan komunitas, di mana trust-building mampu memperkuat keterlibatan dan kapasitas komunitas dalam berbagai inisiatif masyarakat secara berkelanjutan, termasuk ruang interaksi dan kolaborasi program pemberdayaan ekonomi.[523]

---

[518] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 46.

[519] Nuri Alam Siregar, Eja Armaz Hardi, dan Marissa Putriana, "PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI (STUDI KASUS PENGELOLAAN, FILANTROPI BADAN AMIL ZAKAT BMH KOTA JAMBI)," *EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (Juni 2023): 21–22.

[520] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 57.

[521] Ibid., 13.

[522] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 10.

[523] Nasfi Nasfi, "Role Of Social Capital In Influencing Village-Owned Enterprises Performance And Community Economic Empowerment In Indonesian Villages: Village-Owned Enterprises and Village Development Empowerment," *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi* 10, no. 1 (Februari 2026): 10.

2. Masjid NU Ponorogo

a. Program Pembiayaan Syariah (Koperasi Simpan-Pinjam Tanpa Bunga)

Program pembiayaan syariah seperti koperasi simpan-pinjam tanpa bunga di Masjid NU Ponorogo memperkuat dimensi pemberdayaan ekonomi yang dijelaskan Yasir Yusuf, yakni bukan sekadar akses modal tetapi membuka peluang usaha dan kemandirian ekonomi jamaah secara produktif, sehingga turut meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro dan membantu mereka maju secara ekonomi.[524] Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Panji Lukito yang menunjukkan bahwa intervensi pembiayaan syariah berbasis prinsip bagi hasil dan tanpa bunga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, belanja untuk pendidikan dan kesehatan, serta aset rumah tangga secara signifikan, sehingga berdampak positif terhadap indikator kesejahteraan umum klien lembaga keuangan mikro Islam.[525] Dari perspektif Markhamah, keberadaan skema ini berkaitan erat dengan peningkatan jumlah dan pemerataan pendapatan serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal karena akses permodalan yang adil mendorong produktivitas dan keterlibatan aktif jamaah dalam kegiatan ekonomi kolektif. Dengan demikian, sinergi antara teori pemberdayaan Yasir Yusuf dengan pemaknaan kesejahteraan Markhamah menunjukkan bahwa praktik mikro-pembiayaan syariah tidak hanya membantu usaha kecil bertahan tetapi juga memperluas manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas.[526]

Program pembiayaan syariah di Masjid NU Ponorogo tidak hanya menyediakan akses modal tanpa bunga, tetapi juga menekankan literasi ekonomi Islam bagi jamaah, sehingga anggota koperasi mampu menjalankan usaha secara halal, etis, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan Yasir Yusuf, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid meningkatkan kemandirian ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, dan menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa aktivitas ekonomi

---

[524] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 32.

[525] Panji Lukito, "AKAD MUDHARABAH DALAM OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM," *MARGIN: Journal of Islamic Banking* 5, no. 2 (September 2025): 379.

[526] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 41.

merupakan bagian dari ibadah.[527] Markhamah menambahkan bahwa kesejahteraan mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan, sehingga literasi ekonomi syariah berperan dalam memperluas pemerataan pendapatan dan kemampuan anggota dalam mengelola sumber daya secara optimal. Dukungan akademik dari Raudah Abd Rahman dkk menekankan bahwa pendidikan finansial berbasis komunitas meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha mikro, mengurangi risiko kerugian, dan mendorong keberlanjutan ekonomi lokal.[528] Sintesisnya, program ini membangun ekosistem ekonomi masjid yang mandiri, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai sosial-spiritual Islam, sehingga kesejahteraan jamaah meningkat secara menyeluruh.

Pemberdayaan koperasi syariah yang berbasis masjid memberikan akses modal usaha secara lebih manusiawi cicilan ringan tanpa bunga yang membantu pelaku usaha kecil memenuhi kebutuhan operasional mereka. Hal ini sejalan dengan penjelasan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis masjid memberi dampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat di sektor produktif dan mendorong kemandirian ekonomi melalui akses modal dan pelatihan usaha (akses modal ini meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil serta menumbuhkan solidaritas jamaah).[529] Sementara itu, Markhamah menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat mencakup pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi yang memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.[530] Tambahan kajian dari Muhamad Izazi Nurjaman dkk menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam seperti koperasi syariah atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT) berkontribusi pada *inclusive welfare* karena memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha yang tidak terlayani oleh bank konvensional dan membantu menyeimbangkan kondisi ekonomi antara kaya dan

---

[527] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 54.

[528] Raudah Abd Rahman dkk., "The prevalence and risk factors of iron deficiency anemia among pregnant women in Malaysia: a systematic review," *Frontiers in nutrition* 9 (2022): 7–8.

[529] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 88.

[530] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 22.

miskin sehingga meningkatkan kesejahteraan komunitas secara lebih luas.[531] Sintesisnya, program koperasi syariah masjid tidak hanya menyediakan modal yang adil dan sesuai prinsip Islam seperti yang dirasakan oleh Ibu Erlik, tetapi juga mencerminkan kebutuhan pemberdayaan ekonomi yang luas bagi kesejahteraan masyarakat secara inklusif yang diperkuat oleh literatur akademik maupun pendekatan kesejahteraan sosial-ekonomi Islam.

Persepsi positif jamaah terhadap koperasi syariah merupakan modal sosial penting yang mendukung keberlanjutan program, namun masih dibatasi oleh rendahnya pemahaman tentang mekanisme dan dampaknya mengindikasikan kebutuhan akan transparansi dan sosialisasi. Hal ini konsisten dengan penjelasan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis masjid tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi anggota, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan relasi jamaah-masjid melalui akses modal dan keterlibatan jamaah dalam kegiatan produktif.[532] Sementara itu, Markhamah menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan mulai dari perencanaan hingga evaluasi adalah kunci untuk mencapai pemerataan kesejahteraan yang lebih luas.[533] Tambahan dari kajian Suhatri Mariko dkk. menunjukkan bahwa keberhasilan inklusi ekonomi dalam sistem keuangan Islam sangat bergantung pada kemampuan lembaga keuangan sosial-publik (termasuk koperasi syariah) untuk mengatasi ketidaksetaraan melalui transparansi, pendidikan, dan inklusi finansial yang memaksimalkan partisipasi ekonomi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sekadar distribusi modal saja.[534] Dengan demikian, program koperasi syariah akan lebih efektif jika didukung dengan edukasi dan tata kelola yang meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kepercayaan jamaah terhadap mekanisme serta manfaatnya secara menyeluruh.

---

[531] Muhamad Izazi Nurjaman dkk., "Mosque-Based Sharia Financial Innovation To Improve The Welfare Of Village Communities In Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 05 (November 2025): 206.

[532] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 169.

[533] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 95.

[534] Suhatri Mariko, Asrinaldi Asrinaldi, dan Fadli Fadli, "Embedding Islamic Economic Principles in Indonesia's Cooperative Law: Pathways to Social Justice and Economic Equity," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 6, no. 03 (Desember 2025): 155.

b. Program Usaha Produktif Berbasis Masjid

Usaha produktif berbasis masjid mulai mengubah fungsi masjid dari sekadar tempat ibadah menjadi ruang pemberdayaan ekonomi yang membuka akses ekonomi bagi pedagang kecil dan memperkuat interaksi sosial, namun manfaatnya belum merata karena tantangan seperti keterbatasan lahan dan manajemen internal. Hal ini konsisten dengan penjelasan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan ekonomi masjid berdampak langsung pada peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi jamaah, serta memperkuat solidaritas sosial melalui kegiatan produktif (akses modal dan pelatihan usaha membantu usaha mikro).[535] Markhamah menegaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya soal kemakmuran material tetapi juga pemerataan pendapatan dan partisipasi masyarakat aktif dalam pembangunan ekonomi.[536] Dukungan temuan Iqbal Imari dan Mahendra Utama Cahya Ramadhan menyatakan bahwa ketika masjid diberdayakan dengan strategi perencanaan dan kapasitas kelembagaan yang baik, ia dapat menjadi hubs pertumbuhan ekonomi inklusif yang melibatkan keadilan, partisipasi, dan saling tolong-menolong dalam komunitas (*mosque can serve as dynamic hubs for inclusive economic growth*).[537] Sintesisnya, meskipun program saat ini masih terbatas, literatur menunjukkan bahwa dengan penguatan manajemen dan strategi yang inklusif, usaha produktif berbasis masjid berpotensi memperluas kesejahteraan sosial-ekonomi jamaah secara lebih merata.

Transformasi peran masjid yang kini menjadi ruang integratif antara fungsi spiritual dan sosial-ekonomi, di mana dakwah tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif dalam program pemberdayaan jamaah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis masjid meningkatkan pendapatan, solidaritas sosial, dan dimensi spiritual jamaah melalui pengelolaan dana produktif seperti koperasi syariah dan usaha produktif sehingga

---

[535] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 125.

[536] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 67.

[537] Iqbal Imari dan Mahendra Utama Cahya Ramadhan, "Establishing Economic Empowerment System Through Mosque Based Community," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (Juni 2025): 14.

jamaah tidak hanya menguat secara material tetapi juga spiritual.[538] Sementara itu Markhamah menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat mencakup pemerataan pendapatan serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, termasuk peran bersama jamaah dalam kegiatan yang memajukan kehidupan ekonomi komunitas.[539] Dukungan dari temuan Rizqi Anfanni Fahmi menunjukkan bahwa mosques yang inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mampu mempromosikan financial inclusion dan peningkatan kesejahteraan komunitas melalui mekanisme keuangan Islam seperti zakat, wakaf, dan infaq yang terintegrasi dengan layanan sosial lainnya.[540] Sintesisnya, masjid sebagai pusat pemberdayaan komunitas mendekatkan praktik dakwah dengan realitas kebutuhan kesejahteraan umat, memperkuat sinergi nilai spiritual dan ekonomi dalam peningkatan kualitas hidup jamaah dan masyarakat secara lebih holistik.

Program usaha produktif di masjid memberikan dukungan nyata, seperti fasilitas berjualan tanpa biaya sewa, yang meringankan beban operasional pelaku usaha kecil dan membuka ruang bagi jamaah dengan keterbatasan modal, sebagaimana dialami Bapak Ilham. Hal ini sejalan dengan Yasir Yusuf yang menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis masjid meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan produktif yang menggunakan dana ZISWAF untuk mendukung usaha mikro, sekaligus memperkuat solidaritas sosial jamaah.[541] Markhamah menekankan bahwa pemerataan pendapatan dan akses sumber daya ekonomi merupakan indikator utama kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari kesempatan berusaha yang lebih inklusif di masjid.[542] Tambahan kajian dari Indin Rarasati dan Unggul Priyadi menunjukkan bahwa peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi melalui dukungan UMKM berkontribusi nyata pada

---

[538] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 192.

[539] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 34–36.

[540] Rizqi Anfanni Fahmi, "Inclusive Mosques and Economic Empowerment: A Study from an Islamic Economics Perspective in Urban Muslim Communities," *Unisia* 43, no. 1 (Juni 2025): 13.

[541] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 187.

[542] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 22.

pembangunan ekonomi komunitas dan kemandirian usaha mikro.[543] Sintesisnya, masjid berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga wadah pemberdayaan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi komunitas.

Keterlibatan pelaku usaha dalam kegiatan masjid seperti menyediakan makanan untuk acara dan adanya jamaah sebagai pelanggan tetap membentuk masjid sebagai ekosistem sosial-ekonomi yang hidup, di mana aktivitas ibadah dan ekonomi berjalan harmonis. Hal ini sejalan dengan Yasir Yusuf, yang menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis masjid meningkatkan pendapatan dan kemandirian pelaku usaha mikro melalui kegiatan produktif serta memperkuat solidaritas sosial di antara jamaah.[544] Markhamah menekankan bahwa pemerataan pendapatan dan akses terhadap peluang ekonomi merupakan indikator penting kesejahteraan masyarakat, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam memanfaatkan peluang lokal dapat menciptakan dampak sosial yang positif.[545] Dukungan dari penelitian Iqbal Imari dan Mahendra Utama Cahya Ramadhan, menunjukkan bahwa masjid yang dikelola dengan perencanaan strategis dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi komunitas yang inklusif dan dinamis, memperluas akses usaha mikro, dan mengintegrasikan prinsip keadilan serta partisipasi.[546] Sintesisnya, masjid berperan bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai penguat kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

c. Program Penguatan Dana Sosial Produktif

Program Penguatan Dana Sosial Produktif di masjid menunjukkan bagaimana lembaga keagamaan dapat memperluas fungsi sosialnya secara terstruktur dan berkelanjutan. Dengan mengelola dana dari partisipasi jamaah dan donatur, masjid tidak hanya menyalurkan bantuan sesaat, tetapi membangun sistem

---

[543] Indin Rarasati dan Unggul Priyadi, "Empowering MSMEs: The Role of Mosques in Community Economic Development," *Shirkah: Journal of Economics and Business* 9, no. 3 (Agustus 2024): 397.

[544] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 89.

[545] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 26.

[546] Iqbal Imari dan Mahendra Utama Cahya Ramadhan, "Establishing Economic Empowerment System Through Mosque Based Community," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (Juni 2025): 1–2.

distribusi yang jelas, seperti ATM Beras dan Jumat Berkah, sehingga meningkatkan kepedulian kolektif dan keterlibatan aktif jamaah. Sesuai dengan Yasir Yusuf, pengelolaan dana sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf menguatkan solidaritas sosial dan mendorong kegiatan produktif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.[547] Markhamah menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam distribusi sumber daya ekonomi memperluas pemerataan pendapatan dan akses terhadap peluang ekonomi, sehingga kesejahteraan dapat tercapai lebih merata.[548] Penelitian dari Cut Mutia Muqhniy dkk menambahkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam bila dikelola secara profesional mampu mendorong inklusivitas ekonomi dan redistribusi kekayaan, meningkatkan kemandirian masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik.[549] Sintesisnya, program ini merefleksikan pemberdayaan ekonomi umat yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.

Program Penguatan Dana Sosial yang meningkat intensitasnya selama bulan Ramadan menunjukkan peran strategis masjid dalam memperluas fungsi sosialnya secara berkelanjutan. Dana yang terkumpul dari partisipasi jamaah dan donatur tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi juga dirancang untuk mempererat ukhuwah dan menghadirkan kebersamaan, seperti melalui pembagian sembako, buka puasa bersama, dan santunan anak yatim, sehingga membantu jamaah kecil secara nyata. Hal ini selaras dengan penjelasan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, memperkuat solidaritas sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena aktivitas ekonomi dan ibadah saling menguatkan.[550] Menurut Markhamah, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya ekonomi berkontribusi pada pemerataan pendapatan dan kesejahteraan kolektif.[551] Kajian

---

[547] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 118.

[548] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 54.

[549] Cut Mutia Muqhniy dkk., "Peran Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat," *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 3, no. 1 (Januari 2026): 142.

[550] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 128.

[551] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 75.

oleh Nurul Muyasaroh menambahkan bahwa penguatan instrumen keuangan sosial Islam, termasuk zakat dan sedekah, mendukung inclusive welfare dan redistribusi yang adil.[552] Sintesisnya, program sosial masjid Ramadan menciptakan kesejahteraan material dan spiritual secara terpadu, memperkuat solidaritas, dan membangun masyarakat yang inklusif.

Program penguatan dana sosial produktif di lingkungan masjid tidak hanya memberi bantuan langsung, tetapi menciptakan dinamika sosial-ekonomi yang lebih hidup suasana masjid yang aktif, solidaritas yang meningkat, dan keterlibatan ekonomi lokal seperti yang diungkap Ibu Erlik bahwa kegiatan seperti Jumat Berkah dan pembagian sembako Ramadan memberi manfaat sekaligus menggerakkan usaha kecil di sekitar masjid. Hal ini sesuai dengan Yasir Yusuf bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis masjid (ZISWAF, usaha produktif) memperkuat solidaritas sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui interaksi sosial yang nyata dan dukungan ekonomi produktif.[553] Markhamah juga menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam distribusi sumber daya ekonomi merupakan indikator penting kesejahteraan karena membantu pemerataan pendapatan dan akses peluang ekonomi yang lebih luas.[554] Dukungan dari kajian Zainur dkk menyatakan bahwa instrumen Islamic social-public finance (zakat, infak, sedekah, wakaf) berkontribusi pada *inclusive welfare* dengan menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi antara kaya dan miskin serta mendorong partisipasi kolektif dalam pembangunan komunitas.[555] Sintesisnya, keterpaduan fungsi sosial dan ekonomi masjid mendorong solidaritas jamaah dan menggerakkan usaha kecil sehingga memperkuat kesejahteraan komunitas secara holistik dan berkelanjutan.

Program penguatan dana sosial produktif menunjukkan bahwa efektivitas dan pemerataan manfaatnya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti skala

---

[552] Nurul Muyasaroh, "Optimalisasi Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial: Sosialisasi Kepada Ibu-Ibu PKK Pekanbaru," *Al-Ihsan: Jurnal Pengabdian Agama Islam* 2, no. 1 (2025): 34–35.

[553] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 170.

[554] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 22.

[555] Zainur, Ali Muddin Jailani, dan Apriadi, "Pendidikan Literasi Ziswaf Berbasis Masjid Untuk Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Melalui Program Edukasi Keuangan Syariah," *Jurnal Dedikasi Pengabdian Pendidikan* 2, no. 1 (Januari 2026): 31–32.

kegiatan yang relatif kecil, koordinasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya perencanaan jangka panjang, dan kurangnya evaluasi berkala, sehingga dampaknya belum terasa merata bagi seluruh masyarakat, sebagaimana diungkapkan Bapak Ilham. Hal ini sejalan dengan Yasir Yusuf yang menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan usaha produktif, memerlukan struktur kelembagaan yang kuat, pengelolaan profesional, dan program yang terarah agar dapat meningkatkan pendapatan, solidaritas, serta kedekatan spiritual jamaah.[556] Markhamah menambahkan bahwa pemerataan kesejahteraan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, akses pendidikan, dan kualitas layanan sosial yang merata.[557] Dukungan dari Aforisma Mulauddin dkk menegaskan bahwa penguatan struktur kelembagaan, inovasi, dan sinergi multipihak dalam Islamic social-public finance menjadi kunci agar program pemberdayaan ekonomi masjid dapat berkelanjutan dan inklusif.[558] Dengan demikian, perbaikan manajemen, kapasitas pengurus, dan strategi distribusi yang sistematis sangat penting untuk memperluas dampak sosial-ekonomi program.

d. Program Pengembangan dan Digitalisasi Ekonomi Masjid (Rencana Strategis)

Program Pengembangan dan Digitalisasi Ekonomi Masjid yang direncanakan melalui website resmi menunjukkan upaya strategis untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi administrasi, transparansi pengelolaan donasi, dan partisipasi jamaah, terutama generasi muda, sehingga pengelolaan ekonomi berbasis jamaah dapat lebih akuntabel dan inklusif. Hal ini relevan dengan Yasir Yusuf yang menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis masjid melalui pengelolaan dana sosial (ZISWAF, koperasi syariah, usaha produktif) tidak hanya berdampak pada pendapatan tetapi juga memperkuat solidaritas dan

---

[556] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 192.

[557] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 7.

[558] Aforisma Mulauddin, Atep Hendang Waluya, dan Muhammad Reza Prima Matondang, "Mosque Transformation for Community Economic Empowerment: Integrating Islamic Social Finance, Digitalization, and Pentahelix Collaboration," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 12, no. 2 (Desember 2025): 186.

kedekatan spiritual jamaah apabila dikelola profesional dan transparan.[559] Markhamah menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan distribusi ekonomi akan meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan kolektif.[560] Pendukung dari Tika Diliana dkk menunjukkan bahwa digitalisasi dan fintech dalam pengelolaan filantropi Islam seperti zakat dan donasi digital dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi sekaligus memperluas jangkauan layanan sosial serta kepercayaan publik terhadap institusi dan pengelolaannya.[561] Sintesisnya, transformasi digital masjid memperkuat peran lembaga dalam pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui akuntabilitas, efisiensi, dan perluasan cakupan manfaat.

Program pengembangan ekonomi masjid melalui jejaring dan kolaborasi kelembagaan, seperti kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan (Ma'arif dan PCNU), menunjukkan upaya memperluas kapasitas sumber daya manusia dalam manajerial, kewirausahaan, dan literasi digital, sekaligus membuka peluang pembinaan generasi muda untuk keterlibatan produktif sebagaimana disampaikan oleh Bapak H. Imron Husnussairi. Hal ini sesuai dengan Yasir Yusuf yang menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis masjid (ZISWAF, koperasi syariah, usaha produktif) tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memperkuat interaksi sosial dan solidaritas jamaah yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara holistik.[562] Markhamah menambahkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan partisipasi dalam berbagai aspek pembangunan menjadi indikator penting bagi pemerataan kesejahteraan karena meningkatkan kemampuan ekonomi dan akses terhadap peluang.[563] Dukungan dari Evan Hamzah Muchtar menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak termasuk dengan pemerintah, lembaga zakat, ulama, dan institusi pendidikan

---

[559] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 197.

[560] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 56.

[561] Tika Diliana, "Transformasi Zakat Digital Dan Peran BAZNAZ Dalam Penguatan Ekonomi Umat Di Indonesia," *JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS* 7, no. 1 (2025): 5–6.

[562] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 14.

[563] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 9.

penting dalam mengembangkan model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang lebih efektif dan inklusif, karena keterlibatan berbagai pemangku kepentingan memperluas jangkauan program dan meningkatkan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat.[564]

Kebutuhan perencanaan strategis dalam pengembangan ekonomi masjid menunjukkan bahwa inovasi program saja tidak cukup; diperlukan perumusan strategi yang terstruktur, roadmap jangka menengah-panjang, serta pemetaan kebutuhan riil masyarakat agar setiap program memiliki arah, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi yang jelas seperti diungkapkan Bapak H. Imron Husnussairi. Hal ini selaras dengan Yasir Yusuf, yang menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis masjid melalui pengelolaan dana sosial (ZISWAF, usaha produktif) harus disertai kelembagaan yang kuat dan perencanaan sistematis agar mampu meningkatkan pendapatan umat dan memperkuat solidaritas sosial secara berkelanjutan.[565] Markhamah juga menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program merupakan kunci dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dan partisipatif.[566] Dukungan dari kajian Fitri Ana Siregar menunjukkan bahwa inovasi dalam Islamic social-public finance harus dikombinasikan dengan strategic planning dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk menjawab tantangan kontemporer serta memperluas dampak ekonomi dan sosial secara inklusif.[567]

---

[564] Evan Hamzah Muchtar, "Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid: Kolaborasi Lintas Lembaga Dalam Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah Bagi Generasi Muda Di Cipondoh," *ABDIMASTA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Asy-Syukriyyah Tangerang* 1, no. 1 (Juni 2025): 12.

[565] Yasir Yusuf dkk., *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 105.

[566] Markhamah dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, 13–14.

[567] Fitri Ana Siregar, "Integration Islamic Social Finance and SDGs: Perspective Maqasid Sharia Based on Scientific Mapping," *EKONOMIKA SYARIAH : Journal of Economic Studies* 9, no. 2 (Desember 2025): 218.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masjid Baitul Mukhalisin

Program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Masjid Baitul Mukhlisin telah mengalami transformasi yang signifikan dari pola karitatif menuju model produktif dan berkelanjutan. Melalui berbagai program seperti BUMM, Airku, BankZiska, dana berbasis RT, serta program sosial produktif, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat penguatan ekonomi, sosial, dan spiritual masyarakat. Implementasi program menunjukkan adanya proses transfer akses, partisipasi aktif, serta peningkatan kapasitas jamaah yang selaras dengan konsep pemberdayaan. Dampak nyata berupa peningkatan akses ekonomi, peluang usaha, serta solidaritas sosial menegaskan bahwa masjid mampu menjadi motor penggerak transformasi sosial-ekonomi berbasis komunitas. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya bersifat distributif, tetapi juga transformatif dalam mendorong kemandirian jamaah secara kolektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa proses pemberdayaan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai kendala pada aspek manajerial, partisipasi, dan keberlanjutan operasional. Keterbatasan modal, belum stabilnya sistem operasional usaha, serta ketergantungan pada tenaga sukarela menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan masih diperlukan. Selain itu, tantangan dalam disiplin pengembalian pembiayaan, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, serta belum meratanya kapasitas SDM menjadi indikator bahwa proses pemberdayaan masih berada pada tahap penguatan kapasitas. Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses jangka panjang yang memerlukan konsistensi, pendampingan, dan pengembangan sistem yang adaptif. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan usaha, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, profesionalisme, serta kesinambungan pembinaan terhadap masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara profesional, partisipatif, dan berkelanjutan. Integrasi antara nilai keagamaan, kegiatan ekonomi produktif, dan penguatan modal sosial menjadi kekuatan utama dalam membangun kemandirian jamaah. Keberhasilan program tidak hanya terletak pada aspek

ekonomi, tetapi juga pada terbentuknya kepercayaan, solidaritas, dan rasa memiliki di kalangan masyarakat. Dengan dukungan tata kelola yang baik, peningkatan kapasitas SDM, serta perluasan jejaring kemitraan, masjid berpotensi menjadi pusat pemberdayaan yang efektif dan inklusif. Dengan demikian, pemberdayaan berbasis masjid dapat menjadi model alternatif pembangunan ekonomi komunitas yang relevan dalam menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Masjid NU Ponorogo

Program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid menunjukkan transformasi signifikan dari fungsi tradisional menuju pusat aktivitas sosial-ekonomi yang produktif. Program pembiayaan syariah, usaha produktif, serta penguatan dana sosial telah mencerminkan konsep pemberdayaan menurut Yasir Yusuf, yakni peningkatan kapasitas, akses, dan partisipasi jamaah dalam mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri. Praktik koperasi tanpa bunga, penyediaan ruang usaha, serta pengelolaan dana sosial produktif mampu membuka peluang ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat solidaritas sosial. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak seperti takmir, jamaah, dan lembaga eksternal menunjukkan adanya pola pemberdayaan partisipatif yang mendukung terciptanya kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Dengan demikian, masjid tidak lagi berperan sebatas institusi ibadah, tetapi berkembang menjadi agen perubahan sosial-ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi program pemberdayaan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai kendala struktural dan kultural. Keterbatasan modal, rendahnya literasi jamaah terkait program ekonomi, serta kapasitas manajerial pengurus yang belum merata menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, keterbatasan lahan usaha, ketergantungan pada donasi yang fluktuatif, serta minimnya perencanaan strategis jangka panjang turut memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program. Kesenjangan informasi antara pengurus dan jamaah juga menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum sepenuhnya partisipatif. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun akses ekonomi telah terbuka, transfer kapasitas dan kontrol ekonomi kepada jamaah masih perlu diperkuat agar tujuan kemandirian dapat tercapai secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, program pemberdayaan ekonomi masjid memiliki potensi besar sebagai model pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan, namun memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan, strategi, dan inovasi. Integrasi antara nilai spiritual dan aktivitas ekonomi telah menjadi kekuatan utama dalam membangun solidaritas dan kesejahteraan jamaah. Ke depan, keberhasilan program sangat bergantung pada

kemampuan masjid dalam meningkatkan literasi ekonomi, memperluas jejaring kemitraan, mengoptimalkan digitalisasi, serta menyusun perencanaan strategis yang terarah dan terukur. Dengan pengelolaan yang profesional dan partisipatif, masjid berpotensi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat yang tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga memperkuat nilai sosial dan spiritual masyarakat secara holistik.

B. Rekomendasi

1. Masjid Baitul Mukhalisin

Rekomendasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan dalam pengelolaan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Pengurus Masjid Baitul Mukhlisin perlu meningkatkan profesionalisme manajemen melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pembagian tugas yang jelas, serta sistem evaluasi berkala agar setiap unit usaha berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan literasi keuangan bagi pengurus maupun jamaah. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proses pemberdayaan tidak hanya bersifat partisipatif, tetapi juga mampu menghasilkan kemandirian ekonomi yang terukur dan berkelanjutan.

Selanjutnya, diperlukan strategi penguatan permodalan dan jejaring kemitraan guna mendukung ekspansi dan stabilitas program. Pengurus masjid dapat menjalin kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, pemerintah, maupun sektor swasta untuk memperluas akses pembiayaan dan pendampingan usaha. Di sisi lain, optimalisasi partisipasi jamaah juga perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih inklusif dan fleksibel, seperti penyesuaian jadwal kegiatan, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan komunikasi publik agar lebih banyak masyarakat terlibat aktif. Dengan demikian, program pemberdayaan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan jamaah.

Terakhir, keberlanjutan program pemberdayaan memerlukan penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pendampingan yang konsisten. Setiap program seperti BUMM, Airku, BankZiska, dan dana berbasis RT perlu memiliki indikator kinerja yang jelas agar dampaknya dapat diukur secara objektif. Selain itu, integrasi antara pembinaan spiritual dan ekonomi harus terus dipertahankan sebagai keunggulan model pemberdayaan berbasis masjid. Pemerintah dan akademisi juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan kebijakan, riset, dan pendampingan guna memperkuat model ini sebagai alternatif pembangunan ekonomi komunitas. Dengan langkah tersebut, masjid dapat semakin optimal

berperan sebagai pusat pemberdayaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Masjid NU Ponorogo

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan dan manajerial agar program pemberdayaan ekonomi masjid dapat berjalan lebih optimal. Pengurus masjid disarankan untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan manajemen, keuangan syariah, dan kewirausahaan, sehingga mampu mengelola program secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan roadmap atau rencana strategis jangka menengah dan panjang menjadi penting agar setiap program memiliki arah yang jelas, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang terukur. Penguatan struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan program ekonomi masjid.

Selanjutnya, diperlukan peningkatan literasi dan partisipasi jamaah melalui strategi sosialisasi yang lebih sistematis dan inklusif. Pengurus masjid dapat melakukan edukasi rutin mengenai koperasi syariah, usaha produktif, serta pengelolaan dana sosial agar jamaah tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif sebagai pelaku ekonomi. Pemanfaatan media digital seperti website, media sosial, dan platform donasi online juga perlu dioptimalkan untuk memperluas akses informasi dan meningkatkan transparansi. Dengan demikian, kesenjangan informasi antara pengurus dan jamaah dapat diminimalkan, sehingga tercipta pemberdayaan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Selain itu, penguatan aspek ekonomi produktif perlu dilakukan melalui diversifikasi usaha dan perluasan jejaring kemitraan. Masjid dapat menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, pemerintah, maupun sektor swasta untuk memperluas akses permodalan dan pelatihan usaha bagi jamaah. Optimalisasi pemanfaatan aset masjid, pengembangan usaha berbasis digital, serta penciptaan ekosistem ekonomi yang terintegrasi juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada donasi yang fluktuatif. Dengan dukungan inovasi dan kolaborasi multipihak, program pemberdayaan ekonomi masjid diharapkan mampu berkembang menjadi sistem yang mandiri, inklusif, dan memberikan dampak kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Rahman, Raudah, Idayu Badilla Idris, Zaleha Md Isa, Rahana Abdul Rahman, dan Zaleha Abdullah Mahdy. "The prevalence and risk factors of iron deficiency anemia among pregnant women in Malaysia: a systematic review." *Frontiers in nutrition* 9 (2022): 847693.

admin. *Disaksikan Ketua LPCR PP Muhammadiyah, Program BankZiska LAZISMU Jatim Resmi Beroperasi di Masjid Baitul Muhlisin Ponorogo*. t.t. Diakses 11 Mei 2025. https://info.lazismujatim.org/disaksikan-ketua-pp-muhammadiyah-program-bankziska-lazismu-jatim-resmi-beroperasi-di-masjid-baitul-muhlisin-ponorogo/.

Administrator. "Arah Kiblat Langsung Ditentukan Hadratussyekh Hasyim Asyari - Radar Madiun." Arah Kiblat Langsung Ditentukan Hadratussyekh Hasyim Asyari - Radar Madiun. Diakses 2 November 2025. https://radarmadiun.jawapos.com/ponorogo/801198525/arah-kiblat-langsung-ditentukan-hadratussyekh-hasyim-asyari.

Adnan, Fauzi. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi kasus Desa Geger Kec. Kedungadem-Bojonegoro)." 2 (2024).

Afdawaiza, Afdawaiza, Rizaldi Yusfiarto, Galuh Tri Pambekti, Hisham Al Ghunaimi, dan Ahmad Febriyanto. "From Social Trust to Halal Industry Dynamic: The Synergy of Islamic Social Capital and Financial Capability in Small Enterprises Sectors." *Mazahib* 24, no. 2 (Desember 2025): 248–81.

Afif, Mufti, Meichio Lesmana, Abdul Basith, dan Maula Falih Rizqullah. "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pendekatan Analisis SWOT: (Studi Kasus Masjid Raya Al Falah Sragen)." *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 10, no. 02 (2022): 205–18.

Agoi, Moses Adeolu, Emmanuel Taiwo Agoi, Oluwanifemi Opeyemi Agoi, Ayodele Elizabeth Agoi, dan Ahmad Anas. "Empowering Mosque Committees' Economy through Digital Technology and Eco-Friendly Architecture Implementation in Nigeria." *Dharmahita: Journal of Community Service and Development*, 29 Desember 2025, 182–91.

Ahmad, Abdul Mutalib. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Masjid di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Bimas Islam Vol 16 No.1*, 2923.

Aldana, Lavia Vega, Iza Hanifuddin, dan Amin Wahyudi. "Pemberdayaan Komunitas Peternak Sapi Perah oleh Dompet Dhuafa di Desa Singolangu, Kabupaten Magetan." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 3, no. 1 (2024): 1–10.

Al-Jumbulati, Ali. "Abdul Futuh at-Tuwaanisi." *Dirasatun Muqaaranatun fit-Tarbiyyati al-Islamiyah*, 2002.

AMIN, AL. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Masjid Baitus Salam Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru)." PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024.

Amuni, Brighton Savayi, Stella Silas Karimi, dan Felistus Mwikali Patrick. "Influence of Stakeholder Involvement in M&E on the Performance of Donor-Funded Projects in Informal Settlements in Kisumu Central Sub-County, Kisumu County, Kenya." Preprint, 4 September 2025.

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Arsam, Arsam, Nik Suhaida Nik Abdul Majid, dan Asep Amaludin. "The nexus of management model and social transformation: A case study of da'wah strategy at the Jogokariyan mosque." *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2025.

"Arti kata daya - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 1 Mei 2025. https://kbbi.web.id/daya.

Astawa, I. Wayan, Gede Wirata, dan Sri Sulandari. "Digital Public Participation and Responsive Governance in Village Development Planning." *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 14, no. 1 (Januari 2026): 653–62.

Badorf, Florian, dan Kai Hoberg. "The impact of daily weather on retail sales: An empirical study in brick-and-mortar stores." *Journal of Retailing and Consumer Services* 52 (Januari 2020): 101921.

Bongomin, George Okello Candiya, Joseph Mpeera Ntayi, John C. Munene, dan Charles Akol Malinga. "The Relationship between Access to Finance and Growth of SMEs in Developing Economies." *Review of International Business and Strategy* 27, no. 4 (November 2017): 520–38.

Bryson, John M., Barbara C. Crosby, dan Melissa Middleton Stone. "Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed *and* Challenging." *Public Administration Review* 75, no. 5 (September 2015): 647–63. https://doi.org/10.1111/puar.12432.

Carlos, Vera Silva, João Almeida, Filipe Sampaio Rodrigues, Angela C. Macedo, dan Pedro Mota Veiga. “The Impact of Entrepreneurial Ecosystems on Value Co-Creation in SME: The Moderating Role of Marketing Innovations.” *Administrative Sciences* 15, no. 12 (Desember 2025): 475.

Chariro, Linatul, Aji Damanuri, dan Ely Masykuroh. “Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tunagrahita dalam Kerangka Sustainable Development Goals di Desa Karangpatihan Ponorogo.” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 3, no. 1 (2024): 47–58.

Chen, Xintong, Kerry Kuenzi, Lindsey Evans, dan Amanda Stewart. “True Grit: Exploring Nonprofit Sector Resilience Following Economic Recessions.” *Nonprofit Policy Forum* 16, no. 4 (Oktober 2025): 573–601.

Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislan, dan Yuli Indah Sari. *Mosque-Based Integrated Community Empowerment Model | Islamic Social Finance*. 11 Maret 2024.

Darmawan, Hendra, Muhammad Aziz, dan Nurkholis. “Fiqh Discourse on Water: Integrating Social Capital and Mosque-Based Charity through Concurrent Triangulation.” *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 21, no. 2 (Desember 2025): 217–30.

Denny, Denny Hermawan Ritonga, dan Zulkarnain Abdurrahman. “Peran Badan Kemakmuran Masjid Dalam Membudayakan Salat Berjamaah Di Masyarakat Kampung Padang Labuhan Batu.” *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 5, no. 4 (Juli 2024): 1331–42. https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4.2233.

Dhona, Holy Rafika, Puji Rianto, Anang Hermawan, Subhan Afifi, R. Prastya, Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih, Puji Hariyanti, Anggi Arif Fudin Setiadi, dan Sumekar Tanjung. “Islam Dalam Studi Komunikasi.” UII Press, 2022.

Diatmika, I. Putu Gede, dan Sri Rahayu. *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*. Ahlimedia Book, 2022. \.

Diliana, Tika. “Transformasi Zakat Digital Dan Peran BAZNAZ Dalam Penguatan Ekonomi Umat Di Indonesia.” *JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS* 7, no. 1 (2025): 315–21.

Dipa, Pradeka Reza, Saipul Saipul, dan Indarto Kus. “Strategic Governance Through Communities and Sustainable Community Empowerment in Prapatan Subdistrict, Balikpapan City.” *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 7, no. 2 (November 2025): 396–413.

@dminwebmhs. “Masjid dalam Fungsi, Arti dan Tonggak Sejarahnya.” *Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan (DPK) UII*, 13 Agustus 2021.

Dodds, Rachel, dan Regina Scheyvens. *Richard Butler, Emeritus Professor of Tourism, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, United Kingdom.“Has island tourism shifted since the COVID-19 pandemic? Is the industry intent to’build back better’or has it become even more unsustainable? Whichever the case, archipelagos offer illuminating insights to such questions.* t.t.

Duwal, Bal Ram, dan Bharat Singh Thapa. “Determinants of Loan Repayment: The Case of Microfinance Institutions in Nepal.” *Nepal Journal of Multidisciplinary Research* 8, no. 4 (Oktober 2025): 19–37.

DW, Nana Rukmana. “Masjid dan dakwah: merencanakan, membangun, dan mengelola masjid: mengemas substansi dakwah, upaya pemecahan krisis moral dan spiritual.” *(No Title)*, 2002.

Efiyanti, Alfiana Yuli, Muhammad Ali, dan Saiful Amin. “Institution Reinforcement of Mosque in Social Economic Empowerment of Small Traders Community.” *Journal of Socioeconomics and Development* 4, no. 2 (Juli 2021): 189.

Elayah, Moosa, Hasan Al-Awami, Enas Al-Qobati, dan Lau Schulpen. “Financial Sustainability and Influence Dynamics in Yemen’s Conflict-Affected NGO Landscape: Unveiling ‘Sheikh’ Organizations.” *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 36, no. 2 (April 2025): 253–66.

Elok, Fardialh Ika Saputro. “ANALISIS MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR MASJID (Studi Kasus Masjid Besar Al Mukhlasin Sukorejo Pasuruan).” *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*, 2021.

Ezekwe, Christopher Ifeanyi. “Strategic Corporate Communication: A Tool for Enhancing Organizational Performance in Nigeria.” *SSRN Electronic Journal*, 2025.

Fahmi, Rizqi Anfanni. “Inclusive Mosques and Economic Empowerment: A Study from an Islamic Economics Perspective in Urban Muslim Communities.” *Unisia* 43, no. 1 (Juni 2025).

Faizal, Muhazzab Alief, Antri Arta, Jamilatun Ni’mah, dan Zelyn Faizatul Ainur. “Peran Masjid Sebagai Tempat Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 6, no. 1 (2023): 123–34.

Fardilah Ika Saputro, Elok. “Analisis Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Masjid (Studi Kasus Masjid Besar Al Mukhlasin Sukorejo Pasuruan).” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021.

Ginanjar, Kartasasmita. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996, 249., t.t.

Govik, Lisa, dan Henrik Wallström. "Barriers, Solutions and Benefits of Sharing Electric Vehicle Charging Infrastructure." *Transport Policy* 175 (Januari 2026): 103871.

Gutu, Tesfaye Ginbare, István Zsombor Hágen, dan Domician Máté. "Sustainable Financial Inclusion Impact on SMEs' Performance: Systematic Literature Review." *Acta Carolus Robertus* 15, no. Különszám (Desember 2025): 113–30.

Hadi, Bakhtiar. "The Role of Mosques as Centers of Social Innovation in the Development of Urban Islamic Communities." *Journal on Islamic Studies* 1, no. 4 (Februari 2025): 246–56.

Haidi, Aswan. "PERAN MASJID DALAM DAKWAH MENURUT PANDANGAN MOHAMMAD NATSIR." *Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat* 2, no. 02 (Desember 2019): 45–58.

"Hal ini disampaikan oleh Jusuf Kalla dalam sambutannya pada acara Pelantikan Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW-DMI) Provinsi Sulut Periode 2018-2023 dalam rangkaian kunjungan kerja Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI ke Manado, , Sulawesi Utara, 14 November 2019."

Halim, Erwin, Lucyana Claudia, dan Marylise Hebrard. "THE IMPACT OF CUSTOMER SATISFACTION, CUSTOMER EXPERIENCE, E-SERVICE QUALITY TO CUSTOMER TRUST IN PURCHASING DIGITAL PRODUCT AT THE MARKETPLACE." *Jurnal Aplikasi Manajemen* 21, no. 3 (September 2023): 567–77.

Halim, Yasser, Karim Salem, Hazem Tawfik, dan Ahmed Maree. "Service Quality as a Driver of Customer Satisfaction and Purchase Intentions: A Mixed-Methods Longitudinal Study of the Egyptian Post Office (2013–2023)." *Future Business Journal* 11, no. 1 (Oktober 2025): 246.

Handryant, Aisyah N. *Masjid sebagai pusat pengembangan masyarakat: integrasi konsep habluminallah, habluminannas, dan habluminal'alam*. UIN-Maliki Press, 2010.

Hanoum, Syarifa, Ramo Palalic, Theodosia Yunita Durman, dan Mahmood Shubbak. "Enhancing SME Performance through E-Business: The Interplay of Ambidexterity and Entrepreneurial Orientation in Technology Parks." *Journal of Innovation and Entrepreneurship* 14, no. 1 (Juni 2025): 72.

Hartono, Sri, Titi Rapini, dan Rizki Listyono Putro. "Evaluasi Pengelolaan Dan Problematika Laporan Keuangan Masjid Di Kabupaten Ponorogo Berdasarkan Psak 45." *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 5, no. 2 (November 2020).

Hasibuan, Burju Amar Ma'ruf, dan Muniruddin Muniruddin. "Mosque-Based Community Empowerment in Improving the Economy of the Muhammadiyah Taqwa Mosque Dolok Masihul, Serdang Bedagai Regency." *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 6, no. 1 (April 2025): 217–28.

Haugh, Helen M. "The governance of entrepreneurial community ventures: How do conflicting community interests influence opportunity exploitation?" *Journal of Business Venturing Insights* 16 (November 2021): e00265.

Haya, al-Dajani, dan Marlow Susan. "Empowerment and Entrepeneurship: a Theoretical Framecowrk." *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, Emerald Group Publishing Limited, vol. 19, No. 5*, 2013.

Haz, Abdul Hamzah, Bahri Ghazali, Hasan Mukmin, Rini Setawati, dan M. Mawardi J. "Mosque-Based Community Empowerment to Improve Welfare in Pringsewu Regency, Lampung Province." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 15, no. 12 (Desember 2025): Pages 2396-2415.

Heger, Pauline, Christoph Bieber, Mennatullah Hendawy, dan Aryan Shooshtari. "Co-Creating Urban Transformation: A Stakeholder Analysis for Germany's Heat Transition." *Buildings and Cities* 6, no. 1 (Desember 2025).

Hooi, Lai Wan. "SME Performance: Does Organizational Learning Capability Really Matter?" *International Journal of Organizational Analysis* 29, no. 5 (Februari 2021): 1093–116.

Hovik, Sissel, dan G. Anthony Giannoumis. "Linkages Between Citizen Participation, Digital Technology, and Urban Development." Dalam *Citizen Participation in the Information Society: Comparing Participatory Channels in Urban Development*, disunting oleh Sissel Hovik, G. Anthony Giannoumis, Kristin Reichborn-Kjennerud, José M. Ruano, Ian McShane, dan Sveinung Legard, 1–23. Cham: Springer International Publishing, 2022.

Ibrahim, Mohamad Akbar F., Sri Dewi Yusuf, dan Yusran Zainuddin. "Peran Masjid Sabilil Huda Boki Owutango dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah di Tamalate." *Islamic Economics and Finance Journal* 3, no. 1 (2024): 1–15.

Imari, Iqbal, dan Mahendra Utama Cahya Ramadhan. "Establishing Economic Empowerment System Through Mosque Based Community." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (Juni 2025): 1–17.

Iskandar, Ali. *Masjid Tematik : Panduan Memakmurkan Masjid Berkesan Bagi Umat*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2024.

Ismet, Firdaus, dan Zaki Ahmad. *Upaya Meningkatkan Equity Perempuan Dhuafa Desa Bojong Indah, Parung*. (Jakarta: Dakwah Press, 2008), 226., t.t.

Jabłoński, Adam, dan Marek Jabłoński. "Trust as a Key Factor in Shaping the Social Business Model of Water Supply Companies." *Sustainability* 11, no. 20 (Januari 2019): 5805.

Japar, Muhammad, Abdul Haris Semendawai, dan Muhammad Fahruddin. "Hukum Kesehatan Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 952–61.

Kankam, George. "Service quality and business performance: the mediating role of innovation." *Discover Analytics* 1 (Juli 2023).

Khakim, Abdul, dan Siti Yumnah. *Manajemen Masjid (Panduan dalam Membangun dan Memakmurkan Masjid)*. Basya Media Utama, 2024.

Kim, Dong W., Silvana Trimi, Soon G. Hong, dan Seongbae Lim. "Effects of co-creation on organizational performance of small and medium manufacturers." *Journal of Business Research* 109 (Maret 2020): 574–84.

Kunhibava, Sherin, Aishath Muneeza, Maryam Binti Khalid, Zakariya Mustapha, dan Thong Ming Sen. "Islamic Microfinance." *Springer Books*, 2024, 89–104.

Legard, Sveinung. "Controlled and Responsive Interactivity: What Politicians and Bureaucrats in Oslo Say About Their Social Media Use, and What This Might Mean for Democracy." Dalam *Citizen Participation in the Information Society: Comparing Participatory Channels in Urban Development*, disunting oleh Sissel Hovik, G. Anthony Giannoumis, Kristin Reichborn-Kjennerud, José M. Ruano, Ian McShane, dan Sveinung Legard, 117–39. Cham: Springer International Publishing, 2022.

Li, Shasha, Rensong Ye, Chenxi Dou, Jiayi Li, dan Jiayu Yang. "Constraints on Youth Participation in Evening Schools: Empirical Evidence from Shenyang, China." *Sustainability* 18, no. 1 (Januari 2026): 413.

Lim, Seng Boon, Jalaluddin Abdul Malek, Mohd Yusof Hussain, dan Zurinah Tahir. "PARTICIPATION IN E-GOVERNMENT SERVICES AND SMART CITY PROGRAMS: A CASE STUDY OF MALAYSIAN LOCAL AUTHORITY." *PLANNING MALAYSIA* 18 (Juli 2020).

López-Penabad, Mª Celia, José Manuel Maside-Sanfiz, Yousif Agha, dan Ana Iglesias-Casal. "Microfinance Institutions and Corporate Social Responsibility. A Scientometric Study." *Future Business Journal* 10, no. 1 (Agustus 2024): 90. https://doi.org/10.1186/s43093-024-00374-w.

LP Maarif NU Ponorogo. “Masjid NU Ponorogo Arsip.” Diakses 4 Mei 2025. https://maarif.nuponorogo.or.id/tag/masjid-nu-ponorogo/.

Lukito, Panji. “AKAD MUDHARABAH DALAM OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM.” *MARGIN: Journal of Islamic Banking* 5, no. 2 (September 2025): 379–93.

Lynn, Theo, Pierangelo Rosati, Edel Conway, Declan Curran, Grace Fox, dan Colm O’Gorman. “The Digital Citizen.” Dalam *Digital Towns: Accelerating and Measuring the Digital Transformation of Rural Societies and Economies*, disunting oleh Theo Lynn, Pierangelo Rosati, Edel Conway, Declan Curran, Grace Fox, dan Colm O’Gorman, 23–47. Cham: Springer International Publishing, 2022.

Maharani, Adinda, dan Abrista Devi. “Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Masjid Al-Muhajirin Bogor.” *Al-Urban* 5, no. 2 (2021): 98–111.

Mardi, Moh. “Peran Masjid Dalam Pengembangan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat.” *Journal of Economic and Islamic Research* 3, no. 1 (Desember 2024): 391–408.

Mardi yatmo, Hutomo. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoriris dan Implementasi*. Jakarta:Bappenas, 2000, 3, t.t.

Mariko, Suhatri, Asrinaldi Asrinaldi, dan Fadli Fadli. “Embedding Islamic Economic Principles in Indonesia’s Cooperative Law: Pathways to Social Justice and Economic Equity.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 6, no. 03 (Desember 2025): 155–61.

Markhamah, Cita Raras Nindya, Putri Marzalina, Ririn Susilowati, Yenny Puspitawati, dan Noer Hayati. *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*. Muhammadiyah University Press, t.t.

“Masjid Baitul Mukhlisin - Nologaten Ponorogo.” Diakses 2 November 2025. https://masjidbaitulmukhlisin.com/?utm_source=chatgpt.com.

“Masjid Baitul Mukhlisin Nologaten Ponorogo,.”

“mediaponorogo.com Informasi Berita Ponorogo.”

Mirpourian, Seyedmehrdad, Andrea Caragliu, Giorgio Di Maio, Paolo Landoni, dan Emanuele Rusinà. “Determinants of loan repayment performance among borrowers of microfinance institutions: Evidence from India.” *World Development Perspectives* 1 (Maret 2016): 49–52. https://doi.org/10.1016/j.wdp.2016.06.002.

M.Si, Ridwan, S. Pd. *TINGKAT PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENJALIN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA*. Cv. Azka Pustaka, 2021.

Mubarak, M. Asiddiki, Mustapa Khamal Rokan, dan Muhammad Ikhsan Harahap. “Analisis Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid melalui Pengelolaan Zakat pada Bidang Ekonomi (Studi Kasus Masjid Agung At-Taqwa Kabupaten Aceh Tenggara).” *Jurnal*

Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 8, no. 4 (2023). https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/20841.

Muchtar, Evan Hamzah. "Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid: Kolaborasi Lintas Lembaga Dalam Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah Bagi Generasi Muda Di Cipondoh." *ABDIMASTA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Asy-Syukriyyah Tangerang* 1, no. 1 (Juni 2025): 12–18.

Mulang, Hastuti, Ajmal As'ad, dan Rahmi Razak. "Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Pengrajin Eceng Gondok." *SEIKO: Journal of Management & Business* 6, no. 1 (2023): 403–13.

Mulauddin, Aforisma, Atep Hendang Waluya, dan Muhammad Reza Prima Matondang. "Mosque Transformation for Community Economic Empowerment: Integrating Islamic Social Finance, Digitalization, and Pentahelix Collaboration." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 12, no. 2 (Desember 2025): 186–207.

Munir, Muhammad. *Manajemen dakwah*. Prenada Media, 2021.

Muqhniy, Cut Mutia, Sarah Aulia, Andriyani Andriyani, Muhammad Labib, dan Wahdi Sayuti. "Peran Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat." *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 3, no. 1 (Januari 2026): 142–54.

Mutalib, Ahmad Abdul. "DEMOCRATIZATION OF COMMUNITY ECONOMIC EMPOWERMENT THROUGH A MOSQUE IN BONE REGENCY, SOUTH SULAWESI PROVINCE: The Community Economic Empowerment Through Mosques in Bone Regency, South Sulawesi Province." *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 1 (2023): 95–122.

Muyasaroh, Nurul. "Optimalisasi Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial: Sosialisasi Kepada Ibu-Ibu PKK Pekanbaru." *Al-Ihsan: Jurnal Pengabdian Agama Islam* 2, no. 1 (2025): 34–38.

Nambie, Nicholas Bamegne, Kwaku Sarbeng-Adjebeng Akrofi, dan Racheal Amoah. "Effect of Financial Regulations, Risk Management, on Performance of Microfinance Institutions in Sub-Saharan African Countries." *International Journal of Economic Perspectives* 18, no. 11 (November 2024): 2283–310.

Nasfi, Nasfi. "Role Of Social Capital In Influencing Village-Owned Enterprises Performance And Community Economic Empowerment In Indonesian Villages: Village-Owned Enterprises and Village Development Empowerment." *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi* 10, no. 1 (Februari 2026).

Nasution, Sumiah, Ismail, Cahya Ismail Dwi, dan Ulfa Pauziah. “Pelatihan Kewirausahaan Syariah bagi Remaja Masjid DKM AlIkhlas sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Islam.” *Juragan* Vol. 2, No. 2 (2025).

Nawawi, Zuhrinal M., Andri Soemitra, dan Mahfuzah. “Women Economic Empowerment Through Sharia Micro-Finance Institutions in Indonesia: A Qualitative Research.” *IQTISHADIA*, t.t., 2024.

Neessen, Petra C. M., Cosmina L. Voinea, dan Els Dobber. “Business Models of Social Enterprises: Insight into Key Components and Value Creation.” *Sustainability* 13, no. 22 (Januari 2021): 12750.

Notowidagdo, Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial: berwawasan iman dan takwa*. Amzah, 2022.

NU Online. “Masjid NU Ponorogo.”

NU Ponorogo. “Masjid NU Ponorogo Terbaik 2 Masjid Award Provinsi Jatim Kategori Pemberdayaan Ekonomi Masjid - NU PONOROGO NU Online Ponorogo- Mengurus masjid bukan sekedar secara fisik, tetapi juga melengkapi administrasi masjid. Padatnya jadwal kegiatan,.”

Nugawela, Saliya, dan Darshana Sedera. “Status Quo Bias in Users Information Systems (IS) Adoption and Continuance Intentions: A Literature Review and Framework.” arXiv:2212.03283. Preprint, arXiv, 4 Desember 2022.

Nugroho, Agus Eko. “A CRITICAL REVIEW OF THE LINK BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND MICROFINANCE IN INDONESIA.” *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)* 23, no. 2 (Februari 2015): 124–42.

Nungraha, Aat Ruchiat, Bucky Wibawa Karya Guna, Tri Suparyanto, Dewanto, Tomi Apra Santosa, dan Andri Kurniawan. “HR Management Training for Social Organization to Improve Volunteer Effectiveness and Job Satisfcation.” *Inovasi Sosial : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (Januari 2025): 1–9.

Nuraini, Arif. “PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI KOPERASI PONDOK PESANTREN (Studi Di Koperasi Pondok Pesantren Putri Pusat Zainul Hasan Genggong).” *At Tujjar* 12, no. 2 (2024): 1–26.

Nurjaman, Muhamad Izazi, Mia Lasmi Wardiyah, Camelia Sofwan Al-Rasyid, Nita Eldiani, dan Ahmad Tamami. “Mosque-Based Sharia Financial Innovation To Improve The Welfare Of Village Communities In Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 05 (November 2025).

Oswald Spring, Úrsula. “On Health and Water Security.” *Earth at Risk in the 21st Century: Rethinking Peace, Environment, Gender, and Human, Water, Health, Food, Energy Security, and Migration* 18 (Januari 2020): 365–92.

Pajuste, Tiina. “The Digital Divide: Reinforcing Vulnerabilities.” Dalam *Human Rights in the Digital Domain: Core Questions*, disunting oleh Tiina Pajuste, 361–80. Cambridge: Cambridge University Press, 2025.

“Pengertian Pemberdayaan Masyarakat menurut Undang-Undang - Paralegal.id.” 30 November 2022. https://paralegal.id/pengertian/pemberdayaan-masyarakat/.

Perwirawati, Elok, Bantors Sihombing, dan Prietsaweny Riris T. Simamora. “PERENCANAAN KOMUNIKASI PARIWISATA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HILISATARO NANDISA MENUJU DESA WISATA BERBASIS SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT.” *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2 (2022): 321–38.

Pisano, Raffaele, dan Paolo Bussotti. “Introduction to he Issue, Prevention in Human Issue.” *Advances in Historical Studies* 04, no. 02 (2015): 65–67.

Ponorogo, Redaksi Media. *Subuh Ceria: Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo Tawarkan Sarapan Dan Uang Saku | Berita Ponorogo*. 6 November 2024. https://mediaponorogo.com/2024/11/06/subuh-ceria-masjid-baitul-mukhlisin-ponorogo-tawarkan-sarapan-dan-uang-saku/.

Prayoga, Widi, Budi Supriatono Purnomo, dan Imas Purnamasari. “The Impact of Financial Literacy and Financial Behavior on Investment Decision among Private Sector Employees in Tasikmalaya City.” *JURNAL BISNIS STRATEGI* 34, no. 1 (Juli 2025): 63–78.

Purnamasari, Irma, Yudi Mandega Raswono, Mahamadaree Waeno, Azhari Azis Samudera, dan Agus Suradika. “COMMUNITY PARTICIPATION IN SMART VILLAGE IMPLEMENTATION.” *Jurnal Governansi* 11, no. 1 (April 2025): 83–90.

Rachmandhani, Muh Shulthon. “OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KECAMATAN PONOROGO.” *Muslim Heritage* 7, no. 2 (Desember 2022): 459–86. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i2.3887.

Rakhmat, Anwar Taufik. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Dewan Masjid Indonesia di Kabupaten Tasikmalaya.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 755–65.

Rarasati, Indin, dan Unggul Priyadi. "Empowering MSMEs: The Role of Mosques in Community Economic Development." *Shirkah: Journal of Economics and Business* 9, no. 3 (Agustus 2024): 397–410.

Redaksi Media Ponorogo. *Layaknya Jogokariyan, Sugiri: Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo Banget | Berita Ponorogo*. 13 Desember 2024.

Reficco, Ezequiel, Francisco Layrisse, dan Andres Barrios. "From donation-based NPO to social enterprise: A journey of transformation through business-model innovation." *Journal of Business Research* 125 (Maret 2021): 720–32.

Risky, Abu, Suyadi Suyadi, Siswanto Masruri, Wantini Wantini, dan Betty Mauli Rosa Bustam. "Islamic Educational Values in the Empowerment of MSMEs at Masjid Jogokariyan: Reviving the Mosque as a Center of Community Prosperity." *Unisia* 43, no. 1 (Juni 2025).

Rizka, Amalia, Haris Hidayatulloh Muhammad, dan Djalaluddin Ahmad. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Mengurangi Ketergantungan Terhadap Rentenir (Studi Masjid Jami' Al-Umari Kelayu Lombok Timur Ntb)." *INASJIF Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance*, 2024.

Rosyidah, Masayu, dan Rafiqa Fijra. *Metode penelitian*. Deepublish, 2021.

Rozi, Fathor. "Revitalizing the Role of the Mosque in Local Potential-Based Community Economic Empowerment." *GUYUB: Journal of Community Engagement* 6, no. 2 (Juni 2025): 495–508.

Rusliana, Nanang, Armida Salsiah Alisjahbana, Budiono Budiono, dan Raden Muhamad Purnagunawan. "Performance of Small and Medium Enterprises in Indonesia Impacted by Financial Accessibility." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan* 24, no. 2 (Desember 2023): 293–307.

Sabri, Sabri, Mohamad Aras, Adnan Adnan, M. Arpah, dan Riswandhi Ismail. "PENGUATAN EKONOMI DAN SOSIAL MELALUI PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA MITRA SASARAN." *PUAN INDONESIA* 7, no. 2 (Januari 2026): 625–36.

Sabrinasyah, Ajengesti Latifah, Dini Lestari Hasibuan, dan Rani Febrianti Siagianrani. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid: Studi pada Masjid Besar Al Amin Sei Kera Hulu, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara." *Dakwatussifa: Journal of Da'wah and Communication* 2, no. 1 (2023): 11–21.

Saerozi, Ulin Nihayah, Riza Umami, Ahmad Syafik Mursid, dan Dimas Fahmi Azizy. "Mosque Management for the Prosperity of the Congregation in Mosque Typology in Kendal

Regency, Community Empowerment Perspective." *Prosperity: Journal of Society and Empowerment*, 2025.

Safi'i, Muhammad Aris, Muhammad Shulthoni, Agus Arwani, Aenurofik Aenurofik, Ardiyan Darutama, M. Rikzam Kamal, dan Muhammad Hilmi Sholeh. "Strengthening the Role of Mosques for Community Economic Empowerment." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 13, no. 1 (Juni 2025): 36–43.

Sanrego, Yulizar D., dan M. Syafi'i Antonio. "THE EFFECT OF SOCIAL CAPITAL ON LOAN REPAYMENT BEHAVIOR OF THE POOR (A Study on Group Lending Model (GLM) Application In Islamic Microfinance Institution)." *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)* 28, no. 2 (Mei 2013): 188–210.

Saputra, Emon, dan Dian Agustina. "Peran institusi masjid dalam pembangunan ekonomi lokal: Studi kasus pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 2 (2021): 174–95.

Sarjiyanto, Sarjiyanto, Sarwoto Sarwoto, Paska Ellena Dio, Jaelani Abdul Kadir, dan R. B. Radin Firdaus. "The Role of Community Empowerment as Mediator on the Relationship Between Psychological, Social, and Financial Capital on Rural Community Well-Being." *Journal of Population and Social Studies [JPSS]* 34 (2026): 99–117.

Satria, Muhammad Affan, dan A. Syifa'ul Qulub. "Program Pemberdayaan Ekonomi Mualaf: Studi Kasus Program Kampung Inspiratif dan Mandiri Desa Klepu oleh Lmi." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 3 (2019): 555–67.

Schluchter, Jan-René, dan Anselm Böhmer. "Capitalism and Digital Inequality: Implications for Inclusive Education." *Seminar.Net* 21, no. 1 (Juni 2025).

Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Shafira, Jihan Ranna. "Masjid NU Ponorogo Sediakan 300 Porsi untuk Bukber Gratis Tiap Hari." Ponorogo News. Diakses 2 November 2025. https://ponorogo.pikiran-rakyat.com/ngulik-ponorogo/pr-3137893803/masjid-nu-ponorogo-sediakan-300-porsi-untuk-bukber-gratis-tiap-hari.

Shava, Elvin, dan Tigere Paidamoyo Muringa. "Digital empowerment of women in the South African public sector." *Frontiers In sociology*, 2025.

Shharma, Poojha Chaturvedi, Rohit Bansal, Aulia Luqman Aziz, dan Arfendo Propheto. "Exploring the Roles of Social Capital, Social Interaction and Financial Literacy in

Shaping Access to Finance for Indian SMEs." *Discover Sustainability*, 11 Februari 2026.

Siregar, Fitri Ana. "Integration Islamic Social Finance and SDGs: Perspective Maqasid Sharia Based on Scientific Mapping." *EKONOMIKA SYARIAH : Journal of Economic Studies* 9, no. 2 (Desember 2025): 218–30.

Siregar, Nuri Alam, Eja Armaz Hardi, dan Marissa Putriana. "PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI (STUDI KASUS PENGELOLAAN, FILANTROPI BADAN AMIL ZAKAT BMH KOTA JAMBI)." *EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (Juni 2023): 1–25.

Siti, Insani Akbar. "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Deskriptif di Koperasi Masjid Salman ITB Kota Bandung)." *UIN Sunan Gunung Djati*, 2020.

Suaib, M. Si. *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Penerbit Adab, 2023.

Suara Muhammadiyah. "Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo: Dari Ranting Untuk Ummat." 29 Oktober 2025. https://www.suaramuhammadiyah.id/read/masjid-baitul-mukhlisin-ponorogo-dari-ranting-untuk-ummat.

Suardi, Didi. "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34.

Suarni, Agusdiwana, Andi Zulfikar Busri, Sri Wahyuni, dan Dimas Adi Nugroho. "Community Empowerment Based on Muhammadiyah Mosque in Maros-Pangkep, South Sulawesi." *Jurnal Ar-Ribh* 8, no. 1 (Juni 2025).

Sulastiningsih, Sulastiningsih, Muhammadare Waeno, Suci Utami Wikaningtyas, Rio Dewangga, Muhammad Fadhil Adli Yanuar, dan Ekawati Nurjanah. "PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT BERBASIS KOPERASI SYARIAH MASJID." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Widya Wiwaha* 2, no. 3 (2024): 106–13.

Suman, Agus, Ronny Ersya Novianto Putra, Sri Karima Amalia, Heru Hardanto, Candra Aji Kusuma, dan Faishol Amir. *Ekonomi lokal: pemberdayaan dan kolaborasi*. Universitas Brawijaya Press, 2019.

Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman sosial*. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Sumodiningrat, Gunawan, dan Randy R. Wrihatnolo. *Membangun Indonesia emas: model pembangunan Indonesia baru menuju negara-bangsa yang unggul dalam persaingan global*. Elex Media Komputindo, 2005.

Supriyadi, Ahmad. “Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid (studi kritis pasal 53, 54, dan 55 PP. Nomor14 tahun 2014 tentang pelaksanakaan UU nomor 23 tahun 2011Tentang pengelolaan zakat).” *IAIN Tulungagung Research Collections* 3, no. 2 (2017): 210–29.

“Surat Al-Anbiya’ Ayat 107: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 14 Mei 2025. https://quran.nu.or.id/al-anbiya/107.

“Surat Al-Hasyr Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 14 Mei 2025. https://quran.nu.or.id/al-hasyr/7.

Suryanto, Asep, dan Asep Saepulloh. “Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya.” *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2016): 150_176-150_176.

Susanto, Aki Edi. *Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah*. t.t.

Syafar, Muhammad. “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Untuk Menangkal Radikalisme Islam Di Banten.” *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2018): 103–22.

Syahidin. *Pemberdayaan umat berbasis masjid*. Alfabeta, 2003.

Tambunan, Cirprandy Riopaldo. “Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia.” 27 Juni 2023.

Tempo. “Di Bawah Lindungan Masjid.” Diakses 11 Mei 2025. https://www.tempo.co/mingguan/edisi/6512.

Ulum, Mochamad Chazienul, dan Niken Lastiti Veri Anggaini. *Community empowerment: teori dan praktik pemberdayaan komunitas*. Universitas Brawijaya Press, 2020.

Umar, KH Nasaruddin. *Pemberdayaan umat berbasis masjid*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2022.

Umar, Prof K. H. Nasaruddin. *Pemberdayaan umat berbasis masjid*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2022.

Wang, Zonghui, Olga Veniaminovna Kalugina, Olga Vladimirovna Volichenko, Ivan Khalil, dan Haytham F. Isleem. “Sustainability in Construction Economics as a Barrier to Cloud Computing Adoption in Small-Scale Building Projects.” *Scientific Reports* 15, no. 1 (April 2025): 11329.

Wardiyah, Mia Lasmi, Camelia Sofwan Al-Rasyid, Nita Eldian, Muhamad Izazi Nurjaman, dan Ahmad Tamam. “Mosque-Based Sharia Financial Innovation To Improve The Welfare Of Village Communities In Indonesia.” *(JIEI) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. No. 05 2025.

Yasir Yusuf, Muhammad, Nazaruddin A. Wahid, Khairuddin, Israk Ahmadsyah, Jen Surya, dan Hafizh Maulana. *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.

Zada, Muhammad, dan Vasilii Erokhin. "Empowering Small to Medium-Sized Forest Enterprises: Unveiling the Impact of Financial Literacy and Entrepreneur Knowledge on Sustainable Development in Developing Countries." *Journal of the Knowledge Economy* 16, no. 3 (2025): 11293–313.

Zainur, Ali Muddin Jailani, dan Apriadi. "Pendidikan Literasi Ziswaf Berbasis Masjid Untuk Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Melalui Program Edukasi Keuangan Syariah." *Jurnal Dedikasi Pengabdian Pendidikan* 2, no. 1 (Januari 2026): 31–42.

Zhaohui Zeng, Amy, dan Jack C. Hayya. "The performance of two popular service measures on management effectiveness in inventory control." *International Journal of Production Economics* 58, no. 2 (Januari 1999): 147–58.

H. Suwardi, *Wawancara*, 18-April-2025

H. Khairil Anwar, *Wawancara*, 28-Oktober-2025

Dalhar Ashari, *Wawancara*, 28-Oktober-2025

Husain, *Wawancara*, 12-Desember-2025

Amam, *Wawancara*, 01-Desember-2025

H. Imron Husnussairi, *Wawancara*, 25-Oktober-2025

Erlik, *Wawancara*, 26-November-2025

Ilham, *Wawancara*, 26-November-2025